
SOSIOHUMANIORA

Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora
Journal of Social Sciences and Humanities
Volume 20, No. 3, Nopember 2018

Editor	: Asep Sumaryana
Editor Bagian	: Suwandi Sumartias Sulaeman Rahman Nidar Agus Nero Sofyan Munadjat Rd. Ahmad Buchari Yoga Bestari Anissa Lestari Kadiyono Nia Kurniati Asep Agus Handaka Suryana Ella Lesmanawaty Wargadinata Linda Sunarti
Manajer Jurnal	: Usep Sahrudin U. Santosa Kusumah
Sekretariat	: Trisatya Yono Yugiono Lala Adilla Nur Dodih Firmansyah

Alamat Penerbit / Redaksi:

Direktorat Sumberdaya Akademik dan Perpustakaan Universitas Padjadjaran
Graha Kandaga (Perpustakaan) Jatinangor Lt. 1
Jl. Raya Bandung - Sumedang KM. 21 Jatinangor
Telepon/Fax (022) 842 88806 ext. 3806 dan E-mail: sosiohumaniora@yahoo.co.id
website: <http://sosiohumaniora.unpad.ac.id/user>

(Terbit 3 Kali dalam Satu Tahun: Maret, Juli dan Nopember)

Terindeks di:



DAFTAR ISI

SOSIOHUMANIORA
Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora
Journal of Social Sciences and Humanities

Volume 20, No. 3, Nopember 2018

Peranan Musyawarah Mufakat (<i>Bubalah</i>) dalam Membentuk Iklim Akademik Positif di Prodi PPKN FKIP Unila (<i>Yesi Eka Pratiwi dan Sunarso</i>)	199 - 206
Pengaruh Citra Destinasi terhadap Intensi Wisatawan Berkunjung Kembali di Destinasi Sulawesi Selatan Tahun 2014 (<i>Ahmad Ab</i>)	207 - 214
Kajian Potensi dan Kendala dalam Proses Usahatani dan Pemasaran Mangga di Kabupaten Indramayu (<i>Elly Rasmikayati, Gema Wibawa, Rani Andriani, Sri Fatimah dan Bobby Rachmat Saefudin</i>)	215 - 221
Implikasi Pelaksanaan Program Dana Desa terhadap Kohesi Sosial di Desa Tamalate, Kabupaten Takalar (<i>Muhammad Faisal dan Umar Nain</i>)	222 - 230
Asas Hukum bagi Orang Terkenal untuk Mengajukan Gugatan <i>Cybersquater</i> Dikaitkan dengan Undang-Undang Merek di Indonesia (<i>Muhamad Amirulloh, Rika Ratna Permata, dan Helitha Novianty Muchtar</i>)	231 - 235
Tata Kelola Akselerasi Penyelenggaraan Pendidikan pada Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung (<i>Simon Sumanjoyo Hutagalung</i>)	236 - 244
Implementasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Pendekatan Hibrida di Kabupaten Supiori, Provinsi Papua (<i>Orthinus Ferdinando Samfar Kawer, M. Baiquni, Yeremias T. Keban, dan Agustinus Subarsono</i>)	245 - 253
Simbolisme Ayam Jago dalam Pembangunan Kultural Masyarakat Kabupaten Cianjur (<i>Ani Rachmat dan Agusmanon Yuniadi</i>)	254 - 259
Model Edukasi Berdasarkan Segmentasi Konsumen untuk Membangun Minat Masyarakat pada Perbankan Syariah (<i>Bambang Wahyu, Sylvia Rozza dan Sujarwo</i>)	260 - 268
Upaya Disaster Diplomacy Pemerintah Indonesia di Konflik Aceh Tahun 2005 (<i>Arfin Sudirman dan Naura Nabila Haryanto</i>)	269 - 276
Komunikasi Pemasaran Produk Komoditas Lokal Berbasis Komunitas melalui Penggunaan Media (Studi Kasus FruitsUp, UMKM di Jatinangor) (<i>Santi Susanti, Dwi Purnomo, Wahyu Gunawan dan Diana Sari</i>).....	277 - 281
Partisipasi Politik dalam Proses Pembangunan Desa di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara (<i>Marthen L. Kimbal</i>)	282 - 287

PENGANTAR REDAKSI

Dalam Volume 20 Nomor 3 Nopember 2018 ini, kedua belas tulisan mengupas sejumlah hal yang patut disimak pembacanya. Dimulai dengan tulisan Yesi yang mengupas tentang musyawarah mufakat yang berkembang di suatu institusi pendidikan. Dari tulisan ini, bisa saja banyak pengalaman sama dengan para pengelola pendidikan tinggi lainnya yang ada. Bisa jadi solusi yang dihasilkan patut dapat memperlambat isu yang mengarah pada kuburan masal perguruan tinggi.

Tulisan lainnya, mengemukakan persoalan pedesaan yang terdiri dari dua tulisan, pertama menyinggung usaha tani dan pemasaran mangga yang ketika musim panen murah dan paceklik mahal, keduanya, urusan dana desa. Usaha tani ditulis Elly *dkk* yang diharapkan dapat menelanjangi bagaimana usaha tani yang berkaitan dengan mangga di Indramayu agar mendapat hikmat bagi yang lainnya. Sedangkan dana desa yang ditulis Faisal menjadi penting agar pemerintah juga dapat memetik hikmah untuk dilakukan evaluasi bila ternyata dana tersebut tidak memperkokoh kohesi sosialnya.

Bisa saja ada hubungan dana desa dengan usaha tani agar kedua simbiosis. Atau bertalian dengan tulisan Santi tentang komunikasi pemasaran. Oleh sebab itu, ketiga tulisan ini dapat dikaji seksama agar diperoleh benang merahnya untuk dapat memberikan pencerahan agar pihak mayoritas yang bergerak di sektor pertanian dapat hidup lebih terhormat. Kemungkinan para petani lemah dalam melakukan komunikasi dalam memasarkan hasil pertaniannya. Bila hal demikian yang dialami, maka diperlukan bantuan pihak lain termasuk pemerintah untuk memberdayakan dalam aspek komunikasinya.

Kelemahan lainnya yang sering dapat dicermati adalah perbankan. Bambang menulis bahwa edukasi menjadi penting untuk dilakukan agar masyarakat familiar dengan perbankan, khususnya syariah. Dengan demikian, lebih berminat menggunakan jasa perbankan ini untuk melakukan aktivitas produktifnya. Dengan demikian, produktivitas dapat dipacu karena proses kegiatannya tidak lagi tergantung pada ketersediaan dana yang dipunyainya. Pelibatan banyak pihak untuk memacunya menjadi penting agar keberdayaan kelompok masyarakat produktif menjadi terwujud.

Tulisan lainnya adalah pembangunan rumah layak huni yang ditulis Orthinus. Kebijakan yang berkaitan dengan aspek rumah ini menjadi penting untuk konteks Papua. Pertama karena propinsi yang satu ini sering menjadi sorotan dalam aspek rumah dan yang kedua tulisannya menyangkut pendekatan hibrida. Mungkin saja tulisan ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak yang sedang memikirkan pembangunan perumahan bagi khalayak. Oleh karenanya tulisan ini menjadi lebih berguna bila dapat memberikan gambaran yang rinci tentang bagaimana konsep ini diimplementasikan di lapangan.

Dalam tulisan Citra Destinasi wisata yang ditulis Ahmad dengan waktu tahun 2014, sepatutnya menjadi pertimbangan untuk dilakukan sejumlah penyesuaian sehingga pada tahun mendatang dapat lebih memikat lagi. Untuk itu tulisan ini menjadi penting untuk dikritisi agar dapat memunculkan benang merah dalam hal kepariwisataan di Sulsel. Aspek tatakelola dapat juga menarik dalam urusan pariwisata disamping untuk mengakselerasikan penyelenggaraan pendidikan seperti ditulis Simon. Untuk itu kedua tulisan ini cukup menarik untuk dipartautkan secara konseptual, bukan empirikalnya.

Disela tulisan yang menarik, ada juga tulisan bernuansa hukum yang ditulis M. Amirullah. Dikatakan demikian karena tulisannya menyangkut orang terkenal untuk mengajukan *Cybersquater*. Demikian halnya tulisan Arfin dalam *Disaster Diplomacy* di Aceh patut dibaca untuk melihat posisi Indonesia dalam konflik tersebut. Disamping itu ada tulisan Ayam Jago di Cianjur yang ditulis Ani Rahmat. Simbolisme ayam itulah yang membuat tulisannya sarat makna untuk direnungkan. Tulisan terakhir berkenaan dengan partisipasi politik yang ditulis Marthen. Selamat membaca semoga semua tulisan dapat bermanfaat dan berujung munculnya kritik dan saran dari para pembaca sekalian.

Selamat membaca.

Hormat kami,

Dewan Redaktur

PERANAN MUSYAWARAH MUFAKAT (*BUBALAH*) DALAM MEMBENTUK IKLIM AKADEMIK POSITIF DI PRODI PPKN FKIP UNILA

Yesi Eka Pratiwi¹ dan Sunarso²

¹Mahasiswa Prodi PPKn, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta

²Dosen Prodi PPKn, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta

Email:yesiekapratiwi2@gmail.com

ABSTRAK, Penelitian ini bertujuan adalah untuk mendeskripsikan peranan budaya musyawarah mufakat (*Bubalah*) dalam membentuk iklim akademik positif pada civitas akademika di Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. (*Bubalah*) merupakan salah satu tradisi adat Lampung yang diadopsi oleh Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung sebagai budaya akademik. (*Bubalah*) atau musyawarah mufakat memiliki makna yang sama yakni berkumpul bersama untuk menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Dalam pelaksanaannya, budaya musyawarah mufakat (*Bubalah*) di agendakan tiga kali dalam satu semester, yaitu di awal, di tengah, dan di akhir semester. Budaya musyawarah mufakat (*Bubalah*) memiliki peranan sebagai jembatan untuk mempersatukan civitas akademika di program studi PPKn FKIP Universitas Lampung menjadi satu kesatuan yang utuh dalam membentuk iklim akademik yang positif, melalui hubungan kekeluargaan yang harmonis diantara civitas akademika. Selain itu budaya musyawarah mufakat (*Bubalah*) juga berfungsi sebagai wadah dalam menampung aspirasi seluruh civitas akademika agar dapat tersalurkan dengan baik. Pengembangan budaya musyawarah mufakat (*Bubalah*) merupakan sebuah langkah yang diambil Ketua Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung untuk mempertahankan kebudayaan lokal agar tetap terjaga kelestariannya. Proses pengambilan keputusan dalam musyawarah mufakat (*Bubalah*) merupakan konsensus bangsa Indonesia dan dinilai sebagai cara yang lebih efisien dalam mencapai keputusan bersama (*win-win solution*). Pada praktik nyata di lapangan menunjukkan bahwa mahasiswa mulai enggan untuk melestarikan budaya musyawarah mufakat (*Bubalah*) karena dalam pelaksanaannya memakan waktu yang relatif lama, sehingga mahasiswa lebih memilih sistem *voting* yang lebih praktis di bandingkan musyawarah mufakat (*Bubalah*).

Kata kunci: bubalah; budaya musyawarah mufakat; iklim akademik

THE ROLE OF DISCUSSION CONSENSUS (*BUBALAH*) IN SHAPING POSITIVE ACADEMIC CLIMATE PPKN COURSE FKIP UNILA

ABSTRACT, The study aims to describe the role of deliberation cultural in shaping positive academic climate in the academic community in Civic Education Program University of Lampung. And uses a qualitative approach with a type of case study. (*Bubalah*) is one of the Lampung traditions adopted by the Civic Education Program University of Lampung as academic culture. (*Bubalah*) has the same meaning that is gathered together to solve the problem through deliberation. In its implementation, the culture of consensus deliberation (*Bubalah*) is done three times in one semester, at the beginning, in the middle, and at the end of semester. *Bubalah* has a role as a bridge for unifier in the Civic Education Program of the University of Lampung in shaping a positive academic climate, harmonious kinship between the academic community. Besides *Bubalah* culture has a function as a container in accommodating the aspirations of the entire academic community well. The development of a consensus deliberation culture (*Bubalah*) is a step taken by the Head of Citizenship Education Program University of Lampung to maintain local culture in order to maintain its sustainability. The decision-making process through deliberation is the agreement of the Indonesian people and is considered a more efficient way to reach joint decisions. In real practice on the ground shows that students are starting to not conserve consensus culture (*Bubalah*) because the implementation takes a relatively long time, so that students prefer to do a more practical voting than consensus deliberation (*Bubalah*).

Key words: bubalah; cultural consensus discussion; the academic climate

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki beranekaragam budaya, suku, ras, dan bahasa daerah. Sebagai negara kepulauan dengan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merouke dan berjajar pulau-pulau yang terbentang luas, setidaknya terdapat 17.504 pulau yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, yang terdiri atas 8. 651 pulau yang bernama dan 8.853 pulau yang belum bernama. Di samping berlimpah ruahnya kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, juga terdapat beragam budaya yang tumbuh dan berkembang di dalamnya, budaya itu sendiri yang nantinya akan mewarnai bangsa ini. Hampir di

setiap daerah memiliki budaya tersendiri yang mewakili daerahnya untuk menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Budaya merupakan salah satu identitas dari suatu bangsa yang tercermin melalui pelestarian budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pelestarian budaya itu sendiri merupakan salah satu kegiatan untuk menjaga dan mempertahankan agar keasrian budaya tersebut tidak hilang, kegiatan pelestarian dapat digunakan juga sebagai wahana edukatif dalam mempertahankan *local wisdom* setempat.

Budaya yang hakikatnya merupakan suatu sarana pendidikan dalam membentuk pola pikir, sikap dan kepribadian putra-putri bangsa sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kausar (2013: 27) mengartikan

bahwa budaya merupakan salah satu konsep dalam antropologi yang dapat pula diterapkan dalam sebuah organisasi. Budaya juga memiliki beberapa nilai-nilai yang perlu diperhatikan keberadaannya, Hindaryatiningsih (2016: 108-109) menjelaskan bahwa nilai budaya sangat penting karena dapat digunakan sebagai sebagai sepe-rangkat keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam kehidupannya di masyarakat.

Untuk memahami budaya, bukan hanya sekedar mengerti, akan tetapi harus benar-benar paham arti dan makna dari budaya itu sendiri. Salah satu karakter penting dari budaya adalah budaya itu perlu dipelajari dari lahir hingga akhir hidup. Budaya musyawarah mufakat merupakan kegiatan berembuk dan berunding untuk memecahkan masalah yang menghasilkan kesepakatan bersama (*win-win solution*). Musyawarah mufakat bertujuan untuk mempererat tali kekeluargaan seperti halnya yang tertera pada Sila ke empat Pancasila “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan”. Musyawarah mufakat merupakan proses membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah mufakat dilakukan sebagai cara untuk menghindari pemungutan suara yang menghasilkan kelompok minoritas dan mayoritas.

Pada kenyataannya musyawarah mufakat justru digantikan dengan sistem *voting*, yang hakikatnya berlawanan arah dengan musyawarah mufakat. *Voting* dilakukan dengan pemungutan suara di mana suara terbanyak akan menjadi penentunya, sedangkan hakikat musyawarah mufakat merupakan kegiatan berunding dan berembuk untuk mencari jalan keluar bersama tanpa merugikan salah satu pihak dan keputusan tersebut berasal dari kesepakatan bersama. Akan tetapi tidak banyak mahasiswa yang berminat melestarikan musyawarah mufakat dengan dalih kesibukan yang makin padat, sehingga enggan untuk meluangkan waktunya dan memilih cara yang lebih praktis yakni *voting*. Dalam kehidupan sehari-hari musyawarah mufakat dibudayakan untuk menciptakan kerukunan, keharmonisan, toleransi, dan kekeluargaan. Namun pandangan lain tentang musyawarah mufakat juga tidak dapat ditepis bahwa tidak semua mahasiswa memiliki waktu luang dan kesibukan yang sama, untuk ikut dalam kegiatan musyawarah mufakat.

Musyawarah mufakat dalam bingkai tradisi adat Lampung dikenal dengan sebutan (*Bubalah*) yang artinya musyawarah. Bentuk lain budaya musyawarah mufakat yang mulai hilang termakan oleh kebutuhan birokrasi saat ini yakni dari musyawarah menjadi *voting*. Musyawarah mufakat dalam budaya Lampung disebut dengan (*Bubalah*). Tradisi (*Bubalah*) sendiri terus dilestarikan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakatnya. Seperti yang akan dipaparkan dalam penelitian ini yakni peranan budaya musyawarah mufakat (*Bubalah*) dalam membentuk iklim akademik positif di Program Studi

PPkn FKIP Universitas Lampung. Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung mengadopsi tradisi (*Bubalah*) menjadi budaya akademik di Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung. Pengadopsian (*Bubalah*) tersebut dilakukan untuk melestarikan salah satu tradisi adat Lampung yang saat ini mulai tergerus oleh arus globalisasi, ditambah dengan jumlah transmigrasi dari berbagai daerah yang mengakibatkan melunturnya tradisi adat Lampung. Tujuan Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung mengadopsi tradisi (*Bubalah*) adalah membiasakan kepada mahasiswa untuk membudayakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, sebagai sarana pengimplementasian salah satu nilai Pancasila, sebagai wadah untuk mengasah sikap demokratis mahasiswa, dan untuk menciptakan iklim yang positif dan damai. Bentuk lain (*Bubalah*) yang diterapkan oleh Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung ialah MUBES (Musyawarah Besar) yang diprakarsai oleh FORDIKA (Forum Pendidikan Kewarganegaraan).

Salah satu usaha yang dilakukan oleh Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung untuk menciptakan iklim akademik yang positif, kondusif, dan harmonis ialah dengan menerapkan budaya musyawarah mufakat (*Bubalah*). Fattah Bahiki & Rahmatan (1993: 2) menyatakan bahwa *Bubalah* artinya musyawarah. Budaya musyawarah mufakat (*Bubalah*) yang diselenggarakan oleh Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung, memiliki peranan terhadap pembentukan iklim akademik yang positif. Budaya musyawarah mufakat (*Bubalah*) memberikan rangsangan terhadap lingkungan di sekitarnya untuk terbiasa melakukan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Seperti halnya pemaparan dari Dewitt & Slade (2014: 14) menjelaskan bahwa iklim akademik yang positif merupakan lingkungan di mana semua orang terlibat dan dihormati di mana mahasiswa, Ketua Program Studi, dan dosen bekerja bersama untuk mengembangkan hidup, dan berkontribusi bersama dalam membangun Program Studi. Iklim akademik yang positif akan mendorong semangat belajar, kohesi kelompok, rasa hormat, dan saling percaya yang telah terbukti bisa secara langsung meningkatkan kualitas lingkungan pembelajaran. Iklim akademik positif menunjukkan hubungan langsung dengan prestasi akademik, yang saat ini menjadi faktor pendorong keberhasilan belajar mahasiswa. Empat elemen penting pembentuk iklim akademik positif di antaranya; keterlibatan siswa, pemberdayaan, budaya akademik, otonomi, inklusivitas, ekuitas, dan lingkungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus. Dipilihnya jenis penelitian studi kasus dalam penelitian ini karena musyawarah mufakat yang dalam adat istiadat Lampung disebut *bubalah* hanya ada dan diterapkan di Universitas Negeri Lampung. Oleh

kerena itu dengan melihat karakter dari penelitian studi kasus maka jenis penelitian studi kasus sangat cocok diterapkan untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposif yang terdiri dari: Ketua Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung, Dosen Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung, dan Mahasiswa Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen. Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif model Miles dan Huberman dengan langkah-langkah: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Budaya Musyawarah Mufakat (*Bubalah*) di Program Studi PPkn FKIP Unila

Bentuk lain dari usaha yang lakukan oleh Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung untuk menciptakan iklim akademik yang positif, ialah dengan menerapkan budaya musyawarah mufakat (*Bubalah*). Fattah Bahiki & Rahmatan (1993: 2) *Bubalah* itu artinya musyawarah. *Bubalah* biasa juga disebut *Bukhasan Buhimpun* atau biasanya lebih dikenal dengan *Rasan Buhimpun*. *Rasan Buhimpun* ini sebagai perhimpunannya masyarakat Lampung dalam lingkup adat Lampung. *Rasan Buhimpun* secara umum adalah berkumpul bersama, berbicara dalam tata cara perijinan yang disusun berdasarkan maksud untuk menyimpulkan pendapat perbincangan atau ingin bermusyawarah.

Sedangkan Budaya musyawarah mufakat (*Bubalah*) yang diterapkan Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung merupakan salah satu jalan yang ditempuh untuk membiasakan mahasiswa bertindak adil dan bijaksana dalam setiap pengambilan keputusan. Tujuan Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung mengadopsi tradisi (*Bubalah*) adalah membiasakan kepada mahasiswa untuk membudayakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, sebagai sarana pengimplementasian salah satu nilai Pancasila, sebagai wadah untuk mengasah sikap demokratis mahasiswa, dan untuk menciptakan iklim yang kondusif dan damai.

Pelaksanaan budaya musyawarah mufakat (*Bubalah*) yang diselenggarakan di Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung sedikit berbeda dengan pelaksanaan tradisi (*Bubalah*) yang dilaksanakan di masyarakat, pada umumnya tradisi (*Bubalah*) yang dilaksanakan di masyarakat akan dilaksanakan pada malam hari, sedangkan di Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung dilaksanakan pada pagi hari dan di hari libur seperti hari sabtu atau minggu. Menurut Fattah Bahiki & Rahmatan (1993: 5) dalam pelaksanaan perhimpunan (*Bubalah*)

terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan seperti halnya waktu. Perhimpunan ini sebaiknya di waktu malam, karena tidak bisa selesai cepat. Oleh karena itu, tujuannya dilakukan dimalam hari agar tidak mengganggu pekerjaan lain.

Kelemahan dari sistem musyawarah mufakat yakni dalam proses pengambilan keputusan akan memakan waktu yang cukup panjang, alot dan bahkan akan menimbulkan perseteruan antara pihak minoritas dan mayoritas. Apa bila pihak minoritas tetap bersikukuh untuk tidak setuju akan mengakibatkan keputusan tidak menemui kata mufakat. Sehingga pihak minoritas dapat memaksakan untuk tidak tercapainya keputusan. Kekuasaan minoritas ini dapat menimbulkan “diktatorial minoritas” yang artinya kekuasaan dari kelompok kecil yang menentukan segala sesuatunya. Sebaliknya kelebihan dari musyawarah untuk mufakat adalah semua pihak akan merasa dilibatkan, diikutsertakan, dihargai, dan dihormati aspirasinya, sehingga hasil yang akan dicapai dapat dinikmati oleh seluruh anggota berkepentingan *win-win solution* (Idris, 2013: 12).

Berkaitan dengan kepentingan bersama, musyawarah mufakat merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia, dan juga merupakan salah satu nilai dasar yang tertera pada Sila ke empat Pancasila, yang diseluruh daerah tentunya memiliki budaya musyawarah mufakat dengan nama dan pelaksanaan yang berbeda-beda. Budaya musyawarah mufakat tentunya harus terus dijaga keutuhannya, dilestarikan pelaksanaannya, dan dilaksanakan kegiatannya baik itu di lingkungan sosial, keluarga, maupun lingkungan pendidikan. Yang membedakan tradisi (*Bubalah*) dengan budaya musyawarah mufakat lainnya adalah makna tradisi (*Bubalah*) itu sendiri yang berarti berkumpul bersama/ duduk bersama untuk menyambung tali kekeluargaan, pelaksanaannya yang mana tradisi (*Bubalah*) dilaksanakan pada malam hari, dan penentuan keputusan dari (*Bubalah*) yang murni berdasarkan hasil kesepakatan bersama.

Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung mengadopsi tradisi (*Bubalah*) menjadi budaya akademik di Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung. Pengadopsian (*Bubalah*) tersebut dilakukan untuk melestarikan salah satu tradisi adat Lampung yang saat ini mulai tergerus oleh arus globalisasi, ditambah dengan jumlah transmigrasi dari berbagai daerah yang mengakibatkan meluntumnya tradisi adat Lampung. Tujuan Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung mengadopsi tradisi (*Bubalah*) adalah membiasakan kepada mahasiswa untuk membudayakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, sebagai sarana pengimplementasian salah satu nilai Pancasila, sebagai wadah untuk mengasah sikap demokratis mahasiswa, dan untuk menciptakan iklim yang kondusif dan damai. Bentuk lain (*Bubalah*) yang diterapkan oleh Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung ialah MUBES (Musyawarah Besar) yang dinaungi oleh FORDIKA (Forum Pendidikan Kewarganegaraan).

Kesadaran civitas akademika terkait partisipasi dalam mengikuti kegiatan (*Bubalah*) dapat dikatakan cukup baik, hal tersebut dikarenakan pembudayaan yang diterapkan dari awal sampai saat ini terus berjalan dengan baik. Meskipun demikian, kegiatan (*Bubalah*) sering kali menemui hambatan seperti halnya faktor kesibukan karena waktu pelaksanaan yang di agendakan pada hari Sabtu dan Minggu, tidak jarang dijumpai peserta yang hadir pada kegiatan (*Bubalah*) cenderung minim dan hanya itu-itu saja, dan terkadang ditahap acara inti justru banyak peserta yang pulang dan tidak kembali untuk mengikuti kegiatan selanjutnya, hal-hal semacam ini yang terkadang memicu terjangkitnya kevakuman pada kegiatan *Bubalah* itu sendiri.

Beberapa bentuk budaya musyawarah mufakat yang dilaksanakan di Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung ialah, kegiatan musyawarah mufakat KKL yang dilakukan dengan cara memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk menentukan tempat, setelah itu dosen Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung mengelompokkan mahasiswa yang memiliki keinginan yang sama dalam satu kelompok, lalu dosen memberikan arahan kepada mahasiswa untuk membuat proposal sesuai dengan tujuan dari kelompok masing-masing, selanjutnya dosen memaparkan beberapa kompetensi yang harus dicapai dalam pembuatan proposal KKL tersebut diantaranya: tingkat kemenarikan dari tema yang akan diangkat, konten/isi proposal, permasalahan yang akan diangkat, tulisan/tata bahasa, dan kandungan nilai-nilai ke PPKn-annya, setelah itu beberapa dosen akan memberikan penilaian terhadap proposal pengajuan lokasi KKL sekaligus menetapkan proposal mana yang layak untuk dijadikan lokasi KKL tersebut.

Musyawarah mufakat merupakan nilai yang dihasilkan dari akar budaya bangsa Indonesia. Musyawarah mufakat secara tegas dinyatakan dalam Sila keempat dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sila keempat Pancasila menegaskan bahwa prinsip kerakyatan Indonesia harus dijalankan dengan cara permusyawaratan yang bijaksana. Desi & Cahyo (2014: 2) berpendapat bahwa kebebasan dalam berpendapat merupakan salah satu aspek dalam musyawarah untuk mufakat, musyawarah mufakat dilakukan dengan cara pengambilan keputusan melalui kesepakatan bersama dalam artian suara mayoritas memiliki wewenang atas Hak bersuara dan penghargaan atas Hak individu sudah dapat dipenuhi dalam proses pengambilan keputusan. Karenanya pemilihan dengan suara terbanyak dapat dikatakan sebagai proses yang demokratis, tanpa melanggar kesepakatan adat dan juga aturan-aturan dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila dan UUD 1945 merupakan pedoman sekaligus landasan dasar pelaksanaan budaya musyawarah mufakat (*Bubalah*) yang diterapkan Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung. Sebagai salah satu Program Studi yang mengkaji nilai moral Pancasila, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh civitas akademika Program Studi

PPKn FKIP Universitas Lampung, mengamalkannya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta diterapkan dalam kehidupan nyata. Melaksanakan budaya musyawarah mufakat (*Bubalah*) berarti sama halnya dengan menjalankan amanat dari Pancasila. Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung mencoba membangkitkan kembali semangat kebangsaan generasi muda bangsa Indonesia, melalui pelestarian warisan budaya bangsa musyawarah mufakat (*Bubalah*).

Berkaitan dengan pelaksanaan budaya musyawarah mufakat (*Bubalah*) yang diterapkan oleh Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung, Islamey (2011: 4), memaparkan bahwa ciri-ciri musyawarah dan mufakat sebagai berikut:

1. Masalah yang dibicarakan merupakan kepentingan bersama.
2. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur.
3. Proses musyawarah selalu mempertimbangkan moral.
4. Usul atau pendapat mudah dipahami dan masuk akal.
5. Hasil keputusan tidak memberatkan warga atau rakyat.
6. Musyawarah untuk mufakat mengedepankan kekeluargaan, kebersamaan, kesabaran, jujur, saling memberi atau menerima masukan.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, budaya musyawarah mufakat (*Bubalah*) yang diterapkan oleh Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung, juga senantiasa menjunjung kesepakatan bersama dan mengedepankan asas kekeluargaan. Menanggapi hal itu, Ketua Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung menjelaskan tentang langkah yang akan ditempuhnya, ketika musyawarah tidak sampai pada titik mufakat ialah dengan melakukan pendekatan yang lebih *intens* lagi untuk duduk bersama dan mencari penyelesaian bersama. Karena saya yakin sekeras-kerasnya batu karang di lautan akan retak bila ditetesi air terus menerus begitupun dengan manusia. Dan memilih jalan *voting* itu bukan demokrasi, *voting* itu hanyalah jalan pintas untuk mengakhiri suatu permasalahan yang tidak ada titik temu. Dan menurut saya *voting* itu tidak sesuai dengan paradigma demokrasi.

Melaksanakan budaya musyawarah mufakat (*Bubalah*) merupakan sebuah keteladanan yang memiliki beragam manfaat, salah satu manfaat yang diperoleh mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung, dengan menerapkan budaya musyawarah mufakat diantaranya: sebagai sarana melatih kesabaran, wadah untuk membentuk sikap demokratis, memperdalam wawasan, menambah teman, dan mengisi waktu luang. Seperti halnya pemaparan dari Widiastuti dan Rahyuningsih (2008: 60), mendeskripsikan beberapa manfaat musyawarah antara lain:

1. Musyawarah bisa menyelesaikan masalah lebih mudah.
2. Musyawarah dapat memperkokoh kerukunan.
3. Musyawarah dapat mempererat kerja sama.

4. Musyawarah mengajari kita menghormati orang lain.

Ciri khas dari Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung yang sangat menonjol terletak pada iklim dan budaya akademiknya, di mana terdapat nuansa kekeluargaan yang sangat erat di antara civitas akademika tanpa menghilangkan etika dan sopan santun di dalamnya, ketika di luar kelas mereka berbaur layaknya seorang teman yang terlihat begitu akrab dan terbuka namun, berbeda ketika mereka di tempatkan dalam situasi perkuliahan di mana status dosen dan mahasiswa terlihat sangat jelas. Selain nuansa kekeluargaan Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung sangat menjunjung tinggi asas demokrasi dengan mengangkat musyawarah mufakat (*Bubalah*) sebagai budaya akademik yang senantiasa di lestarikan guna mempertahankan tradisi adat Lampung yang sekaligus merupakan pengimplementasian dari Sila ke empat Pancasila.

Sesuai dengan pernyataan di atas Menurut Elly M. Setiadi (2005: 155), Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmahkebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan secara eksplisit menyebut istilah kerakyatan, dan bukan demokrasi. Yang dimaksud "hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan" adalah musyawarah untuk mufakat. Kerakyatan tidak berarti sama dengan demokrasi liberal yang berprinsip pada musyawarah untuk mufakat tanpa diperkenankan melakukan pemungutan suara, sehingga dapat menimbulkan hak *veto* atau diktator minoritas. Musyawarah untuk mufakat adalah ciri khusus Indonesia. Nilai dalam pengembangan Pancasila khususnya Sila keempat yaitu:

1. Mengakui bahwa manusia Indonesia memiliki kedudukan dan hak yang sama.
2. Melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab dan iktikat baik.
3. Mengambil keputusan yang harus sesuai dengan nilai kebenaran dan keadilan.

Iklim Akademik Di Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung

Iklim akademik merupakan aspek penunjang dalam pembentukan sikap demokratis mahasiswa Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung. Diketahui bahwa iklim akademik yang diterapkan oleh Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung, senantiasa mengedepankan asas kekeluargaan dalam membangun kehidupan akademik yang harmonis. Tingkat keharmonisan yang ditunjukkan oleh Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung terlihat pada jalinan hubungan yang dibangun oleh setiap civitas akademika yang ada di dalamnya melalui beragam kegiatan yang positif. Beragam kegiatan dilaksanakan untuk memupuk tali Silaturahmi diantara civitas akademika Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung, seperti halnya kegiatan Mubes (Musyawarah Besar), merupakan salah satu kegiatan yang diangkat

untuk membangun integritas Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung.

Sesuai dengan pernyataan tersebut Kurniawan (2013: 16) memaparkan bahwa, iklim akademik yang ideal dapat digambarkan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan di lingkungan kampus yang ditandai oleh munculnya interaksi yang harmonis, dan hubungan timbal balik yang baik antara dosen dan mahasiswa. Misalnya: diskusi, penelitian, penulisan karya ilmiah, debat, mimbar bebas, kajian, dan diberbagai forum kegiatan lainnya. Iklim akademik yang dibentuk oleh Ketua Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung terkesan positif, kesan positif yang ditimbulkan seperti budaya musyawarah mufakat (*Bubalah*) yang kian kental, asas kekeluargaan yang terus dijaga, peningkatan kualitas pendidikan, dan layanan akademik.

Menanggapi pemaparan tersebut Jain, *et al* (2011: 296) mengatakan bahwa dalam membentuk kualitas pelayanan pada perguruan tinggi dibutuhkan performans intelektual yang terdiri dari dua dimensi pokok diantaranya: kualitas program dan kualitas hidup. Kualitas program meliputi: kurikulum, interaksi, kualitas masukan, dan fasilitas akademik. Sedangkan kualitas hidup meliputi: proses non akademik, fasilitas pendukung, kualitas kampus dan interaksi. Pada dasarnya dalam menciptakan kualitas pembelajaran dan interaksi yang baik, di dalam lingkungan kampus dibutuhkan lembaga pendidikan yang layak dan relevan guna mencetak mahasiswa yang berkualitas.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung, untuk menghasilkan mahasiswa yang berkualitas adalah dengan memberikan pendidikan yang terjamin, pelayanan yang berkualitas, dan fasilitas yang memadai. Sebagaimana semestinya tugas perguruan tinggi yang dituntut untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, begitu juga dengan Program Studi PPkn Universitas Lampung, yang terus berupaya untuk memberikan pendidikan secara maksimal guna menghasilkan lulusan yang profesional. Menanggapi penjelasan di atas Suwanto (2009: 79) menegaskan bahwa profesionalitas dosen terbentuk dan dipengaruhi oleh efektifitas kepemimpinan Ketua Program Studi dan iklim akademik yang positif. Iklim akademik memberikan kontribusi yang positif, di mana peran dari kondisi lingkungan akademik memberikan dorongan terhadap kemampuan profesionalitas dosen dalam mengajar. Karena pada dasarnya terciptanya lingkungan yang aman, damai, tentram, menyenangkan, dan kondusif memberikan motivasi dan semangat tersendiri untuk menebarkan ilmu pengetahuan.

Kondisi lingkungan merupakan salah satu unsur pokok dalam mendukung berjalannya proses perkuliahan, kelancaran proses perkuliahan juga di tentukan lewat kondisi lingkungan yang memadai. Universitas Lampung terkenal dengan sebutan *green campus* karena lingkungannya yang sejuk, rindang, jauh dari

keramaian, wilayah yang luas, dan bersih. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kondisi lingkungan di Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung pada tahun 2017-2018 sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, berbagai perubahan sedikit demi sedikit mulai dirasakan. Seperti halnya perubahan kondisi bangunan program studi PPkn yang awalnya terdiri satu lantai, kini sudah di renovasi menjadi dua lantai, fasilitas ruang tunggu yang semakin nyaman dengan adanya fasilitas kursi yang cukup banyak dan nyaman, kondisi lingkungan yang semakin bersih dan tertata dibandingkan sebelumnya, dan tingkat keamanan yang semakin terjaga dengan diberlakukan kartu parkir untuk meminimalisir pencurian motor, hubungan antar civitas akademika semakin solid dengan tetap menjaga iklim akademik yang harmonis, dan proses perkuliahan yang semakin kondusif dengan memberlakukannya inovasi pembelajaran. Sesuai dengan pemaparan di atas Fisher & Fraser (1990: 187) juga menyatakan bahwa peningkatan mutu lingkungan kerja di kampus dapat menjadikan kampus lebih efektif dalam memberikan proses pembelajaran yang lebih baik.

Beranjak dari pemaparan tersebut D. Maramba & S. Museus (2013: 495) menggambarkan tentang iklim kampus secara khusus, melalui dua faktor yang mempengaruhi iklim kampus tersebut yaitu lingkungan akademik itu sendiri dan perilaku siswa. Sebagai langkah awal yang harus dilakukan Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung dalam membentuk iklim akademik yang positif adalah dengan membentuk kondisi lingkungan yang nyaman, tenang, dan menyenangkan. Faktor pendukung terciptanya suasana yang nyaman bagi mahasiswa untuk belajar adalah kondisi ruangan yang didukung dengan lingkungan yang kondusif. Kondisi ruangan yang nyaman akan menumbuhkan motivasi dan semangat belajar mahasiswa semakin tinggi, meskipun pada dasarnya tingkat kenyamanan seseorang itu berbeda-beda.

Perbedaan merupakan bentuk dari kesempurnaan, dengan sikap dan karakter mahasiswa Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung yang beranekaragam, perbedaan tidak lantas membuat jarak di antara mereka semakin menjauh, perbedaan justru dimaknai sebagai pelengkap dari celah-celah kekurangan yang ada. Perbedaan adalah situasi yang wajar di mana mahasiswa Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung terdiri dari beragam daerah, suku, dan agama, dengan pola pikir yang berbeda-beda. Salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung, untuk menjembatani perbedaan tersebut ialah dengan menyatukan mereka dalam bingkai kekeluargaan. Sejalan dengan penjelasan tersebut A. Rockenbach & M. Mayhew (2013: 4) menjelaskan bahwa, iklim akademik di perguruan tinggi memiliki peranan agama atau kepercayaan yang sangat digencarkan, karena suatu agama di pandang mampu melahirkan nilai-nilai yang membangun karakter siswa, dan mengajarkan arti toleransi

dalam keberagaman dan menghargai perbedaan. Melalui iklim akademik di Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung, Ketua Program Studi berharap mahasiswa mampu untuk bersosialisasi dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan, budaya, suasana, dan warga yang ada di dalamnya. Meskipun benar, fenomena *bergeng* juga tidak luput dari kebiasaan mahasiswa Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung, fenomena tersebut lahir dari kondisi sosial dan ekonomi yang mendasari mahasiswa Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung untuk menemukan teman yang sesuai dengan apa yang ia inginkan.

Berdasarkan pemaparan tersebut Park. J.J, *et al* (2013: 466–496) menegaskan bahwa keberagaman dalam lingkungan akademik tidak selalu menyoal etnik dan ras, akan tetapi keberagaman sosial, ekonomi memberikan warna tersendiri terhadap pembentukan iklim kampus. Selain perbedaan, iklim kampus terbentuk melalui hubungan civitas akademik yang ada di sebuah perguruan Tinggi. Hubungan akademik memiliki peranan yang besar dalam menunjang terbentuknya iklim akademik di sebuah Perguruan Tinggi. Hubungan civitas akademika di Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung terbilang sangat harmonis, karena keharmonisan itulah yang ditanamkan ketua program studi kepada kami semua. Dan untuk menjaganya, dibutuhkan tali kekeluargaan yang erat, saling menghormati, dan menghargai, serta membudayakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan itu yang saya rasakan dari hubungan yang selama ini terjalin di Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung.

Salah satu metode yang digunakan oleh ketua Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung dalam rangka menciptakan suasana yang harmonis dan hubungan yang baik yaitu dengan cara meluangkan waktu sejenak untuk dapat berkumpul dengan dosen dan mahasiswa, dan menjadi sesosok yang mampu mengayomi, membimbing, dan menjadi suri teladan yang baik untuk civitas akademika di Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung. Beberapa bentuk sikap yang sering dicontohkan ketua program studi yakni: tidak sungkan meminta maaf kepada mahasiswa, dosen ataupun staff ketika dirinya salah, tidak ragu-ragu untuk mengucapkan terimakasih ketika dirinya mendapati bantuan dari mahasiswa, dosen, ataupun staff, tidak sungkan untuk menyapa dosen, mahasiswa, dan staff terlebih dahulu, tidak malu untuk bertanya atau meminta bantuan kepada dosen, mahasiswa, dan staff ketika dirinya tidak tahu, dan tidak canggung untuk berbaur untuk mengobrol maupun berdiskusi dengan mahasiswa, dosen, dan staff. Menurut ketua Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung seluruh warga Program Studi PPkn FKIP Universitas Lampung memiliki hak dan kewajiban yang sama, diperlakukan dengan sama tanpa dibeda-bedakan semuanya rata, sejajar, dan tanpa adanya diskriminasi.

Hubungan yang baik antara civitas akademika terlihat dari etika dan tata krama mahasiswa ketika

hendak bertemu atau menemui dosen, serta sopan santun mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung saat berbicara maupun bersikap dengan dosen. Sedangkan keharmonisan civitas akademika Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung tergambar melalui keterbukaan mahasiswa kepada dosen terkait persoalan perkuliahan maupun persoalan lainnya, selain terbuka mahasiswa dan dosen Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung terlihat bersahabat ketika berada di luar proses perkuliahan.

Peranan Budaya Musyawarah Mufakat (*Bubalah*) Dalam Membentuk Iklim Akademik Yang Positif

Konsep dasar iklim dan budaya akademik mengacu pada karakteristik dari sebuah Universitas, yang nantinya akan digunakan sebagai panduan penyelenggaraan proses perkuliahan yang ada. Iklim dan budaya akademik berkembang melalui tingkat-tingkat revolusi tertentu, secara praktis iklim dan budaya akademik merupakan proses pembentukan identitas dari sebuah Universitas. Iklim dan budaya akademik merupakan cerminan yang akan menggambarkan kondisi lingkungan di sebuah Universitas, hubungan, budaya, dan sikap dari warganya itu sendiri. Sejalan dengan pemaparan tersebut Tilaar (1999: 180) menjelaskan bahwa pengembangan sikap demokratis bukan hanya membentuk jati diri individu yang beraneka ragam, akan tetapi didukung dengan sistem yang mengembangkan sikap demokratis tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan budaya musyawarah mufakat (*Bubalah*) dalam membentuk iklim akademik yang positif terlihat dari aktifitas kegiatan mahasiswa yang berjalan kondusif, kegiatan perkuliahan yang semakin inovatif, hubungan civitas akademika yang harmonis, dan terbentuknya sikap mahasiswa yang demokratis. Dibalik semua itu budaya musyawarah mufakat (*Bubalah*) berperan sebagai pedoman dalam pembentukan iklim akademik di Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung. Budaya musyawarah mufakat (*Bubalah*) memberikan rangsangan terhadap lingkungan disekitarnya untuk terbiasa melakukan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Seperti halnya pemaparan dari Dewitt & Slade (2014: 14) menjelaskan bahwa iklim akademik yang positif merupakan lingkungan di mana semua orang terlibat dan dihormati di mana mahasiswa, Ketua Program Studi, dan dosen bekerja bersama untuk mengembangkan hidup, dan berkontribusi bersama dalam membangun Program Studi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai peranan budaya musyawarah mufakat (*Bubalah*) terhadap pembentukan iklim akademik yang positif, terbukti dari budaya musyawarah mufakat (*Bubalah*) dapat mempengaruhi kondisi lingkungan akademik di Program

Studi PPKn FKIP Universitas Lampung dan sikap dari warga yang ada di dalamnya. budaya musyawarah mufakat (*Bubalah*) membiasakan mahasiswa untuk terus bersikap demokratis, sehingga mau tidak mau, atau suka tidak suka, sikap mahasiswa dan iklim akademik secara tidak langsung akan terbentuk sesuai dengan budaya yang ada di sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Rockenbach, A. & Mayhew, M. (2013). How the Collegiate Religious and Spiritual Climate Shapes Students Ecumenical Orientation. *Research in Higher Education*, 54 (4), 461-479.
- Maramba, D. & Museus, S. 2013. Examining The Effects Of Campus Climate, Ethnic Group Cohesion, and Cross Cultural Interaction On Filipino American Students Sense Of Belonging In College. *Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice*, 14 (4), 495-522.
- Desi, P. & Cahyo, S. (2014). Musyawarah Mufakat atau Pemilihan Lewat Suara Mayoritas? Diskursus Pola Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. 13, (2), 1-13.
- Dewitt, P. & Slade, S. (2014). *School Climate Change*. USA: ASCD Alexandria.
- Elly, M.S. (2005). *Panduan Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fattah, B. & Rahmatan. (1993). *Tanggung Rasan Buhimpun*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Fisher, D.L., & Fraser, B.J. (1990). *School climate: Assessing and improving school environments* (Set: Research Information for Teachers No. 2, Item 4). Melbourne, Australia: Australian Council for Educational Research.
- Hindaryatiningsih, N. (2016). Model Proses Pewarisan Nilai-nilai Budaya Lokal Dalam Tradisi Masyarakat Buton. *Sosiohumaniora*, 18, (2), 108-115.
- <https://nasional.kompas.com/read/2011/08/18/13170468/Budaya.Musyawarah.Mufakat.Makin.Luntur>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2018 pada jam 13:54 wib
- Idris, T. (2013). Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi. *Lex et Societatis*, 1, (1). 19-30.
- Islamey, A. (2011). Penerapan Demokrasi Pancasila. *Jurnal ilmiah-PKn. STMIK AMIKOM Yogyakarta*. 1, (4), 4-9
- Jain, R., Sinha, G. & Sahney, S. (2011). Conceptualizing Service Quality in Higher Education. *Asian Journal on Quality*, 12 (3), 296-314.

- Kausar. (2013). Budaya Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Lampung. *Sosiohumaniora*. 15, (1), 26-34.
- Kurniawan, A.W. 2013 Manajemen Konflik dalam Mengembangkan Atmosfer Akademik. *Jurnal Strategi dan Bisnis*, 1, (1), 16-30.
- Park, JJ., Denson, N. & Bowman, N.A. (2013). Does Socioeconomic Diversity Make a Difference, Examining the Effects of Racial and Socioeconomic Diversity on the Campus Climate for Diversity. *American Educational Research Journal*, 50, (3), 466-496.
- Suwanto, (2009). Hubungan Keefektifan Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Iklim Sekolah Terhadap Profesionalitas Guru Pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. Tesis Teknologi Pendidikan. Surakarta.
- Tilaar, H.A.R. (1999). Pendidikan Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Widihastuti, S. & Rahyuningsih, F. (2008). *Pendidikan Pancasila: SD/MI kelas II*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

PENGARUH CITRA DESTINASI TERHADAP INTENSI WISATAWAN BERKUNJUNG KEMBALI DI DESTINASI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014

Ahmad Ab.

Program Studi Manajemen Divisi Kamar, Politeknik Pariwisata Makassar

E-mail: dg_betagowa@yahoo.com

ABSTRAK, Salah satu faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata adalah citra destinasi. Setiap destinasi pariwisata harus mampu menciptakan sebuah citra destinasi yang positif untuk menarik wisatawan memiliki intensi berkunjung kembali ke destinasi pariwisata tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung citra kognitif terhadap intensi wisatawan berkunjung kembali ke Sulawesi Selatan. *Convenience sampling* digunakan untuk menentukan sampel penelitian. Data dikumpulkan melalui survey, dimana kuesioner diberikan kepada 546 wisatawan dan yang memenuhi syarat untuk diolah adalah 482 kuesioner. Data dianalisis menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pengaruh langsung citra kognitif terhadap intensi wisatawan berkunjung kembali ke Sulawesi Selatan adalah positif. Pengaruh tidak langsung citra kognitif terhadap intensi wisatawan berkunjung kembali melalui citra afektif juga berpengaruh positif. Semakin tinggi citra kognitif akan semakin tinggi citra afektif dan akan semakin besar intensi wisatawan berkunjung kembali ke destinasi pariwisata tersebut.

Kata Kunci: Citra Destinasi; Citra Kognitif; Citra Afektif; Intensi Berkunjung Kembali

THE INFLUENCE OF DESTINATION IMAGE ON TOURIST REVISIT INTENTION TO SOUTH SULAWESI DESTINATION IN 2014

ABSTRACT, One of the factors that influences the tourism development is destination image. Each tourist destination has to be able to establish a positive destination image in order to attract tourists who intend to revisit the destination. This study aimed to investigate the direct and indirect effects of cognitive image on tourists' revisit intention to South Sulawesi Province. Convenience sampling method was employed to determine samples of this research. Data were collected by using survey where 546 questionnaires were distributed to tourists but only 482 questionnaires were useable for further analysis. This study utilized path analysis for data analysis. The results of the study indicate that the direct effect between cognitive image and tourists' revisit intention to South Sulawesi was positive. The indirect effect of cognitive image and tourists' revisit intention to South Sulawesi through affective image was also positive. The higher cognitive image, the higher affective image and the greater tourists' revisit intention to the tourist destination.

Key words: Destination Image; Cognitive Image; Affective Image; Revisit Intention

PENDAHULUAN

Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor unggulan nasional dan juga diharapkan akan menjadi sektor unggulan di mancanegara terutama di kawasan ASEAN. Namun, kenyataan saat ini menunjukkan bahwa peringkat pariwisata Indonesia di mancanegara belum unggul dibanding negara lain, termasuk negara yang ada di kawasan ASEAN. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan juga peringkat daya saing pariwisata Indonesia di ASEAN yang masih berada di bawah negara Malaysia, Singapore, dan Thailand.

Pariwisata adalah salah satu industri yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Pariwisata mempunyai peran untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan dan mempunyai efek pengganda terhadap sektor lainnya. Begitu juga dalam skala yang lebih kecil dari sebuah Negara, yaitu propinsi. Untuk menjaga dan meningkatkan kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara ke Propinsi Sulawesi Selatan maka daya saing pariwisata harus ditingkatkan. Propinsi Sulawesi Selatan memiliki posisi yang strategis karena berada pada posisi "hub" dengan wilayah lain yang ada di kawasan

Timur Indonesia (Arman, dkk, 2016:102). Propinsi Sulawesi Selatan yang memiliki ibukota Makassar memiliki peran penting sebagai salah satu pusat bisnis di Kawasan Timur Indonesia. Posisi yang strategis ini dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dengan bidang pariwisata yang harus secara konsisten menciptakan dan memelihara citra destinasi pariwisata yang positif. Citra destinasi yang positif akan memberikan keyakinan kepada wisatawan untuk melakukan kunjungan kembali pada destinasi pariwisata tersebut. Pencitraan yang baik tentu akan menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung, sebaliknya pencitraan yang buruk akan membuat destinasi pariwisata menjadi terpuruk (Indira, dkk., 2013:47).

Hunt (1975:7) mendefinisikan citra sebagai persepsi yang dimiliki pengunjung yang potensial tentang sebuah destinasi. Citra destinasi adalah sejumlah keyakinan kognitif dan kesan afektif yang seseorang miliki pada destinasi tertentu (Crompton, 1979:18). Baloglu dan Brinberg (1997:14) dan Beerli *et. al.*, (2002:486) menyimpulkan bahwa citra destinasi dicirikan dengan persepsi subyektif yang terdiri dari tingkat aspek kognitif (keyakinan) dan aspek afektif (perasaan). Ada beberapa yang menjadi atribut-atribut yang ada pada citra destinasi, baik citra kognitif maupun citra afektif. Apabila wisatawan merasa-

kan citra destinasi yang positif maka akan berpotensi kepada wisatawan untuk melakukan kunjungan kembali di waktu yang akan datang.

Destinasi pariwisata yang dijadikan lokus penelitian dapat dilihat pada peta pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan pada Gambar 1.



Sumber: Wisata Indonesia Timur, 2014.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Destinasi pariwisata di Sulawesi Selatan yang menjadi lokus penelitian adalah Kabupaten Wajo yang memiliki daya tarik wisata Danau Tempe, Kabupaten Soppeng yang memiliki daya tarik wisata permandian air panas Lejja dan permandian alam Ompo, Kabupaten Sinjai yang memiliki daya tarik wisata Pulau Sembilan dan Benteng Balang Nipa, Kabupaten Bone yang memiliki daya tarik wisata Bola Soba (rumah adat) dan makam raja-raja Bone, Kabupaten Bulukumba yang memiliki daya tarik wisata Pantai Bira, Kabupaten Bantaeng yang memiliki daya tarik wisata Pantai Marina, Pantai Seruni, air terjun Bissapu, permandian alam Eremerasa dan wisata agro Loka, Kabupaten Gowa yang memiliki daya tarik wisata sejarah museum Balla Lompoa (istana raja Gowa), taman wisata alam Malino, dan makam Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros yang memiliki daya tarik wisata permandian alam Bantimurung (air terjun), Kabupaten Pangkep yang memiliki daya tarik wisata permandian Matampa dan daya tarik wisata budaya Sumpang Bitu, Kota Pare-pare yang memiliki daya tarik wisata pantai Lumpue dan hutan wisata Pangeran Pettarani, Kabupaten Toraja Utara yang memiliki banyak daya tarik wisata antara lain: Ketekesu, Londa dan Lemo dan Kota Makassar yang memiliki daya tarik wisata Pulau Samalona, Pulau Kayangan, Benteng Somba Opu dan Fort Rotterdam dan Kawasan Pantai Losari.

Pengaruh Citra Destinasi terhadap Intensi Wisatawan Berkunjung Kembali di Destinasi Sulawesi Selatan Tahun 2014
(Ahmad Ab)

Pengembangan citra yang positif sangat penting untuk kesuksesan suatu destinasi pariwisata sehingga akan muncul keyakinan wisatawan untuk berkunjung ke destinasi pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Tujuan akhir dari pemasaran destinasi adalah menarik wisatawan dengan memengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan perjalanan mereka. Citra sebuah destinasi pariwisata merupakan keyakinan wisatawan akan destinasi tersebut. Kesesuaian antara keyakinan dengan apa yang dirasakan atau dipersepsikan oleh wisatawan akan menghasilkan kepuasan akan sebuah destinasi dan pada akhirnya mereka memiliki intensi berkunjung kembali (*revisit intention*). Citra destinasi pariwisata yang positif sangat penting karena akan memengaruhi perilaku khususnya pada intensi mereka berkunjung kembali ke destinasi pariwisata tersebut sehingga hal ini menjadi salah satu hal yang menarik untuk diteliti. Segala upaya harus dilakukan agar wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Selatan memiliki intensi berkunjung kembali dan membawa teman dan keluarga lainnya untuk melakukan kunjungan wisata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: (1) bagaimana pengaruh langsung citra kognitif terhadap intensi wisatawan berkunjung kembali ke destinasi pariwisata di Sulawesi Selatan; dan (2) bagaimana pengaruh tidak langsung citra kognitif melalui citra afektif terhadap intensi wisatawan berkunjung kembali ke destinasi pariwisata di Sulawesi Selatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis pengaruh langsung citra kognitif terhadap intensi wisatawan berkunjung kembali ke destinasi pariwisata di Sulawesi Selatan; dan (2) untuk menganalisis pengaruh tidak langsung citra kognitif melalui citra afektif terhadap intensi wisatawan berkunjung kembali ke destinasi pariwisata di Sulawesi Selatan.

Citra Destinasi

Pada awal pengujian tentang fenomena dari citra dalam hubungannya dengan pariwisata, Hunt (1975:7) mendefinisikan citra sebagai "impresi" atau persepsi yang dilakukan oleh pengunjung potensial tentang sebuah area. Menurut Hunt (1975:7) citra adalah impresi seseorang atau beberapa orang yang memberikan sebuah pernyataan tentang destinasi yang mereka belum datangi. Citra destinasi tidak hanya didefinisikan sebagai persepsi atribut destinasi individu tetapi juga kesan secara menyeluruh atau holistik dari destinasi. Citra destinasi terdiri dari karakteristik fungsional yang menitikberatkan pada aspek bukti fisik (*tangible*) dari destinasi dan karakteristik psikologi yang menitikberatkan pada aspek yang bukan bukti fisik (*intangible*) (Echtner dan Ritchie, 2003:46). Dengan kata lain, Echtner dan Ritchie mengungkapkan bahwa citra destinasi seharusnya dirasakan baik dalam bentuk atribut-atribut individu (seperti iklim dan fasilitas akomodasi) impresi secara holistik (suasana mental dan imajinasi tentang destinasi). Karakteristik fungsional mangacu pada komponen yang dapat diobservasi atau

diukur secara langsung seperti tingkat harga, fasilitas akomodasi dan atraksi, sedangkan karakteristik psikologi mengacu pada hal-hal yang bukan bukti fisik (*intangibile*), seperti keramahan dan keamanan.

Echtner dan Ritchie juga mengungkapkan bahwa citra destinasi dirasakan dalam bentuk atribut keduanya, baik fungsional maupun karakteristik psikologi. Contohnya, pada sisi holistik, impresi fungsional terdiri dari suasana mental atau gambaran dari karakteristik fisik dari destinasi. Impresi psikologis yang holistik adalah gambaran dari suasana destinasi. Gallarza, Saura dan Garcia (2002:72) mengungkapkan bahwa ada banyak akademisi yang memberikan definisi tentang citra yang dituangkan dalam konsep mereka. Penelitian oleh Baloglu dan Brinberg (1997:14); Baloglu *et al.*, (1999:870); Gartner (1993: 193); Walmsley dan Young (1998:68); Beerli dan Martin (2004:624) mengungkapkan bahwa citra sebagai sebuah konsep yang dibentuk oleh pertimbangan konsumen dan interpretasi sebagai konsekuensi dua komponen yang saling terkait: evaluasi perseptif/kognitif yang menyangkut pengetahuan individu dan keyakinan tentang obyek (sebuah evaluasi dari atribut-atribut yang dirasakan dari obyek) dan penilaian afektif berhubungan dengan yang dirasakan individu terhadap obyek. Penelitian mereka juga menyatakan bahwa citra afektif adalah fungsi dari citra kognitif dan motivasi melakukan perjalanan.

Intensi Berkunjung Kembali ke Destinasi Pariwisata

Huang dan Hsu dalam Luo dan Hsieh (2013:3638) menyatakan bahwa perilaku perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan adalah hasil dari berbagai macam faktor. Tidaklah cukup memahami perilaku wisatawan untuk berkunjung kembali ke destinasi pariwisata hanya disebabkan oleh faktor motivasi, sikap dan pertimbangan tujuan. Beberapa penelitian terdahulu cenderung untuk mengukur intensi wisatawan berkunjung kembali melalui intuisi personal dan keinginan untuk membuat rekomendasi (Ajzen dan Driver, 1992:222). Konsep intensi berkunjung kembali (*revisit intention*) juga dapat ditunjukkan melalui keinginan untuk merekomendasikan, yang berarti wisatawan menyatakan keinginan untuk berkunjung kembali ke sebuah destinasi dan membuat rekomendasi kepada teman yang lain karena mereka mempunyai kepuasan dalam pengalaman perjalanannya dan pengalaman kepuasan ini akan menjadi bagian pemasaran dari mulut ke mulut dan loyalitas pelanggan (Robertson dan Regula, 1994:174).

Sebuah penelitian eksplorasi tentang intensi wisatawan berkunjung kembali ke destinasi pariwisata oleh Gyte dan Phelps dalam Assaker *et al.* (2010:891) menyatakan bahwa pelancong dari negara Inggris yang berkunjung ke negara Spanyol yang menunjukkan bahwa akan timbul keinginan mereka untuk berkunjung kembali di waktu yang akan datang. Baloglu dan Erikson dalam Assaker *et al.* (2010:891) dalam investigasinya pada kunjungan internasional yang berulang-ulang pada destinasi pariwisata di Mediterranean, menemukan bahwa

umumnya para pelancong ke sebuah destinasi pariwisata cenderung beralih ke destinasi pariwisata yang lain untuk perjalanan berikutnya, tetapi banyak yang berharap dapat kembali ke destinasi pariwisata sebelumnya pada suatu waktu di masa yang akan datang.

Banyak peneliti telah menggunakan tipologi wisatawan untuk memahami keinginan pengunjung dari waktu ke waktu. Opperman (2000:83) menyatakan bahwa tipologi pelancong yang dinamis sebagai sebuah fungsi dari berbagai kunjungan. Diidentifikasi ada tiga jenis pelancong, yaitu agak loyal (tidak sering), loyal (paling kurang setiap tiga tahun) dan sangat loyal (setiap tahun dan atau dua kali setahun). Opperman (2000:83) selanjutnya menambahkan tipologinya dengan memperkenalkan jenis pelancong yang lain, seperti yang tidak melakukan pembelian (kurang peduli terhadap destinasi pariwisata), pembeli yang tidak stabil (beralih ke destinasi pariwisata yang lain secara regular) dan pembeli yang tidak loyal (tidak pernah kembali lagi).

Feng dan Jang dalam Assaker *et al.*, (2010:891) mengusulkan sebuah segmentasi yang membagi atas tiga bagian yang menitikberatkan pada intensi wisatawan berkunjung kembali pada destinasi pariwisata, yaitu (1) pengunjung yang berulang-ulang (pengunjung yang mempunyai intensi berkunjung kembali dengan konsistensi yang tinggi dari waktu ke waktu); (2) pengunjung yang ditangguhkan (pengunjung dengan intensi berkunjung kembali rendah di jangka pendek, tetapi mempunyai intensi berkunjung kembali sedang dan tinggi dalam jangka menengah dan jangka panjang); (3) perpindahan yang berulang-ulang (pelancong yang mempunyai intensi berkunjung kembali dengan konsistensi yang rendah dari waktu ke waktu). Selanjutnya Feng dan Jang dalam Assaker *et al.* (2010:891) membagi kerangka waktu menjadi tiga, yaitu jangka pendek (kurang dari satu tahun), jangka menengah (satu-tiga tahun) dan jangka panjang (tiga-lima tahun).

METODE

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka desain penelitian yang digunakan adalah penelitian *explanatory* atau *confirmation research* yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis (Rahayu, 2005:46). Penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai Agustus 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah wisatawan, yaitu wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke beberapa destinasi dan daya tarik wisata di Sulawesi Selatan. Dalam rangka meningkatkan tingkat respon dari responden dalam penelitian ini maka penentuan sampel dilakukan melalui *non probability sampling* yaitu *convenience sampling*. Dalam pengumpulan data mengenai wisatawan yang berkunjung ditemui kesulitan untuk menentukan dengan pasti berapa banyak populasi wisatawan, sehingga teknik

convenience sampling dianggap paling sesuai digunakan. Jumlah kuesioner yang diberikan kepada responden adalah 546 dan kuesioner yang memenuhi syarat untuk diolah adalah 482 kuesioner.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui survey. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer yakni data yang diperoleh langsung melalui kuesioner yang diberikan kepada wisatawan pada saat pengambilan data penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dalam bentuk tulisan dan dokumen-dokumen angka statistik, seperti kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Untuk menganalisis data hasil survey, menginterpretasi hasil penelitian serta untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung citra kognitif terhadap intense untuk berkunjung kembali melalui citra afektif, maka digunakan analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur (*path analysis*) merupakan perluasan dari analisis regresi berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (*model causal*) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 2013:249). Menurut Kuncoro, dkk., (2008:1) menyatakan bahwa analisis jalur digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui hubungan langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data berikut ini adalah data karakteristik dari 482 responden wisatawan yang memberikan tanggapan terhadap kuesioner yang diajukan sesuai tingkat substansi pengalaman atau persepsi wisatawan. Jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki adalah 262 orang (54,40%) dan yang berjenis kelamin perempuan adalah 220 orang (45,60%). Jumlah responden berdasarkan umur adalah 163 orang (33,80%) yang berumur antara 17-20 tahun, 173 orang (35,90%) yang berumur 21-30 tahun, 81 orang (16,80%) responden yang berumur 31-40 tahun, 43 orang (8,90%) responden yang berumur 41-50 tahun, 19 orang (3,90%) yang berumur 51-60 tahun dan 3 orang (0,60%) responden yang berumur di atas 60 tahun. Jumlah responden berdasarkan jenis wisatawan adalah 458 orang (95,00%) wisatawan nusantara dan 24 orang (5,00%) adalah wisatawan mancanegara.

Selanjutnya karakteristik responden berdasarkan pekerjaan adalah responden yang berasal dari wiraswasta

sebanyak 32 orang (6,60%), responden yang berasal dari mahasiswa atau pelajar 225 orang (46,70%), responden yang berprofesi sebagai PNS sebanyak 47 orang (9,80%), responden yang berasal dari pegawai swasta atau karyawan 76 orang (15,80%), responden yang berasal dari kalangan petani atau nelayan adalah 7 orang (1,50%). Selanjutnya responden dari perusahaan BUMN sebanyak 3 orang (0,60%), responden yang berprofesi sebagai perawat (*nursery*) sebanyak 3 orang (0,60%), responden yang berprofesi sebagai tehni sebanyak 2 orang (0,40%), responden yang berprofesi dari kontraktor sebanyak 1 orang (0,20%), responden yang berasal dari kalangan ibu rumah tangga sebanyak 20 orang (4,10%), responden yang berprofesi dosen (*guru*) adalah 59 orang (12,20%), responden yang berprofesi sebagai konsultan sebanyak 2 orang (0,40%), responden yang berasal dari kalangan tentara dan purnawirawan (*pensiunan PNS*) masing-masing 1 orang atau 0,20%. Responden yang berprofesi sebagai ekonom adalah 2 orang (0,40%) dan dari pers luar negeri (*Belgia*) adalah 1 orang atau 0,20%.

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Citra Destinasi Pariwisata

Hasil perhitungan analisis regresi berganda disajikan dalam tabel 1.

Kontribusi atau sumbangan citra kognitif dan citra afektif terhadap intensi wisatawan berkunjung kembali didasarkan pada persamaan regresi di bawah ini:

$$Y_2 = 0,292 X_1 + 0,510 Y_1$$

Persamaan analisis jalur tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Koefisien jalur X_1 sebesar 0,292 yang dapat diartikan bahwa variabel citra kognitif memberikan pengaruh positif terhadap intensi wisatawan berkunjung kembali (*revisit intention*) ke destinasi pariwisata di Sulawesi Selatan.
2. Koefisien jalur Y_1 sebesar 0,510 yang dapat diartikan bahwa variabel citra afektif memberikan pengaruh positif terhadap intensi wisatawan berkunjung kembali (*revisit intention*) ke destinasi pariwisata di Sulawesi Selatan.

Selanjutnya untuk mengetahui ada tidaknya hubungan korelasional antar variabel dapat dilihat pada tabel 2.

Dengan melihat hasil perhitungan korelasi antara variabel penelitian dapat diketahui bahwa:

1. Terdapat hubungan positif antara citra kognitif (X_1) dan citra afektif (Y_1) sebesar 0,595.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Regresi Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.617	.157		3.933	.000		
Citra Kognitif	.363	.049	.292	7.442	.000	.646	1.549
Citra Afektif	.543	.042	.510	12.983	.000	.646	1.549

a Dependent Variable: Intensi Berkunjung Kembali

Pengaruh Citra Destinasi terhadap Intensi Wisatawan Berkunjung Kembali di Destinasi Sulawesi Selatan Tahun 2014
(Ahmad Ab)

2. Terdapat hubungan positif antara citra kognitif (X_1) dan intensi berkunjung kembali (Y_2) sebesar 0,596.
3. Terdapat hubungan positif antara citra afektif (Y_1) dan intensi berkunjung kembali (Y_2) sebesar 0,684.

Tabel 2. Perhitungan Korelasi antara Variabel Penelitian

Variabel Penelitian		Citra Kognitif	Citra Afektif	Intensi Berkunjung kembali
Citra Kognitif	Pearson Correlation	1	.595(**)	.596(**)
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	482	482	482
Citra Afektif	Pearson Correlation	.595(**)	1	.684(**)
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	482	482	482
Intensi Berkunjung Kembali	Pearson Correlation	.596(**)	.684(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	482	482	482

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Untuk mengetahui pengaruh variabel citra kognitif terhadap intensi wisatawan berkunjung kembali ke destinasi maka sebelumnya harus mengetahui pengaruh citra kognitif (X_1) terhadap citra afektif (Y_1). Hasil analisis data menunjukkan bahwa besarnya hubungan atau korelasi (r) untuk variabel citra kognitif (X_1) terhadap citra afektif (Y_1) adalah 0,595 atau 59,50%. Koefisien korelasi yang ditemukan adalah 0,595 atau 59,50% termasuk kategori sedang. Jadi hubungan antara citra kognitif dengan citra afektif termasuk dalam kategori sedang. Pengaruh r^2 (r square) citra kognitif terhadap citra afektif sebesar 0,354 atau 35,40%. Hal ini berarti bahwa varians yang terjadi pada variabel citra afektif 35,40% ditentukan oleh varians yang terjadi pada citra kognitif. Hal ini juga berarti bahwa pengaruh citra kognitif (X_1) terhadap citra afektif (Y_1) adalah 0,354 atau 35,40% dan sisanya 0,646 atau 64,60% ditentukan faktor lain.

Selanjutnya, dicari pengaruh citra afektif terhadap (Y_1) terhadap intensi wisatawan berkunjung kembali (Y_2). Hasil analisis data menunjukkan bahwa besarnya hubungan atau korelasi (r) untuk variabel citra afektif terhadap (Y_1) terhadap intensi wisatawan berkunjung kembali (Y_2) adalah 0,684 atau 68,40%. Hubungan dari variabel Y_1 terhadap Y_2 termasuk dalam kategori kuat. Pengaruh r^2 (r square) citra afektif terhadap intensi

wisatawan berkunjung kembali ke destinasi sebesar 0,468 atau 46,80%. Hal ini berarti bahwa varian yang terjadi pada variabel intensi berkunjung kembali 46,80% ditentukan oleh varians yang terjadi pada citra afektif dari wisatawan. Hal ini juga berarti bahwa pengaruh citra afektif (Y_1) terhadap intensi wisatawan berkunjung kembali (Y_2) adalah 0,468 atau 46,80% dan sisanya 0,532 atau 53,20% ditentukan faktor lain.

Seperti diketahui bahwa persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang telah dihipotesiskan adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = a + p_2 X_1 + e_1 \dots\dots\dots (1)$$

$$Y_2 = a + p_1 X_1 + p_3 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

X_1 = citra kognitif

Y_1 = citra afektif

Y_2 = intensi berkunjung kembali

e_1 = jumlah varians variabel citra afektif yang tidak dapat dijelaskan oleh citra kognitif

e_2 = jumlah variance variabel intensi wisatawan berkunjung kembali yang tidak dapat dijelaskan oleh citra kognitif dan citra afektif.

Untuk mengetahui pengaruh citra kognitif terhadap citra afektif dapat disajikan pada tabel 3.

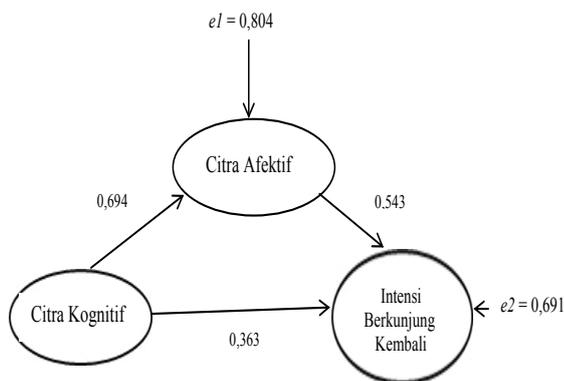
Tabel 3 memberikan nilai *unstandardized beta* citra kognitif pada persamaan regresi (1) sebesar 0,694 dan signifikan pada 0,000 yang berarti citra kognitif mempengaruhi citra afektif. Nilai koefisien unstandardized beta 0,694 merupakan nilai path atau jalur p2. Tabel 1 menunjukkan persamaan regresi (2) nilai unstandardized beta untuk citra kognitif adalah 0,363 dan citra afektif adalah 0,543 dan semuanya signifikan pada 0,000. Nilai unstandardized beta citra kognitif 0,363 merupakan nilai jalur path p1 yaitu nilai jalur pengaruh citra kognitif secara langsung ke intensi wisatawan berkunjung kembali ke destinasi pariwisata. Selanjutnya nilai *unstandardized beta* citra afektif 0,543 merupakan nilai jalur path p3 yaitu nilai jalur pengaruh citra afektif terhadap intensi wisatawan berkunjung kembali ke destinasi pariwisata. Besarnya nilai $e1 = \sqrt{(1 - 0,354)}\sqrt{(1 - 0,354)} = 0,804$ dan besarnya nilai $e2 = e1 = \sqrt{(1 - 0,354)}\sqrt{(1 - 0,523)}\sqrt{(1 - 0,354)}\sqrt{(1 - 0,523)} = 0,691$. Hasil analisis jalur ini dapat digambarkan sesuai dengan model persamaan penelitian yang disajikan dalam gambar 2.

Hasil analisis jalur pada gambar 2 menunjukkan bahwa citra kognitif dapat berpengaruh langsung ke

Tabel 3. Hasil Perhitungan Regresi Citra Kognitif terhadap Citra Afektif Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.569	.155		10.097	.000		
Citra Kognitif	.694	.043	.595	16.228	.000	1.000	1.000

a Dependent Variable: Citra Afektif



Gambar 2. Model Persamaan Penelitian

intensi wisatawan berkunjung kembali ke destinasi pariwisata dan dapat juga berpengaruh tidak langsung, yaitu pengaruh citra kognitif ke citra afektif (sebagai variabel intervening) dan variabel citra afektif berpengaruh ke intensi berkunjung kembali ke destinasi pariwisata. Besarnya pengaruh langsung adalah 0,363 sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu $(0,694) \times (0,543) = 0,38$. Total pengaruh citra kognitif ke intensi berkunjung kembali ke destinasi pariwisata adalah: $0,36 + (0,38) = 0,74$ atau total pengaruh citra kognitif ke intensi wisatawan berkunjung kembali ke destinasi pariwisata adalah: $0,363 + (0,694 \times 0,543) = 0,74$.

Menurut Cohen (1988:26) menyatakan bahwa “koefisien jalur dengan nilai absolut kurang dari 0,10 mengindikasikan sebuah pengaruh yang kecil atau rendah, nilai sekitar 0,30 mengindikasikan pengaruh yang sedang dan nilai yang sama dengan 0,50 atau di atasnya mengindikasikan sebuah pengaruh yang besar atau kuat”. Atas dasar ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh langsung citra kognitif terhadap intensi wisatawan berkunjung kembali ke destinasi pariwisata di Sulawesi Selatan termasuk dalam kategori pengaruh yang sedang (0,36) karena berada pada nilai sekitar 0,30. Pengaruh citra kognitif secara tidak langsung terhadap intensi wisatawan berkunjung kembali ke destinasi pariwisata melalui citra afektif adalah termasuk kategori pengaruh yang sedang (0,38) yang juga berada pada nilai sekitar 0,30. Sedangkan pengaruh total citra kognitif dan citra afektif adalah termasuk kategori pengaruh yang besar atau kuat (0,74) karena nilai berada di atas 0,50.

Indikator-indikator atau atribut-atribut yang ada pada citra kognitif harus dioptimalkan menjadi sangat tinggi sehingga wisatawan akan memiliki intensi berkunjung kembali atau melakukan kunjungan yang berulang-ulang ke destinasi pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan dan akan merekomendasikan wisatawan atau relasi yang lainnya untuk berkunjung ke destinasi pariwisata tersebut. Destinasi pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan memiliki keindahan alam yang sangat menarik untuk dinikmati oleh wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sulawesi Selatan pada tahun 2012 adalah 64.601

orang atau 0,80% dari total wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia yaitu 8.044.462 orang, sedangkan perjalanan wisatawan nusantara ke Sulawesi Selatan adalah 4.871.632 atau 1,99% dari total wisatawan nusantara di Indonesia di tahun yang sama yaitu sebanyak 245.290.000 perjalanan. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan kunjungan, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sulawesi Selatan adalah 106.584 orang atau 1,21% dari total wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia yaitu 8.802.129 orang, sedangkan perjalanan wisatawan nusantara yang ke Sulawesi Selatan adalah 5.385.809 atau 2,15% dari 250.040.000 perjalanan wisatawan nusantara di Indonesia.

Beberapa hal yang masih sangat perlu mendapatkan perhatian pada destinasi pariwisata yang ada antara lain adalah kebersihan lingkungan. Hampir semua destinasi pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan memiliki permasalahan yang sama yaitu masih banyaknya sampah yang ada di lokasi atau destinasi pariwisata tersebut. Permasalahan kebersihan lingkungan ini juga bisa terjadi di destinasi pariwisata yang lain di Indonesia. Hal senada diungkapkan oleh Indira, dkk., (2013:53) yang menyatakan bahwa Kota Bandung memiliki citra yang positif sebagai kota untuk berbelanja dan mencari makanan yang enak dan unik, namun citra atau *image* positif tersebut bergeser menjadi kota yang semrawut, macet dan banyak sampah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penyediaan berbagai macam festival dan *event* budaya, penyediaan akomodasi dan layanannya, penyediaan restoran yang bagus, aksesibilitas ke destinasi (tersedianya penerbangan langsung dari dan ke luar negeri), termasuk informasi yang memudahkan wisatawan untuk menuju ke obyek wisata yang ada di destinasi dan juga tersedianya harga-harga yang terjangkau baik untuk membeli makanan dan minuman maupun untuk berbelanja sebagai buah tangan pada saat wisatawan kembali ke daerah atau negara asalnya.

Menyangkut atribut-atribut yang ada pada citra afektif, diharapkan kepada penyedia destinasi dan pemangku kepentingan (*stake holder*) untuk memberikan layanan yang menyenangkan terhadap wisatawan, jaminan keamanan dari dan ke destinasi pariwisata, wisatawan merasakan kebebasan untuk berwisata ke tempat yang mereka inginkan tanpa mengalami kekuatiran akan ancaman keamanan, dan juga dibutuhkan keramahtamahan dari masyarakat lokal di destinasi pariwisata yang dikunjungi. Banyak wisatawan yang memberikan apresiasi terhadap keramahtamahan masyarakat lokal terutama anak-anak yang senang berphoto dengan wisatawan. Namun masih terdapat beberapa hal kecil terkadang dilakukan, namun akan berakibat yang mungkin kurang menyenangkan terhadap wisatawan misalnya ketidakjujuran dari penyedia transportasi lokal seperti pengemudi becak dan taxi ketika mengantar wisatawan ke daya tarik wisata. Pemerintah daerah melalui dinas pariwisata baik di tingkat propinsi,

kabupaten dan kota telah berusaha melakukan pembinaan kepada pengemudi becak dan taxi dengan memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis tentang sadar wisata, sapta pesona maupun pelayanan prima. Pemerintah juga mengajak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain dalam bidang pariwisata (PHRI, ASITA dan pihak kampus) untuk melakukan penyuluhan dan bimbingan teknis di bidang pariwisata.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis jalur (*path analysis*) dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik dua kesimpulan. *Pertama*, citra kognitif berpengaruh langsung dan positif terhadap intensi wisatawan berkunjung kembali. Hasil pengujian koefisien jalur ditemukan bahwa koefisien jalur dari X_1 ke Y_2 (citra kognitif berpengaruh langsung dan positif terhadap intensi wisatawan berkunjung kembali) secara statistik adalah signifikan. Dengan kata lain apabila indikator-indikator atau atribut-atribut yang ada pada citra kognitif dapat dioptimalkan menjadi sangat tinggi maka dapat dipastikan bahwa wisatawan akan mempertimbangkan untuk berkunjung kembali atau melakukan kunjungan yang berulang-ulang ke destinasi pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan dan akan merekomendasikan wisatawan atau relasi yang lainnya untuk berkunjung ke destinasi tersebut. *Kedua*, hasil analisis jalur juga menunjukkan bahwa citra kognitif dapat berpengaruh tidak langsung dan positif terhadap intensi wisatawan berkunjung kembali ke destinasi pariwisata melalui citra afektif yaitu X_1 terhadap Y_1 dan Y_1 terhadap Y_2 . Wisatawan yang mempersepsikan citra kognitif yang tinggi akan memberikan citra afektif yang tinggi pula. Melalui citra afektif ini, citra kognitif dapat berpengaruh secara tidak langsung dan positif terhadap intensi wisatawan untuk berkunjung kembali ke destinasi pariwisata. Hal itu dapat dibuktikan dari hasil analisis jalur yang hasilnya secara statistik adalah berpengaruh signifikan. Semakin tinggi citra kognitif akan semakin tinggi citra afektif dan semakin besar kemungkinan wisatawan untuk melakukan kunjungan kembali ke destinasi pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Wisatawan nusantara yang berkunjung ke Sulawesi Selatan berasal dari Jakarta, Medan, Bandung, Bekasi, Bali, Gorontalo, Ambon, Yogyakarta, Pekanbaru, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Kolaka, Palembang, Surabaya, Samarinda dan termasuk wisatawan nusantara yang berasal dari kabupaten lain yang ada di Sulawesi Selatan. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sulawesi Selatan berasal dari negara Austria, Jerman, Australia, Ukraina, Kanada, Polandia, Argentina, Belanda, Belgia, Perancis. Umumnya wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Selatan memiliki intensi berkunjung kembali, namun para wisatawan tersebut memiliki juga intensi

berkunjung ke destinasi pariwisata yang lain yang ada di Indonesia. Wisatawan nusantara yang termasuk jenis pelancong loyal untuk berkunjung kembali ke Sulawesi Selatan berasal dari Jakarta, Bandung dan Medan sedangkan wisatawan mancanegara yang termasuk jenis pelancong loyal berasal dari Belanda sedangkan wisatawan yang berasal dari daerah dan negara lain termasuk ke dalam jenis pelancong agak loyal dan tidak ada wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang termasuk dalam kategori jenis pelancong sangat loyal, karena mereka cenderung memilih ke destinasi pariwisata yang lain untuk perjalanan selanjutnya. Hal ini sejalan dengan hasil investigasi dari Baloglu dan Erikson dalam Assaker *et al.* (2010:891) yang menemukan bahwa umumnya para pelancong ke sebuah destinasi pariwisata cenderung beralih ke destinasi pariwisata yang lain untuk perjalanan berikutnya, tetapi banyak yang berharap dapat kembali ke destinasi pariwisata sebelumnya pada suatu waktu di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. & Driver, B.L. (1992) Application of the Theory of Planned Behaviour to Leisure Choices, *Journal of Leisure Research*, 24, (3), 207-224.
- Arman, Hadi, S., Achsan, N.A. & Fauzi A., (2016). Analisis Sektor Strategis Pulau Sulawesi, Jawa Timur dan Kalimantan Timur, *Sosiohumaniora*, 18, (2), 97-107.
- Assaker, G., Vinzi, V.E. & O' Connor, P.O. (2011). Examining the Effect of Novelty Seeking, Satisfaction, and Destination Image on Tourist' Return Pattern: A Two Factor, Non-Linear Latent Growth Model, *Tourism Management*, 32 (4), 890-901.
- Baloglu, S., & Brinberg, D. (1997). Affective Image of Tourism Destination, *Journal of Travel Research*, 35, (4), 11-15.
- Baloglu, S. & Erickson, R. E. (1998). Destination Loyalty and Switching Behaviour of Travelers: A Markov Analysis, *Tourism Analysis*, 2, 119-127.
- Baloglu, S. & McCleary, K.W. (1999), A Model of Destination Image Formation, *Annals of Tourism*, 26, (4), 868-897.
- Berli, A. & Martin, J.D. (2004). Tourists' Characteristics and the Perceived Image of Tourist Destination: A Quantitative Analysis—A Case Study of Lanzarote, Spain, *Tourism Management*, 25, (5), 623-636.
- Berli, A., Diza, G. & Perez, P.J. (2002). The Configuration of the University Image and Its Relationship with the Satisfaction of Students, *Journal of Educational Administration*, 40, (5), 486-504.
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*, 2nd Edition, Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

- Crompton, J. (1979). An Assessment of the Image of Mexico as a Vacation Destination and the Influence of Geographical Location upon that Image, *Journal of Travel Research*, 17, (4), 18-24
- Echtner, C.M. & Ritchie, J.R.B. (2003). The Meaning and Measurement of Tourism Destination Image, *The Journal of Tourism Studies*, 14, (1), 37- 48.
- Gallarza, M.G., Saura, I.G. & Garcia, H.C. (2002). Destination Image: Towards a Conceptual Framework, *Annals of Tourism Research*, 29, (1), 56-78.
- Gartner, W.C. (1993). Image Formation Process, *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 2, (2/3), 191-215.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hunt, J.D. (1975). Image as a Factor in Tourism Development, *Journal of Travel Research*, 13 (3), 1-7.
- Indira, D., Ismanto, S.U. & Santoso, M.B. (2013). Pencitraan Bandung Sebagai Daerah Tujuan Wisata: Model Menemukenali Ikon Bandung Masa Kini, *Sosiohumaniora*, 15, (1), 45-54.
- Kuncoro, A., Engkos & Riduwan (2008). Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis), Bandung: Alfabeta.
- Luo, S.J. & Hsieh, L.Y. (2013). Reconstructing Revisit Intention Scale in Tourism, *Journal of Applied Science*, 13, (18), 3638-3648.
- Opperman, M. (2000). Tourism Destination Loyalty, *Journal of Travel Research*, 39, (1), 78-84
- Rahayu, S. (2005). SPSS Versi 12,00 dalam Riset Pemasaran, Bandung : Alfabeta.
- Robertson, R.A. & Regula, J.D. (1994). Recreational Displacement and Overall Satisfaction: A study of Central Iowa's Licensed Boaters, *Journal Leisure Research*, 26, (2), 174-181.
- Walmsley, D.J. & Young, M. (1998). Evaluative Image and Tourism: The Use of Perceptual Constructs to Describe the Structure of Destination Image, *Journal of Travel Research*, 36, (3), 65-69.
- Wisata Indonesia Timur. (2014). Peta Wisata Sulawesi Selatan, Diakses dari <https://wisataindonesiatimur.wordpress.com/wisata-indonesia-timur/peta-wisata-sulawesi-selatan/> Kamis, tanggal 25/09/2014.

KAJIAN POTENSI DAN KENDALA DALAM PROSES USAHATANI DAN PEMASARAN MANGGA DI KABUPATEN INDRAMAYU

Elly Rasmikayati¹, Gema Wibawa¹, Rani Andriani¹, Sri Fatimah¹, dan Bobby Rachmat Saefudin²

¹Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran

²Peneliti dan Staf Pusat Riset Pangan Berkelanjutan DRPMI Universitas Padjadjaran

E-mail: e.rasmikayati@unpad.ac.id

ABSTRAK, Mangga merupakan salah satu buah favorit yang selalu dicari oleh konsumen namun sulit didapatkan di pasar. Padahal, respon konsumen terhadap buah mangga adalah peluang bisnis yang dapat dimaksimalkan oleh petani mangga terutama di Kabupaten Indramayu sebagai sentra produksi mangga terbesar di Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis karakteristik proses usahatani dan pemasaran mangga di Kabupaten Indramayu dan juga menjelaskan kendala dan potensi dalam memenuhi ketersediaan mangga sepanjang tahun. Survey dilakukan di Kabupaten Indramayu sebagai salah satu sentra produksi mangga di Jawa Barat terhadap 130 petani yang dipilih menggunakan teknik sampling acak sederhana. Data dianalisis menggunakan alat analisis kuantitatif descriptive statistics analysis dan Chi-Square yang dipadukan dengan analisis data kualitatif berupa wawancara dengan para responden. Penelitian ini menemukan bahwa proporsi petani yang penguasaan pohon mangganya terbatas adalah 56% sedangkan sisanya 44% adalah petani mangga yang jumlah pohonnya lebih banyak. Petani yang kepemilikan pohon mangganya terbatas cenderung mengusahakan mangga dengan seadanya, sebaliknya petani yang jumlah penguasaan pohonnya besar cenderung lebih serius dan intensif baik dalam proses usahatani mangga maupun dalam segi pemasaran mangganya. Potensi yg dapat menjadi modal pengembangan usahatani mangga dan pemasaran mangga adalah pengalaman bertani mangga dan kemudahan pinjaman modal, terutama dari perbankan, sehingga sangat berpotensi bagi para petani untuk dapat meningkatkan meningkatkan kontinuitas produktivitas dan kualitas mangganya. Sedangkan kendala yang terjadi adalah akses pinjaman modal untuk petani kecil yang relatif masih sulit, faktor curah hujan yang tinggi, biaya pemeliharaan yang semakin mahal, dan masih terbatasnya industri pengolahan mangga di Indramayu.

Kata kunci: Agribisnis mangga; penguasaan pohon mangga; petani mangga; proses usahatani dan pemasaran mangga

THE POTENTIAL AND CONSTRAINTS OF MANGO'S FARMING AND MARKETING PROCESS IN INDRAMAYU REGENCY

ABSTRACT, Mangoes are one of the most popular fruits favored by consumers. However, mangoes are rarely found in the market. The consumer response to mango fruit should be a potential business opportunity for mango farmers in Indramayu District as the largest mango production center in West Java. This research aimed at describing and analyzing the characteristics of the farming and marketing process of mango in Indramayu District and describing the constraints and potentials to fulfill the availability of mangoes throughout the years. A survey was conducted to 130 mango farmers in Indramayu Regency who were selected using cluster sampling technique. The data was analyzed using quantitative methods, descriptive statistics and Chi-Square analysis, combined with qualitative data analysis of the interview with respondents. The findings revealed that 56% of the farmers had limited number of mango trees and the remaining 44% had more trees. Farmers with more mango trees tended to put more effort both in the process of mango farming and marketing. There were some factors that were potentials for the development of mango farming and marketing to increase the continuity of productivity and quality of mangoes such as the farmers' experience and the ease acces of funding, particularly from banks. In addition, the constraints encountered were limited access to capital loans for small farmers, high rainfall, expensive maintenance costs and limited number of mango processing industry in Indramayu.

Keywords: Mango agribusiness; mangga tree preparation; mango farmer; farming process and mango marketing

PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat beberapa provinsi yang menjadi sentra produksi mangga nasional. Salah satu sentra produksi mangga bagi nasional adalah Provinsi Jawa Barat. Terdapat beberapa daerah di Jawa Barat yang merupakan sentra produksi mangga diantaranya yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Sumedang. Data produksi mangga Jawa Barat ditampilkan dalam Tabel 1.

Sebagai sentra produksi mangga terbesar di Jawa Barat, Indramayu dijuluki sebagai Kota Mangga, hal tersebut menjadi produk unggulan tersendiri bagi Kabupaten Indramayu. Wilayah ini identik dengan buah mangga

karena setiap halaman rumah, tempat sekolah, rumah ibadah, perkantoran, taman di Kabupaten Indramayu mayoritas ditanami pohon mangga, selain itu kebun-kebun mangga setiap desa terbentang luas di beberapa lokasi di wilayah Indramayu. Tanaman mangga sangat cocok tumbuh dan berbuah di Kabupaten Indramayu, hal tersebut terjadi karena faktor struktur tanah, iklim, dan topografi yang mendukung sehingga buah mangga yang berasal dari Indramayu memiliki ciri khas rasa yang enak, manis, dan aroma wangi yang tajam.

Tanaman mangga sangat cocok dibudidayakan di Kabupaten Indramayu sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan budidaya tanaman lainnya. Dari sisi permintaan konsumen, mangga merupakan salah satu buah yang

paling banyak disukai dan selalu dicari oleh konsumen. Dari dalam negeri, tentunya jumlah permintaannya sangat besar karena merupakan refleksi dari jumlah produksi mangga nasional yang tidak diekspor ditambah dengan impor mangga. Kemudian dari sisi permintaan mangga dari luar negeri, walau secara trend ekspor mangga tersebut telah menggambarkan kenaikan yang pesat dan memiliki kontribusi yang besar pada total ekspor hortikultura, namun kenaikan tersebut belum menggambarkan kenaikan ekspor yang stabil dan signifikan dibandingkan dengan perkembangan pada tingkat produksi. Persentase ekspor mangga terhadap jumlah produksi hanya berada di kisaran 0,05% saja (BPS, 2016). Penyebab utama masih kecilnya persentase ekspor mangga tersebut adalah masih rendahnya kualitas produk mangga yang dihasilkan petani sehingga tidak memenuhi standar ekspor.

Tabel 1. Produksi Mangga di Wilayah Sentra Mangga Jawa Barat

Kabupaten	Tahun					Share (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
Indramayu	6.851	8.479	7.244	6.874	9.064	25
Cirebon	6.205	3.095	5.166	3.744	3.109	14
Majalengka	4.852	1.024	5.717	6.440	3.753	14
Kuningan	3.938	3.241	2.333	3.211	1.292	9
Sumedang	2.901	2.361	2.063	2.349	2.340	8
Jumlah	24.747	18.200	22.523	22.618	19.558	70
Jawa Barat	34.221	32.707	32.148	31.337	26.011	100

Keterangan: Share adalah rasio total produksi kabupaten dengan total produksi Jawa Barat

Sumber: Sumber: Jawa Barat dalam Angka 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017 (diolah).

Berdasarkan Tabel 1, Kabupaten Indramayu sebagai sentra produksi utama di Jawa Barat yang menjadikan mangga sebagai identitas daerahnya tersebut menghasilkan jumlah produksi mangga yang berfluktuasi. Menurut Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat (2016) Dalam kurun waktu 5 tahun, Kabupaten Indramayu mencapai produksi mangga terbanyak pada tahun 2016 dengan jumlah 9.064 ton sedangkan tahun 2012 hanya mencapai 6.851 ton. Hal serupa juga dialami oleh keempat kabupaten lainnya, yang mana produksi mangga di masing-masing kabupaten tersebut mengalami peningkatan dan penurunan jumlah yang sangat signifikan. Pada tahun 2012, Kabupaten Cirebon dan Kuningan mampu memproduksi mangga sebanyak 6.205 ton dan 3.938 ton. Namun, jumlah tersebut berkurang hampir mencapai 50% di tahun 2016 sehingga produksinya menjadi 3.109 ton dan 1.292 ton. Begitupun dengan Kabupaten Majalengka yang mengalami jumlah produksi mangga yang berfluktuasi dan signifikan. Jumlah produksi mangga di Kabupaten Sumedang cenderung stabil dari tahun 2012 – 2016 yaitu dengan rata-rata produksi 2.403 ton setiap tahunnya. Kabupaten Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan Sumedang memberikan kontribusi rata-rata dalam 5 tahun sebesar 25%; 14%; 14%; 9%; dan 8% terhadap total produksi mangga di Jawa Barat.

Kajian Potensi dan Kendala dalam Proses Usahatani dan Pemasaran Mangga di Kabupaten Indramayu
(Elly Rasmikayati, Gema Wibawa, Rani Andriani, Sri Fatimah, dan Bobby Rachmat Saefudin)

Melihat kesenjangan yang terjadi di tingkat konsumen dan produsen mangga bahwa mangga merupakan salah satu buah yang paling banyak disukai dan selalu dicari oleh konsumen. Tetapi seringkali konsumen kecewa, karena mangga seringkali kualitasnya tidak terjaga dan sering tidak tersedia di pasar. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana proses usahatani mangga dan pemasaran yang dilakukan oleh petani mangga. Dengan demikian sangat menarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya sistem usahatani mangga dan pemasarannya di Kabupaten Indramayu. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan dan menganalisis karakteristik proses usahatani dan pemasarannya pada petani mangga di Kabupaten Indramayu; dan 2) menjelaskan kendala dan potensi dalam memenuhi ketersediaan mangga sepanjang tahun.

METODE

Penelitian dilakukan dengan metode Survey-eksplanatory, dengan pengambilan sampel *multi-stage random sampling*. Tahapannya adalah memilih satu kecamatan yang merupakan sentra mangga di Kabupaten Indramayu, dan dengan bantuan perangkat lunak Microsoft excel 2013 terpilihlah kecamatan Cikeding secara acak. Selanjutnya memilih desa sentra mangga secara acak dan terpilihlah desa Jatisura. Sedemikian sehingga responden petani terpilih secara random sebanyak 130 responden.

Desain penelitian yang digunakan adalah *mix method* dimana desain penelitian ini menggabungkan desain penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk memperdalam hasil yang didapat (Creswell and Clark, 2008). Penelitian ini akan membahas lebih banyak variabel di dalam hal proses usahatani dan proses pemasaran dari hasil penelitian dari Sulistyowati dan Natawidjaja (2016) yang mengungkapkan tentang pola tanam mangga (proses usahatani) dan tingkat komersialisasi petani (proses pemasaran mangga) di Jawa Barat. Variabel-variabel proses usahatani yang dianalisis dalam penelitian ini diantaranya: Jumlah Kepemilikan Pohon Mangga, Sumber Modal Usahatani, Lokasi Menanam Mangga, Pola Tanam Mangga, Kepemilikan Saprotan, Sumber Air untuk Pemeliharaan Mangga, Pengendalian OPT, Penggunaan Teknologi *Off Season*. Sedangkan variabel-variabel proses pemasaran diantaranya adalah: Tujuan Pasar Petani, Penentu Harga Jual, Sistem Pembayaran, Akses Informasi Harga Pasar, Kondisi Jalan ke Lokasi Kebun Mangga, dan Kemitraan Mangga.

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis karakteristik proses usahatani dan pemasarannya serta menjelaskan kendala dan potensi dalam memenuhi ketersediaan mangga sepanjang digunakan alat analisis kuantitatif *descriptive statistics analysis*, dan analisis *Chi-Square* yang dipadukan dengan analisis data kualitatif dari hasil wawancara dengan para responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Kepemilikan Pohon Mangga

Petani mangga dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan jumlah pohon yang kuasainya, yaitu petani yang jumlah pohonnya terbatas dan banyak. Petani yang jumlah pohonnya terbatas adalah petani yang menguasai paling banyak 60 pohon mangga, sedangkan petani yang jumlah pohonnya banyak adalah petani yang menguasai lebih dari 60 pohon mangga. Kriteria ini merupakan adaptasi dari Hartanto (1984). Hasil kajian sebagaimana tersaji pada Tabel 2, menunjukkan bahwa proporsi petani yang penguasaan pohon mangganya terbatas adalah 56% sedangkan sisanya 44% adalah petani mangga yang jumlah pohonnya lebih banyak. Petani yang pohonnya terbatas jumlahnya sedikit lebih banyak dari pada petani yang pohonnya banyak. Karakteristik kepemilikan pohon mangga di Kabupaten Indramayu ini sejalan dengan penelitian mangga di tingkat Jawa Barat dari penelitian Rasmikayati dkk (2017) bahwa petani kecil lebih banyak dari petani sedang dan besar.

Tabel 2. Karakteristik Petani Mangga di Indramayu Berdasarkan Kepemilikan Pohon Mangga

Kepemilikan Pohon Mangga	Frequency	Percent
Terbatas	73	56.2
Banyak	57	43.8
Total	130	100.0

Sumber: Data Primer, diolah 2018

Analisis Karakteristik Proses Usahatani Mangga di Kab. Indramayu

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari segi proses usahatani, petani yang kepemilikan pohon mangganya terbatas cenderung mengusahakan mangga dengan seadanya, sebaliknya petani yang jumlah penguasaan pohonnya besar, usahatani yang mereka lakukan lebih serius dan intensif.

Hal ini terlihat dari beberapa variabel diantaranya dalam hal sumber modal usahatani mangga. Nilai sigifikansi uji *Chi-Square* nya bernilai 0,001 yang berarti ada keterkaitan antara kepemilikan pohon mangga dengan sumber modal petani. Petani yang jumlah pohonnya terbatas lebih mengandalkan modal sendiri dari pada yang jumlah pohonnya banyak. Hasil yang sama diungkapkan oleh penelitian Sulistyowati dan Natawidjaja (2016) bahwa Petani mangga lebih banyak menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari modal sendiri. Petani yang jumlah pohonnya banyak mempunyai akses yang lebih baik terhadap pinjaman bank untuk menambah dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi mangganya. Kemudian dilihat dari lokasi menanam pohon mangga, Nilai sigifikansi uji *Chi-Square* nya bernilai 0,032 yang berarti ada keterkaitan antara kepemilikan pohon mangga dengan lokasi menanam mangga. Petani yang jumlah pohonnya terbatas lebih dominan menanam mangga

di halaman rumahnya, sedangkan petani yang jumlah pohonnya banyak terlihat sudah lebih berani untuk menanam mangga tidak hanya di halaman rumahnya saja tetapi juga di ladang/kebun dan sawah mereka. Kemudian dari segi pola tanam mangga, nilai sigifikansi uji *Chi-Square* nya bernilai 0,176 yang berarti bahwa tidak ada keterkaitan antara kepemilikan pohon mangga dengan pola tanam mangga. Dalam Tabel 2 terlihat bahwa persentase jumlah petani yang menerapkan pola tanam polikultur dan yang monokultur hampir sama.

Dalam segi kepemilikan sarana dan prasarana pertanian, nilai sigifikansi uji *Chi-Square* nya bernilai 0,082 yang berarti ada keterkaitan antara kepemilikan pohon mangga dengan kepemilikan saprotan. Petani yang jumlah pohonnya terbatas masih banyak yang tidak memilikinya, mereka lebih megandalkan untuk menyewa, sedangkan petani yang jumlah pohonnya banyak sudah banyak yang mampu membeli saprotan. Kemudian berdasarkan sumber air yang digunakan, nilai sigifikansi uji *Chi-Square* nya bernilai 0,000 yang berarti ada keterkaitan antara kepemilikan pohon mangga dengan sumber irigasi. Petani yang jumlah pohonnya banyak sudah banyak menerapkan beberapa sumber irigasi seperti menggabungkan sumur bor dan embung, sedangkan pada petani yang jumlah pohonnya terbatas lebih banyak yang masih mengandalkan air hujan sebagai sumber pengairan utama usahatani mangganya.

Kemudian dalam sistem pengendalian hama dan OPT, nilai sigifikansi uji *Chi-Square* nya bernilai 0,017 yang berarti ada keterkaitan antara kepemilikan pohon mangga dengan sistem pengendalian hama dan OPT yang dilakukan petani. Terlihat bahwa petani dengan jumlah pohon mangga terbatas lebih banyak yang belum menerapkan sistem pengendalian hama dan OPT dari pada petani dengan jumlah pohon banyak. Selain itu, diantara petani dengan jumlah pohon banyak sudah ada yang menggunakan sistem perangkap hama secara penuh tanpa menggunakan pestisida sama sekali.

Sementara itu dalam hal penggunaan teknologi *off season* yang diterapkan, kedua kelompok petani ini relatif mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama sudah banyak yang menggunakan teknologi *off season* dengan total mencapai 89% petani mangga di kab. Indramayu. Kemudian sekitar 52% petani di Indramayu baik yang jumlah pohonnya terbatas maupun banyak, keduanya sama-sama sudah banyak yang menerapkan pola tanam mangga secara khusus / monokultur. Hal ini dikarenakan karena mangga merupakan tanaman musiman yang waktu musimnya singkat, oleh karena itu untuk memenuhi permintaan konsumen dibutuhkan teknologi pembuangan/*off season* (Natawidjaja *et. al.*, 2014).

Analisis Karakteristik Proses Pemasaran Mangga di Kab. Indramayu

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari segi proses pemasaran mangga, petani yang kepemilikan pohon mangganya terbatas cenderung lebih baik dari pada petani

Tabel 3. Proses Usahatani Mangga Dikaitkan dengan Kepemilikan Pohon Mangga Petani di Indramayu

Variabel Proses Usahatani Mangga	Kepemilikan Pohon Mangga					
	Terbatas		Banyak		Total	
	Frek. (orang)	Persen (%)	Frek. (orang)	Persen (%)	Frek. (orang)	Persen (%)
Sumber Modal Usahatani Mangga						
1) Modal Sendiri	58	79,5	39	68,4	97	73,9
2) Pinjaman Bank	8	11,0	16	28,1	24	19,5
3) Pinjaman Mitra	7	9,6	2	3,5	9	6,5
Total	73	100,0	57	100,0	130	100,0
Pearson Chi-Square (Sig.)	0,001***					
Lokasi Menanam Pohon Mangga						
1) Halaman Rumah	9	12,3	4	7,0	13	9,7
2) Halaman Rumah dan Kebun/Ladang	29	39,7	16	28,1	45	33,9
3) Halaman rumah, Kebun/Ladang, dan Sawah	4	5,5	8	14,0	12	9,8
4) Kebun/Ladang	29	39,7	25	43,9	54	41,8
5) Kebun/Ladang dan Sawah	2	2,7	4	7,0	6	4,9
Total	73	100,0	57	100,0	130	100,0
Pearson Chi-Square (Sig.)	0,032**					
Pola Tanam Mangga						
1) Monokultur	38	52,1	29	51	67	51,5
2) Polikultur	35	47,9	28	49	63	48,5
Total	73	100,0	57	100,0	130	100,0
Pearson Chi-Square (Sig.)	0,176					
Kepemilikan Saprotan						
1) Beli	61	83,6	55	96,5	116	90,0
2) Beli dan Sewa	1	1,4	1	1,8	2	1,6
3) Sewa	1	1,4	0	0	1	0,7
4) Tidak Punya	10	13,7	1	1,8	11	7,7
Total	73	100,0	57	100,0	130	100,0
Pearson Chi-Square (Sig.)	0,082*					
Sumber Air untuk Pemeliharaan Mangga						
1) Embung	10	13,7	5	8,8	15	11,2
2) Hujan	20	27,4	6	10,5	26	19,0
3) Sumur Bor	30	41,1	19	33,3	49	37,2
4) Sumur Bor dan Embung	11	15,1	27	47,3	38	31,2
5) Sumur Bor dan Irigasi	2	2,7	0	0,0	2	1,4
Total	73	100,0	57	100,0	130	88,8
Pearson Chi-Square (Sig.)	0,000***					
Pengendalian OPT						
1) Menggunakan Perangkap Hama	0	0,0	1	1,8	1	1,8
2) Menggunakan Pestisida	49	67,1	49	86,0	98	76,5
3) Menggunakan Pestisida dan perangkap hama	4	5,5	1	1,8	5	3,6
4) Tidak Menggunakan	20	27,4	6	10,5	26	19,0
Total	73	100,0	57	100,0	130	100,0
Pearson Chi-Square (Sig.)	0,017**					
Penggunaan Teknologi <i>Off Season</i>						
1) Tidak	12	16,4	3	5	15	10,9
2) Ya	61	83,6	54	95	115	89,1
Total	73	100,0	57	100,0	130	100,0
Pearson Chi-Square (Sig.)	0,179					

Ket : *** : Signifikan dengan taraf nyata 1%

** : Signifikan dengan taraf nyata 5%

* : Signifikan dengan taraf nyata 10%

Sumber : Data Primer, diolah 2017

yang jumlah pohon mangganya terbatas. Hal ini terlihat dari beberapa variabel diantaranya tujuan pasar mangga. Nilai sigifikansi uji *Chi-Square* nya bernilai 0,000 yang berarti ada keterkaitan antara kepemilikan pohon mangga dengan Tujuan Pasar. Petani yang jumlah pohon mangganya sudah lebih banyak yang menjual mangganya secara langsung ke pabrik atau ke kios-kios mangga atau langsung ke pasar

tradisional. Berbeda dengan petani yang jumlah pohon mangganya terbatas yang masih mengandalkan tengkulak dalam pemasaran mangganya. Tujuan pasar petani mangga yang jumlah pohonnya terbatas di Kabupaten Indramayu ini sejalan dengan Penelitian Widyarina dkk. (2017) di Kabupaten Majalengka bahwa tujuan pasar mayoritas responden petani mangga di Kabupaten Majalengka

adalah menjual hasil produk mangganya ke pedagang pengumpul/tengkulak. Kemudian selain itu, petani mangga cenderung menjualnya ke bandar/pedagang besar/supplier. Menurut petani, menjual hasil panen mangga ke pedagang pengumpul/tengkulak sangatlah mudah dan dekat. Petani mangga masih banyak yang memiliki prinsip bahwa rezeki haruslah dibagikan kepada sesama, terutama sesama warga sekitar. Maka dari itu petani mangga lebih cenderung menjual buah mangga mereka ke tengkulak di sekitar lingkungan rumah mereka.

Kemudian dilihat dari sistem pembayaran, nilai sigifikansi uji *Chi-Square* nya bernilai 0,000 yang berarti tidak ada keterkaitan antara kepemilikan pohon mangga dengan sistem pembayaran. Namun demikian, petani dengan jumlah pohon banyak yang menggunakan sistem pembayaran jatuh tempo. Hal ini merupakan akibat dari penjualan secara langsung ke pabrik, toko atau ke pasar tradisional. Sedangkan petani dengan jumlah pohon mangga terbatas kebanyakan menerapkan sistem pembayaran tunai karena mereka menjual mangga kepada tengkulak. Kemudian jika ditinjau berdasarkan akses petani terhadap informasi harga pasar terlihat bahwa 48% petani dengan kepemilikan pohon mangga terbatas tidak mempunyai akses terhadap informasi harga pasar. Sedangkan petani dengan jumlah pohon mangga

banyak 86% dari mereka sudah mendapatkannya dari berbagai sumber seperti, pembeli di pasar, internet, mitra dan lain-lain. Menurut penelitian Ramadhani dan Rasmikayati (2017), tujuan pemasaran mayoritas adalah ke pedagang pengumpul/tengkulak dipilih karena adanya faktor kemudahan akses, kedekatan/keluarga, sistem pembayaran tunai, dan pinjaman saprotan.

Potensi dan Kendala yang Dihadapi Petani di Kab. Indramayu

Sudah kurang lebih 10 tahun terakhir usahatani mangga di Kabupaten Indramayu, mengalami peningkatan, baik dari segi produksi, luas lahan, maupun jumlah pohonnya. Petani selalu melakukan kegiatan budidaya mangga yang terdiri atas penyiapan lahan, penanaman, pemupukan, penyiangan, pengendalian HPT, pemanenan dan pemangkasan. Bahkan dilakukan penanaman pohon-pohon baru apabila pohon mangga yang mereka miliki sudah tidak produktif. Petani mangga lebih bergantung pada penggunaan zat perangsang tumbuh daripada budidaya tanaman mangga secara alami karena permintaan akan komoditas mangga selalu terjadi setiap saat. Dalam satu tahun panen dapat mencapai 3 sampai 4 kali. Bulan Agustus sampai september merupakan periode yang paling tinggi produksinya. Namun demikian menurut

Tabel 4. Proses Pemasaran Mangga Dikaitkan dengan Kepemilikan Pohon Mangga Petani di Indramayu

Variabel Proses Pemasaran Mangga	Kepemilikan Pohon Mangga					
	Terbatas		Banyak		Total	
	Frek. (orang)	Persen (%)	Frek. (orang)	Persen (%)	Frek. (orang)	Persen (%)
Tujuan Pasar Mangga						
1) Kios dan pabrik	1	1.4	24	42.1	25	21.7
2) Langsung Dijual ke Bandar/Pedagang Besar/Supplier	6	8.2	6	10.5	12	9.4
3) Langsung Dijual ke Pasar Tradisional	1	1.4	22	38.6	23	20.0
4) Melalui Perantara Pedagang Pengumpul/Tengkulak	36	49.3	1	1.8	37	25.5
5) Pengontrak	29	39.7	4	7.0	33	23.4
Total	73	100.0	57	100.0	130	100.0
Pearson Chi-Square (Sig.)	0,000***					
Penentu Harga Jual						
1) Keputusan Bersama	11	15.1	6	10.5	17	12.8
2) Pembeli	57	78.1	50	87.7	107	82.9
3) Petani	5	6.8	1	1.8	6	4.3
Total	73	100.0	57	100.0	130	100.0
Pearson Chi-Square (Sig.)	0,423					
Sistem Pembayaran						
1) Jatuh Tempo	4	5.5	3	5.3	7	5.4
2) Tunai	67	91.8	32	56.1	99	74.0
3) Tunai dan Jatuh Tempo	2	2.7	22	38.6	24	20.7
Total	73	100.0	57	100.0	130	100.0
Pearson Chi-Square (Sig.)	0,000***					
Akses Petani terhadap Informasi Harga Pasar						
1) Tidak	48	65.8	8	14	56	39.9
2) Ya	25	34.2	49	86	74	60.1
Total	73	100.0	57	100.0	130	100.0
Pearson Chi-Square (Sig.)	0,000***					

Ket : *** : Signifikan dengan taraf nyata 1%

** : Signifikan dengan taraf nyata 5%

* : Signifikan dengan taraf nyata 10%

Sumber : Data Primer, diolah 2017

Kajian Potensi dan Kendala dalam Proses Usahatani dan Pemasaran Mangga di Kabupaten Indramayu
(Elly Rasmikayati, Gema Wibawa, Rani Andriani, Sri Fatimah, dan Bobby Rachmat Saefudin)

Rasmikayati dan Saefudin (2018) untuk teknik budidaya di tingkat petani masih kurang yaitu dalam pemeliharaan, penanganan hama dan penyakit, dan pemakaian ZPT yang tidak bijaksana. Permasalahan lain yaitu karena kurangnya pengetahuan petani dan hanya memikirkan keuntungan.

Bantuan dari pemerintah untuk usahatani mangga tidak begitu sering terjadi, hanya pada tahun 2013 terdapat bantuan bibit dari pemerintah dan kemudian disusul oleh penyuluhan pada tahun 2014. Namun penyuluhan dan pelatihan belum sering yang khusus tentang usahatani mangga. Bantuan dan penyuluhan atau pelatihan mayoritas yang diberikan masih tentang usahatani padi. Hal ini disinyalir karena petani Indramayu dianggap sudah mandiri dalam hal budidaya mangga dan pemasarannya sudah terjamin melalui peran tengkulak dan bandar sekitar.

Meskipun sudah mandiri, tidak sedikit petani mangga yang memilih mengontrakkan atau memborongkan pohon mangga mereka ke tengkulak. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya tengkulak yang ada dan biasanya lebih menawarkan untuk membeli mangga petani dengan cara dikontrak atau diborong saja. Biasanya, akibat butuh uang dalam waktu cepat dan menghindari harga anjlok pada saat panen raya maka petani mangga lebih memilih mengontrakkan atau memborongkan pohon mangganya. Selain itu, sulitnya modal juga menjadi pertimbangan petani mangga untuk langsung mengontrakkan atau memborongkan pohon mangganya, karena jika harus dipanen sendiri berarti harus dilakukan pemeliharaan yang cukup intensif agar hasilnya banyak. Sistem yang dilakukan biasanya kontrak hanya selama 1 tahun saja, tapi apabila petani sedang butuh uang maka kontrak bisa diperpanjang selama 5 tahun. Menurut Sulistyowati dkk. (2013) masalah lain yang sering di keluhkan petani dalam bermitra adalah masalah pembayaran. Petani mitra merasa jatuh tempo pembayaran yang terlalu lama, yaitu hingga 3 bulan terhitung sejak barang di kirim. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh petani dalam menjalankan kemitraan antara lain adalah: (1) masih lemahnya pengetahuan petani tentang pascapanen; (2) lemahnya akses terhadap informasi pasar; (3) lemahnya permodalan dan (4) lemahnya infrastruktur penanganan pascapanen dan mutu. Pembentukan kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) mangga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan daya tawar petani sehingga nilai jual produknya akan meningkat. Menurut Safe'i dkk (2018), tergabungkannya petani sebagai anggota gapoktan dapat meningkatkan pendapatan petani.

Meskipun pohon mangga di Kab. Indramayu selalu berbuah, namun ada kalanya juga mengalami penurunan produksi, namun tidak terlalu signifikan. Cuaca dan HPT menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Bahkan menurut penuturan beberapa responden petani mangga ada pohon mangga yang tidak berbuah sama sekali pada tahun 2015. Kendala cuaca yang dihadapi adalah ketika banyak angin dan hujan pada saat pohon mangga tengah berbunga, sehingga mengakibatkan bunga

mudah rontok. Akibatnya peyemprotan akan dilakukan terus menerus. Selain itu jika musim hujan, serangan penyakit akan lebih banyak seperti timbulnya jamur pada buah sehingga buah akan lebih cepat membusuk serta buah yang dihasilkan tidak mulus. Faktor teknologi penanganan hama ini merupakan faktor yang berpengaruh nyata mendorong peningkatan perilaku agribisnis petani mangga ke arah yang positif dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani mangga itu sendiri (Rasmikayati dan Saefudin, 2018).

Untuk permodalan, petani-petani besar atau petani yang kepemilikan pohon mangganya banyak tidak terlalu sulit mendapatkannya, bahkan mereka seringkali ditawari secara langsung oleh lembaga kredit seperti bank dan KUR untuk meminjam modal. Namun hal tersebut berbeda bagi petani-petani kecil, mereka masih kesulitan untuk mengaksesnya sehingga permodalan menjadi hambatan. Masalah permodalan ini juga seringkali menjadi faktor sangat penting karena bisa menjadi penyebab terikatnya petani mangga dalam sistem yang tidak menguntungkan mereka. Hal ini karena yang juga harus diperhitungkan selama menunggu panen mangga adalah biaya-biaya konsumtif keluarga petani mangga, terutama untuk para petani yang menjadikan bertani mangga sebagai pekerjaan pokoknya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Khaswarina (2017) bahwa dari aspek pengeluaran, faktor yang dominan adalah jumlah anggota rumah tangga, tabungan, jumlah anak sekolah, konsumsi non pangan dan pendapatan total. Faktor yang responsif mempengaruhi pengeluaran adalah pendapatan total.

Salah satu harapan dari petani mangga adalah semakin banyaknya industri pengolahan mangga. Karena meskipun dijuluki sebagai Kota Mangga, masih jarang ditemui industri pengolahan mangga. Menurutnya dengan adanya industri pengolahan tersebut semakin membuat Indramayu layak mendapat julukan sebagai Kota Mangga yang bisa dijadikan sebagai *City Branding* untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Indramayu.

SIMPULAN

Proporsi petani yang penguasaan pohon mangganya terbatas adalah 56% sedangkan sisanya 44% adalah petani mangga yang jumlah pohonnya lebih banyak. Petani yang kepemilikan pohon mangganya terbatas cenderung mengusahakan mangga dengan seadanya, sebaliknya petani yang jumlah penguasaan pohonnya besar, usaha tani yang mereka lakukan lebih serius dan intensif baik dalam proses usahatani mangga yang mereka lakukan maupun dalam segi pemasaran mangganya. Hal ini terlihat dari beberapa variabel usahatani mangga yaitu Sumber Modal Usahatani, Lokasi Menanam Mangga, Kepemilikan Saprotan, Sumber Air untuk Pemeliharaan Mangga, dan Pengendalian OPT dan variabel pemasaran mangga yaitu Tujuan Pasar Petani, Sistem Pembayaran,

dan Akses Informasi Harga Pasar. Potensi yang dimiliki petani mangga di Kab. Indramayu selain dari sudah berpengalaman dalam hal budidaya mangga juga dalam hal permodalan, petani-petani besar atau petani yang kepemilikan pohon mangganya banyak tidak terlalu sulit mendapatkannya, bahkan mereka seringkali ditawarkan secara langsung oleh lembaga kredit seperti bank dan KUR untuk meminjam modal. Namun hal tersebut berbeda bagi petani-petani kecil, mereka masih kesulitan untuk mengaksesnya sehingga permodalan menjadi kendala bagi petani kecil. Salah satu harapan dari petani mangga sendiri adalah semakin banyaknya industri pengolahan mangga yang akan semakin membuat Indramayu layak mendapat julukan sebagai Kota Mangga yang bisa dijadikan sebagai *City Branding* untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Indramayu.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Kemenristek Dikti yang telah membiayai penelitian ini dalam skema PUPT (Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi) tahun anggaran 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J.W. & Clark, V.L.P. (2008). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. London: Sage Publications.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. (2016). *Produksi Buah Mangga*. Jawa Barat.
- Hartanto. (1984). *Petani Kecil dan Karakteristiknya*. Jakarta: CV. Yasaguna
- Khaswarina, S. (2017). Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Ekonomi Rumah Tangga Petani Karet Di Desa Koto Damai Kabupaten Kampar. *Sosiohumaniora*, 19, (3), 199-205
- Natawidjaja, R.S., Rum, I.A., Sulistyowati, L., & Saidah, Z. (2014). Improving The Participation Of Smallholder Mango Farmers In Modern Retail Channels In Indonesia. *The International Review of Retail, Distribution And Consumer Research*, 24, (5), 564-580.
- Ramadhani, W. & Rasmikayati, E. (2017). Pemilihan Pasar Petani Mangga Serta Dinamika Agribisnisnya Di Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 3, (2), 185-205.
- Rasmikayati, E., & Saefudin, B. R. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mampu Mendorong Petani Mangga Untuk Meningkatkan Perilaku Agribisnisnya Pada Era Globalisasi. *Paradigma Agribisnis*, 1, (1), 1-13.
- Rasmikayati, E. & Saefudin, B.R. (2018). Confirmatory Factor Analysis: Faktor-Faktor Penentu Agribisnis Mangga Di Kabupaten Majalengka Berdasarkan Penguasaan Lahannya. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 4, (1).
- Rasmikayati, E., Sulistyowati, L., & Saefudin, B. R. (2017). Risiko Produksi Dan Pemasaran Terhadap Pendapatan Petani Mangga: Kelompok Mana Yang Paling Berisiko. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 3, (2), 105-116.
- Safe'i, R., Febryano, I.G., & Aminah, L.N. (2018). Pengaruh Keberadaan Gapoktan Terhadap Pendapatan Petani Dan Perubahan Tutupan Lahan Di Hutan Kemasyarakatan. *Sosiohumaniora*, 20, (2), 109-114.
- Statistik, B.P. (2015). *Jawa Barat Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (Pada 10 Juli 2018).
- Statistik, B.P. (2017). *Jawa Barat Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Diambil dari <https://www.bps.go.id>.
- Sulistyowati, L., Natawidjaja, R. & Saidah, Z. (2013). Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Mangga Terlibat Dalam Sistem Informal Dengan Pedagang Pengumpul. *Sosiohumaniora*, 15, (3), 285-293.
- Sulistyowati, L. & Natawidjaja, R. (2016). Commercialization Determinant Of Mango Farmers In West Java-Indonesia. *Ijaber*, 11, (11), 7537-7557.

IMPLIKASI PELAKSANAAN PROGRAM DANA DESA TERHADAP KOHESI SOSIAL DI DESA TAMALATE KABUPATEN TAKALAR

Muhammad Faisal dan Umar Nain

Program Studi Pembangunan dan Pemberdayaan Fakultas Politik Pemerintahan,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kampus Sulawesi Selatan
E-mail: faisalmile69@gmail.com

ABSTRAK, Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi pelaksanaan program dana desa terhadap kohesi sosial. Pelaksanaan program dana desa menjadi penting untuk dianalisis karena kehadirannya adalah untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Jenis penelitian ini adalah korelasional prediktif, non eksperimental. Data diperoleh melalui instrumen berupa kuesioner. Responden penelitian ini adalah 265 warga Desa Tamalate (198 laki-laki, 67 perempuan) yang diambil dengan teknik *convenience sampling*, insidental, dan secara purposif diupayakan agar responden dapat dijangkau pada setiap RW dari 10 RW di Desa Tamalate dan berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan uji regresi linear satu variabel independen dan dengan bantuan Program SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program dana desa berimplikasi positif dan signifikan terhadap kohesi sosial masyarakat. Dari persamaan regresi linear diperoleh informasi bahwa pelaksanaan program dana desa berkontribusi sebesar 0,539 terhadap kohesi sosial. Nilai R Square sebesar 0,300 yang menjelaskan bahwa sebanyak 30% variasi yang berbeda dari kohesi sosial ditentukan oleh pelaksanaan program dana desa pada taraf signifikansi = 0,05. Kohesi sosial tercipta seiring dengan munculnya rasa suka diantara anggota masyarakat dan interaksi yang terjadi didominasi kerjasama serta mempunyai tujuan yang terkait satu dengan lainnya.

Kata kunci: Implikasi; pelaksanaan program; dana desa; kohesi sosial

IMPLICATIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND PROGRAMS TO SOCIAL COHESION IN TAMALATE VILLAGE TAKALAR REGENCY

ABSTRACT, The purpose of this study was to analyze the implications implementing the village fund program on social cohesion. The implementation village funding program becomes important analyzed because presence is strengthen the village community the subject development. Types of research correlational predictive, non experimental. Data of research variables obtained through instrument form questionnaires the data participants who happened. Participants this study were 265 Tamalate villagers (198 men, 67 women) for field research. Participants were captured convenience, incidental, and purposive sampling techniques attempted enable participants captured each RW of 10 RWs in Tamalate Village and from various occupational backgrounds. Research data were analyzed by using linear regression test one independent variable and help SPSS program version 20. The results showed implementation the village fund program has positive and significant implications for social cohesion. From the linear regression equation is found implementation of village fund program contributes 0.539 to social cohesion. The R Square value of 0.300 explains that many as 30% the different variations social cohesion are determined the implementation village fund program at significance level = 0.05. Social cohesion is created along with emergence a sense of love among members society and interaction occurs dominated cooperation and have goals related to one another.

Key words: implications; program implementation; village funds; social cohesion

PENDAHULUAN

Bahwa salah satu dari Nawa Cita Presiden Jokowi-JK adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sebagai upaya memperkuat daerah-daerah dan desa di seluruh Indonesia maka dikurangkan program dana desa dengan alokasi anggaran triliunan rupiah. Secara filosofi, dana desa adalah untuk memberdayakan masyarakat desa, agar desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Penggunaan dana desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pada pasal 19 disebutkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Walaupun demikian, dana desa lebih diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya, disebutkan pula dalam pasal 20 bahwa penggunaan dana desa harus mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa). Lebih jauh, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Penggunaan Prioritas Dana Desa dijelaskan bahwa tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program atau kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) melainkan memberikan pandangan prioritas dana desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk

berkreasi membuat program atau kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisis kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya. Meskipun desa diberikan kewenangan dalam penggunaan dana desa, namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan dana desa. Adapun prinsip-prinsip penggunaan dana desa adalah sebagai berikut: 1) keadilan, berarti setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan dana desa. Jadi kepentingan warga desa tidak dibeda-bedakan dalam pemanfaatan dan menikmati hasil pembangunan yang dibiayai dari dana desa, (2) kebutuhan prioritas, dalam arti lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, sehingga dapat memecahkan secara langsung berbagai persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat desa dan (3) tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan potensi sumber daya alam dilihat dari karakteristik wilayah desa seperti desa pesisir/pantai, desa dataran rendah, dan desa pegunungan yang didukung dengan sumber daya manusianya (Nain, 2017: 219).

Penyelenggaraan prioritas dana desa adalah pada dua bidang yaitu program atau kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, maka program atau kegiatan pembangunan desa meliputi: (i) pembangunan infrastruktur untuk mengatasi isolasi desa sehingga ada konektivitas antara satu desa dengan desa lain; (ii) pembangunan sarana pelayanan kesehatan berbasis masyarakat seperti posyandu dan pos kesehatan desa serta penempatan tenaga medis di desa dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa; (iii) pembangunan infrastruktur pendidikan anak usia dini, kelompok bermain, dan taman kanak-kanak di desa serta didukung dengan pembangunan perpustakaan desa; (iv) pemberdayaan usaha ekonomi lokal menuju peningkatan produk unggulan desa yang memiliki daya saing; atau (v) menciptakan inovasi desa yang menghasilkan energi terbarukan seperti biogas dari kotoran ternak yang tidak merusak sehingga menunjang keberlanjutan lingkungan hidup (Nain, 2016: 160). Dalam istilah lebih khusus, program pembangunan akan berhasil jika ada kesesuaian yang erat antara: kebutuhan pihak penerima bantuan dengan hasil program; persyaratan program dengan kemampuan nyata dari organisasi pembantu, dan kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima dan proses pengambilan keputusan organisasi pembantu (Korten, 1988: 240).

Tata cara pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dimulai dari persiapan, musyawarah dusun, musyawarah perencanaan desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa dan sosialisasi. Pada kegiatan persiapan melakukan sosialisasi dan pembentukan kelompok kerja/tim perencanaan desa yang dilanjutkan dengan penguatan kapasitas kelompok kerja/tim perencanaan desa, penyusunan *Road Map*,

identifikasi kebutuhan data sekunder desa, dan sosialisasi jadwal ke masing-masing dusun (Nain, 2017: 102). Ini menjelaskan bahwa sejak tahapan penyusunan RPJMDesa sudah ada aksi kolektif dari kelompok kerja dan masyarakat dusun. Masyarakat desa diharapkan untuk ikut dalam sosialisasi kegiatan, sehingga mereka memahami poin-poin penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) termasuk dapat berkontribusi memberikan saran atau gagasan dan terlibat dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan desa. Pada tahap musyawarah dusun (Musdus) keterlibatan masyarakat desa sangat diperlukan. Aset desa dan permasalahan dasar masyarakat digali pada tahap ini. Olehnya itu, partisipasi masyarakat dusun sangat diperlukan untuk mengetahui secara tepat apa kebutuhan masyarakat yang mendasar dan dibutuhkan oleh masyarakat desa pada umumnya. Kehadiran masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan seperti petani, nelayan, pengrajin, atau lainnya mutlak diperlukan supaya rencana pembangunan yang disusun itu tidak salah sasaran. Aksi kolektif masyarakat dan kekokohan kelembagaan masyarakat desa menjadi poin penting demi terciptanya kohesi sosial masyarakat tidak saja pada tahap persiapan, musyawarah dusun, sampai kepada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa, tetapi juga sampai pada pelestarian dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Aksi kolektif, kekokohan kelembagaan, dan kerjasama semua pemangku kepentingan merupakan unsur penting dan merupakan faktor instrik masyarakat dalam membangun desa demi terwujudnya kohesi sosial masyarakat. Pelaksanaan program dana desa dimulai dengan menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang sesuai dengan tata cara/tahapan penyusunan yaitu mulai dari persiapan, musyawarah dusun, musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan sosialisasi peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) untuk enam tahun. Selanjutnya adalah menjabarkan rencana pembangunan jangka menengah kepada rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) untuk satu tahun, serta dilanjutkan dengan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDesa). Program atau kegiatan yang disusun dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDesa) itulah yang dilaksanakan untuk periode pembangunan desa satu tahun anggaran.

Kehadiran program dana desa memengaruhi pola interaksi masyarakat desa. Jika sebelumnya, masyarakat desa memiliki tingkat homogenitas yang tinggi dengan solidaritas mekanik, maka setelah dana desa masuk ke desa-desa terjadi perubahan menjadi masyarakat heterogen. Masyarakat heterogen ditandai dengan solidaritas organis (Johnson, 1986: 183). Perkembangan masyarakat desa dari solidaritas mekanis menjadi solidaritas organik ditandai dengan adanya pembagian kerja (Soekanto, 2013: 35). Dengan Dana desa yang

penggunaannya dikuasakan kepada kepala desa, maka terdapat kecenderungan kepala desa untuk mengorganisir masyarakatnya dalam kelompok-kelompok kegiatan yang dibiayai dari dana desa sebagai wujud nyata dari kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ini berarti bahwa interaksi dapat dilihat sebagai proses sosial. Sebagai suatu proses sosial interaksi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kohesivitas sosial masyarakat. Sudah tentu interaksi masyarakat dapat terjadi mulai pada tahap persiapan, musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes), musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), dan tahap sosialisasi peraturan desa tentang rencana pembangunan desa. Faktor-faktor yang dapat membentuk kohesivitas adalah setiap anggota memiliki komitmen yang tinggi, interaksi didominasi kerjasama bukan persaingan, mempunyai tujuan yang terkait satu dengan lainnya (Faturachman (2006: 95). Pembangunan desa yang dimulai dari tahapan perencanaan dengan melibatkan masyarakat desa akan tercipta bentuk interaksi yang didominasi kerjasama dan sama-sama mempunyai tujuan yang saling terkait dengan lainnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diasumsikan bahwa program dana desa yang penggunaannya dimulai dengan menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa), menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa), menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDesa) desa, sampai kepada membuat pertanggungjawaban pelaksanaan dan pelestarian serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan desa akan berkorelasi dengan tingkat kohesivitas masyarakat desa.

Kohesi sosial dapat dipahami sebagai kesatuan, keutuhan dan kepaduan dalam suatu upaya agar anggota kelompok tetap bertahan di dalam komunitas (Kaslan, 2014:7). Menurut Kulig *et al.* (2008: 83-84) komunitas pedesaan memiliki karakteristik yang berbeda dari komunitas lainnya, yakni memiliki latar belakang yang sama dengan tingkat pendidikan yang setara, afiliasi keagamaan, dan etnik, juga rentang waktu masyarakat berada dalam komunitas tersebut. Homogenitas ini membuat kohesi sosial pada komunitas pedesaan relative lebih tinggi daripada komunitas perkotaan. Lebih jauh, Kulig, *et al.*, (2008: 84) memaparkan bahwa komunitas petani memiliki inisiatif dalam mengatasi masalah, saling membantu menanam dan panen serta berinteraksi sebagai aksi kolektif. Selain itu, Forrest, *et al.*, (2001: 2129) menyatakan bahwa ranah-ranah kohesi sosial adalah (1) nilai-nilai bersama dan sebuah budaya warga (*civic culture*), (2) keteraturan sosial dan kendali sosial, (3) solidaritas sosial, (4) jejaring sosial dan modal sosial, serta (5) kelekatan dan identifikasi pada tempat (*place attachment and identity*).

Kohesi sosial dalam sebuah komunitas dapat terjadi ketika anggota-anggota komunitas saling menyukai dan menginginkan kehadiran satu dengan lainnya. Kohesi sosial juga dapat terbentuk dari rasa saling percaya (*mutual trust*) diantara anggota komunitas (Primadona, 2001; Noorkamilah, 2008). Oleh Faisal (2017:72)

menyebut *trust* lahir dari adanya keharmonisan dengan sesama manusia yang dapat berdampak kepada luasnya jaringan kerja. (Myres, 2014: 280). menyatakan bahwa kohesi sosial merupakan perasaan "*we feeling*" yang mempersatukan setiap anggota menjadi satu bagian. Rasa memiliki tersebut juga dapat membentuk kohesi sosial antar individu dalam suatu komunitas. Rasa memiliki ini yang membuat individu menyadari bahwa ia merupakan bagian dari komunitas. Ramdhani dan Martono (1996: 87) menambahkan bahwa masyarakat yang sudah berkohesi, kepentingan individu sudah tidak diutamakan lagi. Kohesi sosial dapat dilihat dari rasa komunitas (*sense of community*). Teori rasa komunitas yang dibawa oleh Chavis *et al.* (2008: 3) dimana rasa komunitas dapat dilihat dari keanggotan, pengaruh, pemenuhan kebutuhan dan berbagi hubungan emosional. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi di dalam komunitas sebagai akibat adanya program dana desa yang berdampak pada aspek ekonomi dan sosial diharapkan tidak mengganggu rasa memiliki dan rasa komunitas di Desa Tamalate. Penelitian ini mengkaji bagaimana program dana desa dilaksanakan dan implikasinya terhadap kohesi sosial masyarakat.

METODE

Jenis Penelitian dan Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah korelasional prediktif, non eksperimental. Data variabel penelitian diperoleh melalui instrumen berupa kuisioner yang menggali data responden yang sudah terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini juga termasuk jenis *expost facto*. Peneliti tidak melakukan randomisasi sampel maupun kontrol variabel.

Data penelitian dianalisis dengan menggunakan uji regresi linear satu variabel independen. Uji regresi digunakan untuk meramalkan suatu variabel dependen (Y) berdasar satu variabel independen (X) dalam suatu persamaan linear (Sugiyono, 2003: 243). Analisis regresi dilakukan dengan menggunakan Program SPSS versi 20. Variabel dependen (Y) adalah kohesi sosial, sedangkan variabel independen (X) adalah Pelaksanaan Program Dana Desa. Menurut Trihendradi (2009: 147), kriteria untuk menentukan apakah model fit (kesesuaian antara model penelitian atau model pengukuran dengan data empiris) adalah jika $\text{sig} (0,000) < \alpha$ (dalam penelitian ini ditetapkan taraf signifikansi (α) sebesar 5%).

Definisi Operasional Variabel

Pelaksanaan program dana desa didefinisikan sebagai pelaksanaan program atau kegiatan yang didanai dari dana desa mulai dari keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa, tahap penyusunan rencana kerja pemerintah desa untuk satu tahun, pelaksanaan pembangunan desa, sampai kepada pemanfaatan hasil-hasil pembangunan desa yang pendanaannya bersumber dari anggaran dana desa. Dalam penelitian ini kohesi sosial secara operasional didefinisikan sebagai kesatuan, keutuhan, dan kepaduan

dalam upaya untuk mendorong anggota tetap bertahan dalam sebuah komunitas. Menurut Chavis *et al.* (2008: 3) kohesi sosial diukur dengan menggunakan empat indikator yaitu *Reinforcement of Needs* (pemenuhan kebutuhan), *Membership* (keterlibatan sebagai anggota komunitas), *Influence* (memberikan pengaruh) dan *Shared Emotional Connection* (berbagi kontak emosional). Lebih jauh, *Reinforcement of needs* (pemenuhan kebutuhan) adalah kondisi dimana anggota komunitas mendapatkan apa yang mereka butuhkan karena telah menjadi bagian dari komunitas, *Membership* (keterlibatan sebagai anggota komunitas): orang-orang yang tergabung dalam komunitas dan anggota komunitas meluangkan banyak waktu dan usaha mereka untuk menjadi bagian dari komunitas, *Influence* (memberikan pengaruh): kemampuan komunitas dalam mempengaruhi komunitas lainnya. Selain itu, anggota komunitas juga memiliki pengaruh atas komunitasnya, dan *Shared Emotional Connection* (berbagi kontak emosional) adalah anggota-anggota komunitas menikmati kebersamaan di dalam komunitas dan berbagi kejadian penting bersama seperti pesta pernikahan, ulang tahun, dan lain-lain.

Responden Penelitian

Responden penelitian ini adalah 265 warga Desa Tamalate (198 laki-laki, 67 perempuan) untuk penelitian lapangan (*field test*). Usia responden pada rentang 25-50 tahun. Responden dijanging dengan teknik penyampelan *convenience*, insidental, dan secara purposif diupayakan agar responden dapat dijanging pada setiap RW dari 10 RW di Desa Tamalate dan berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan. Rincian partisipan dari latar belakang pekerjaan tersebut adalah petani (15), nelayan (143), pedagang (60), industri kerajinan/konstruksi (20), angkutan/jasa-jasa (15), dan pegawai/karyawan (12).

Uji coba instrumen penelitian dilakukan pada 130 warga di Desa Tamalate (75 laki-laki, 55 perempuan) dengan usia berada pada rentang 25-50 tahun. Data uji coba diambil dari berbagai warga pada 10 RW dan 20 RT di Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

Instrumen Pelaksanaan Program Dana Desa

Instrumen ini disusun sendiri oleh peneliti yang dikembangkan berdasarkan definisi operasional yaitu terkait dengan implikasi program dana desa, meliputi: keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa, tahap penyusunan rencana kerja pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, sampai kepada pemanfaatan hasil-hasil pembangunan desa yang pendanaannya bersumber dari anggaran dana desa (24 butir). Alternatif jawaban setiap butir adalah ya atau tidak.

Contoh butir pelaksanaan program dana desa adalah sebagai berikut:

“Pemerintah desa menyampaikan informasi pemahaman kepada masyarakat atas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di desa Tamalate, dengan menggunakan

dana desa”. Pilihan responnya adalah Ya (Skor 1), atau Tidak (Skor 0). “Saya terlibat dalam kegiatan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa dan memberikan sasaran/gagasan”. Pilihan responnya adalah Ya (Skor 1), atau Tidak (Skor 0). “Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa memprioritaskan bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa. Pilihannya responnya adalah Ya (Skor 1), atau Tidak (Skor 0). “Ketika program pembangunan di desa dilaksanakan, saya memberikan sumbangan berupa bahan/material bangunan (misalnya: tanah timbunan, pasir, batu kali, semen, dll)”. Pilihannya responnya adalah Ya (Skor 1), atau Tidak (Skor 0). “Hasil-hasil pembangunan fisik di desa, dapat dilestarikan karena masyarakat desa merasa ikut memiliki”. Pilihan responnya adalah Ya (Skor 1), atau Tidak (Skor 0).

Hasil uji coba instrumen menunjukkan bahwa setiap butir instrumen valid dan reliabel, dengan indeks Cronbach's Alpha 0,862 dan korelasi butir-total 0,294 sampai dengan 0,648.

Instrumen Kohesi Sosial.

Instrumen ini terdiri atas 20 butir pernyataan yang diadaptasi dari *Sense of Community Index version 2/SCI-2* (Chavis *et al.* 2008: 2). Contoh butir pernyataan: “Saya merasakan bahwa saya milik masyarakat Desa Tamalate”. Pilihan responnya adalah Ya (Skor 1), atau Tidak (Skor 0). “Saya lebih suka akan tinggal di masyarakat Desa Tamalate ini dibanding di tempat lain”. Pilihan responnya adalah Ya (Skor 1), atau Tidak (Skor 0). “Kebanyakan orang-orang dalam masyarakat Desa Tamalate saling menyukai antara satu dengan yang lain”. Pilihan responnya adalah Ya (Skor 1) atau Tidak (Skor 0). “Apakah orang lain dalam kelompok masyarakat dapat dipercaya”. Pilihan responnya adalah Ya (Skor 1) atau Tidak (Skor 0). “Sebagian besar warga Desa Tamalate berbagi tugas dan tanggung jawab untuk membuat masyarakat desa menjadi suatu tempat yang baik untuk kehidupan”. Pilihan responnya adalah Ya (Skor 1) atau Tidak (Skor 0). “Orang-orang di Desa Tamalate saling membantu dalam melakukan pekerjaan”. Pilihan responnya Ya (Skor 1) atau Tidak (Skor 0). Karena terdapat 20 butir pernyataan, maka kemungkinan skor terendah adalah 0, yaitu ketika responden memberikan jawaban tidak pada semua butir pernyataan dan skor tertinggi adalah 20, jika responden memberikan jawaban Ya pada semua butir pernyataan. Hasil uji coba instrumen menunjukkan bahwa seluruh butir valid dan reliabel, dengan indeks Cronbach's Alpha 0.862 dengan korelasi butir-total antara 0.437 sampai dengan 0.826.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Desa Tamalate dan Karakteristik Responden

Desa Tamalate adalah salah satu desa di Kabupaten Takalar tepatnya di Kecamatan Galesong Utara dengan luas 0,70 km² yaitu 4,63 persen dari luas kecamatan Galesong Utara. Jarak ke Ibukota Kecamatan hanya 0,5 km, dan sejauh 27 km dari ibu kota kabupaten. Desa

Tamalate memiliki 4 dusun, 10 RW dan 20 RT. Kecamatan dalam Angka 2016 menjelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Tamalate sebanyak 4036 jiwa yang terdistribusi pada 864 rumah tangga, terdiri atas 1896 laki-laki dan 2140 perempuan. Dilihat dari mata pencaharian penduduk, maka Desa Tamalate termasuk desa nelayan, karena kebanyakan penduduknya bekerja sebagai nelayan.

Selanjutnya, karakteristik responden penelitian menurut tingkat pendidikan adalah 37,74% tamat SD atau sederajat, tamat SMP atau sederajat 28,30%, tamat SMA atau sederajat 22,64% dan sebanyak 11,32% menyelesaikan pendidikannya di tingkat Perguruan Tinggi. Tingkat pendidikan responden menunjukkan lamanya responden menempuh pendidikan formal. Tingkat pendidikan yang hanya tamat SD (37,74%) tersebut disebabkan oleh pada umumnya masyarakat nelayan tidak memprioritaskan pendidikan karena tuntutan ekonomi. Setelah anak-anak tamat SD, orang tua mereka lebih memilih untuk membawa anaknya untuk mencari ikan. Faktor ekonomi sebagai salah satu alasan rendahnya tingkat pendidikan di Desa Tamalate. Masyarakat berpikir bahwa ketika sudah lulus SD dapat langsung bekerja sebagai nelayan atau di sawah membantu perekonomian keluarga.

Lebih jauh, jenis pekerjaan responden dideskripsikan berikut ini:

Tabel 1. Jumlah dan Jenis pekerjaan responden

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Petani	15	5,66
Nelayan	143	53,96
Pedagang	60	22,64
Industri Kerajinan/Konstruksi	20	7,55
Angkutan & jasa-jasa	15	5,66
Pegawai/Karyawan	12	4,53
Jumlah	265	100,00

Sumber: Hasil penelitian, 2017

Nelayan merupakan mata pencaharian bagi masyarakat Desa Tamalate yang utama. Hal ini disebabkan oleh letak Desa Tamalate yang berada di pesisir pantai Kecamatan Galesong Utara. Laut yang luas dan segala potensi kekayaan di dalamnya seperti ikan merupakan harapan bagi sebagian besar masyarakat Desa Tamalate. Pekerjaan sebagai nelayan merupakan warisan yang sudah berlangsung cukup lama dari generasi ke generasi. Selain itu, kondisi tersebut juga didukung oleh kurangnya lahan pertanian bagi petani untuk menggarap sawah yang

hanya ada di bagian timur desa. Selain bekerja sebagai nelayan (53,96 persen) dan petani (5,66 persen), sebagian warga bekerja sebagai pedagang (22,64 persen), industri kerajinan dan konstruksi (7,55 persen), angkutan dan jasa-jasa (5,66) serta pegawai/karyawan (4,53 persen).

Selanjutnya disajikan pula tingkat pendapatan responden, yaitu pada tabel 2.

Tingkat pendapatan adalah besarnya jumlah uang yang diterima oleh responden sebagai penghasilan mereka selama bekerja. Tingkat pendapatan dikelompokkan berdasarkan data lapangan yang diperoleh. Pendapatan utama responden berasal dari pekerjaannya sebagai nelayan. Terutama bagi responden yang tidak memiliki keterampilan selain bekerja sebagai nelayan. Walaupun pendapatan warga sebagai nelayan tidak terlalu besar, namun banyak warga di Desa Tamalate tetap bertahan menggeluti pekerjaan sebagai nelayan. Tabel 2 menunjukkan tingkat pendapatan responden yang paling banyak adalah antara 1 juta s.d 2 juta sebesar 52,08 persen, disusul dengan tingkat pendapatan yang kurang dari 1 juta sebesar 29,06 persen. Sedangkan yang lebih dari 2 juta sebesar 11,32 persen. Hubungan antara jenis pekerjaan dengan tingkat pendapatan responden disajikan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 2. Persentase responden berdasarkan tingkat pendapatan

Tingkat Pendapatan	Jumlah	Persentase
Kurang dari 1.000.000,-	77	29,06
Antara 1.000.000,- s.d 2.000.000,-	138	52,08
Lebih dari 2.000.000,-	50	11,32
Jumlah	265	100,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2017

Tabel 3 menunjukkan bahwa pendapatan yang kurang dari 1 juta per bulan terbanyak pada jenis pekerjaan responden sebagai nelayan yakni 48 orang, sementara pendapatan lebih dari 2 juta terbanyak pada jenis pekerjaan sebagai pedagang yakni 37 orang dan petani hanya 1 orang. Untuk tingkat pendapatan antara 1 s.d 2 juta terbanyak pada jenis pekerjaan sebagai nelayan yakni 90 orang dan 3 orang responden yang pekerjaannya sebagai petani. Selain itu, tidak ada pegawai/karyawan yang memiliki pendapatan kurang dari 1 juta per bulan. Pegawai/karyawan tersebut enam orang mengaku sebagai perangkat desa dan enam orang lagi berprofesi sebagai karyawan.

Tabel 3. Hubungan antara jenis pekerjaan dengan tingkat pendapatan responden

Jenis Pekerjaan	Tingkat Pendapatan/bulan			Jumlah
	Kurang dari 1 juta	Antara 1 s.d 2 juta	Lebih 2 juta	
Petani	11	3	1	15
Nelayan	48	90	5	143
Pedagang	3	20	37	60
Industri Kerajinan/Konstruksi	10	7	3	20
Angkutan dan jasa-jasa	5	8	2	15
Pegawai/Karyawan	-	10	2	12
Jumlah	77	138	50	265

Sumber: Olah data, 2017

Deskripsi Pelaksanaan Program Dana Desa

Pelaksanaan program dana desa dimulai pada tahun 2015. Pelaksanaan program dana desa di Desa Tamalate mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) setiap tahunnya. Dengan adanya RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun sendiri oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa menunjukkan bahwa Desa Tamalate semakin memperkuat hak-hak masyarakat desa dan kewenangan mereka sekaligus mampu mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia sebagai kekuatan utama dalam membangun desanya.

Dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah desa melibatkan masyarakat di desanya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang intinya adalah bahwa dalam perencanaan pembangunan desa perlu mengikuti tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh kepala desa dan perangkatnya dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa secara optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Hasil kuesioner penelitian (Tabel 4) menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa seperti memberikan saran dan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, masyarakat juga memberikan sumbangan berupa barang atau alat-alat lain yang dibutuhkan seperti parang, gergaji, linggis termasuk memberikan tanah timbunan, pasir, batu kali, semen, dll, dan bantuan tenaga, terutama pada saat pembangunan mesjid sebagai rumah ibadah.

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa mencapai 97,57 persen dalam hal memberikan bantuan tenaga. Hanya 9,43 persen masyarakat yang tidak pernah memberikan bantuan tenaga dalam proses pembangunan desa. Sementara itu, bentuk keterlibatan masyarakat yang paling rendah adalah dalam memberikan material bangunan yang hanya 37,74 persen yang berarti bahwa sebanyak 62,26 persen responden tidak berpartisipasi.

Lebih jauh, Tabel 4 di atas juga menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan program dana desa memenuhi prinsip partisipatif dan demokratis.

Dikatakan demikian karena pelibatan masyarakat dari berbagai unsur seperti para petani dan nelayan sebagai kelompok marginal, juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan misalnya dalam pembuatan jalan permukiman dan pembangunan tambatan perahu di pesisir pantai Desa Tamalate. Selain itu, dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa juga memprioritaskan bidang pemberdayaan masyarakat. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok tani dan nelayan, kelompok perempuan, masyarakat miskin, dan kegiatan kepemudaan. Fakta ini menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan Desa Tamalate memenuhi prinsip pemberdayaan dan kaderisasi. Dikatakan demikian karena pemerintah desa telah berupaya memberikan kekuatan atau *power* kepada masyarakatnya (*empowering*), dan pada saat yang sama pemerintah desa telah berupaya memberikan peluang kepada masyarakat di Desa Tamalate untuk bisa berkembang (*enabling*). Ini ditunjukkan dengan pelaksanaan program dana desa dengan membangun Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan peningkatan kapasitas bagi kader-kadernya, pembangunan drainase, perbaikan jalan tani, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan pembangunan tersebut pemerintah desa menggunakan tenaga kerja yang berasal dari desanya sendiri. Sebanyak 97,57 persen dari 265 responden memberikan jawaban ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan pembangunan desa.

Indikator lainnya dari pelaksanaan program dana desa dalam penelitian ini adalah pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hasil-hasil pembangunan desa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti rumah ibadah, Posyandu, gedung pendidikan anak usia dini, tambatan perahu, drainase, pengelolaan pasar desa, dan jalan antar pemukiman. Semua responden merasa bertanggungjawab dan berupaya untuk memanfaatkan serta melestarikan hasil-hasil pembangunan di desa.

Tingkat Kohesi Sosial

Kohesi sosial dapat dipahami sebagai kesatuan, keutuhan dan kepaduan dalam suatu upaya agar anggota kelompok tetap bertahan di dalam suatu komunitas. Kohesi sosial sebagai perasaan “we feeling” yang mempersatukan setiap anggota menjadi satu bagian (Myres, 2014: 280). Penelitian ini menggunakan empat indikator dalam menganalisis tingkat kohesi sosial, sebagaimana diungkapkan oleh Chavis *et al.* (2008: 3), yaitu *Reinforcement of Needs* (pemenuhan kebutuhan),

Tabel 4. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Tamalate

No	Bentuk Keterlibatan	Pilihan Jawaban		Persentase	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Memberikan Saran	223	42	84,15	15,85
2	Memberikan Solusi Permasalahan	135	130	50,94	49,06
3	Memberikan Material Bangunan	100	165	37,74	62,26
4	Bantuan Tenaga	240	25	97,57	9,43

Sumber: Data Primer, 2017

Membership (keterlibatan sebagai anggota komunitas), *Influence* (memberikan pengaruh) dan *Shared Emotional Connection* (berbagi kontak emosional). Hasil penelitian terhadap keempat indikator tersebut, ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5 di atas menjelaskan bahwa kohesi sosial masyarakat Desa Tamalate termasuk tinggi karena semua memberikan nilai di atas 90 persen. Keempat komponen indikator *sense of community* merepresentasikan tingkat kohesi sosial dalam masyarakat di Desa Tamalate yakni pemenuhan kebutuhan, keterlibatan anggota, memberikan pengaruh, dan berbagi kontak emosional. Indikator yang memiliki nilai paling tinggi adalah berbagi kontak emosional yang mencapai 100 persen. Sementara indikator memberikan pengaruh juga memiliki nilai yang tinggi tetapi dengan jumlah responden yang lebih rendah yakni 94,34 persen. Fakta ini menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Tamalate memiliki rasa komunitas yang kuat dan memiliki keterikatan yang tinggi antara satu dengan yang lain. Walaupun diketahui bahwa untuk indikator memberikan pengaruh diyakini hanya dimiliki oleh beberapa responden. Dikatakan demikian karena beberapa responden meyakini bahwa ada tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh di masyarakatnya.

Pemenuhan kebutuhan mencakup komunitas dapat memenuhi kebutuhan anggota dan komunitas, mereka memiliki perasaan "*we feeling*" yang mempersatukan setiap anggota, memiliki nilai-nilai yang dibagi bersama, serta mempunyai kesamaan dalam kebutuhan dan mengejar tujuan hidup yang sama. Sebanyak 98,11 persen responden memiliki rasa komunitas dalam hal pemenuhan kebutuhan yang tinggi. Ini disebabkan oleh keterikatan masyarakat yang tinggal dalam satu desa dan sudah hidup bersama sejak nenek moyangnya terdahulu. Mereka memiliki keterikatan darah antara satu keluarga dengan keluarga yang lain.

Keterlibatan anggota dalam komunitas dapat dilihat dari munculnya saling percaya diantara warga, mengenal satu sama lain, menggunakan banyak waktu dan tenaga untuk menjadi bagian dari warga masyarakat desa. Selain itu, keterlibatan anggota dapat juga dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan desanya, mulai dari tahapan perencanaan pembangunan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan desa. Tabel 4 menunjukkan sebanyak 97,57 persen responden memberikan bantuan tenaga dalam proses

pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini dapat dipahami karena mereka adalah warga asli yang mendiami desanya dan membutuhkan pembangunan di desanya.

Selanjutnya, memberikan pengaruh adalah kemampuan anggota komunitas untuk memengaruhi anggota komunitas lainnya. Sebanyak 94,34 persen dari 265 responden yang memiliki pengaruh pada kondisi lingkungan. Sedangkan 5,66 persen lainnya merasa tidak memiliki pengaruh pada kondisi lingkungan karena mereka menganggap ada warga masyarakat yang ditokohkan dapat memberikan pengaruh kepada lingkungan di komunitasnya. Responden yang merasa memiliki pengaruh terhadap kondisi lingkungannya karena sering memberikan saran atau masukan kepada anggota masyarakat yang lain atau kepada pemerintah desa, memberikan solusi pemecahan masalah dan bahkan diantara mereka merasa memengaruhi keberhasilan pembangunan desanya karena mampu memberikan bantuan material dalam pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.

Berbagi kontak emosional adalah anggota-anggota komunitas menjalani dan menikmati kebersamaan di dalam komunitas dan berbagi kejadian penting bersama. Berbagi kontak emosional dapat dilihat dari anggota sering berkumpul dengan anggota lainnya, merasa sebagai milik masyarakat dan sebagai anggota dari masyarakat desa, serta mereka lebih suka tinggal di desa Tamalate dibandingkan dengan di tempat lain dan tidak bermaksud pindah dari desanya. Sebesar 100 persen responden mengakui bahwa mereka telah memiliki kontak emosional yang tinggi. Mereka meyakini bahwa orang-orang yang tinggal di desa Tamalate saling memahami, saling menghormati, dan saling membantu dalam rangka mewujudkan desanya sebagai tempat kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Mereka saling percaya dan membagi perasaan suka satu sama lainnya. Bahkan setiap ada acara yang dilaksanakan dengan sukarela mereka ikut, seperti melayat, pernikahan, sunatan, pengajian, dan yang lainnya, termasuk kegiatan yang diorganisir oleh pemerintah desa, misalnya sosialisasi, musyawarah dusun, penggalan gagasan, musyawarah desa, musrenbang desa, kegiatan kerja bakti dan kegiatan sosial lainnya.

Impikasi Program Dana Desa Terhadap Kohesi Sosial.

Model *summary* hasil analisis program SPSS versi 20 menjelaskan nilai koefisien korelasi (R) adalah 0.547 dan R Square sebesar 0.300. Ini menjelaskan bahwa 30

Tabel 5. Persentase responden berdasarkan tingkat kohesi sosial

Kategori	Pemenuhan Kebutuhan		Keterlibatan Anggota		Memberikan Pengaruh		Berbagi Kontak Emosional	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Ya	260	98,11	254	95,85	250	94,34	265	100,00
Tidak	5	1,89	11	4,15	15	5,66	0	0,00
Total	265	100,00	265	100,00	265	100,00	265	100,00

Sumber: Data Primer, 2017

persen variabel kohesi sosial dipengaruhi oleh variabel pelaksanaan program dana desa. Sementara itu, koefisien korelasi (R) nilainya sebesar 0,547 yang berarti hubungan antar variabel berada dalam kategori sedang. Model linear antara variabel pelaksanaan program dana desa dengan variabel kohesi sosial dijelaskan oleh nilai sig (0.000) < alpha (0.05) maka model linear antara variabel pelaksanaan program dana desa dengan variabel kohesi sosial signifikan. Selanjutnya koefisien regresi dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Koefisien Regresi Hasil Analisis Program SPSS versi 20.

Model	B	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Std. Error	Beta			
1	(Constant)	6.017	.851		7.072	.000
	Pelaksanaan Program Dana Desa	.539	.051	.548	10.625	.000

Sumber: Hasil Olah Data 2017

Tabel 6 tersebut menunjukkan bahwa koefisien regresi dari persamaan linear $Y = 6.017 + 0.539X$. Koefisien korelasi (0.539), ini menjelaskan bahwa pelaksanaan program dana desa berimplikasi positif terhadap kohesi sosial masyarakat. Demikian juga untuk nilai Sig (0.000) < alpha (0.05) menjelaskan bahwa pengaruh variabel pelaksanaan program dana desa terhadap kohesi sosial adalah signifikan. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini terbukti bahwa ada implikasi positif pelaksanaan program dana desa terhadap kohesi sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program dana desa ternyata dapat memprediksi dalam arah korelasi positif tingkat kohesi sosial masyarakat di Desa Tamalate. Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Faturochman (2006: 95) bahwa kohesi sosial semakin kuat jika interaksi masyarakat didominasi kerjasama bukan persaingan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Daraba (2017: 56) bahwa program dana desa berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Daraba (2017:56) dalam penelitiannya yang melibatkan 55 partisipan warga desa menunjukkan bahwa program dana desa memberikan kontribusi positif terhadap tingkat partisipasi masyarakat mulai dari memberikan saran, kritik, bantuan, atau pun terlibat aktif dalam proses pelaksanaan program. Selain itu, temuan penelitian ini juga sejalan penelitian Peters *et al.* (2010) bahwa kohesi sosial dapat dimulai dengan interaksi sosial yang bersifat informal dan sepiantas lalu (*cursory*), misalnya mengobrol singkat, atau melalui sapaan "halo". Melalui interaksi sosial yang demikian itu, orang-orang merasa disambut, terhubung (*connected*) dengan warga rumah, dan sekaligus merasa seperti di rumah (*feel at home*).

Kohesi sosial masyarakat desa membuat anggota tidak bersifat individualis serta mampu menciptakan aksi-

aksi kolektif dari masyarakat. Aksi kolektif masyarakat dan kekokohan kelembagaan masyarakat desa menjadi poin penting demi terciptanya kohesi sosial masyarakat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan program dana desa mulai pada tahap persiapan, musyawarah dusun, rembug desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang desa), pelaksanaan pembangunan desa, sampai kepada pelestarian dan pemanfaatan hasil-hasil pemanfaatan pembangunan desa merupakan aksi kolektif masyarakat yang mampu merekatkan kohesi sosial masyarakat di Desa Tamalate. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Forrest *et al* (2001) di Amerika Serikat menyatakan bahwa kohesi sosial di tingkat masyarakat dapat berasal dari bentuk dan kualitas interaksi sosial di tingkat lokal dan keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan kohesi sosial. Lebih jauh, Forrest *et al* (2001) mengatakan bahwa dalam model masyarakat modern, kohesi sosial dipandang sebagai proses *bottom up*.

Pengembangan kohesi sosial dapat berupa menjembatani kerjasama, rasa saling memahami, dan penciptaan kepentingan bersama, dapat menjadi dasar untuk mekanisme pencegahan konflik dan mempertahankan keutuhan yang berkelanjutan. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program dana desa yang penggunaannya dikuasakan kepada kepala desa selaku kuasa pengguna anggaran di desanya, dapat mengorganisir masyarakatnya dalam kelompok-kelompok kegiatan sebagai wujud nyata dari kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sekaligus menjadi jembatan kerjasama dan rasa saling memahami serta mampu menciptakan kepentingan bersama di desanya. Artinya bahwa kohesi sosial tercipta karena dengan pelaksanaan program dana desa masyarakat memiliki kemampuan untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.

SIMPULAN

Pelaksanaan program dana desa berimplikasi positif terhadap kohesi sosial. Berdasarkan koefisien determinasi (R^2), kontribusi pelaksanaan program dana desa terhadap tingkat kohesi sosial adalah 30 persen. Koefisien korelasi (R) sebesar 0,547 yang berarti hubungan antar variabel berada dalam kategori sedang. Sementara itu, nilai koefisien regresi sebesar 0,539 dan nilai sig= 0,000 yang lebih kecil dari alpha 0,05 masing-masing menunjukkan bahwa pelaksanaan program dana desa berimplikasi positif dan signifikan terhadap kohesi sosial. Pelaksanaan program dana desa mulai pada tahap persiapan, musyawarah dusun, musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, sampai kepada pelestarian dan pemanfaatan hasil-hasil pemanfaatan pembangunan desa merupakan aksi kolektif masyarakat yang mampu merekatkan kohesi sosial masyarakat. Kohesi sosial tercipta seiring dengan

munculnya rasa suka diantara anggota masyarakat dan interaksi yang terjadi didominasi kerjasama serta mempunyai tujuan yang terkait satu dengan lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini terselenggara atas biaya swadana dari tim peneliti. Namun demikian tidak akan terlaksana kalau tidak mendapat izin dari pimpinan. Untuk itu tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Direktur IPDN Kampus Sulawesi Selatan atas izin yang diberikan guna terlaksananya penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak pemerintah Kabupaten Takalar. Demikian juga ucapan terima kasih kepada masyarakat di Desa Tamalate yang menjadi partisipan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Chavis, D.M., Lee, K.S. & Acosta, J.D. (2008). The Sense of Community (SCI) Revised: The Reliability and Validity of the SCI-2. Paper presented at the 2nd International Community Psychology Conference, Portugal: Lisboa.
- Daraba, D. (2017). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora*, 19, (1), 52-58.
- Faisal, M. (2017). Modal Sosial Usahawan Pendetang di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. *Sosiohumaniora*, 19, (1), 70-76.
- Faturochman, (2006). Pengantar Psikologi Sosial (Introduction to Social Psychology), Yogyakarta: Pustaka.
- Forrest, R. & Ade, K. (2001). Social Cohesion, Social Capital, and the Neighbourhood?. *Urban Studies*, 38, (12), 2125-2145.
- Johnson, D.P. (1986). Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Jilid 1, Jakarta: PT. Gramedia.
- Kaslan, B. (2014). Kohesi Sosial. [http://www.scribd.com/doc/250553704/Kohesi Sosial Komunitas#Scribd](http://www.scribd.com/doc/250553704/Kohesi-Sosial-Komunitas#Scribd).
- Kulig, J.C., Edge, D.S., Dana, S.E. & Joyce, B. (2008). Understanding Community Resiliency in Rural Communities Through Multidimethod Research. *Journal of Rural and Community Development*. <http://www.jrcd.ca/viewarticle.php?id=181>
- Korten, D.C. (1988). Penyusunan Program Pembangunan Pedesaan: Pendekatan Proses Belajar Mengajar dalam David C Korten dan Syahrir, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Noorkamilah. (2008). Kohesivitas Remaja Islam di Kampung Sayidan, Prawirodirjan, Yogyakarta. [http://digilib.uinsuka.ac.id/8368/1/Noorkamilah %20kohesivitas%20Remaj%20Islam%20di%20Kampung%20Sayidan,%20Prawirodirjan,%20Yogyakarta.pdf](http://digilib.uinsuka.ac.id/8368/1/Noorkamilah%20kohesivitas%20Remaj%20Islam%20di%20Kampung%20Sayidan,%20Prawirodirjan,%20Yogyakarta.pdf).
- Nain, U. (2016). Sosiologi Pembangunan Desa, Jawa Barat. Sumedang: IPDN Jatinangor.
- , (2017). Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peters, K., Elands, B. & Buijs, A. (2010). Social Interactions in Urban Parks: Stimulating Social Cohesion?. *Urban Forestry & Urban Greening*, 9, (2), 93-100.
- Primadona, (2001). Peran Penting Trust sebagai Energi Pembangunan Masyarakat. <http://download.Portalgaruda.org/article.php?article=58207&val=4377>
- Ramdhani, N., & Martono. (1996). Kohesivitas pada Masyarakat Miskin. <http://ilib.ugm.ac.id.ezproxy.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=4232>
- Soekanto, S. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2003). Statistika Untuk Penelitian, Bandung: Penerbit: CV Alfabeta.
- Trihendradi, C. (2012). Step by Step SPSS 20 Analisis Data Statistik. Yogyakarta: Penerbit Andi.

ASAS HUKUM BAGI ORANG TERKENAL UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN *CYBERSQUATTER* DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG MEREK DI INDONESIA

Muhamad Amirulloh, Rika Ratna Permata, dan Helitha Novianty Muchtar

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
E-mail: muhamad.amirulloh@unpad.ac.id

ABSTRAK, Pengaturan tentang hak menggugat bagi orang terkenal pada UU Merek dan Indikasi Geografis terhadap pendaftar serta penggunaan nama sebagai nama laman domain internet tanpa ijin (*cybersquatter*) belum ada, padahal materi ini telah diamanahkan atau diperintahkan oleh Pasal 27 ayat (1) UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016. Melalui metode yuridis normatif dan metode komparatif dengan *Anticybersquatting Consumer Protection Act 1999 of USA*, artikel ini mencoba memberikan landasan pemikiran perlunya perubahan terhadap ketentuan UU Merek terkait kewenangan atau hak orang terkenal dalam menggugat para *cybersquatters*, apabila nama orang terkenal tersebut telah didaftarkan dan dilindungi pula sebagai merek. Asas hukum *legitima persona stands in judicio* dapat digunakan untuk merevisi UU Merek dengan menambahkan ketentuan hak menggugat bagi orang terkenal terhadap pelaku yang menggunakan namanya sebagai nama domain internet.

Kata kunci: hak menggugat; orang terkenal; *cybersquatting*; harmonisasi; nama domain.

LEGAL PRINCIPLES FOR FAMOUS PERSON TO SUE *CYBERSQUATTER* REGARDING TRADEMARK LAW IN INDONESIA

ABSTRACT, Law Number 20 Year 2016 concerning Trademark and Geographical Indication has not been regulated famous person's right to sue to against *cybersquatter*, even though it has been self-directed or mandated by the article 27 paragraph 1 ITE Act. Through normative juridical and comparative methods with the *Anticybersquatting Consumer Protection Act 1999 of the USA*, this article attempts to provide a rationale reason to amend the Trademark Law provisions about the famous person's right in suing *cybersquatters*, if the name of such person has been registered and protected as trademark. The legal principle of the legality of *persona stands in judicio* may be used to revise the Trademark Law by adding the provision of the right to sue for a famous person against a perpetrator who uses his or her name as domain name.

Key words: rights of sue; famous person; *cybersquatting*; harmonisation; domain name.

PENDAHULUAN

Daya tarik suatu laman internet biasanya dapat dilihat dari nama laman internet tersebut. Semakin unik dan menarik, maka laman internet tersebut akan semakin sering dikunjungi (*hits*). Salah satu obyek nama domain yang sangat menarik perhatian pengguna internet adalah penggunaan terhadap nama orang terkenal, karena dengan daya tariknya yang kuat serta besar terhadap masyarakat mengenai informasi yang berkaitan dengan seluk beluk *public figure* tersebut, ini merupakan salah satu bentuk strategi bisnis pada era millenium, yang paling jitu adalah dengan menggunakan nama laman domainnya sebagai sarana terhadap perdagangan secara elektronik (*electronic commerce*). mengingat kemampuannya dalam mempromosikan hasil produk yang menjangkau ke berbagai penjuru dunia dalam waktu yang sangat singkat. (Amirulloh, 2017). Dengan keunggulan teknis dan ekonomis suatu nama domain tersebut, maka tingkat kerugian yang ditimbulkan akan sangat besar apabila terjadi pelanggaran kepemilikan nama domain, dalam hal ini apabila digunakan nama orang terkenal oleh pihak lain secara ilegal sebagai nama domain.

Praktik dan kasus suatu pelanggaran terhadap nama domain orang terkenal sudah banyak terjadi, misalnya di

Indonesia ada kasus nama domain peterfsaerang, gusdur, dan megawati. Kasus di luar negeri antara lain penggunaan nama julia roberts dan Stevie wonder. Seiring dengan maraknya kasus pelanggaran tersebut, dipastikan banyak orang terkenal mendapatkan suatu kerugian secara ekonomi dan mengakibatkan terhadap penggunaan namanya sebagai nama domain dalam melakukan aktivitas pada dunia maya (*cyberspace*), Kerugian lain yang didapatkan adalah berkurang atau bahkan menghilangkan terhadap potensi keuntungan, bahkan yang lebih parah lagi dapat merusak reputasi orang terkenal tersebut. Dari kejadian mengenai penggunaan nama orang terkenal sebagai nama laman domain internet, sehingga berdampaknya kepada hak eksklusif dan pada kesempatan dalam berbisnis di dunia internet. (Amirulloh, 2016).

Telah dikualifikasinya perbuatan pendaftaran terhadap nama orang terkenal sebagai nama laman domain internet dan tanpa seijin dari orang terkenal yang dipakai merupakan suatu perbuatan melawan hukum dalam Pasal 23 ayat (2) UU ITE (Amirulloh, 2016), kenyataan tentang penamaan orang terkenal yang telah didaftarkan sebagai merek sebelum terjadinya suatu pelanggaran yang mengarah ke *cybersquatting*, menimbulkan pemahaman akan perlunya pengaturan dalam UU Merek tentang hak menggugat bagi orang terkenal tersebut terhadap pelaku *cybersquatting*.

Tabel 1. Jumlah Nama Domain Terdaftar di Indonesia Jan 2017 - Juli 2018

Bulan	Tahun	Total
Jan	2016	163,324
Feb	2016	188,228
Mar	2016	188,790
Apr	2016	189,883
May	2016	189,949
June	2016	194,448
July	2016	201,566
Aug	2016	206,424
Sep	2016	225,772
Oct	2016	231,379
Nov	2016	1,199,045
Dec	2016	1,207,550
Jan	2017	1,212,634
Feb	2017	1,212,868
Mar	2017	1,217,190
Apr	2017	1,215,232
May	2017	1,202,359
June	2017	1,203,361
July	2017	1,207,718

Sumber : Pandi.or.id, Agustus 2017

UU Merek telah memiliki pengaturan yang melarang penggunaan nama dan/atau foto orang terkenal untuk didaftarkan sebagai merek. Dengan demikian, UU Merek telah memberikan perlindungan terhadap orang terkenal. Perlindungan penggunaan nama orang terkenal tersebut perlu dilakukan harmonisasi dengan ketentuan UU ITE yang memberikan perlindungan terhadap nama orang terkenal dari penggunaannya sebagai nama domain internet.

Pasal 38 ayat (1) UU ITE memberikan dasar hukum bagi pemilik merek untuk melakukan gugatan perdata terhadap *cybersquatter* dan *typosquatter*. Namun demikian, ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan juga menyatakan bahwa gugatan perdata dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini menyebabkan perlunya pengkajian lebih lanjut terhadap UU Merek sebagai pelengkap gugatan ganti rugi mengingat *cybersquatter* dan *typosquatter* sangat terkait dengan merek.

Masalah yang hendak dikaji secara umum adalah persoalan tentang keberlakuan rezim hukum merek (sebagai rezim hukum dunia nyata) dalam mengatur penggunaan nama domain di internet (dunia maya, *cyberspace*). Secara spesifik permasalahan yang hendak dikaji adalah tentang asas-asas hukum acara perdata yang dapat digunakan untuk merumuskan kewenangan/ hak orang terkenal untuk menggugat *cybersquatter* pada UU Merek.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang merupakan pendekatan deduktif.

Asas Hukum Bagi Orang terkenal untuk Mengajukan Gugatan *Cybersquater* dikaitkan dengan Undang-Undang Merek di Indonesia (Muhamad Amirulloh, Rika Ratna Permata dan Helitha Novianty Muchtar)

Dalam hal ini dilakukan pengkajian terhadap UU ITE dan UU Merek terkait hak menggugat orang terkenal akibat *cybersquatting* yang dilakukan oleh pelaku. Metode yuridis komparatif dilakukan dengan mengkaji permasalahan tersebut dalam pengaturan negara lain, dalam hal ini *Anticyber squatting Consumer Protection Act 199 of USA*. Deskriptif analitis digunakan sebagai spesifikasi penelitian, yaitu dengan mengemukakan fakta tentang penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain, serta kewenangan menggugat dari orang terkenal berdasarkan ketentuan UU ITE dan UU Merek yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum gugatan ganti rugi.

Tahap penelitian meliputi penelitian dengan studi kepustakaan. Sumber data penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum yang mengikat sebagai bentuk bahan hukum primer, serta instrumen hukum internasional sebagaimana tersebut dalam metode pendekatan, dan bahan hukum tersier yang berupa ensiklopedia dan berbagai artikel di media cetak dan elektronik. Guna memperoleh landasan teoretis digunakan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data terhadap data sekunder. Penelaahan terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan analisis kualitatif sehingga diperoleh simpulan terhadap permasalahan yang dihadapi berdasarkan asas hukum dan norma hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu masyarakat yang hidup dalam tatanan sosial selalu memiliki dinamika tersendiri. Hukum hadir dalam masyarakat dan mencoba untuk menjawab beberapa dinamika yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Pengertian hukum yang memadai, dengan demikian, akan mencakup juga unsur lembaga dan unsur proses, selain unsur asas dan unsur kaedah atau norma yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, yang justru akan mampu mewujudkan berlakunya asas dan norma itu sebagai suatu kenyataan (Kusumaatmadja, 2002). Menurut Rahmawati, berdasarkan definisi hukum tersebut maka untuk merealisasikan berlakunya atau adanya hukum menjadi kenyataan ketika terjadi pelanggaran, maka dibutuhkan hukum formil atau hukum acara (Rahmawati, 2017).

Seiring dengan berjalannya waktu maka perkembangan teknologi yang semakin maju pula, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memerlukan perangkat hukum formil atau hukum acara, disamping harus pula ditunjang oleh perangkat hukum materiil. Oleh karenanya, diperlukan adanya suatu hukum perdata formil (hukum acara perdata) yang progresif juga terhadap perkembangan TIK, yang menggantikan hukum perdata formil yang ada pada saat ini (Fakhriah, 2009).

Dalam era TIK, dengan keberadaan UU ITE memberikan efek domino bagi undang-undang lain yang

belum sejalan dan belum mengikuti serta mengakomodasi perkembangan TIK di masyarakat Indonesia dan dunia. Harmonisasi ini bertujuan agar ketentuan yang telah diatur dalam UU ITE dapat ditindaklanjuti sehingga menjadi dasar hukum yang jelas dan pasti bagi kegiatan masyarakat terkait pemanfaatan TIK (Amirulloh & Suryanti, 2015). Lebih jauh lagi UU ITE yang ada saat ini merupakan regulasi yang bersifat “payung”, sehingga membutuhkan adanya “penerimaan tongkat estafet” regulasi lainnya untuk mengatur hal-hal yang bersifat spesifik, sehingga tercipta harmonisasi hukum terkait pemanfaatan TIK. Dalam hal *cybersquatting*, diperlukan harmonisasi UU Merek dengan UU ITE, baik dari segi hukum materil maupun hukum formilnya.

Menurut pandangan Mertokusumo, (1998), hukum perdata formil (hukum acara perdata) merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur pentaatan terhadap hukum perdata materil, dengan perantara hakim. Hukum perdata formil ini pada praktiknya mencakup cara-cara tentang bagaimana mengajukan kepada pengadilan tuntutan atas suatu hak, cara-cara tentang bagaimana pemeriksaan kebenaran (formil) di pengadilan, serta cara-cara bagaimana pengadilan memutuskan perkara, termasuk pula cara-bagaimana pelaksanaan dari putusan pengadilan tersebut.

Selama hukum tersebut dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua pihak, maka tidak akan terdapat masalah. Permasalahan akan terjadi ketika ada pihak yang melanggar hukum atau melanggar hak orang lain. Disinilah terdapat sengketa yang harus diselesaikan secara hukum agar data tercipta keteraturan, ketertiban, kepastian hukum, keadilan ataupun kemanfaatan (Rahmawati, 2017).

Di dalam hukum acara perdata dikenal para pihak yang memiliki kaitan langsung dalam suatu perkara, inisiatif dalam hukum perdata formil, yaitu perihal tentang pelaksanaan untuk mempertahankan hak, secepatnya diputuskan oleh pengugat yaitu orang yang merasa bahwa haknya mereka dilanggar (Sutantio & Oeripkartawinata, 1997).

Sebagai suatu hukum, hukum acara perdata tidak hanya berkaitan dengan kaidah saja, melainkan terdapat asas-asas yang menjiwai atau menjadi latar belakang dari suatu peraturan atau kaidah. Asas hukum sendiri diartikan Paul Scholten, sebagai suatu dasar-dasar pemikiran yang terdapat pada suatu sistem hukum yang bentuk konkretnya adalah berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Subhan, 2008).

Dalam hukum acara perdata, hakim menjalankan kewenangannya untuk mencari kebenaran formal dan keadilan didasari undang-undang maupun ketentuan hukum yang tidak tertulis, serta dapat saja menerapkan yurisprudensi dalam memutus sengketa perdata yang dihadapinya. Hakim perdata dalam mencari kebenaran formal adalah menyelidiki kebenaran dari peristiwa-peristiwa yang dikemukakan di depan persidangan, sepanjang dikehendaki oleh para pihak yang terkait dalam

masalah. Hakim perdata tidak boleh mengabdikan hal-hal yang melebihi dari apa yang digugat atau diminta oleh penggugat (*ultra petita*) sebagaimana ditentukan pada Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 178 ayat (3) HIR, dan Pasal 189 ayat (2) RBg (Panggabean, 2012 : 75). Hukum acara perdata menganut salah satu prinsip yang utama bahwa inisiatif berperkara adalah datang dari para pihak. Artinya, apabila terdapat pihak yang merasakan/mengalami haknya dilanggar atau merasa dirugikan, maka pihak tersebut berhak untuk membuat dan mendaftarkan ke pengadilan gugatannya untuk menuntut haknya tersebut.

Pengadilan dipercaya sebagai tempat yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak penggugat yang mengajukan gugatan/tuntutan hak. Namun demikian, pihak yang akan dilindungi adalah pihak yang benar-benar memiliki kepentingan atau yang benar-benar mengalami kerugian. Hanya pihak yang benar-benar memiliki kepentingan yang layak dan cukup serta adanya dasar hukum yang mengatur kepentingannya itu saja yang akan diterima gugatannya atau permohonannya (Mertokusumo, 1998). Dalam hal ini, UU Merek perlu segera mengatur kembali perlindungan hak merek dari penggunaannya sebagai nama domain. Hal tersebut sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum serta sebagai upaya mewujudkan harmonisasi hukum antar UU Merek dengan UU ITE yang terlebih dahulu telah mengatur perlindungan hak merek dari *cybersquatting*.

Prinsip "*legitima persona stands in judicio*" berarti bahwa pihak yang berkeyakinan bahwa dia memiliki hak dan ingin mempertahankan haknya memiliki kewenangan untuk bertindak selaku pihak/para pihak dalam suatu perkara di Pengadilan. Prinsip ini dapat dijadikan dasar bagi orang terkenal untuk menuntut haknya agar namanya atau mereknya tidak digunakan sebagai nama domain internet oleh *cybersquatter*. Hal ini dikarenakan bahwa orang terkenal memang memiliki hak atas namanya dan/atau mereknya, serta memiliki hak untuk menuntut hak atas nama dan/atau mereknya tersebut dari penggunaannya oleh *cybersquatter*. Adanya suatu kemampuan dalam bertindak (*handelingsbekwaamheid*) sebagai suatu pihak tersebut adalah inti yang sangat penting daripada suatu kewenangan hukum atau kewenangan untuk menjadi pendukung hak (*rechtsbevoegdheid*) (Mertokusumo, 1998: 53). Dalam hal ini, ketentuan UU Merek harus pula mengatur hak atau kewenangan orang terkenal pemilik nama dan/atau merek untuk menggugat ganti rugi perdata terhadap pelaku *cybersquatting*.

Pada dasarnya dasar gugatan dalam perkara perdata bersumber pada salah satu dari kondisi wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi karena adanya pelanggaran terhadap perjanjian diantara para pihak yang berperkara. Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah, "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut".

Tuntutan terhadap pelanggaran terhadap nama domain yang diatur di dalam UU ITE merupakan tuntutan yang didasarkan pada adanya perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, rumusan pengaturan dalam UU Merek terkait dilindunginya hak merek berupa nama orang terkenal dari perbuatan *cybersquatting* harus pula ditegaskan kembali, sebagai sambutan tongkat estafet atau wujud harmonisasi hukum UU Merek dengan UU ITE, demi terciptanya kepastian hukum.

Prinsip lainnya yang terkait adalah "*point d interest, point d action*", yaitu pihak yang dapat mengajukan tuntutan hak/hukum adalah pihak yang memiliki kepentingan yang layak dan cukup. Dikualifikasinya *cybersquatting* terhadap merek berbentuk nama orang terkenal sebagai suatu PMH dalam UU ITE telah cukup menjadi dasar hukum bagi UU Merek melakukan kualifikasi yang sama, sehingga akan menimbulkan "kepentingan hukum" yang cukup bagi orang terkenal pemilik nama dan/atau pemilik merek tersebut untuk melakukan tuntutan atau gugatan ganti rugi perdata kepada pelaku *cybersquatting* di Indonesia.

Dalam hukum acara dikenal kompetensi pengadilan atau kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara. Di dalam hukum acara perdata dikenal pula kewenangan-kewenangan, yaitu (Sutantio dan Oeripkartawinata, 1997):

- a. Kewenangan mutlak/absolut, yaitu kewenangan yang terkait dengan pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, yang dilihat dari adanya macam-macam badan peradilan (*attributie van rechtsmacht*). Kewenangan mutlak/absolut berdasarkan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah terdiri dari kewenangan peradilan umum, kewenangan peradilan agama, kewenangan peradilan tata usaha negara, dan kewenangan peradilan militer. Merujuk pada ketentuan Pasal 23 *jis*. Pasal 38 dan 39 UU ITE, maka yang dimaksud dengan mengajukan gugatan adalah dialamatkan pada kompetensi absolut peradilan umum, yaitu ke pengadilan negeri. Sementara itu, gugatan atas nama domain yang terdaftar sebagai merek diajukan ke kompetensi mutlak yang sama yaitu ke peradilan umum, hanya diajukan ke peradilan khusus dibawah peradilan umum, yaitu pengadilan niaga sebagaimana diatur di dalam UU Merek.
- b. Kewenangan relatif, yaitu kewenangan yang mengatur pembagian kewenangan untuk mengadili antara pengadilan yang serupa, yang antara lain tergantung dari fakta-fakta hukum antara lain berupa tempat tinggal tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR (*distributie van rechtsmacht*). Asas *Actor Sequitur Forum Rei* menyatakan bahwa yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat, berikut dengan pengecualian-pengecualianya berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2), Pasal 118 ayat (3) dan Pasal 118 ayat (4) HIR.

Terkaitan dengan perlindungan terhadap nama orang terkenal dari *cybersquatting*, diatur pada Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek yang menyatakan bahwa, "suatu permohonan ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak". Dalam kaitannya dengan *cybersquatting*, maka sudah menjadi layak dan patut apabila nama atau merek orang terkenal tersebut juga dilindungi dari perbuatan *cybersquatting* dalam UU Merek.

Dalam rangka menegakkan hukum merek, khususnya untuk memberikan hak atau kewenangan kepada pemilik merek untuk melakukan suatu tindakan hukum, langkah yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan ganti rugi perdata, sebagaimana diatur pada Pasal 83 ayat (1) UU Merek yang menyatakan bahwa, "Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti dan/atau; b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut".

Dalam kaitannya dengan pelanggaran hak merek yang digunakan sebagai nama domain internet, ketentuan ini seharusnya perlu ditambahkan suatu ketentuan yang menyatakan bahwa pemilik merek berhak menggugat para pelanggar *cybersquatter*, hal ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum atas hak menggugat, sehingga ketentuan penyelesaian sengketa dalam UU Merek ini berjalan secara harmonis sesuai dengan Pasal 38 UU ITE.

Selain melalui Pengadilan Niaga, penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran merek juga dapat menggunakan metode penyelesaian sengketa alternatif maupun arbitrase. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 93 UU Merek, yang menyatakan bahwa, "Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 83, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa". Ketentuan ini sudah sejalan atau harmonis dengan Pasal 39 ayat (1) UU ITE.

Penarapan dari UU tentang Merek yang lebih progresif dan responsif terhadap perlindungan hukum bagi orang yang terkenal dapat dilihat dari perbuatan hukum berupa pelanggaran merek yang digunakan sebagai nama domain (*cybersquatting*), maka studi kegiatan berupa perbandingan pengaturan hukum Negara lain mengenai kasus-kasusnya perlu dilakukannya. Menurut Bogdan, (2010) dalam rangka pembuatan konsep regulasi atau kegiatan *de lege ferenda* lainnya, maka kegiatan evaluasi komparatif terhadap isu yang sama tetapi dengan solusi yang beragam dari negara-negara lain, dipandang sebagai suatu usaha yang akan sangat bermanfaat bagi negara perbandingan tersebut (Bogdan, diterjemahkan oleh Widiowatie, 2010).

Berdasarkan perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat melalui *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999*, pelanggaran nama domain dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran merek. Berdasarkan *Act* ini, orang terkenal dilindungi dari penggunaannya sebagai nama domain oleh *cybersquatter*, dengan memberikan dasar gugatan perdata berupa ganti rugi berikut besaran jumlah ganti rugi yang dapat diperoleh pemilik merek dari gugatan tersebut. Sebagai contoh kasus, Madonna Ciccone atau yang lebih terkenal dengan nama Madonna, seorang artis terkenal Amerika Serikat, juga pemilik merek “Madonna” telah memenangkan gugatan kepemilikan nama domain “Madonna.com” berdasarkan putusan panel *World Intellectual Property Organization’s (WIPO) Mediation and Arbitration Center*, Kasus nomor D2000-0847 (<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0847.html>, tanggal 12 Oktober 2000). Madonna telah memiliki hak merek atas namanya dengan bukti pendaftaran merek di Amerika Serikat Reg. No. 1,473,554 and 1,463,601.

SIMPULAN

Gugatan ganti rugi perdata dapat diajukan terhadap setiap pihak yang dirugikan atas pelanggaran nama domain sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 UU ITE *jis.* Pasal 38 UU ITE dan Pasal 39 UU ITE melalui pengadilan negeri (sesuai kompetensi relatif tergugat), selain menuntut pembatalan pendaftaran nama domain. Pihak yang mengajukan gugatan atas pelanggaran nama domain haruslah yang menderita kerugian dan memiliki kepentingan yang cukup, layak, dan kepentingan tersebut memiliki dasar hukum karena merekalah berhak untuk menuntut haknya atau membela kepentingannya yang dilanggar (*legitima persona stands in judicio, point d interest point d action*). Gugatan atas perbuatan melanggar hukum terhadap nama domain dari nama dan/atau merek orang terkenal sebagaimana diatur didalam UU Merek, dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga sesuai kompetensi relatif dari tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirulloh, M. & Suryanti, N. (2015). *Cybersquatting Terhadap Nama Orang Terkenal*, Bandung: Kalam Media.
- Amirulloh, M. (2016), Penggunaan Nama Kota Sebagai Nama Domain di Indonesia, *Sosiohumaniora*, 18, (2), 153-158.
- Amirulloh, M. (2017). Penggunaan Nama Kota Sebagai Nama Domain Di Indonesia, *Sosiohumaniora*, 19, (1), 8-17.
- Bogdan, M. (2010). Pengantar Perbandung Sistem Hukum. (D.S. Widiowatie, Penerj.) Bandung: Nusa Media.
- Departemen Komunikasi dan Informatika RI. (2007). Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Depkominfo.
- Fakhriah, E.L. (2009). Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata, Bandung: PT. Alumni.
- Kusumaatmadja, M. (2002). Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Cetakan Kedua, Bandung: Alumni.
- Mertokusumo, S. (1998). Hukum Acara Pedrada Indonesia, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Edisi Kelima, Penerbit Liberty
- Panggabean, H.P. (2012), Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia, Bandung: Alumni.
- Rahmawati, E. & Rachmainy, L. (2013). Tinjauan Yuridis Penjatuhan Putusan Verstek Dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia, Bandung: Laporan Hasil Penelitian DIPA BLU Unpad.
- Rahmawati, E. (2017). Beberapa Aspek Hukum Acara Perdata dalam Pelanggaran Nama Domain di Indonesia. Bandung: Makalah Pemandang untuk FGD penelitian tentang Kewenangan Orang Terkenal dalam Menggugat Cybersquatter di Indonesia.
- Subhan, H. (2008). Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan, Jakarta: Cetakan Ke-1, Kencana.
- Sutantio, R. & Oeripkartawinata, I. (1997), Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Cetakan VIII, CV Mandar Maju.
- WIPO Arbitration and Mediation Center. di unduh pada tanggal 15 September 2017. <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0847.html>

TATA KELOLA AKSELERASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

Simon Sumanjoyo Hutagalung

Jurusan Administrasi Negara, Universitas Lampung

E-mail: simon.sumanjoyo@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK, Perkembangan daerah otonom baru membutuhkan daya dukung tata kelola yang kuat agar dapat berakselerasi dengan daerah lainnya dalam membangun pendidikan. Tata kelola yang sinergis menghasilkan pengelolaan pendidikan yang berkapasitas baik. Penelitian yang dilakukan bertujuan mengidentifikasi kondisi existing, faktor yang mendorong kondisi pendidikan dan potensi kelembagaan dan hubungan antar lembaga yang dapat membangun suatu model. Penelitian kualitatif ini dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan *focus group discussion*. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu; (1). Kondisi existing sumber daya pendidikan masih menghadapi kuantitas sekolah yang belum memenuhi rasio nasional dan distribusi guru belum merata. Anggaran belum optimal dimiliki oleh Dinas Pendidikan, sehingga belum menghasilkan program yang dapat mengakselerasi pendidikan. (2). Faktor yang dominan mempengaruhi kondisi sumber daya pendidikan itu antara lain warisan kebijakan pendidikan yang tidak berhasil menciptakan pemerataan infrastruktur pendidikan serta kondisi daya dukung infrastruktur yang belum maksimal bagi terciptanya akselerasi pendidikan di wilayah tersebut. (3). Potensi kelembagaan dan hubungan antar lembaga terletak pada peran Dinas Pendidikan, Instansi pemerintah lainnya pada Kabupaten Pesisir Barat, pihak swasta/yayasan atau lembaga masyarakat serta instansi pendidikan yang ada di luar wilayah Pesisir Barat. Keseluruhan lembaga tersebut memiliki format keterlibatannya yang terjalin dalam suatu kerangka kerja yang diarahkan oleh Pemkab Pesisir Barat. Hubungan inilah yang membangun model tata kelola yang mengakselerasi penyelenggaraan pendidikan.

Kata kunci: kebijakan pendidikan; pemekaran daerah; tata kelola

GOVERNANCE OF EDUCATION ACCELERATION IN PESISIR BARAT REGENCY LAMPUNG PROVINCE

ABSTRACT, Development of new autonomous regions requires a strong carrying capacity of governance in order to accelerate with other regions in educational development. Synergistic governance will result an education management with good capacity. The research aimed to identify existing conditions, factors that encourage educational conditions and institutional potential and relationships between institutions that can build a model. This qualitative research in collecting data using interview, observation and focus group discussion. Data analysis is done qualitatively with interactive model. This research yields several conclusions; (1). Existing condition of educational resources still faces the quantity of schools that have not met the national ratio and the teacher distribution has not been evenly distributed. The budget has not optimally owned by education office, so it has not produced a program that can accelerate education. (2). Dominant factors influencing the condition of educational resources include the legacy of education policy that has not succeeded in creating equitable distribution of educational infrastructure and the condition of the carrying capacity of infrastructure that has not been maximized for the acceleration of education in the region. (3). Institutional and inter-institutional potential relationships in the Pesisir Barat District area lies in the role of the Education Office, other government agencies, private parties/ foundations or community institutions and educational institutions outside the Pesisir Barat region. The entire institution has its own format of engagement which is related in a framework directed by the Pesisir Barat Government. This relationship then builds a model of governance that accelerates the delivery of education.

Key words: education policy; regional expansion; governance

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia berada pada kondisi yang tertinggal dari negara tetangga. *Political and Economic Risk Consultant*, dalam survey tentang kualitas pendidikan, menyimpulkan bahwa Indonesia berada di urutan akhir dari 12 negara di Asia. Survey *World Competitiveness Year Book* pada tahun 2007 tentang daya saing pendidikan menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan 53 dari 55 negara yang disurvei. Implikasi dari kualitas pendidikan tersebut dapat dilihat dari *Human Development Index* Indonesia. *United Nation Development Programe* dalam HDI tahun 2007 menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ke 107 dari 177 negara yang disurvei. Di kawasan ASEAN, Indonesia menempati urutan ke 7 dari sembilan negara ASEAN (Syamsuri, 2010 dalam Lisnawati, 2011).

Selain isu kebijakan dan manajemen pendidikan,

alokasi dan pendistribusian anggaran pendidikan menjadi faktor yang menyebabkan kondisi tersebut. Hal ini wajar karena kurangnya alokasi anggaran dan distribusi mengakibatkan kurangnya dukungan pengembangan pendidikan. Sistem anggaran pendidikan di Indonesia juga sangat rumit, dan tidak ada mekanisme untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang pendanaan sekolah atau membandingkan perbedaan antara biaya pendidikan (Clark, 1998: 25 dalam Arifi, 2008: 124). Kenaikan anggaran pendidikan mulai 2005-2009 cukup mencengangkan, kenaikan rasionya sangat signifikan. Namun secara keseluruhan, gaji guru mencapai persentase yang sangat besar dari keseluruhan anggaran pendidikan (Rahmawati, 2016: 14). Implikasinya adalah bahwa kondisi fasilitas pendukung pendidikan, seperti infrastruktur dan alat pengajaran, diprediksi tidak banyak berubah.

Selain itu, implikasi kondisi yang juga terjadi adalah profesionalitas guru di Indonesia yang belum membaik. Data Balitbang Depdiknas tahun 2007 menunjukkan bahwa guru Indonesia yang layak mengajar pada tingkat SD hanya 28,94%. Guru SMP negeri 54,12%, swasta 60,99%, guru SMA negeri 65,29%, swasta 64,73 %, guru SMK negeri 55,91 %, swasta 58,26 %. Kondisi guru ini salah satunya dipengaruhi oleh pendidikan guru yang belum memadai. Dari 2,7 juta guru di Indonesia hanya sepertiganya atau 35% saja yang berpendidikan S1. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar guru tidak memiliki kelayakan untuk mengajar (Subrayanti, 2013: 3).

Kondisi-kondisi tersebut terjadi dalam sebaran tidak merata, artinya terdapat faktor demografis dan geografis yang terjadi pada lingkup kewilayahan tertentu (Oswald, Coutinho, Best, dan Singh, 2016). Kondisi baik pada wilayah dengan tingkat kemajuan lebih baik, akan berbanding terbalik pada wilayah yang belum maju. Sebagian besar kondisi itu justru terjadi pada wilayah yang belum maju. Bahkan dimungkinkan pada suatu wilayah memiliki distribusi kapasitas kelembagaan yang timpang. Karena itu distribusi kapasitas kelembagaan tersebut juga merupakan kendala bagi proses kebijakan penyelenggaraan pendidikan (Dobbins, 2014).

Meski demikian, melalui pendekatan relasional dan pengembangan kelembagaan, kondisi problematik tersebut juga memiliki potensi positif. Jika kondisi kapasitas kelembagaan yang sudah lebih dahulu mencapai kemajuan dalam aspek pengelolaan sumber daya (sarana dan SDM) diarahkan untuk memiliki jalinan dan interaksi spesifik dengan kelembagaan dengan tingkat kemajuan yang belum baik (Boron dan Thomson, 2017). Penciptaan hubungan *symbiosis* pada aspek ini dalam wujud aktivitas-aktivitas yang mengarah pada penciptaan kondisi keseimbangan kapasitas (Liu dan Li, 2016), sehingga persoalan ketimpangan kondisi kelembagaan dapat menemukan solusi yang lebih baik.

Memperhatikan kondisi dari masing-masing daerah yang berkembang secara berbeda serta melihat lingkup geografis dari masing-masing Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai latar belakang yang menciptakan keberagaman kondisi penyelenggaraan pendidikan. Kondisi latar belakang yang beragam tersebut merupakan implikasi dari kelangkaan sumberdaya pendukung dan belum optimalnya pengelolaan sumberdaya itu dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks itu, kelembagaan merupakan unsur utama yang berkontribusi terhadap unsur lain agar pada kondisi yang optimum.

Meskipun pemerintah telah melakukan insiatif pengembangan penyelenggaraan pendidikan melalui beberapa program insentif dan stimulatif, namun yang perlu dimaknai bahwa program tersebut lebih bermakna alokasi dan distribusi sumber daya materiil kepada satuan penyelenggara pendidikan. Padahal, penyelenggaraan pendidikan juga mencakup aspek interaksi di dalam lembaga, antar lembaga penyelenggara pendidikan dan antara

lembaga penyelenggara pendidikan dengan lembaga lain yang bersinggungan dengan mereka. Dalam pendekatan interaksionalis, interaksi yang terjadi diantara lembaga dapat memberikan efek yang secara berkelanjutan akan memberikan implikasi bagi aktivitas yang diselenggarakan oleh masing-masing lembaga (Scruton dan McNamara, 2015). Interaksi yang bertentangan dan tidak mendukung satu dengan lainnya akan menciptakan kondisi yang kritis dan tidak kondusif bagi perkembangan lembaga. Interaksi yang terselenggara dengan baik dan saling mendukung, akan menciptakan kondisi aktivitas lembaga menjadi lebih kondusif bagi tumbuhnya perkembangan yang baik (Rubington dan Weinberg, 2015). Karena itu pengkajian terhadap potensi pengembangan tata kelola (*governance*) pada daerah otonom baru tersebut perlu ditelaah.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta *Focus Group Discussion*. Penelitian dilakukan untuk menganalisis tiga hal, yaitu; (1). Faktor-faktor yang mendukung kondisi pendidikan yang ada di daerah otonom baru, (2). Aspek potensial dalam pendidikan yang dapat berkontribusi pada pengembangan organisasi model tata kelola pendidikan, dan (3). Model tata kelola yang dapat mendukung percepatan penyelenggaraan pendidikan pada daerah otonom baru. Analisis data dilakukan dengan metode interaktif yang pada akhirnya dapat dihasilkan yang berkorelasi dan informasi bermanfaat bagi pengembangan model tata kelola pendidikan di daerah otonom baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Existing dan Faktor yang mempengaruhi kondisi sumber daya penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.

Pelayanan publik mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kondisi umum daerah itu sendiri (Abdullah, 2011). Kebijakan desentralisasi seharusnya memiliki dampak yang besar dalam meningkatkan pelayanan publik (Habibi, 2015). Kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakatnya pasca pemekaran daerah (dalam hal daerah administratif dan perencanaan pelayanan) menjadikan pemerintah daerah diharapkan dapat lebih bijak dalam merencanakan pembangunan pelayanan publik.

Idealnya pembangunan fasilitas pelayanan daerah sudah seharusnya disesuaikan dengan pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya (Pohan, 2015). Semakin banyak jumlah penduduk disuatu daerah maka sewajarnya jumlah penyediaan layanan juga ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat (Tjiptoherijanto, 1999). Fasilitas pendidikan yang memadai akan mendukung peningkatan kualitas

masyarakat sehingga pendidikan dan kesehatanpun menjadi indikator penting bagi nilai IPM suatu daerah.

Apabila dicermati secara lebih lanjut, kondisi infrastruktur sekolah pada wilayah Kabupaten Pesisir Barat belum mencapai standar nasional. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia yaitu SNI 03-6981-2004, satu buah fasilitas Sekolah Dasar (SD) wajib disediakan untuk minimal penduduk sejumlah 1600 jiwa, sedangkan untuk SMP dan SMA sejumlah 4800 jiwa. Apabila dihitung secara cermat, hampir keseluruhan wilayah kecamatan di Pesisir Barat sudah memenuhi rasio tersebut. Tercatat hanya dua kecamatan yang belum memenuhi rasio tersebut, yaitu Kecamatan Bengkunt Belimbing dan Kecamatan Ngambur. Data tersebut dapat dilihat dari tabel 1.

Kondisi rasio yang hampir serupa juga terjadi pada jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Terlebih dahulu data rasio tersebut terlihat dari tabel 2.

Dari tabel 2 tersebut dapat dicermati jika rasio jumlah sekolah dengan penduduk pada jenjang pendidikan menengah dan atas hampir sebagian besar wilayah

belum mencapai rasio ideal. Tercatat Kecamatan Karya Penggawa, Way Krui, Pesisir Tengah, Krui Selatan, Pesisir Selatan dan Ngambur belum memenuhi rasio ideal tersebut. Hanya Kecamatan Lemong, Pesisir Utara, Pulau Pisang, Bengkunt dan Bengkunt Belimbing yang sudah memenuhi rasio ideal tersebut.

Setelah mencermati kedua rasio tersebut, maka dapat dikemukakan jika tersedianya sekolah *existing* pada Kabupaten Pesisir Barat bila dibandingkan dengan jumlah penduduk nampak belum seimbang, bertambahnya jumlah penduduk tidak sebanding dengan peningkatan penyediaan sekolah diberbagai tarafnya. Oleh karena itu diperlukan adanya penambahan jumlah penyediaan sekolah guna menunjang pemerataan pelayanan, serta peningkatan kesejahteraan (Bank Dunia, 2013).

Selain peninjauan terhadap kesesuaian jumlah infrastruktur eksisting dengan standar yang berlaku, kualitas pelayanan dalam sektor pendidikan juga dapat dikatakan semakin baik jika angka rasio murid terhadap guru semakin kecil dalam perkembangannya (Bank Dunia, 2013). Namun perlu untuk ditinjau lebih lanjut apakah

Tabel 1. Rasio Jumlah Sekolah Dasar Terhadap Jumlah Penduduk di Kab. Pesisir Barat

No	Kecamatan	SD		Jumlah Penduduk (2012)	Rasio Ideal (1/1600)	Status Terpenuhi
		Negeri	Swasta			
1	Lemong	16	1	14365	9	T
2	Pesisir Utara	12	0	8202	5	T
3	Pulau Pisang	2	0	1343	1	T
4	Karya Penggawa	11	1	14292	9	T
5	Way Krui	5	0	8328	5	T
6	Pesisir Tengah	11	2	18358	11	T
7	Krui Selatan	8	0	8531	5	T
8	Pesisir Selatan	17	0	21762	14	T
9	Ngambur	10	0	17953	11	B
10	Bengkunt	6	0	7620	5	T
11	Bengkunt Belimbing	12	1	24000	15	B
Jumlah		110	5			

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Barat, diolah peneliti (2015).

Tabel 2. Rasio Jumlah SLTP dan SLTA Terhadap Penduduk di Kab. Pesisir Barat

No	Kecamatan	SLTP		SLTA		SMK		Jumlah Penduduk (2012)	Rasio Ideal (1/4800)	Status Terpenuhi
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta			
1	Lemong	6	0	1	0	0	0	14365	3	T
2	Pesisir Utara	2	0	1	0	0	0	8202	2	T
3	Pulau Pisang	1	0	0	0	0	0	1343	0	T
4	Karya Penggawa	1	0	1	0	0	0	14292	3	B
5	Way Krui	1	0	0	0	0	0	8328	2	B
6	Pesisir Tengah	3	0	1	2	1	1	18358	4	B
7	Krui Selatan	0	1	0	1	0	0	8531	2	B
8	Pesisir Selatan	4	1	1	0	0	0	21762	5	B
9	Ngambur	3	2	1	0	1	0	17953	4	B
10	Bengkunt	3	1	1	0	0	0	7620	2	T
11	Bengkunt Belimbing	5	0	2	0	0	0	24000	5	T
Jumlah		29	5	9	3	2	1			

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Barat, diolah peneliti (2015).

penurunan rasio tersebut didasarkan pada peningkatan jumlah guru atau justru penurunan jumlah murid yang bersekolah.

Fasilitas pelayanan pendidikan jenjang menengah pertama belum tersedia hampir di setiap daerah terutama pedesaan. Selain itu, tenaga pengajar yang berkualitas masih terkonsentrasi di daerah-daerah yang baik perekonomiannya (Sulisworo, Nasir, dan Maryani, 2017). Padahal melalui adanya pemekaran daerah diharapkan adanya penataan dan penyiapan fasilitas pendidikan oleh pemerintah daerah semenjak tingkat dasar sampai tingkat lanjutan. Rentang kendali yang semakin dekat antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam aspek fasilitas pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah hasil pemekaran. Hadirnya daerah pemekaran baru sesungguhnya bisa menciptakan lowongan pekerjaan bagi tenaga pendidik.

Tersedianya tenaga pendidik yang berkualitas menjadi kunci keberhasilan sektor pendidikan di daerah pemekaran (Bank Dunia, 2013). Semakin rendah rasio jumlah pengajar dengan jumlah murid akan semakin efektif proses belajar-mengajar di sekolah di DOB (Khairunnisa, 2013). Perlu dicermati juga bahwa tidak semua tenaga pengajar mau melaksanakan tugas di daerah hasil pemekaran karena alasan tempat tinggal yang jauh dari sekolah (Meha dan Ismanto, 2013). Biasanya, tenaga pengajar tinggal tinggal di daerah induk hasil pemekaran (Zulyanto, Noeraini, Badriah, dan Istikomah, 2017).

Ditemukan juga beberapa sekolah yang kondisi infrastruktur belum tersentuh renovasi. Hal ini misalnya terjadi di salah satu bangunan sekolah di Pekon (desa) Wayharu, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Hampir seluruh bangunan sekolah tersebut dalam kondisi rusak. Beberapa bagian dinding bangunan yang terbuat dari panpan tampak belubang di sana-sini. Bagian atap, mulai lapuk termakan usia. Bahkan dikhawatirkan, roboh. Padahal, gedung sekolah merupakan tempat pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar dari tingkat SD, SMP dan SMA Filial (kelas jauh). Jumlah siswa di sekolah ini sekitar 1.000 orang yang berasal dari empat pekon yakni, Pemerihan, Wayharu, Badardalam dan Pekon Siringgading, Margono. Kerusakan bangunan sekolah itu sudah lama terjadi sejak wilayah tersebut masih menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Barat (Tahun 2009).

Kondisi sumber daya fisik berupa infrastruktur sekolah yang sebagian besar merupakan pelimpahan dari Kabupaten induk yang rusak tersebut perlu ditindaklanjuti agar tidak mempengaruhi minat siswa dalam mengikuti pendidikan. Terlebih lagi setiap tahun dana BOS yang diterima Kabupaten Pesisir Barat semakin besar, sehingga alokasi kepada fasilitas bangunan sekolah tersebut niscaya dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Daya Dukung Fasilitas Pendukung di Kabupaten Pesisir Barat

Daya dukung fasilitas pendukung non pendidikan sesungguhnya juga dapat memberikan pengaruh terdapat optimalnya penyelenggaraan pendidikan di suatu daerah (Jeong, Lee, dan Cho, 2017). Dalam aspek ini dapat dicontohkan berupa fasilitas sumber daya listrik atau akses telekomunikasi. Sebagai daerah otonom baru, Kabupaten Pesisir Barat dihadapkan kepada kondisi infrastruktur yang masih minim. Hal ini misalnya berpengaruh terhadap penyelenggaraan beberapa program pendidikan yang berskala nasional, misalnya adalah penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UN CBT). Meski mulai tahun ini pemerintah mulai menggunakan sistem Computer Based Test (CBT) dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2014/2015 dari tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat belum bisa dilakukan di Kabupaten Pesisir Barat (KPB).

Belum siapnya satuan pendidikan yang ada dan belum masuk kriteria untuk mengikuti pelaksanaan UN CBT tersebut, yang salah satunya harus memiliki perangkat komputer sebanyak 40 unit setiap SMP atau SMA sederajat dan juga perlengkapan lainnya menjadi alasan utamanya. Daerah yang masuk kriteria dapat melaksanakan UN CBT tersebut yakni Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Lampung Tengah (Lamteng), Lampung Timur (Lamtim), Lampung Utara (Lampura), Pringsewu, Bandar Lampung dan Metro. Sedangkan, Pesisir Barat tidak masuk kriteria tersebut.

Guna mendukung pelaksanaan UN CBT ditahun berikutnya, Disdikbud Kabupaten Pesisir Barat akan melakukan berbagai persiapan sehingga kedepan dapat melaksanakan UN dengan sistem tersebut seperti halnya kabupaten lain. Namun, hal itu juga sesuai dengan perkembangan di satuan pendidikan yang ada di Pesisir Barat, yang diharapkan Disdikbud juga memiliki perlengkapan seperti perangkat komputer yang memenuhi standar serta perlengkapan lainnya. Menggunakan sistem CBT tersebut memang hanya memerlukan sinkronisasi data, kemudian data diujikan dan soal ujian tetap tersimpan di komputer. Pelaksanaan UN dengan CBT juga akan mendorong efektivitas anggaran karena tidak perlu melakukan pengadaan percetakan soal ujian seperti pada UN tertulis, selain itu juga pelaksanaan UN dengan CBT akan mendorong transformasi lebih modern dalam penilaian. Akan tetapi Kabupaten Pesisir Barat saat ini belum mampu untuk melaksanakan sistem tersebut (Marzuki, 2015).

Contoh pelaksanaan ujian nasional CBT ini merupakan wujud dari pengaruh infrastruktur pendukung yang belum tertata dengan baik akan memberikan dampak yang negatif terhadap penyelenggaraan masa depan pendidikan (Nurmandi, 2013). Oleh karena itu, pembangunan pendidikan perlu juga di akselerasi dengan pembangunan fasilitas fisik pendukung sehingga potensi masa depan pendidikan pada kabupaten ini tidak dihadapkan kepada kendala yang berarti (Lau, 2015).

Potensi-potensi kelembagaan penyelenggara pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.

Sebagai daerah otonom baru yang harus mengejar keteringgalan, dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat mulai berbenah. Bidang pendidikan merupakan salah satu program utama yang menjadi perhatian bagi pemerintahan yang baru beranjak 1,5 tahun usianya. Dalam *Focus Group Discussion* (FGD) diketahui bahwa pembangunan bidang pendidikan sekarang ini tidak hanya fokus dibidang fisik, namun juga bidang non fisik menjadi perhatiannya. Bidang fisik, sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan nampak cukup memadai dari jenjang pendidikan menengah sampai ke jenjang pendidikan dasar.

Tahun Anggaran 2014 lalu Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memberi perhatian kepada bidang non fisik diantaranya mendukung program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan menyukseskan program nasional wajib belajar 12 tahun. Bapak Kepala Dinas Pendidikan mengemukakan bahwa untuk mendukung program pemerintah pusat maka rangkaian program dilaksanakan seperti Program Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP), Program Bimbingan Kurikulum 2013 dan Program Seleksi Guru Berprestasi (Marzuki,2015).

Sistem pendidikan itu telah berjalan dari tahun 2014 namun program-program unggulan itu tidak akan dilaksanakan dengan baik tanpa dukungan dari masyarakat dan elemen-elemen masyarakat lainnya, *stakeholder* dan orang tua murid. Seluruhnya harus beriringan serta saling mendukung, sehingga *output*-nya maksimal dengan menghasilkan siswa yang handal dan mampu bersaing didunia internasional.

Visi yang menjadi arah dalam penyelenggaraan pendidikan seringkali tidak dapat terimplementasi dikarenakan tidak sungguh-sungguh nya para pejabat publik dalam mengeksekusi visi tersebut. Sebagai akibatnya adalah tidak berkesinambungannya program dan kegiatan yang diselenggarakan guna pelaksanaan visi tersebut (Paulus, 2013). Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat, konsistensi visi tersebut dapat dilihat dari variasi program yang dilaksanakan oleh seluruh elemen terkait, dimana dinas yang menjadi *leading sector*-nya memfasilitasi program tersebut.

Potensi hubungan kelembagaan dalam rangka akselerasi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.

Mencermati kondisi *existing*, faktor yang pengaruhi sumber daya pendidikan dan potensi kelembagaan di Kabupaten Pesisir Barat, maka dapat diidentifikasi potensi hubungan kelembagaan yang dapat ditempuh guna mengakselerasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kabupaten tersebut. Potensi hubungan kelembagaan tersebut digambarkan pada gambar 1. sebagai berikut:

Pola hubungan yang dapat diterapkan adalah pola yang menjalin posisi kemitraan strategis dengan beberapa komponen penting yang berkaitan dengan pendidikan di

wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Komponen tersebut adalah Dinas Pendidikan, Dinas atau instansi sektoral lainnya, pihak swasta, yayasan atau lembaga masyarakat dan juga pelibatan institusi pendidikan yang ada diluar kabupaten, khususnya pada tingkat provinsi Lampung.



Gambar 1. Pola Hubungan Kelembagaan Berbasis Kemitraan

Dalam hubungan kelembagaan tersebut dinas pendidikan dapat menyusun program yang nantinya akan memberikan ruang kepada komponen lembaga lainnya untuk turut berperan dalam pelaksanaan pendidikan, misalnya program yang merangkul perusahaan swasta, yayasan atau lembaga masyarakat untuk turut menurunkan sumber dayanya dalam proses pengajaran baik berupa sumber daya materiil maupun sumber daya manusia yang dimilikinya. Adanya ruang kepada mereka dapat secara bertahap meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah.

Terlibatnya dinas atau instansi lain pada Kabupaten Pesisir Barat diarahkan kepada penguatan kapasitas pendidikan dalam konteks identitas dinas/intansi lain tersebut. Misalnya dinas pariwisata melakukan program penguatan berbahasa Indonesia dan Inggris ke sekolah-sekolah di wilayah Pesisir Barat. Program ini nantinya bertujuan memberikan kapasitas komunikasi kepada para siswa sehingga dapat berinteraksi secara baik kepada wisatawan yang datang.

Komponen institusi pendidikan diluar Kabupaten Pesisir Barat juga dapat diberikan ruang untuk terlibat dalam pengembangan kualitas pendidikan di wilayah itu. Contoh pelibatan IBI Darma Jaya mendorong perlunya instansi pendidikan lain untuk diberikan kesempatan melaksanakan program dan kegiatan mereka di wilayah Pesisir Barat. Bahkan bila dimungkinkan dapat dilakukan melalui suatu program yang dirancang oleh Dinas Pendidikan, dimana program tersebut mendorong seluruh instansi pendidikan di Provinsi Lampung untuk turut mengembangkan kualitas pendidikan, sebagai *reward* kepada mereka maka pihak Pemerintah Kabupaten dapat mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap Pesisir Barat. Pola dan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif dari dan kepada semua *stakeholders* yang diawali dari perencanaan, dengan memperhatikan manfaat serta perubahan, baik tingkat perubahan jangka pendek

maupun jangka panjang (Lambelanova, 2017). Pola hubungan yang dirancang tersebut pada dasarnya bersifat saling menguntungkan, dimana seluruh komponen akan mendapatkan imbal balik yang positif dan institusi pendidikan di wilayah kabupaten Pesisir Barat juga akan mendapatkan pengaruh yang baik, sehingga kemudian dapat secara bertahap memperbaiki kualitas pendidikannya. Dibutuhkan juga perbaikan dalam penyusunan serta penetapan program yang sesuai kebutuhan guna mengimplementasikan kebijakan pendidikan dasar seperti tersedianya tenaga pendidik, ketersediaan sarana kegiatan pembelajaran dan biaya operasional, menempatkan pejabat yang tepat sesuai dengan kemampuan dan keahlian pada bidangnya (Londa, 2016).

Model tata kelola dalam rangka akselerasi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.

Model yang ditawarkan untuk diterapkan guna tata kelola penyelenggaraan pendidikan pada Kabupaten Pesisir Barat adalah variasi model *New Public Management* yang dapat diterapkan dengan syarat didukung oleh politisi, birokrat dan masyarakat. NPM memiliki fokus pada meningkatkan efisiensi, aparatur publik yang terspesialisasi secara horisontal, kontrakisasi, marketisasi, gaya manajemen sektor swasta, standar kinerja yang eksplisit dan control terhadap keluaran/hasil (Christensen, 2012).

Dalam beberapa dekade terakhir dapat dikatakan belum ada model yang dominan (Pollitt dan Bouckaert, 2011). NPM telah dilengkapi dengan post-NPM, termasuk konsep utama seperti koordinasi, sentralisasi, pemerintahan, jaringan dan kemitraan. Mekanisme pencegahan nasional dan post-NPM tumpang tindih dan tidak saling eksklusif saat datang untuk alat-alat reformasi tertentu. Kedua paradigma itu tergabung ide-ide dari perspektif lain, dan keduanya mencakup praktek dan gagasan literatur akademis dari kedua model yang digabungkan (Klijn, 2011). Dengan demikian dapat disimpulkan jika reformasi pasca-NPM menyiratkan peningkatan fokus pada integrasi, koordinasi horizontal sejalan dengan pendekatan tata kelola dan peningkatan kontrol politik dan finalisasi (Pollitt, 2003), (Lægread dan Verhoest, 2010). Oleh karena itu model yang hendak dibangun dalam penelitian ini adalah model NPM yang bersinggungan dengan kemitraan dan koordinasi antar *stakeholder* yang kuat. Model tersebut dapat diilustrasikan pada gambar 2.

Dalam model tersebut pemerintah kabupaten melalui Dinas Pendidikan memiliki peran utama untuk membangun kesepakatan bersama. Posisi mereka sebagai pihak yang mengkoordinasi penyelenggaraan pendidikan pada wilayahnya dengan mendorong Dinas Pendidikan serta Instansi Pemerintah Daerah lainnya agar mampu menciptakan program yang inovatif dan mendorong akselerasi kapasitas pendidikan. Selain itu mereka juga melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap

program yang dilaksanakan oleh instansi-instansi tersebut serta kemitraan yang terjalin dengan pihak swasta/lembaga masyarakat dan pihak institusi pendidikan yang turut serta dalam program-program pemerintah kabupaten.



Gambar 2. Model Tata Kelola Akselerasi Penyelenggaraan Pendidikan

Pihak swasta atau lembaga masyarakat diberikan peran dalam penyediaan dan pengelolaan sarana, alat dan infrastruktur pendukung penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, mereka juga diberikan peran partisipatif dalam penyediaan dukungan tenaga pengajar, baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat sementara dan *part time*. Tentu saja peran mereka ini perlu difasilitasi melalui kebijakan insentif yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Kebijakan insentif dimaksudkan memberikan daya tarik komparatif bagi mereka untuk turut serta dalam pengelolaan pendidikan di wilayah Pesisir Barat.

Pihak ketiga yang juga perlu dikelola perannya yaitu perguruan tinggi dan institusi pendidikan lainnya. Peran mereka lebih bersifat kepada pembangunan kapasitas jangka panjang elemen pendidikan di wilayah Pesisir Barat. Peran mereka diantaranya adalah sebagai tenaga ahli perencana program pendidikan yang melakukan analisis dan konsultasi penyusunan program yang dirancang agar mampu menciptakan akselerasi penyelenggaraan pendidikan dalam periode tertentu. Selain itu, posisi mereka juga sebagai pendamping dan evaluator terhadap program-program inovasi pembelajaran di sekolah. Hal ini penting mengingat peningkatan kapasitas memerlukan konsistensi pelaksanaan tahapan guna memaksimalkan hasil dan dampak yang dikehendaki.

Secara keseluruhan, koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan kemitraan tersebut mungkin relatif mudah dikembangkan, karena mudah bagi para pelaku yang terlibat untuk melihat manfaatnya. Berbagi sumber daya juga dipandang penting mengingat kurangnya sumber daya yang efektif, membuat mereka bergantung satu sama lain. Batasan yang mungkin perlu diantisipasi adalah koordinasi yang terkoneksi dengan jarak dan faktor geografis (Palm dan Ramsell, 2007). Oleh karena

itu guna mengoptimalkan operasionalisasi model tersebut diperlukan strategi yang mampu menggerakkan seluruh komponen untuk mencapai tujuan bersama. Strategi tersebut dapat disusun dalam tahapan sebagai berikut:

1. Membangun kapasitas. Dalam rangka memperoleh sumberdaya luar, institusi terlibat membutuhkan kapasitas yang cukup baik dalam aspek pengetahuan ataupun keterampilan. Kapasitas institusi dibangun dengan proses pendampingan terus menerus oleh Dinas Pendidikan pada wilayah sasaran yang telah memenuhi kriteria layak untuk dimitrakan. Peningkatan kapasitas berwujud pelatihan ataupun pendampingan langsung dalam secara nyata diberikan oleh fasilitator dan beberapa pihak terkait.
2. Menguatkan peranan dan fungsi pihak swasta dan masyarakat fasilitator kemitraan. Wujud konkret dari peran Dinas Pendidikan pada koordinasi akselerasi pendidikan salah satunya adalah memfasilitasi kemitraan antara masyarakat dengan beberapa pihak. Peran Dinas Pendidikan yang dapat dilakukan dalam kemitraan adalah: (1) Mengembangkan kebijakan bersama dengan pemerintah daerah yang terkait dengan kemitraan; (2) Mengembangkan basis data dan sistem informasi bagi kebutuhan kemitraan; (3) Menggalang sumberdaya luar guna mendanai program masyarakat dan mendampingi peningkatan kapasitas sekolah/unit belajar; (4) Mengembangkan sistem kemitraan yang transparan, partisipatif dan akuntabel dan (5) Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang meningkatkan kapasitas sekolah/unit belajar dan komunitas masyarakat dalam kemitraan.
3. Perlu peningkatan kapasitas baik bagi sekolah/unit belajar maupun komunitas masyarakat dalam menjalankan peran untuk memfasilitasi kemitraan. Peningkatan kapasitas itu dilakukan dengan berbagai pelatihan dan pendampingan. Oleh karenanya, Dinas Pendidikan perlu menggalang kerjasama dengan beberapa pihak. Secara luas diarahkan bisa menggalang kerjasama dengan program-program lain, perguruan tinggi, LSM dan lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan.
4. Memfasilitasi pemasaran sosial. Guna mengimplementasikan program akselerasi pendidikan di wilayah kabupaten, maka para aktor yang terlibat harus memperkenalkan program kepada pihak luar. Oleh karena program dihasilkan berupa produk gagasan sosial, maka bentuk pemasaran yang dilakukan adalah pemasaran sosial. Keberhasilan pemasaran sosial bukan sekedar diukur dari tergalangnya sumberdaya akan tetapi juga berwujud dukungan-dukungan kebijakan dan penggunaan metodologi yang telah diperkenalkan oleh program secara luas. Fasilitasi pemasaran dilakukan pada semua aras, baik itu di kelurahan, kota maupun nasional. Fasilitasi kemitraan di tingkat kelurahan didampingi oleh komunitas masyarakat, pada tingkat

kabupaten dilakukan oleh lembaga masyarakat/ swasta dengan pendampingan Dinas Pendidikan.

5. Membangun Jejaring. Kunci dalam menggalang kemitraan salah satunya adalah memiliki jejaring dengan berbagai pihak yang terkait dengan isu-isu program yang hendak dimitrakan. Program akselerasi penyelenggaraan pendidikan mendorong seluruh stakeholder guna aktif terlibat pada forum-forum multipihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Fasilitasi juga dilakukan guna pihak tersebut dapat menjadi bagian dari berbagai jaringan yang terkait dengan isu program, baik itu jaringan program-program sosial, ekonomi maupun lingkungan.

SIMPULAN

Berdasarkan proses analisis yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kondisi existing sumber daya pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat masih menghadapi kondisi kuantitas sekolah yang belum seluruhnya memenuhi rasio nasional. Selain itu, distribusi guru juga masih belum merata, cenderung menumpuk pada daerah tertentu. Kondisi tersebut sejalan dengan kondisi anggaran yang belum secara optimal dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat, sehingga belum dapat secara maksimal menghasilkan program yang dapat mengakselerasi pendidikan di daerah tersebut.

Faktor yang paling dominan mempengaruhi kondisi sumber daya pendidikan di wilayah Kabupaten Pesisir Barat itu antara lain dikarenakan warisan kebijakan pendidikan dari kabupaten induk yang memang tidak berhasil menciptakan pemerataan infrastruktur pendidikan. Selain itu, kondisi daya dukung infrastruktur di wilayah Pesisir Barat yang belum mengalami kemajuan juga memberikan efek yang belum maksimal bagi terciptanya akselerasi pendidikan di wilayah tersebut. Contohnya adalah kondisi infrastruktur listrik dan telekomunikasi.

Potensi kelembagaan dan hubungan antar lembaga di wilayah Kabupaten Pesisir Barat sesungguhnya terletak pada Dinas Pendidikan, Dinas atau Instansi pemerintah lainnya pada Kabupaten Pesisir Barat, pihak swasta/ yayasan atau lembaga masyarakat serta instansi pendidikan yang ada di luar wilayah Pesisir Barat. Keseluruhan lembaga tersebut memiliki format keterlibatannya masing-masing, namun akan tetap terjalin dalam suatu kerangka kerja yang diarahkan oleh Pemkab Pesisir Barat. Pada format inilah diharapkan akan tercipta akselerasi kebijakan pendidikan.

Model yang dapat dioperasionalkan guna membangun tata kelola akselerasi penyelenggaraan pendidikan pada wilayah Pesisir Barat adalah model yang mengadaptasi model *New Public Management* dengan memperkuat aspek kemitraan dan koordinasi vertical dan horizontal yang kuat. Guna mengimplementasikan model tersebut maka dapat diadopsi strategi yang terdiri dari empat tahapan yaitu; penguatan kapasitas, penyusunan peran, pemasaran bersama dan penguatan jejaring.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.A. (2011). Kajian dampak pemekaran wilayah terhadap pembangunan daerah (Studi Kasus: Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat). Bogor: IPB.
- Boron, S.M. & Thomson, G. (2017). Sustainability Education: Towards Total Sustainability Management Teaching. In F. W. Leal, L. Brandli, P. Castro, dan J. Newman, Handbook of Theory and Practice of Sustainable Development in Higher Education. World Sustainability Series. (pp. 37-51). London: Springer.
- Christensen, T. (2012). Post-NPM and changing public governance. *Meiji Journal of Political Science and Economics*, 1, (1), 1-11.
- Dobbins, M.K. (2014). Higher Education Governance and Policy Change in Western Europe: International Challenges to Historical Institutions. London: Springer.
- Dunia, B. (2013). Mendayagunakan Guru dengan Lebih Baik: Memperkuat Manajemen Guru untuk Meningkatkan Efisiensi dan Manfaat Belanja Publik. Jakarta: Bank Dunia.
- Habibi, M.M. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28, (2), 117-124.
- Palm, J.E.R. (2007). Developing Local Emergency Management by Co-Ordination Between Municipalities in Policy Networks: Experiences from Sweden. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 15, (4), 173-182.
- Jeong, D.W., Lee, H.J. & Cho, S.K. (2017). Education decentralization, school resources, and student outcomes in Korea. *International Journal of Educational Development*, 53, 12-27.
- Khairunnisa, (2013). Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP Di Jawa Barat. Bogor: IPB.
- Klijn, E.H. (2011). Public Management and Governance: a comparison of two paradigms to deal with modern complex problems. In D. Levi-Faur (ed.), The Oxford Handbook of Governance. Oxford: Oxford University Press.
- Lægreid, P. and K.Verhoest (eds.) 2010. Governance of Public Sector Organizations. Proliferation, autonomy and performance. London: Palgrave Macmillan.
- Lambelanova, R. (2017). Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Di Kabupaten Bandung Barat. *Sosiohumaniora*, 19, (2), 185-198.
- Lau, W. (2015). Means to an End: A Comparative Review of Finland and Singapore's Basic Education System. Lund: Lund University.
- Liu, Q. & Li, X. (2016). Symbiotic Harmony: The Realistic Way to Develop Teacher-Student Relationship in University. 2nd Asia-Pacific Management and Engineering Conference (APME 2016) (pp. 697-702). Shanghai: DEStech Publications, Inc.
- Londa, V. Y. (2016). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Daerah Kepulauan (Studi di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara). *Sosiohumaniora*, 18, (3), 273-281.
- Marzuki, (2015, 7 23). Kepala Dinas Pendidikan Pesisir Barat. (S. S. Hutagalung, Interviewer)
- Meha, A.M. (2013). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penempatan Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Timur (Doctoral dissertation, Magister Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana FKIP-UKSW).
- Nurmandi, A. (2013). Pemekaran dan Reformasi Birokrasi di Provinsi Riau. Seminar Nasional Menyongsong Pemilu 2014: Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Politik Indonesia Berkemajuan (pp. 16-38). Makasar: Prodi Ilmu Pemerintahan UMM.
- Oswald, D.P. Coutinho, M.J., Best, A.M. & Singh, N.N. (2016). Ethnic Representation in Special Education. *The Journal of Special Education*, 32, (4), 194-206.
- Paulus, R. D. (2013). Implementasi Kebijakan Di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 1, (1), 1-14.
- Pohan, Z.S. (2015). Analisis Dampak Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Utara 2008-2014 Terhadap Perkembangan Pembangunan Kabupaten Labuhan batu Utara. *Politika*, 6, (2), 25-53.
- Pollitt, C. (2003). The Essential Public Manager. Maidenhead: Open University.
- Pollitt, C. & G. Bouckaert. (2011). Public Management Reform: A Comparative Analysis – NPM, Governance and the Neo-Weberian State. 3.Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Rubington, E. & Weinberg, M. (2015). Deviance: The Interactionist Perspective. London: Routledge.
- Scruton, H. & McNamara, J. (2015). An Interactionist Approach to Learning Disabilities. *International Journal of Education*, 7, (4), 43-52.
- Sulisworo, D. Nasir, R. & Maryani, I. (2017). Identification of teachers' problems in Indonesia on facing. *International Journal of Research Studies in Education*, 6, (2), 81-90.

- Tjiptoherijanto, P. (1999). Urbanisasi dan Pengembangan Kota di Indonesia. *Populasi*, 10, (2), 57-72.
- Zulyanto, A., Noeraini, A.A., Badriah, L.S. & Istikomah, N. (2017). *Pencapaian MGDs di Indonesia*. Bandung: Unpad Press.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DENGAN PENDEKATAN HIBRIDA DI KABUPATEN SUPIORI PROVINSI PAPUA

Orthinus Ferdinando Samfar Kawer¹, M. Baiquni², Yeremias T. Keban³, dan Agustinus Subarsono³

¹Program Studi S3 Studi Kebijakan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

²Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada

³Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada

E-mail: orthinuskawer@gmail.com

ABSTRAK, Kebijakan pembangunan perumahan menjadi instrumen pemerintah untuk melakukan intervensi pembangunan di daerah. Namun pembangunan rumah layak huni (RLH) dapat dijadikan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Implementasi kebijakan pembangunan RLH perlu mempertimbangkan pendekatan kombinasi, yaitu pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan pendekatan bawah-atas (*bottom-up*), yang dikenal sebagai pendekatan hibrida. Paper ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembangunan RLH dengan pendekatan hibrida di Kabupaten Supiori dengan memperhatikan partisipasi masyarakat lokal dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dengan pemerintah daerah, pemangku kepentingan maupun masyarakat penerima dana bantuan sosial RLH, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan RLH di Kabupaten Supiori telah dimulai sejak tahun 2012 dengan orientasi utama pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah. Pembangunan RLH ini dibiayai dengan dana bantuan sosial atau dikenal sebagai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari dana Otonomi Khusus. Perpaduan antara peran Pemerintah Kabupaten Supiori serta Kepala Distrik dan Kepala Kampung, dan peran masyarakat benar-benar sudah terlihat, yang merefleksikan pendekatan hibrida dalam implementasi pembangunan RLH. Masyarakat berpartisipasi aktif melalui tiga bentuk partisipasi, yaitu keterlibatan dalam sosialisasi dan musyawarah kampung, penyediaan material dan tenaga kerja lokal, serta manajemen konflik sosial akibat adanya kesan diskriminasi dalam penentuan prioritas penerima dana bantuan sosial pembangunan RLH. Dengan prosedur operasi standar yang dibuat, maka sulit bagi pemerintah daerah untuk berlaku dominan dalam intervensi masyarakat. Sebaliknya, prosedur operasi standar yang ada memungkinkan masyarakat berpartisipasi maupun mendampingi otoritas pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan RLH di masing-masing kampung prioritas.

Kata kunci: Implentasi Kebijakan Pembangunan; Rumah Layak Huni; Pendekatan Hibrida

THE IMPLEMENTATION OF ADEQUATE HOUSING DEVELOPMENT POLICY USING HYBRID APPROACH IN SUPIORI REGENCY, PAPUA PROVINCE

ABSTRACT, *Housing development policy is government's instrument to make intervention in local development. Adequate housing development can used to empower local community. It is necessary to consider a combined approach, i.e. top-down and bottom-up approaches, well-known as a hybrid approach. This paper aims at analyzing the implementation of adequate housing development with a hybrid approach in Supiori Regency by considering community participation. This study used a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through participant observation, in-depth interviews with local government authorities, stakeholders, and families receiving the social fund for adequate housing, and documentation. The results of the study show that the adequate housing development in Supiori Regency was started from 2012 and oriented to low-income community empowerment. The adequate housing development was funded using the Direct Fund for Community (Bantuan Langsung Masyarakat—BLM) from the Special Autonomy fund. The combined roles played by the Government of Supiori Regency, Heads of District and Village, and community were actually seen to reflect the hybrid approach in the adequate housing development. The community participated through three forms, i.e. involvement in socialization and consultation at village level, provision of materials and labors, and the management of social conflict due to discrimination in determining ones prioritized to gain the fund for adequate house development. With the prevailing procedures, it is difficult for government to intervent the local community development. Such procedures enabled community to participate and accompany the government in performing the adequate housing development activities in each priority village.*

Key words: *The Implementation of Development Policy; Adequate Housing; Hybrid Approach*

PENDAHULUAN

Kebijakan perumahan (*housing policy*) masih sangat diperlukan, terutama di negara-negara berkembang. Di Indonesia, pergeseran kebijakan perumahan sejak akhir dekade 1990-an terjadi seiring dengan masuknya era reformasi sejak berakhirnya rezim otoriter Orde Baru tahun 1998. Menurut Monkkonen (2013), pembangunan perumahan di Indonesia didasari kondisi kekurangan perumahan akibat perubahan demografis, krisis ekonomi,

dan tren formasi rumah tangga, terutama sejak akhir tahun 1990-an sampai tahun 2007. Kekurangan perumahan mendorong kebijakan peningkatan suplai perumahan melalui program intervensi pembangunan perumahan yang digagas oleh pemerintah dengan pendekatan atas-bawah (*top-down*).

Kebijakan perumahan menjadi instrumen pemerintah yang sangat penting untuk melakukan intervensi pembangunan. Festus dan Amos (2015) menunjukkan bahwa kebijakan perumahan merupakan alat yang penting

dalam upaya mendukung pembangunan nasional di Nigeria. Namun implementasi kebijakan pembangunan oleh pemerintah dengan pendekatan atas-bawah ternyata bermasalah, misalnya administrasi buruk, pendanaan tidak memadai, infrastruktur tidak mencukupi, dan pembiayaan perumahan kurang (Festus dan Amos, 2015). Masalah dalam implementasi kebijakan pembangunan atas-bawah ini umumnya juga ditemukan di negara berkembang seperti Indonesia, dalam kasus ini di Papua.

Dalam rangka mengatasi permasalahan pendekatan atas-bawah tersebut, perlu transformasi manajemen pemerintahan daerah, dari pendekatan atas-bawah menjadi responsif terhadap aspirasi bawah-atas. Transformasi manajemen pemerintahan daerah ini penting, terkhusus sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Redjo, 2009). Di Provinsi Papua, penerapan Otonomi Khusus melalui UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan yang sangat besar bagi kepala daerah (bupati/walikota) dalam melaksanakan kebijakan pembangunan berorientasi pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat pengejaran ketertinggalan pembangunan, termasuk di bidang perumahan (Sumule, 2003). Pada era Otonomi Khusus, pembangunan perumahan bukan hanya merupakan instrumen kebijakan utama pemerintah, tetapi juga menjadi titik balik bagi partisipasi masyarakat dengan pendekatan bawah-atas dalam melaksanakan pembangunan perumahan di daerah, khususnya melalui pembangunan RLH. Hal ini karena untuk mencapai keberhasilan pembangunan masyarakat kampung, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat lokal, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya dan merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka (Daraba, 2017).

Salah satu kasus yang sangat menarik dikaji di Provinsi Papua adalah pembangunan RLH di Kabupaten Supiori. Daerah ini membutuhkan pembangunan fisik melalui penyediaan infrastruktur lewat pembangunan RLH dalam kerangka pengembangan wilayah. Banyak daerah masih tertinggal jauh dengan jarak berjauhan satu sama lain. Sarana dan prasarana perhubungan berupa jalan, transportasi dan komunikasi juga terbatas. Penduduk umumnya tinggal di daerah terisolir, di rumah yang tidak layak huni dan berjauhan satu sama lain, sehingga Pemerintah Kabupaten Supiori memainkan peran penting sebagai agen utama penyediaan RLH. Tujuan paper ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pembangunan RLH dengan pendekatan hibrida di Kabupaten Supiori dengan memperhatikan partisipasi dari masyarakat lokal dalam implementasi kebijakan tersebut.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pendekatan atas-bawah mengacu pada bagaimana suatu keputusan otoritatif dilaksanakan, baik di lokasi tertentu maupun banyak lokasi. Tokoh paling menonjol sebagai pendiri pendekatan atas-bawah generasi pertama adalah

Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky (Parsons, 1995). Pendekatan ini memandang implementasi kebijakan yang ditulis dalam dokumen resmi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan. Menurut Matland (1995), pendekatan atas-bawah menggeser fokus dari bagaimana naskah undang-undang menjadi hukum dan hukum menjadi program.

Untuk mengevaluasi implementasi atas-bawah, beberapa pertanyaan dapat diajukan, yaitu: sejauh mana tindakan para pejabat pelaksana dan kelompok target telah sesuai dengan keputusan kebijakan, sejauh mana tujuan tersebut dicapai dari waktu ke waktu, apakah faktor utama yang mempengaruhi output serta dampak kebijakan baik yang relevan dengan kebijakan resmi maupun kebijakan lain yang penting secara politik dan bagaimana kebijakan direformulasi dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman (Sabatier, 1986: 22). Jadi, implementasi kebijakan publik dengan pendekatan atas-bawah memerlukan masukan atau umpan balik untuk perbaikan kebijakan bertahap dari waktu ke waktu.

Para teoretisi atas-bawah melihat para perancang kebijakan sebagai aktor sentral dan memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor yang dapat dimanipulasi pada tingkat pusat. Di wilayah kebijakan, pembuat kebijakan atas-bawah biasanya memprioritaskan berbagai kebijakan yang jelas (Matland 1995). Pendekatan atas-bawah memiliki kekuatan, salah satunya adalah berusaha mengembangkan nasihat kebijakan yang dapat digeneralisir dan mempunyai pola-pola konsisten yang dapat dikenali dalam perilaku di wilayah kebijakan berbeda (Matland 1995). Namun, pendekatan atas-bawah dikritik karena hanya mengambil bahasa undang-undang sebagai titik berangkat dan kurang mempertimbangkan pentingnya berbagai aksi sebelumnya. Pendekatan ini umumnya menganggap implementasi sebagai proses administratif dan mengabaikan atau menyingkirkan aspek-aspek politik. Tekanan pada para pembuat undang-undang sebagai aktor kunci membuat pendekatan atas-bawah kurang memperhatikan para aktor dalam masyarakat di tingkat lokal.

Pendekatan bawah-atas berkembang sebagai respons terhadap kekurangan dari pendekatan atas-bawah. Pendekatan bawah-atas banyak berfokus pada variabel prediktor serupa seperti bentuk dan muatan kebijakan, organisasi dan sumberdaya, serta orang beserta bakat, motif, sikap dan hubungan antarpersonal termasuk pola komunikasi mereka. Tokoh pendekatan bawah-atas adalah Mazmanian dan Sabatier (1983), Ripley dan Franklin (1982), Ingram dan Mann (1980). Menurut Matland (1995), pendekatan bawah-atas mengakui implementasi kebijakan bervariasi dari waktu ke waktu di antara berbagai kebijakan dan dari satu daerah ke daerah lain.

Pendekatan bawah-atas mulai terjadi apabila otoritas publik menekankan pentingnya konsensus dan kepatuhan, dan mengakui pentingnya partisipasi dalam formasi kebijakan oleh 'bawahan'. Partisipasi bukan terjadi dalam implementasi kebijakan saja, melainkan sudah mulai

pada tahap formasi kebijakan sebelumnya. Para teoretisi pendekatan bawah-atas menekankan kelompok-kelompok target dan pemberi pelayanan karena kebijakan itu dibuat pada tingkat lokal (Matland 1995). Pendekatan bawah-atas mengidentifikasi jejaring aktor yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan di satu wilayah atau lebih dan bertanya pada mereka tentang tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak mereka (Hanf et al., 1978). Pendekatan ini mengembangkan teknik jejaring untuk mengidentifikasi para aktor lokal, regional, dan nasional yang terlibat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan program pemerintahan dan non-pemerintahan yang relevan. Jadi, terbentuk suatu mekanisme untuk bergerak dari aktor, pembuat keputusan lokal, dan masyarakat menuju pembuat kebijakan puncak di sektor publik (Sabatier 2005: 23).

Para aktor serta tujuan, strategi dan aktivitas mereka perlu dipahami untuk memahami implementasi. Pendekatan bawah-atas tidak memberi nasihat tentang kebijakan preskriptif, melainkan lebih mendeskripsikan apakah faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan dalam mencapai tujuan (Matland 1995). Pendekatan ini penting dan strateginya fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan kesulitan lokal dan faktor kontekstual. Akan tetapi, pendekatan ini mengalami kelemahan karena kontrol kebijakan seharusnya dilaksanakan aktor-aktor yang kekuasaannya menurun dari akuntabilitas mereka atas pemilih yang berdaulat melalui wakil-wakil terpilih mereka, tetapi otoritas para pemberi pelayanan pada tingkat lokal tidak mempunyai kekuasaan seperti itu. Pendekatan bawah-atas juga cenderung terlalu menekankan pada level otonomi lokal (Matland 1995).

Pendekatan hibrida merupakan pendekatan kombinasi (*hybrid approach*) dalam implementasi yang memadukan variabel utama dari pendekatan atas-bawah dan bawah-atas ke dalam kerangka tunggal. Pendekatan ini memadukan berbagai pendekatan, perbandingan lintas-kebijakan, tekanan pada peran dari negara sekaligus pengendalian pada analisis sistematis, khususnya untuk melihat variasi di berbagai latar, kebijakan, dan waktu dengan hasil yang diharapkan lebih komprehensif.

Helga Puzl dan Oliver Treib (dalam Fischer et al., 2007) mengemukakan bahwa teori-teori hibrida dalam implementasi kebijakan mendapat kontribusi dari beberapa pakar utama, antara lain Elmore (1978), Majone dan Wildavsky (1978), Scharpf (1978), Mayntz (1977), Windhoff-Heritier (1980), Ripley dan Franklin (1982), Sabatier (1986), Goggin et al. (1990), dan Winter (1990). Sebagai reaksi terhadap perdebatan antara pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, para peneliti seperti Elmore (1978), Sabatier (1986), dan Goggin et al. (1990) berusaha untuk mensintesis kedua pendekatan tersebut, dengan memasukkan beberapa kelebihan masing-masing ke dalam model implementasi kebijakan mereka.

Implementasi kebijakan publik dengan pendekatan terpadu adalah sintesis di antara pendekatan-pendekatan alternatif, baik pendekatan atas-bawah maupun bawah-atas, terutama untuk melihat ide-ide kunci dari masing-

masing. Perspektif inovatif ini digagas oleh Richard Elmore (1978). Dalam perspektif ini, kebijakan dari atas dipertimbangkan, namun pilihan individu dan organisasi yang menjadi inti masalah kebijakan juga diperhatikan, demikian pula aturan, prosedur, dan struktur yang paling dekat dengan pilihan-pilihan tersebut, instrumen kebijakan yang ada untuk mempengaruhi berbagai hal tersebut serta kebijakan praktis yang layak untuk dapat mencapai tujuan kebijakan dari atas.

Selain mengakui pentingnya perencanaan dari atas, pendekatan hibrida juga berfokus pada tindakan individu sebagai titik berangkat yang memungkinkan mereka dilihat sebagai respons terhadap masalah atau isu dalam bentuk pilihan-pilihan di antara berbagai alternatif (Elmore, 1978). Dalam konteks ini aspek yang terpenting dalam implementasi kebijakan adalah tanggung jawab (*responsibility*) dan kepercayaan (*trust*). Hal ini karena tanggung jawab bicara tentang hubungan antara tujuan dan hasil, sedangkan kepercayaan bicara tentang proses penerapan kebijakan agar menimbulkan manfaat (Lane, 1987: 542). Lane berpendapat bahwa pendekatan atas-bawah menekankan 'sisi tanggung jawab', sedangkan pendekatan bawah-atas menekankan 'sisi kepercayaan'. Intinya, implementasi kebijakan merupakan kombinasi antara tanggung jawab dan kepercayaan.

Dalam pendekatan hibrida, keberhasilan implementasi program tergantung pada pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Selain harus selalu mulai dengan pertimbangan mengenai instrumen kebijakan dan sumber daya yang tersedia bagi perubahan kebijakan, para pembuat kebijakan juga harus mengidentifikasi struktur insentif bagi para pelaksana dan kelompok-kelompok target kebijakan (Helga Puzl dan Oliver Treib (dalam Fischer et al., 2007:95). Bagi Sabatier (1986), pendekatan hibrida muncul dalam kerangka advokasi kebijakan yang sama dengan pendekatan bawah-atas ketika analisis dimulai dari masalah kebijakan dan berlanjut dengan rekonstruksi strategi dari aktor yang terkait dalam rangka memecahkan masalah. Dengan pergeseran pendekatan atas-bawah, Sabatier (1986) menekankan peran pembelajaran kebijakan dan pentingnya kondisi sosial-ekonomi eksternal yang bisa berdampak terhadap pembuatan kebijakan. Perpaduan arah dalam pembuatan kebijakan ini membawa implikasi terhadap pertimbangan atas-bawah dan bawah-atas dalam proses implementasi kebijakan.

Pemaduan antara pendekatan atas-bawah (variabel makro) dan bawah-atas (variabel mikro) dilakukan untuk mendapatkan kelebihan dari kedua pendekatan, mengurangi kelemahan kedua pendekatan dan memungkinkan level-level berbeda bisa berinteraksi secara regular (Matland 1995). Goggin et al. (1990) menyatakan diri merupakan pendiri generasi ketiga dari model implementasi kebijakan, karena mereka berusaha menjembatani kesenjangan antara pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Mereka mengakui perspektif keputusan kebijakan yang didefinisikan secara terpusat untuk diimplementasikan oleh aktor-aktor di tingkat lebih rendah. Namun, mereka juga memahami

bahwa pelaksana kebijakan juga merupakan aktor-aktor politik yang memiliki haknya sendiri dan hasil usahanya memerlukan proses negosiasi rumit antara pelaksana kebijakan dan otoritas-otoritas pemerintah pusat (Helga Puzl dan Oliver Treib, dalam Fischer et al., 2007: 96).

Menurut Helga Puzl dan Oliver Treib (dalam Fischer et al., 2007: 97), teori-teori yang mendasari pendekatan hibrida menimbulkan inovasi yang penting dalam teori-teori implementasi kebijakan. Teori-teori tersebut berusaha mengatasi kelemahan konseptual dari perdebatan yang terpolarisasi antara pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, dan memadukan pengarah politik pemerintah pusat dan pentingnya otonomi daerah. Namun, implementasi kebijakan sering terjadi karena adanya banyak pemangku kepentingan yang berinteraksi diantara level-level yang berbeda sehingga para pembuat kebijakan pusat maupun aktor lokal penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di Kabupaten Supiori. Penelitian ini berfokus pada implementasi pembangunan RLH di daerah yang sedang berkembang dengan pendekatan hibrida. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi partisipan di lapangan dan wawancara mendalam serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengumpulan data primer dibantu oleh informan kunci, yang ditemukan dengan teknik purposif atau sesuai tujuan penelitian, antara lain Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, petugas lapangan dalam pembangunan RLH, tokoh agama dan adat, otoritas distrik, kelurahan/kampung, tokoh pemuda dan perempuan, serta masyarakat yang menerima dana bantuan program pembangunan RLH di lokasi penelitian.

Peneliti turun lapangan secara langsung untuk melakukan observasi partisipan dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, peneliti dibantu dengan beberapa alat wawancara seperti daftar pertanyaan semi-terstruktur sebagai panduan pengumpulan data yang relevan dengan indikator yang diteliti. Data yang dikumpulkan berhubungan dengan implementasi kebijakan pembangunan RLH, khususnya mengenai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori untuk membangun RLH sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Mengacu pada pendapat Miles dan Huberman (2009), analisis kualitatif ini dilakukan melalui tiga alur kegiatan secara simultan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan RLH di Kabupaten Supiori pada dasarnya adalah stimulasi pemerintah daerah berupa dana yang diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk membantu pembangunan RLH. Rumah itu dibangun dengan prakarsa dan upaya dari masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, meliputi perbaikan, pemugaran, perluasan atau pembangunan rumah baru serta lingkungannya. Pemerintah Kabupaten Supiori sadar mereka memiliki keterbatasan daya beli dan perlu diberi dukungan untuk memperoleh RLH. Kelompok sasaran penerima dana bantuan sosial pembangunan RLH adalah warga masyarakat kampung dengan mata pencarian tidak tetap dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Kondisi rumah sebagian besar masyarakat Kabupaten Supiori umumnya masih memprihatinkan, baik di daerah perdalaman, perdesaan maupun perairan dangkal pinggir laut. Di perdalaman, rumah penduduk biasanya dibangun berbentuk panggung untuk menghindari binatang liar dan dalam kurun waktu lama rumah panggung menjadi rumah tradisional daerah perdalaman Supiori. Di perdesaan, rumah dibangun langsung di atas pondasi tanpa panggung. Di perkampungan perairan dangkal pinggir laut, rumah dibangun di atas pancang kayu yang berjajar. Masyarakat belum memiliki rumah permanen dan sebagian besar berupa rumah tua yang sudah rusak. Kondisi rumah itu umumnya tidak layak huni dan masih banyak rumah induk ditinggali lebih dari satu kepala keluarga, terutama anak-anak yang sudah berkeluarga tetapi tetap tinggal di rumah orangtuanya karena mereka berpenghasilan rendah dan tidak mampu membangun rumah. Pada tahun 2012, banyak rumah di Kabupaten Supiori masih berbentuk sederhana dan tidak layak huni. Pemerintah daerah melihat rumah-rumah sederhana itu tidak layak huni dan perlu dibangun. Oleh karena itu, putra daerah, Fredrik Manufandu, sebagai Bupati terpilih periode 2011-2016 mempunyai prakarsa kebijakan membangun RLH bagi masyarakat kurang mampu. Program pembangunan RLH ini dilaksanakan sebagai wujud pemberdayaan potensi masyarakat dan pemerintah kampung dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat kampung.

Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni

Pembangunan RLH dilaksanakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di 38 kampung se-Kabupaten Supiori sejak tahun 2012. Dana pembangunan itu berasal dari APBD Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2012-2015 sebesar Rp38.000.000.000 (Lampiran Tabel 1). Setiap kampung memperoleh dana bantuan sosial sebesar Rp1.000.000.000, yang dibagi menjadi 20 keluarga per kampung atau Rp50.000.000 per penerima. Jumlah dana bantuan sosial itu tidak dibedakan antara daerah-daerah yang berbeda, baik di perdalaman, perdesaan maupun perairan dangkal pinggir laut. Program ini dilaksanakan

oleh Dinas PMPK Kabupaten Supiori sebagai bagian yang tak terpisahkan dari implementasi UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagai amanat agar pemerintah dan masyarakat Kabupaten Supiori dapat berkreasi dan berinovasi dalam pembangunan daerah termasuk melalui pemberdayaan menuju kemandirian masyarakat kampung. Sejak dilaksanakan pada tahun 2012 hingga 2015, 3.000-an RLH berhasil dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Supiori.



Gambar 1. RLH Terbangun Optimal di Kampung Waryesi, Distrik Supiori Timur (a); Kampung Warbefondi, Distrik Supiori Selatan (b); Kampung Amyas, Distrik Supiori Barat; dan (e) Kampung Fanjur, Distrik Supiori Utara



Gambar 2. RLH Terbangun Optimal (a) dan Kurang Terbangun Optimal (b) di Perairan Laut Dangkal Pinggir Pantai Kampung Rayori, Distrik Kepulauan Aruri

Pembangunan RLH di Kabupaten Supiori adalah wujud implementasi pembangunan yang berorientasi pada tata-kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Peran aktif ini ditunjukkan dengan adanya prakarsa pemerintah daerah (*top-down*) untuk meningkatkan keberdayaan potensi masyarakat dan pemerintah kampung melalui pembangunan RLH. Mengingat banyak masyarakat berpendapatan rendah dan selama ini belum mampu membangun tempat tinggalnya menjadi layak huni, maka Pemerintah Kabupaten Supiori berprakarsa aktif untuk memberikan dana bantuan sosial pembangunan RLH.

Di Kabupaten Supiori, otoritas pelaksanaan pembangunan RLH di setiap kampung didelegasikan khusus kepada Dinas PMPK. Sesuai dengan nama lembaga, PMPK mempunyai tugas utama melaksanakan program

Tabel 1. Pelaku dan Peran Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Pembangunan RLH

No	Pelaku	Peran Pengelola Pengguna Dana BLM
1.	Kabupaten	
a.	Tim Koordinasi	Koordinasi sinkronisasi monitoring dan evaluasi
b.	PMPK dan PKK	Penanggungjawab program pemberdayaan kampung
c.	Dinas Keuangan	- Memindah bukukan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari kas daerah ke rekening dana block grant (BLM) - Memindah bukukan dana dari rekening khusus ke rekening TPKK berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari PJOK Kabupaten (PMPK)
d.	Satker (PJO Kabupaten)	Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)
e.	Kantor Cabang Kas Bank Papua Kabupaten	- Melakukan transaksi pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari rekening khusus ke rekening BLM di rekening kampung (nama kampung) - Mengantar dana kesemua lokasi yang tercantum dalam surat keputusan ini - Memberikan laporan bulanan realisasi penyaluran BLM kepada ketua tim koordinasi kabupaten dan kepada Bank Papua
6.	Distrik	
a.	Kepala distrik (Penanggung jawab operasional kegiatan distrik)	- Melakukan verifikasi atas pengajuan rencana kerja dan penggunaan dana dari TPKK - Menerbitkan surat persetujuan atas rencana kerja dan penggunaan dana oleh TPKK kepada penanggung jawab program pemberdayaan kampung kabupaten (PMPK) - Melakukan pengawalan dan pembinaan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban keuangan kegiatan - Menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati tentang pelaksanaan program BLM secara berkala (bulan, triwulan dan semester)
7.	Kampung	
a.	Tim Pengelola Kegiatan Kampung Kelurahan (TPKK)	- Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) - Ketua TPKK menandatangani slip penarikan dari rekening kampung/ kelurahan - mengelola dana BLM - Menyampaikan slip penarikan dana pada saat musyawarah kampung kelurahan pertanggung jawaban dana tahap I dan II
8.	Wakil masyarakat yang dipilih saat Muskam	Menandatangani slip penarikan dana dari Rekening Kampung/ Kelurahan (Rek, TPKK)
9.	Kepala Kampung/ Lurah	- Menandatangani Surat Penetapan Kepala Kampung/ Kelurahan (SPKK) - menandatangani slip penarikan dana dari Rekening Kampung/ Kelurahan (Rek, TPKK) yang dikelola TPKK

Sumber: Data diolah (2018)

pembangunan daerah yang berorientasi dasar pada pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung. Artinya, walaupun prakarsa awal program pembangunan yang dicanangkan berasal 'dari atas', baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, orientasi utamanya tetap untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung. Di tingkat kampung, Kepala Kampung adalah Panitia Program Pembangunan RLH untuk kampungnya. Kepala Kampung membuat rencana penggunaan dana dan membuat laporan penggunaan dana, membuat administrasi daftar tenaga kerja pembangunan RLH, mendokumentasikan nota-nota yang dibuat dalam penggunaan dana bantuan sosial selama proses pembangunan, dan mengambil foto dokumentasi pembangunan RLH. Dengan usulan pemerintah kampung melalui Badan Musyawarah Kampung, Pemerintah Daerah melalui PMPK menentukan lokasi dan alokasi bantuan sosial pembangunan RLH. Orientasi pemberdayaan masyarakat inilah yang menggeser pendekatan atas-bawah menjadi kombinasi dengan pendekatan bawah-atas atau sering disebut sebagai pendekatan hibrida.

Pengelolaan dana bantuan sosial pembangunan RLH di Kabupaten Supiori dilakukan dengan pedoman khusus yang dibuat untuk pembangunan kampung sebagai pegangan semua pelaku pengelola program, termasuk masyarakat, sehingga implementasinya bisa mencapai tujuan program dan menghindari agar tidak sampai terjadi kesalahan prosedur dan penyimpangan dana. Semua pelaku pembangunan RLH dan masyarakat harus mentaati petunjuk yang berlaku demi keberlanjutan pembangunan RLH di Kabupaten Supiori. Pengelolaan dana bantuan sosial pembangunan RLH itu dilaksanakan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Supiori dalam pengembangan kapasitas pengelolaan pembangunan RLH. Hal awal ini sangat penting dalam memberikan kewenangan lebih besar kepada masyarakat dan pemerintah kampung.

Pendekatan Hibrida dalam Pembangunan RLH

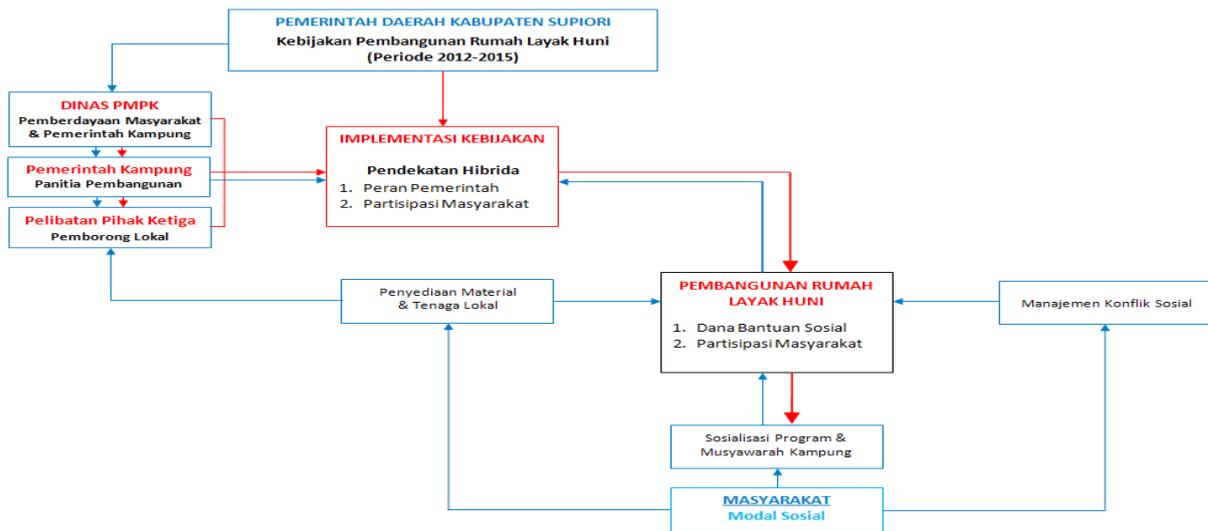
Pembangunan RLH di Kabupaten Supiori dilaksanakan dengan anggaran negara yang dibelanjakan untuk pembangunan perumahan masyarakat melalui dana Otonomi Khusus. Pembangunan RLH disertai penyediaan sarana dan prasarana umum yang mendukung. Di Kabupaten Supiori, peran pemerintah sebagai representasi dari negara sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan RLH karena masyarakat penerima dana bantuan sosial berpenghasilan rendah dan tidak mampu membangun rumahnya sendiri. Pembangunan RLH menjadi tanggung jawab utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (PMPK). Dinas PMPK adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam pembangunan RLH, Dinas PMPK Kabupaten Supiori memainkan peran yang strategis, khususnya dalam merumuskan sekaligus melaksanakan kebijakan teknis

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat daerah, pengelolaan keuangan dan aset kampung serta pemerintahan kampung. Dinas PMPK melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan kerjasama dalam mendukung pembangunan RLH. Di bawah Dinas PMPK, kebijakan pembangunan RLH dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung. Dengan pendekatan atas-bawah, pembangunan RLH sejak tahun 2012 dilaksanakan melalui beberapa tahap, antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan pekerjaan, revisi terhadap pelaksanaan pembangunan, dan penyelesaian kegiatan. Pembangunan RLH bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kampung, khususnya untuk memberikan pelayanan dasar perumahan dan permukiman sehat kepada masyarakat berpendapatan rendah atau kurang mampu.

Pada prinsipnya, pemerintah daerah melalui Dinas PMPK memainkan peran dominan dalam pelaksanaan pembangunan RLH. Namun, pemerintah daerah juga menyediakan ruang partisipasi masyarakat yang bertumpu pada prakarsa dan swadaya masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan atas RLH yang dibangun sehingga dapat membangkitkan kepercayaan, kemampuan dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerjasama antara pemangku kepentingan dalam pembangunan RLH. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan RLH diarahkan agar masyarakat semakin berdaya dalam pembangunan yang diadakan di daerah. Pemberdayaan ini dimulai dari proses pengajuan proposal dana bantuan sosial pembangunan RLH, pelaporan penggunaan dana, dan pembuatan dokumentasi proses dan hasil pembangunan. Dengan keterlibatan dalam proses dari awal hingga akhir tersebut, masyarakat menjadi lebih merasa memiliki program dan terlibat dalam pemeliharaan rumah yang terbangun. Selain itu, partisipasi masyarakat juga terlihat dari keterlibatan warga masyarakat dalam sosialisasi dan musyawarah kampung mengenai pembangunan RLH, dalam penyediaan material dan tenaga kerja lokal, serta dalam manajemen konflik sosial akibat diskriminasi saat penentuan penerima bantuan.

Di awal pencaangan pembangunan RLH di berbagai kampung Kabupaten Supiori, warga masyarakat kampung merasa senang terlibat atau ambil bagian dalam pelaksanaan program tersebut. Bagi masyarakat tidak mampu dan belum memiliki RLH, mereka mengharapkan prioritas mendapatkan dana bantuan sosial itu segera. Namun, mereka menyerahkan penentuan prioritas penerima dana bantuan sosial itu kepada tokoh masyarakat dalam acara sosialisasi dan musyawarah kampung pembangunan RLH. Penyerahan penentuan prioritas tersebut adalah salah satu indikasi keterlibatan warga masyarakat dalam mensukseskan pembangunan RLH. Inilah yang disebut partisipasi semi-aktif yaitu seolah-olah tidak terlibat tetapi sebenarnya kepasrahan itu sangat mendukung keberhasilan pembangunan RLH. Logikanya, tidak dapat dibayangkan apa yang terjadi seandainya



Gambar 3. Implementasi Pembangunan Rumah Layak Huni dan Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Program dan Musyawarah Kampung

warga sudah melakukan protes terhadap program pembangunan yang baru disosialisasikan. Jika banyak protes dalam tahap sosialisasi ini, pelaksanaan program akan menemui banyak kendala di lapangan. Penerimaan masyarakat atas siapa saja yang diberi dana bantuan sosial terlebih dulu oleh tokoh masyarakat menjadi kunci awal kesuksesan pembangunan RLH pada tahap selanjutnya. Jadi, warga menerima pembangunan RLH dan menerima prioritas penerima dana bantuan sosial tanpa protes. Sikap ini merefleksikan kepercayaan yang tinggi dari warga terhadap tokoh masyarakat, dalam hal ini kepala kampung dan sekretaris kampung, serta merefleksikan solidaritas tinggi terhadap warga masyarakat lain yang dipandang lebih berhak menerima dana bantuan sosial terlebih dahulu. Hal ini menjadi salah satu indikasi utama kuatnya modal sosial masyarakat kampung di Kabupaten Supiori.

Dalam pembangunan RLH di Kabupaten Supiori, musyawarah kampung memainkan peranan strategis dalam penentuan prioritas penerima dana bantuan sosial RLH. Dalam acara ini, partisipasi terjadi di sepanjang proses musyawarah, terutama dalam membahas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Partisipasi ini dilakukan, baik oleh aparat pemerintah maupun tokoh dan warga masyarakat kampung. Biasanya terdapat tiga pembahasan, yaitu penetapan 20 kepala keluarga penerima bantuan RLH; evaluasi dan pertimbangan kembali jumlah dana bantuan sosial sebesar Rp1.000.000.000 agar diusahakan ditambah sesuai dengan kondisi wilayah pembangunan yang berbeda-beda; dan penetapan jadwal pelaksanaan pembangunan RLH. Jadi partisipasi bukan hanya melibatkan warga masyarakat, melainkan juga tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Mereka menjadi bagian dari Tim Pengelola Keuangan dalam pembangunan RLH, khususnya terlibat dalam mengelola keuangan untuk memastikan dana bantuan sosial yang diberikan itu benar-benar dapat dialokasikan secara nyata untuk membangun RLH. Mereka bukan terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

saja, melainkan juga dalam pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan urusan keuangan pembangunan RLH. Mereka bergerak bersama dalam Tim Pengelola Kegiatan Kampung (TPKK). Musyawarah kampung terbukti menjadi wadah partisipasi masyarakat yang efektif dalam pembangunan RLH di Kabupaten Supiori. Selain memberdayakan warga dan tokoh masyarakat dalam pengelolaan keuangan pembangunan RLH, musyawarah kampung menjadi wadah bagi aparat pemerintah kampung untuk melakukan sosialisasi agar warga masyarakat terlibat memutuskan siapa yang diberi prioritas menerima dana bantuan sosial tersebut terlebih dulu.

Keterlibatan Masyarakat dalam Penyediaan Material dan Tenaga Kerja Lokal

Di Kabupaten Supiori, ketersediaan material bangunan terbatas dan sulit diadakan dari luar, khususnya di daerah yang jauh dari ibukota kabupaten. Ini adalah salah satu kendala yang sulit diatasi dalam pelaksanaan pembangunan RLH, baik di daerah perdalaman maupun kepulauan. Selain karena sarana transportasinya sangat terbatas, biaya pengangkutan juga tinggi. Artinya, daerah-daerah yang berbeda dengan kondisi topografi yang berbeda mempunyai tingkat kemahalan berbeda pula, khususnya akibat masih terbatasnya bahan material untuk membangun RLH serta infrastruktur transportasi, baik lewat darat maupun laut. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dalam penyediaan material dari sumber lokal terbukti sangat strategis dalam mendukung kelancaran pembangunan RLH, khususnya di perdalaman maupun kepulauan. Karena masyarakat merasa senang dengan dana bantuan sosial yang diberikan pemerintah, mereka dengan senang hati berusaha membantu pembangunan RLH yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mereka. Bantuan yang mereka berikan tentu saja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yaitu bukan berupa uang karena mereka tidak memilikinya, melainkan penyediaan material bangunan, khususnya batu gunung untuk pondasi

dan timbunan tanah untuk badan rumah, serta tenaga kerja. Selain menyediakan material bangunan berupa batu gunung atau batu karang untuk pondasi, timbunan tanah untuk badan rumah, serta balok-balok kayu untuk tiang, tidak sedikit warga masyarakat yang menerima bantuan sosial membantu menyediakan pasir untuk membangun rumahnya atau memotong kayu balok untuk keperluan pemasangan kap rumahnya. Mereka tidak menerima penggantian uang dari pemerintah dan tetap saja terlibat sebagai refleksi adanya partisipasi berbasis modal sosial karena mereka sudah merasa senang dibantu pemerintah dalam membangun rumah pribadi yang sebelumnya tidak layak huni. Fenomena ini unik dan cukup merata di berbagai kampung seluruh distrik di Kabupaten Supiori. Di satu sisi, pekerjaan penyediaan material terselesaikan warga masyarakat penerima dana bantuan sosial sendiri, sedangkan di sisi lain pemborong lokal sangat diuntungkan karena warga masyarakat penerima bantuan tidak mengharapkan penggantian biaya dalam pengadaan material tersebut. Mereka siap sedia untuk membantu pengadaan material bangunan yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan mereka.

Selain bantuan yang diberikan secara sukarela, ada juga partisipasi warga masyarakat yang berbayar, yaitu sebagai tenaga kerja lokal. Dalam pembangunan RLH di Kabupaten Supiori, salah satu wujud partisipasi masyarakat adalah keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pembangunan RLH. Mereka terlibat sekaligus dibayar sesuai dengan kemampuan mereka serta sesuai dengan standar bayaran tenaga kerja lokal. Umumnya mereka terlibat membantu pengerjaan pondasi rumah, menyusun batako, pemasangan kap rumah, serta pintu dan paku seng. Bagi mereka, partisipasi masyarakat tidak lantas berupa keterlibatan tanpa bayaran, melainkan juga berupa keterlibatan dalam pembangunan dengan standar bayaran tenaga kerja lokal. Bayaran tenaga kerja lokal penting karena anggaran tenaga kerja memang sudah ada, jadi ada atau tidak ada tenaga kerja lokal, anggaran itu sudah seharusnya dikeluarkan. Tanpa ada partisipasi dalam penyediaan material bangunan dan tenaga kerja lokal, bisa dikatakan pembangunan RLH tidak terlaksana dengan baik dan optimal, terkhusus di daerah dengan topografi atau perairan yang sulit ditempuh. Di sini pentingnya tenaga kerja lokal sebagai wujud partisipasi masyarakat lokal dalam pelaksanaan pembangunan RLH.

Keterlibatan Masyarakat dalam Manajemen Konflik Sosial

Salah satu fenomena menarik yang ditemukan di lapangan adalah adanya kemampuan warga dan tokoh masyarakat di berbagai kampung seluruh distrik di Kabupaten Supiori untuk meredam potensi konflik akibat diskriminasi di dalam penentuan prioritas penerima dana bantuan sosial pembangunan RLH serta untuk mencari jalan keluar penyelesaian masalah di sepanjang pembangunan RLH. Warga masyarakat terlibat strategis

sebagai objek sekaligus subjek pembangunan, yang sudah menerima atau belum menerima dana bantuan sosial tersebut. Warga masyarakat yang sudah menerima dana bantuan sosial itu tidak lantas terlalu senang secara berlebihan, melainkan tetap berendah hati dan menjaga perasaan warga masyarakat lain yang belum menerima dana bantuan sosial tersebut. Mereka selalu menghadiri acara yang berkaitan dengan pembangunan RLH walau mereka sudah menerima dana bantuan sosial tersebut. Mereka juga terbiasa mengikuti kegiatan gotong royong, seperti dalam penyediaan material bangunan untuk RLH yang dibangun belakangan pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, warga masyarakat yang belum menerima dana bantuan sosial pembangunan RLH juga berendah hati untuk tidak dengan mudah tersulut kebencian dan permusuhan terhadap para penerima prioritas dana bantuan sosial tersebut. Mereka bersedia menerima sistem pergiliran dan mereka percaya nantinya mereka mendapatkan bagian serupa pada tahun berikutnya dengan semangat altruisme dan solidaritas, yaitu mengutamakan kepentingan dari warga masyarakat lain yang disepakati bersama lebih membutuhkan dibanding dirinya. Sikap rendah hati serta saling menjaga perasaan warga masyarakat lain ini menjadi refleksi terpenting dari kuatnya modal sosial yang dimiliki oleh warga masyarakat di berbagai kampung seluruh distrik Kabupaten Supiori.

Penerimaan warga masyarakat atas prioritas penerima dana bantuan sosial pembangunan RLH dapat ditemukan cukup merata di berbagai kampung seluruh distrik di Kabupaten Supiori. Kepercayaan masyarakat kepada Kepala Kampung dan Sekretaris Desa menjadi kunci utama kesuksesan pelaksanaan pembangunan RLH di berbagai kampung seluruh distrik Kabupaten Supiori. Adanya kepercayaan menjadi indikasi utama adanya unsur modal sosial yang kuat dalam diri sebagian besar warga masyarakat. Hal ini terbukti turut mendukung kesuksesan pembangunan RLH tanpa ada konflik dan keributan yang berarti akibat kesan diskriminasi, baik di antara warga yang sudah menerima dan belum menerima bantuan sosial maupun di antara warga masyarakat yang sudah dan belum menerima dana bantuan dengan Kepala Kampung dan Sekretaris Desa serta di antara mereka semua itu dengan kontraktor pelaksana pembangunan RLH. Fenomena masyarakat untuk menerima apa pun keputusan Kepala Kampung dan Sekretaris Desa menjadikan warga masyarakat tetap bersikap tenang dan saling menjaga solidaritas. Ini wujud paling penting dari partisipasi warga masyarakat dalam manajemen konflik sosial akibat munculnya diskriminasi saat penentuan prioritas penerima dana bantuan sosial pembangunan RLH.

Dalam mencegah munculnya kesan diskriminasi, Kepala Kampung biasanya menekankan pentingnya mendahulukan warga masyarakat yang mereka ketahui bersama benar-benar perlu diprioritaskan menerima dana bantuan sosial pembangunan RLH. Kebanyakan

warga masyarakat percaya bahwa keputusan Kepala Kampung adalah keputusan terbaik dan dapat dipercaya karena semua warga yang pada dasarnya membutuhkan juga akan mendapatkan bagian pada tahun mendatang. Dalam meyakinkan warga, Kepala Kampung dibantu oleh Kepala Dusun, sehingga warga yang belum menerima dana bantuan sosial RLH menjadi lebih percaya mereka nantinya juga mendapatkan bagian. Jadi, peran Kepala Kampung terbukti strategis dalam menentukan prioritas penerima dana bantuan sosial RLH sampai tahapan pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, atau bahkan pelaporan kegiatan pembangunan. Hal ini menjadi perhatian utama Kepala Kampung supaya konflik dan keributan tidak terjadi di tengah masyarakat akibat ada warga merasa bahwa dana bantuan sosial RLH dibagikan secara tidak adil.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan RLH di Kabupaten Supiori dilaksanakan dengan penerapan pendekatan bawah-atas dengan orientasi utama pada pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Supiori berupaya meningkatkan peran masyarakat dengan mobilisasi sumber daya secara proporsional untuk mewujudkan RLH yang memadai. Salah satu indikasi utama pendekatan atas-bawah dalam pembangunan RLH adalah orientasi pada pembangunan RLH. Pemerintah daerah tidak otoriter dengan perencanaan murni dari atas, tetapi melakukan perencanaan dengan menyelami kebutuhan masyarakat. Karena masyarakat yang dibantu berpenghasilan rendah, rumah yang dibangun adalah rumah yang mampu memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan RLH di Kabupaten Supiori itu dibuat dan dilaksanakan dengan pendekatan kombinasi antara atas-bawah dan bawah-atas, atau dikenal sebagai pendekatan hibrida.

SIMPULAN

Pembangunan RLH di Kabupaten Supiori dilaksanakan sejak tahun 2012 dengan orientasi pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah. Pembangunan RLH ini dibiayai dengan dana bantuan sosial (BLM) dari dana Otonomi Khusus. Dana tersebut dikelola secara khusus dan ditransfer secara langsung ke rekening pemerintah kampung untuk menghindari kerumitan birokrasi. Dalam implementasinya, orientasi tata-kelola pemerintahan yang baik terlihat nyata. Perpaduan antara peran Pemerintah Kabupaten Supiori serta Kepala Distrik dan Kepala Kampung, dan peran masyarakat benar-benar sudah terlihat. Perpaduan ini merefleksikan kombinasi pendekatan hibrida dalam implementasi pembangunan RLH. Dalam kasus ini, masyarakat berpartisipasi aktif melalui tiga bentuk partisipasi, yaitu keterlibatan dalam

sosialisasi maupun musyawarah kampung, penyediaan material dan tenaga kerja lokal, serta manajemen konflik sosial akibat kesan diskriminasi dalam penentuan prioritas penerima dana bantuan sosial pembangunan RLH. Dengan prosedur operasi standar yang dibuat, sulit bagi pemerintah daerah untuk berlaku dominan dan melakukan intervensi atas masyarakat. Sebaliknya, prosedur operasi standar yang ada memungkinkan masyarakat berpartisipasi untuk mendampingi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di masing-masing kampung prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Daraba, H.D. (2017). Pengaruh program dana desa terhadap tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, *Sosiohumaniora*, 19, (1), 52-58
- Elmore, R.F. (1978). Organizational models of sosial program implementation, *Public Policy*, 26, (2), 185-228.
- Festus, & Amos, (2015). Housing Policy in Nigeria: An Overview, *American International Journal of Contemporary Research*, 5, (2).
- Goggin, M.L., Bowman A.O., Lester J.P., & O'Toole, L.J. (1990). *Implementing Theory and Practice*, England: Scott, Foresman and Company.
- Lane, J.E. (1987). Implementation, accountability and trust, *European Journal of Political Research*, 15, (5), 527-46.
- Mazmanian, D.A. & Sabatier, P.A. (1983) *Implementation and Public Policy*. Glenview, Ill.: Scott, Foresman.
- Miles, B.M. & Huberman, A.M. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Monkkonen, P. (2013). Urban land-use regulations and housing markets in developing countries: Evidence from Indonesia on the importance of enforcement. *Land Use Policy*, 34, 255-264.
- Parsons, W. (1995). *Public Policy*. Aldershot: Edward Elgar.
- Redjo, S.I. (2009), *Transformasi Manajemen Pemerintahan: Kasus Di Pemerintah Kota Bandung*, *Sosiohumaniora*, 11, (3), 25-35.
- Sabatier, P.A. (1986) Top-down and bottom-up approaches to implementation research: A critical analysis and suggested synthesis, *Journal of Public Policy*, 6, (1), 21-48.
- Sumule, A. (2003). *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.

SIMBOLISME AYAM JAGO DALAM PEMBANGUNAN KULTURAL MASYARAKAT KABUPATEN CIANJUR

Ani Rachmat¹ dan Agusmanon Yuniadi²

¹Program Studi Sastra Rusia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran

²Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran

E-mail: ani.rachmat@unpad.ac.id

ABSTRAK. Penelitian ini mengkaji latar kultural dan historis pemaknaan ayam jago dalam kebudayaan Indonesia secara umum, dan kebudayaan Sunda secara khusus. Ayam pelung menjadi fokus kajian karena secara simbolik erat kaitannya dengan masyarakat Kabupaten Cianjur. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Sumber-sumber penelitian ini menggunakan sumber naskah, buku, jurnal, serta sumber lisan berupa wawancara. Ayam jago adalah satwa yang merepresentasikan kekuatan. Dalam kebudayaan Sunda, ayam jago erat kaitannya dengan kisah Ciung Wanara. Kisahnya merepresentasikan kebiasaan masyarakat yang gemar dalam memelihara dan mengadu ayam. Kebiasaan memelihara ayam tergambar pula dalam kebiasaan masyarakat Kabupaten Cianjur terhadap ayam pelung. Ayam pelung yang memiliki suara bagus dimaknai bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi historis dan kultural. Ayam pelung pun kemudian menjadi simbol pembangunan fisik dan psikis Kabupaten Cianjur. Slogan “Cianjur Jago” mengandung harapan akan terciptanya masyarakat yang “jago” secara positif dalam pembangunan kultural masyarakat Kabupaten Cianjur di masa yang akan datang.

Kata kunci: Ayam Jago; Ayam Pelung; Cianjur; Simbolisme

SYMBOLISM OF THE ROOSTER AS THE CULTURAL BUILDING OF CIANJUR REGENCY'S SOCIETY

ABSTRACT. *The main subject this study is the meaning of the rooster – as cultural and historical field – in Indonesian Cultural and especially in Sundanese Culture. “Ayam Pelung” (a kind of Indonesian Rooster) is object of study because it is relate with symbolic value of Cianjur’s society custom. Study employs a Historical Method, which consists of four stage: Heuristic, Critic, Interpretation, Historiography. The study utilize some sources such as Sindanese manuscript, book, journal and oral sources. In the general meaning, rooster represent of the strength. It seen in story of Ciung Wanara, a Sundanese Culture tale. The story show the custom of society who like keep and fight of their rooster. This custom seen in habitual Cianjur’s Socociety who delight of Ayam Pelung. Ayam Pelung has beautiful voice as economic profit, cultural and historical value. Then, Ayam Pelung is symbolically become sign of Cities building and philosophically to construct of mentalities peoples. Cianjur Regency’s government has slogan “Cianjur Jago” which is contains the hope of positive society in the future.*

Key words: *The Rooster; Ayam Pelung; Cianjur; Symbolism*

PENDAHULUAN

“Tugu Ngaos Mamaos Maenpo akan diganti menjadi Tugu Ayam Pelung dan setiap pukul 04.00 WIB akan berkokok sendiri seperti alarm. Selain itu juga masyarakat tidak hanya tahu ayam pelung saja, namun juga harus mengerti filosofi sejarahnya.” (Irvan Rivano Muchtar, Bupati Cianjur) (cianjurkini.com, <http://www.cianjurkini.com/>, diakses 13 Januari 2017).

“Cianjur Jago”. Itulah slogan kota yang sekarang gencar didengungkan bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar. *Booming*-nya slogan ini dibarengi pula dengan penampakan wajah kota yang banyak berhiaskan logo kepala ayam berjengger merah. Ayam jago dijadikan simbol yang merepresentasikan identitas kultural masyarakat Cianjur. Filosofinya pun menjadi landasan bagi pembangunan kota dan masyarakat Cianjur secara umum.

Simbol wilayah menjadi hal yang diutamakan pada masa pembangunan sekarang ini. Setiap wilayah, baik kota, kabupaten, provinsi, maupun negara, perlu

memiliki identitas khas dan unik yang membedakannya dengan wilayah lain. Pembangunan ekonomi khususnya pariwisata menjadi alasan utama yang membuat setiap wilayah “berlomba-lomba” mempercantik kotanya dengan pembangunan fisik dan ragam budayanya. Setiap wilayah berusaha menunjukkan identitasnya berdasarkan elemen fisik (*tangible*) maupun psikis (*intangible*), dengan salah satunya memperhatikan nilai-nilai historis serta nilai-nilai lokal setempat sebagai keunikan dan karakteristik sendiri. Kebudayaan merupakan jiwa dan karakter dari suatu wilayah (Amar: 2009).

Kabupaten Cianjur, dengan simbol ayam jagonya merupakan representasi jati diri dan filosofi pembangunan. Simbolisasi ayam jago tak lepas dari pemaknaan terhadap sifat dan karakter ayam jago yang merepresentasikan kegagahan dan kemenangan. Pemaknaan atas wujudnya itulah yang menjadi dasar dan harapan diciptakannya simbol verbal dan simbol monumental di Kabupaten Cianjur. Dalam pembentukannya, identitas kultural memiliki asal dan sejarah yang terus mengalami transformasi. Transformasi ini dipengaruhi oleh sejarah,

budaya, dan kekuasaan (Hall, 1990: 225). Ayam jago pun tidak semata-mata dipilih sebagai sebuah simbol kultural, tetapi pemaknaan terhadapnya telah mengalami proses historis yang panjang.

Kajian ini akan menjawab permasalahan terkait bagaimana pemaknaan ayam jago dalam masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Sunda secara khusus, serta bagaimana aktualisasi pemaknaan tersebut dalam masyarakat Kabupaten Cianjur. Satwa kerap kali dijadikan filosofi simbolik mengenai suatu wilayah ataupun suatu hal. Bukan hanya “maung” yang menjadi filosofi Persib Bandung misalnya, ataupun Garuda yang menjadi satwa simbolik nasional. Dalam hal ini lah penelitian ini penting untuk dilakukan untuk melihat bagaimana masyarakat Kabupaten Cianjur meletakkan dasar filosofi kulturalnya pada ayam jago.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yakni Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Tahap heuristik ialah kegiatan mencari atau mengumpulkan sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan. Kajian ini menggunakan beberapa sumber tertulis berupa buku, jurnal, serta naskah seperti Wawacan Sajarah Galuh untuk melihat pemaknaan ayam jago secara historis dalam masyarakat Sunda. Selain itu, digunakan juga naskah perbandingan yaitu Babad Tanah Jawi yang dalam beberapa isinya memuat cerita ayam (Ciung Wanara) di Kerajaan Galuh. Beberapa buku digunakan pula untuk melihat pola kebudayaan terkait pemaknaan ayam jago secara nasional. Dalam penelitian ini, digunakan sumber lisan berupa wawancara yang dilakukan dengan Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman, sebagai sumber primer dalam melihat kebijakan Kabupaten Cianjur terkait simbolisme jago.

Tahap kedua ialah kritik. Sumber yang didapat kemudian melalui tahap kritik eksternal untuk menguji otentisitas sumber, serta tahap kritik internal untuk menguji kredibilitas pembuat sumber. Perbandingan antar sumber dilakukan pula sebagai bentuk mencari fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini disebut sebagai koroborasi. Koroborasi dilakukan karena dalam mendapatkan fakta sejarah diperlukan suatu dukungan data dari sumber sejarah lain satu atau lebih. Tahap ketiga ialah interpretasi berupa kegiatan menafsirkan fakta-fakta yang ada secara verbal dan faktual hingga dituliskan dalam tahap keempat, yakni historiografi (tahap penulisan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ayam Jago: Peliharaan dan Permainan dalam Historisitas yang Panjang

Ayam merupakan hewan yang sangat tidak asing dalam keseharian masyarakat Indonesia. Hewan dengan nama Latin *Gallus domesticus* ini memiliki nilai

fungsional yang beragam, mulai dari hewan penanda pagi (membangunkan manusia), pemuas batin (hobi memelihara ayam), penghasil rupiah (ternak dan sabung ayam), hingga pemenuh nutrisi – bahkan daging ayam dan telur ayam menjadi standar nilai gizi dan kemewahan pangan yang tinggi dalam perspektif masyarakat Indonesia.

Menjadi menarik tatkala ayam disandarkan pada perspektif sejarah, di mana ke-multifungsi-an itu benar-benar tercatat dalam inskripsi-inskripsi dan juga pada tuturan lisan yang turun temurun. Ada garis historis yang panjang dan subjektivitas yang beragam (pada setiap etnisitasnya) terkait pemaknaan manusia terhadap ayam.

Jejak awal perubahan ayam dari makhluk ekologis menjadi makhluk kultural (dimaknai sebagai bagian dari kebudayaan manusia) tidak lepas dari proses domestikasi atau proses penjinakan. Dalam buku *Why Did The Chicken Cross The World?: The Epic Saga of the Bird That Powers Civilization*, Andrew Lawler menyebutkan bahwa ayam didomestikasi di kawasan Asia Selatan hingga Asia Tenggara sekitar 10.000 tahun lalu (<http://nationalgeographic.co.id>, diakses 10 September 2017). Terkait proses domestikasi ini, seorang antropolog Amerika, Phillis Passariello menyebutkan bahwa manusia memiliki subjektivitas dalam memaknai seekor satwa.

“Seekor anjing dapat menjadi teman baik, penyerang yang menakutkan, ataupun (teman) saat makan malam, (semuanya) tergantung konstruksi kultural dan tergantung bagaimana identitas dan kemampuan anjing ditempatkan oleh manusia”. (Passariello, 1999: 12).

Kutipan dari seorang Antropolog Amerika di atas memberi makna bahwa setiap kultur memiliki banyak cara untuk berinteraksi dengan satwa, secara fisik ataupun metaforik. Upaya domestikasi telah menghadirkan berbagai konstruksi kultural, seperti adanya *labelling* dan *treatment* terhadap satwa. Anjing yang dilahirkan dalam sifat buas, telah dimaknai sebagai “rekan” sejak periode Mesolitik. Begitupun dengan sapi yang berubah dari kelian menjadi ternak, kendaraan, hingga simbol religius. Ayam pun pada dasarnya mengalami pemaknaan sebagai simbol kejantanan (jago).

Secara historis, simbolisme terhadap ayam menghadirkan pemaknaan yang sakral sebagai sebuah representasi kekuatan. Ayam menjadi hewan yang sering diadu sebagai simbol kemerahan kekuasaan. Secara umum, Anthony Reid menggambarkan kebiasaan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara yang sering mengadakan pesta-pesta kerajaan sebagai simbol kemegahan dan kebesaran kerajaan. Segala macam momen – dalam hal ini penobatan raja, perkawinan, penguburan, ritus memasuki usia dewasa, pesta keramaian agama tiap tahun, upacara kesuburan, serta penerimaan tamu luar negeri – diperingati dan dilaksanakan dengan arakan-arakan besar dan hiburan umum (Reid, 2014: 200-201). Dalam hiburan itulah terdapat pertunjukan pertarungan satwa sebagai sebuah adu kekuatan. Terkait dengan ayam, pemaknaan

sebagai kekuatan terlihat pada makna kata *sabung* dalam adu ayam. Kata *sabung* yang terdapat dalam inskripsi-inskripsi sekitar 922 M secara metaforis diartikan sebagai “pahlawan”, “serdadu”, “pemenang” (Geertz, 1992: 212).

Ayam memang identik dengan hewan aduan. Hal ini telah dinarasikan Thomas Stamford Raffles dalam *The History of Java* bahwa *sabung ayam* dan adu burung puyuh menjadi perlombaan yang sudah sangat umum dilakukan di kalangan masyarakat biasa (Raffles, 2014: 241-243). *Sabung ayam* menjadi pesta yang sering dilakukan di tiap kota kecil dan pasar (Reid, 2014: 212).

Sumber tertulis tertua menyebutkan bahwa adu sudah dipraktikkan masyarakat Bali sejak abad ke-10, seperti digambarkan dalam Prasasti Sukawana dan Prasasti Batur Abang (*Historia*, diakses 22 September 2014). Di Jawa, adu ayam telah dilakukan sejak abad ke-11, yang termuat dalam *Serat Jago*, dengan cerita Cindelaras yang terkenal. Bahkan, kebiasaan ini lebih jauh lagi dilakukan jika merujuk pada folklor Ciung Wanara, dengan latar Kerajaan Galuh pada abad ke-8.

Pemaknaan historis ayam jago pada masyarakat Sunda memang erat sekali mengacu pada kisah Ciung Wanara. Kisah yang termuat dalam Wawacan Sajarah Galuh ini menceritakan suatu perebutan kekuasaan di Kerajaan Galuh. Kisah ini diperkuat pula dengan adanya artefak yang berada di Situs Karangkamulyan, Kabupaten Ciamis. Cerita berawal dari berkuasanya seorang penguasa bernama Ratu Galuh, pendiri Kerajaan Galuh. Setelah mendirikan dan memerintah Kerajaan Galuh, Ratu Galuh memutuskan untuk menjadi pertapa. Ia kemudian menyerahkan singgasana kerajaannya kepada Ki Bondan yang berkedudukan sebagai patih. Ratu Galuh menitipkan kerajaan kepada Ki Bondan dan juga menitipkan cincin *soca ludira*. Ada sebuah perjanjian jika Ratu Galuh selesai bertapa, maka Ki Bondan harus segera menyerahkan kembali tahtanya. Namun, yang dilakukan Ki Bondan ialah berkuasa sewenang-wenang. Cincin *soca ludira* dipakainya dan seketika wajahnya berubah menjadi Ratu Galuh. Perubahan ini tidak diketahui oleh siapapun (Sukaradja dalam Lubis, 2013: 91).

Setelah berkuasa dalam waktu yang lama, di keraton lahir lah seorang bayi laki-laki dari rahim Naganingrum, istri Ratu Galuh. Kelahiran bayi laki-laki itu membuat Ki Bondan khawatir, lalu menyuruh patih kerajaan untuk membunuh bayi tersebut dan membuangnya ke Sungai Citanduy. Sang Patih tidak benar-benar membunuh bayi tersebut, tetapi hanya menghanyutkannya dalam sebuah peti bersama sebutir telur ayam. Bayi laki-laki itu kemudian ditemukan oleh Aki dan Nini Balangantrang, yang merupakan kakek Naganingrum. Setelah ditemukan, mereka kemudian menamakan bayi tersebut dengan nama Ciung Wanara. Sementara itu, telur ayamnya dierami oleh Nagawiru di Gunung Padang. Telur tersebut menetas dan jadilah seekor ayam jantan peliharaan Ciung Wanara (Sukaradja dalam Lubis, 2013: 92).

Di pusat Kerajaan Galuh, Ki Bondan menye-

lenggarakan sayembara melalui *sabung ayam*. Raja Galuh akan menyerahkan setengah wilayah kerajaannya kepada orang yang ayamnya bisa mengalahkan ayam milik raja. Ayam Ki Bondan mampu dikalahkan oleh ayam Ciung Wanara. Namun, Ki Bondan mengingkari janjinya. Untuk mendapatkan haknya, Ciung Wanara membuat penjara dari besi dan meminta Ki Bondan untuk memeriksanya. Ketika Ki Bondan sedang berada di dalam penjara besi, Ciung Wanara menguncinya. Terpenjaralah Ki Bondan dalam kurungan peti itu (Sukaradja dalam Lubis, 2013: 93).

Kisah Ciung Wanara termuat juga dalam Babad



Sumber: Dokumentasi Pribadi 2009

Gambar 1. Penyabungan Ayam di Situs Karangkamulyan

Tanah Jawi, dengan narasi dan penokohan yang sedikit berbeda. Namun, cerita seorang anak terbuang yang kemudian menjadi raja berkat *sabung ayam*, tetap menjadi narasi utama. Dalam Babad Tanah Jawi, kisah Ciung Wanara menjadi latar belakang terbentuknya Kerajaan Majapahit. Putra mahkota raja yang bernama Raden Sesuruh berperang melawan Ciung Wanara yang bergelar Arya Banyak Wide. Karena kalah, Raden Sesuruh pun pergi ke arah timur, hingga akhirnya mendirikan Kerajaan Majapahit (Olthof, 1941: 14-23).

Di balik kisah Ciung Wanara tersebut terdapat sebuah representasi bahwa memelihara dan mengadu ayam sudah menjadi kebiasaan dan hiburan yang lazim dilakukan. Telah ada suatu pemaknaan “jago” terhadap ayam sebagai hewan adu, di mana pemaknaan tersebut mengantarkan pada adanya perlakuan istimewa berupa treatment terhadap ayam agar menjadi pemenang dalam sebuah pertarungan. Treatment semacam ini digambarkan Clifford Geertz pada kebiasaan orang Bali.

“(mereka) menghabiskan sejumlah besar waktu untuk kesayangan mereka itu, merawat mereka, memberi mereka makan, membicarakan mereka, mencoba mereka satu sama lain, atau hanya menatap mereka dengan kekaguman yang mengasyikkan bercampur lamunan yang melayang-layang...berjongkok bermalas-malasan di bangsal pertemuan atau sepanjang jalan dengan pinggul di bawah, bahu ke depan, seperti berlutut, separuh atau lebih dari mereka memegang seekor jago, mengapitnya di antara kedua pahanya, melambungkannya naik turun dengan lembutnya untuk menguatkan kaki-kakinya, membelai bulu-bulunya dengan sensualitas abstrak, menyentuhnya

ke jago tetangga untuk membangkitkan gairahnya, menjauhkannya ke pinggangnya dan menenangkannya kembali..” (Geertz, 1992: 213).

Lebih jauh lagi Clifford Geertz menjelaskan bahwa ayam sabungan yang dipelihara di dalam kandang rotan, biasanya sering dipindah-pindahkan untuk menjaga keseimbangan sinar matahari. Memberinya makan jagung dan diet khusus, memasukkan lada merah ke paruh dan dubur untuk meningkatkan gairah, dimandikan dengan air suam-suam kuku, jamu-jamuan, bunga, dan bawang. Ayam pun disikat dengan menggunakan bulu ekor kuda, tajinya diasah, bulunya di rapikan, dan kakikanya dipijat (Geertz, 1992: 213).

Clifford Geertz pun bicara soal keranjingan jago, di mana seseorang dapat menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk jago-jago itu. Hal ini tercermin dalam Kisah Ciung Wanara di mana Ki Bondan sebagai raja Galuh berani mempertaruhkan wilayah kerajaannya gara-gara seekor ayam jago. Secara umum, pemaknaan ayam jago sebagai sebuah peliharaan (hobi) dan juga sebagai satwa aduan telah memiliki benang merah historis yang sangat panjang. Kebiasaan ini tidak bisa hanya disekat dalam satu lokalitas saja, tetapi kebudayaannya me-“nasional”. Namun demikian, tetap saja setiap kelokalan memiliki keunikan dan karakteristik yang khas. Pun dengan ayam jago (ayam pelung) dalam masyarakat Cianjur yang telah memiliki tempat sebagai kebiasaan khas yang diwariskan secara turun temurun.

Ayam Pelung Cianjur dan Adopsi Simbolis Pembangunan Kultural

Sahutan kokok ayam yang melengking panjang terdengar di setiap pagi. Terlihat pula beberapa laki-laki berjongkok mengusap-ngusap dan memandikan ayam jago yang besar. Sesekali memegang paruhnya atau memijat-mijat tubuhnya. Itulah pemandangan yang sering terlihat di Kecamatan Warungkondang, salah satu kecamatan di Kabupaten Cianjur. Ayam pelung telah menjadi keseharian masyarakat, di mana kepemilikan ayam pelung menjadi sensasi tersendiri. Layaknya merawat anak sendiri, ayam pelung pun mendapat perhatian yang sama terkait kebersihan, kesehatan, dan juga nutrisinya. Pak Agus, salah satu narasumber (sebagai penggiat ayam pelung di Cianjur), menyebutkan bahwa ayam pelung merupakan produk budaya yang khas, di mana tidak ditemukan lagi di kabupaten lain, selain Kabupaten Cianjur (Wawancara Agus pada 7 September 2017). Dengan kata lain, ayam pelung sudah menjadi *trendmark*, selain juga tentunya tauco yang menjadi panganan khas Kabupaten Cianjur. (Saidah dkk, 2012: 25).

Menurut beberapa penuturan masyarakat, kebiasaan memelihara ayam pelung memang berawal dari Kabupaten Cianjur, namun tidak bisa dipastikan awal mula kebiasaan muncul. Tidak ada bukti tertulis, dan yang hanya ada dua versi tradisi lisan. Menurut versi pertama, permulaan munculnya ayam pelung ada sejak 1850,

yang berasal dari Desa Buniasih, salah satu kampung di Kecamatan Warungkondang. Di desa tersebut tinggal seorang kyai sekaligus petani yang bernama Djarkasih atau Mama Acih. Dikisahkan bahwa ia bermimpi bertemu Eyang Suryakencana, sosok yang sangat dipercayai sebagai orang yang sangat sakti. Eyang Suryakencana atau Raden Suryakencana Winata Mangkubumi merupakan seorang putra dari Pangeran Aria Wiratanudatar, seorang pendiri Kabupaten Cianjur (Wawancara Wakil Bupati Cianjur, 8 September 2017). Pada abad ke-19, Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Karesidenan Priangan, selain kabupaten Bandung, Sumedang, Parakanmuncang, Limbangan, dan Sukapura (Muhsin, *Sosiohumaniora*, 2011: 98).

Dalam mimpinya, Kyai Djarkasih diperintahkan untuk pergi ke suatu tempat untuk mengambil seekor ayam. Mimpi itu menjadi kenyataan tatkala Kyai Djarkasih melihat seekor ayam yang berbulu jarang saat ia sedang berada di ladang. Kyai Djarkasih pun kemudian membawa pulang ayam itu dan merawatnya sampai besar. Setelah besar, ayam tersebut memiliki perbedaan dengan ayam kampung lainnya karena suara berkokoknya yang panjang dan mengalun merdu. Ayam ini kemudian dikawinkan dengan ayam biasa, dan melahirkan ayam-ayam pelung yang ada sekarang.

Menurut versi kedua, ayam pelung Cianjur berawal dari 1940 ketika seorang santri bernama H. Kosim dari Jambudwipa Kecamatan Warung Kondang bertamu kepada gurunya bernama Mama Ajengan Gudang. Saat bertamu, H. Kosim berniat untuk membeli sepasang ayam yang menurutnya memiliki bentuk badan yang berbeda dengan ayam lainnya. Niat tersebut terlaksana dan akhirnya ia membawa ayam tersebut ke Kecamatan Warungkondang untuk dipelihara. Konon, ayam itulah yang menjadi bibit bagi ayam-ayam pelung yang ada di Kabupaten Cianjur.

Kedua versi itu dipercayai oleh masyarakat. Di



Sumber: Dokumentasi Pribadi 2017

Gambar 2. Ayam Pelung Cianjur

balik adanya kepercayaan itu, ada sebuah pemaknaan lain oleh masyarakat Cianjur, di mana memelihara ayam pelung dipercaya bisa mendatangkan rezeki, ketentraman, dan kebahagiaan hidup. Tentu manfaat praktisnya menjadi penanda Shalat Subuh bagi masyarakat Cianjur yang mayoritas muslim. Simbolisme seperti ini bisa dikomparasikan dengan pemaknaan masyarakat Jawa terhadap burung perkutut. Burung perkutut – dan juga kuda – menjadi dua dari lima persyaratan yang harus dimiliki laki-laki Jawa. Kelima hal itu adalah turangga (kuda), curiga (senjata), wisma (rumah), wanita (istri), dan kukila (burung perkutut) (Sastroatmodjo, 2006: 11).

Seperti itulah pandangan masyarakat dalam memelihara satwa, dimana terdapat pemaknaan normatif yang disiratkan dalam bahasa simbolik. Pemaknaan simbolik pun kemudian terlihat dalam simbol-simbol kota seperti yang diadopsi Pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap kebiasaan memelihara ayam pelung. Jargon “Cianjur Jago” yang didengungkan memang berasal dari filosofi ayam jago atau ayam pelung. Pemaknaannya kemudian meluas bahwa makna “Jago” menyiratkan keunggulan dalam hal positif. Lebih jauh lagi, slogan Jago di sini menurunkan tujuh pilar pembangunan Kabupaten Cianjur yakni, melaksanakan Shalat di awal waktu, Ashar mengaji, menyantuni anak yatim, membiasakan bersedekah, mencintai fakir miskin, penolakan terhadap kemaksiatan, dan pembentukan kampung yang Islami. Kata “Jago” pun oleh masyarakat Kabupaten Cianjur dimaknai sebagai gabungan kata dari Jujur, Agamis, Gijih, Optimis. (Wawancara Wakil Bupati Cianjur, 8 September 2017).



Sumber: cianjurkab.go.id, diakses 7 Agustus 2017

Gambar 3. Slogan Cianjur Jago

Selain menjadi sebuah jargon, penampakan wajah kota dengan kepala ayam berjengger merah juga sebagai sebuah promosi kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Cianjur. Ayam pelung telah diakui sebagai salah satu aset yang harus dilestarikan. Promosi kebudayaan Kabupaten Cianjur salah satunya ialah dengan banyaknya kontes ayam pelung, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Bahkan, ayam pelung Cianjur telah terkenal hingga Jepang, ketika Kaisar Jepang pada 1980-an meminta bibit ayam pelung untuk dibudidayakan di Jepang. Namun, demi menjaga keaslian dan kekhasannya, pemerintah Kabupaten Cianjur menolak dan hanya

memberi satu ekor ayam pelung saja sebagai bentuk penghormatan (Wawancara Wakil Bupati Cianjur, 8 September 2017).

SIMPULAN

Ayam jago bukan hanya sekedar makhluk ekologis, tetapi pemaknaan masyarakat terhadapnya telah mengubahnya menjadi “makhluk kultural”. Keakraban masyarakat terhadap ayam jago memunculkan pemaknaan tersendiri, sebagai hewan peliharaan dan juga sebagai hewan adu. Ayam pelung sebagai hewan peliharaan dimaknai sebagai warisan kultural yang dipercayai mendatangkan berkah. Masifnya pemeliharaan ayam pelung pada masyarakat Cianjur, membuat pemerintah kabupaten mengadopsinya secara verbal dan visual. Slogan Jago dan juga “ayamisasi” wajah kota merupakan bentuk pemaknaan Pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap kekuatan yang dimiliki ayam jago serta pengadopsian terhadap sosoknya secara simbolik menjadi harapan akan terbentuknya masyarakat yang “jago” seperti karakter ayam tersebut. Simbolisasi pada dasarnya menjadi kebiasaan pada setiap masyarakat. Simbolisasi dilakukan pada hal apapun yang akrab dengan masyarakat bersangkutan, baik itu hewan, tumbuhan, ataupun manusia itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, (2009). Identitas Kota, Fenomena dan Permasalahannya, *Jurnal ruang*, 1, (1), 55-59.
- Geertz, C. (1992). Tafsir Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius
- Hall, S. (1990). Cultural Identity and Diaspora.” Identity: Community, Culture, Difference. London: Lawrence & Wishart
- Lubis, N.H. (2013). Sejarah Kerajaan Sunda. Bandung: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat
- Muhsin, M. (2011). Dinamika Sosial Ekonomi Priangan Abad ke-19. *Sosiohumaniora*, 13, (1), 96-107.
- Olthof, W.L. (2017). Babad Tanah Jawi. Yogyakarta: Narasi
- Passariello, P. (1999). Me and my totem: cross-cultural attitudes towards animals, dalam Francine L. Dolins (ed.), Attitudes to Animals. Cambridge: Cambridge University Press
- Raffles, T.S. (2014). The History of Java. Yogyakarta: Narasi
- Reid, A. (2014). Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid I: Tanah di Bawah Angin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Saidah, Z., Kusno, K. & Wulandari, E. (2012) Strategi Pemasaran Tauco Cap Biruang di Kabupaten Cianjur. *Sosiohumaniora*, 14, (1), 24-37.

- Sastroatmodjo. S. (2006). *Citra Diri Orang Jawa*. Yogyakarta: Narasi
- Sukarja, D. (2002). *Inventarisasi dan Dokumentasi Sumber Sejarah Galuh Ciamis*. Jakarta: Katalog Perpustakaan Nasional RI
- Wawancara Agus (Ketua Perkumpulan Pegiat Ayam Pelung Cianjur), 7 September 2017
- Wawancara Wakil Bupati Cianjur, 8 September 2017
- Hanggoro, T.H. (2014). Perang Ayam, *Historia*, <https://historia.id/kuno/articles/perang-ayam-DrdkP>, diakses 22 September 2014
- Radar Cianjur. (2017) Tugu Ngaos Mamaos Maenpo di Cianjur Akan Diganti Ayam Pelung. <https://cianjur.pojoksatu.id/baca/tugu-ngaos-mamaos-maenpo-cianjur-diganti-tugu-ayam-pelung-setuju> diakses 13 Januari 2017
- Nationalgeographic Ayam. (2017). Berevolusi Mengiringi Peradaban Manusia. <http://nationalgeographic.grid.id/read/13296278/ayam-berevolusi-mengiringi-peradaban-manusia?page=all> diakses 10 September 2017, diakses 9 September 2017.

MODEL EDUKASI BERDASARKAN SEGMENTASI KONSUMEN UNTUK MEMBANGUN MINAT MASYARAKAT PADA PERBANKAN SYARIAH

Bambang Waluyo, Sylvia Rozza, dan Sujarwo

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, Kampus Universitas Indonesia, Depok 16421

E-mail: bamwaluyo13@gmail.com

ABSTRAK, Pemahaman masyarakat yang rendah terhadap perbankan syariah menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Tujuan penelitian mengetahui variasi pelaku segmentasi konsumen dengan memperhatikan aspek-aspek kognitif, sosial, emosional, fisik, estetika dan spiritual. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian terdahulu menemukan lima segmen konsumen yaitu *syariah loyalis*, *obligatory*, *follower*, *functional benefit*, dan *essentially conventional*. Ranking pemahaman terhadap perbankan syariah berdasarkan urutan dari yang paling paham hingga yang paling tidak paham adalah *syariah loyalis*, *obligatory*, *follower*, *functional benefit* dan *essentially conventional*. Dasar yang dapat digunakan dalam edukasi perbankan syariah adalah : (1). edukasi perbankan syariah masih sangat diperlukan, (2). Edukasi perbankan syariah perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah, (3). Informasi tentang bank syariah dapat disampaikan melalui iklan pada berbagai media, dan (4). Segmen *essentially conventional* perlu diberi edukasi baik tentang produk maupun tentang perbankan syariah itu sendiri. Kerjasama diantara para *stakeholders* sangat diperlukan dalam edukasi perbankan syariah. Evaluasi keberhasilan edukasi dapat dilihat dari meningkatnya awareness segmen *essentially conventional* pada perbankan syariah.

Kata kunci: model edukasi; segmentasi konsumen; minat masyarakat; perbankan syariah

CONSUMERS SEGMENTATION BASED EDUCATION MODEL IN BUILDING SOCIETY'S INTEREST IN ISLAMIC BANKING

ABSTRACT, *Lack of society's understandings in Islamic banking is a challenge in Islamic banking development in Indonesia. This research is aimed at knowing all behaviour varieties in consumers segmentation based sharia banking education model which focuses on cognitive, social, emotional physical aesthetics, and spiritual aspects. This is a qualitative research. The prior research had founds five segments of customer; i.e. syariah loyalis, obligatory, follower, functional benefit, and essentially conventional. The ranking of understanding of sharia banking made from the most understand to the least understand is the segment of sharia loyalist, obligatory, follower, functional benefit, and essentially conventional. Some basic thoughts that can be used in Islamic banking education are: (1). Education on sharia banking is still needed to provide understanding to the community about sharia banking, (2). Sharia banking education should be included in the school curriculum, (3). Information about sharia banking can be broadcasted in various advertising media, and (4). The essentially conventional segmen should be given a more intensive education about sharia banking both on products and sharia banking institutions. There must be collaboration among all stakeholders for education on sharia banking. Evaluation of public education success can increasing awareness of essentially conventional segment toward sharia banking.*

Key words: education model; consumers segmentation; society interest; shria banking

PENDAHULUAN

Pemahaman masyarakat yang rendah terhadap perbankan syariah menjadi tantangan dalam upaya pengembangan perbankan syariah. Kepala Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI), Edy Setiadi, mengatakan bahwa upaya meningkatkan pemahaman dan preferensi masyarakat menggunakan perbankan syariah merupakan salah satu tantangan dalam pengembangan perbankan syariah (<http://ekonomisyariah.info>). Dalam sambutannya pada pencaanangan Gerakan Ekonomi Syariah (GRES), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan bahwa sosialisasi dan edukasi masyarakat menjadi tantangan dalam akselerasi pertumbuhan keuangan syariah (Setkab Republik Indonesia, 2013). Perbankan Indonesia belum memiliki program edukasi yang memadai, komprehensif, terintegrasi dan terencana dengan baik dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat di bidang keuangan khususnya perbankan (Bank Indonesia, 2007 (1)). Langkah nyata upaya pengem-

bangun perbankan syariah dilakukan BI di mana pada 2013 merumuskan *Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah*. *Grand strategi* tersebut merupakan strategi komprehensif pengembangan pasar meliputi aspek strategis antara lain program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, *online/web-site*), yang bertujuan memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah bagi masyarakat. Perkembangan terkini tentang edukasi perbankan syariah terdapat dalam cetak Biru Pengembangan, yang pada salah satu pilarnya adalah pada Penguatan Riset, Asesmen dan Edukasi, di mana Bank Indonesia akan memaksimalkan dalam memperkuat riset dan asesmen ekonomi syariah; meningkatkan kompetensi industri dan regulator; dan peningkatan *awareness* masyarakat (Bank Indonesia, 2018). Dengan demikian dari sisi edukasi saat ini adalah dalam proses penguatan agar masyarakat semakin memahami perbankan syariah baik dari sisi kelembagaan

maupun hak dan kewajiban masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terus dilakukan hingga saat ini, tidak dapat dijalankan secara parsial (Bank Indonesia, 2017). Peran riset, asesmen, edukasi serta kerjasama yang erat antar institusi menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dan semakin dibutuhkan dalam menjalankan strategi dan program sehingga lebih efektif.

Hirsanuddin (2005) menyatakan bahwa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip operasional perbankan syariah, maka perlu dilakukan sosialisasi yang intensif oleh pihak bank sendiri, BI, pemerintah dan pihak-pihak yang terkait. Winandar (2011) juga menyebutkan bahwa strategi komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan BI masih belum efektif sampai kepada masyarakat sehingga bank syariah masih dikenal eksklusif untuk umat Islam Indonesia. Istilah-istilah dalam perbankan syariah harus disosialisasikan seperti istilah bagi hasil (*profit and loss sharing*) di bank syariah dapat dibedakan dengan sistem bunga (*interest*) di bank konvensional dalam setiap transaksinya (Bachro, 2010).

Strategi yang jitu dan ampuh dalam memasarkan bank syariah yang hingga kini belum ditemukan oleh BI dan bank-bank syariah, juga menjadi faktor penyebab masyarakat belum berhubungan dengan bank syariah (Rahmad, 2015). Waluyo dan Ekowati (2008) dalam penelitiannya menemukan bahwa mayoritas responden menyatakan istilah-istilah dalam laporan keuangan bank syariah sulit dimengerti karena baru mengetahui istilah-istilah tersebut (misalnya *murabahah*) yang menyebabkan nama produk pada bank syariah tidak familiar. Waluyo dan Ansori (2010) menemukan alasan masyarakat tidak memilih bank syariah antara lain karena belum kenal dengan produk syariah, sosialisasi yang kurang, informasi yang terbatas tentang kelebihan menjadi nasabah bank syariah, tidak ada yang memberikan informasi lebih dalam tentang bank syariah. Waluyo dan Waluyo (2013) juga menemukan masih terjadi mispersepsi masyarakat terhadap perbankan syariah yang ditandai dengan masih besarnya persentase responden yang menganggap margin dalam *murabahah* (jual beli) di bank syariah merupakan istilah lain dari bunga/riba yang digunakan di bank konvensional, serta istilah-istilah pada perbankan syariah sulit dipahami. Dalam suatu komunikasi, pesan yang disampaikan belum tentu diterima dengan benar sesuai dengan yang dimaksud peneriman pesan (Danar dan Syam, 2012). Waluyo dan Sujarwo (2013) mengemukakan bahwa dalam sosialisasi dan edukasi publik perbankan syariah perlu dilakukan beberapa usaha yaitu jangkauan edukasi diperluas misalnya target kelompok masyarakat yang dituju maupun media yang digunakan dalam pelaksanaan edukasi tersebut.

Hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan penyebab masyarakat belum memahami perbankan syariah adalah karena strategi edukasi dan komunikasi yang belum efektif sampai kepada masyarakat sehingga

masyarakat tidak memahami istilah-istilah dalam perbankan syariah, belum kenal dengan produk perbankan syariah bahkan terjadi mispersepsi terhadap perbankan syariah. Hal-hal tersebut dapat berpengaruh terhadap minat masyarakat pada perbankan syariah. Untuk mengatasi kelemahan yang ada pada edukasi yang telah dilakukan, perlu dilakukan sesuatu yang baru dalam proses edukasi perbankan syariah.

Edukasi perbankan syariah yang dilakukan dengan memperhatikan segmentasi konsumen bank syariah diharapkan hasilnya akan optimal. Edukasi terhadap segmen *syariah loyalis* harus dibedakan dengan edukasi terhadap segmen *essentially conventional*. Riset pengembangan pasar yang dilakukan oleh BI bersama MarkPlus.co menghasilkan pemetaan segmentasi konsumen bank syariah berdasarkan orientasi bank dibagi berdasarkan segmen sebagai berikut (Bank Indonesia, 2012):

- a. *Syariah Loyalis* yaitu segmen pokoknya syariah yang dalam kondisi apapun akan menggunakan bank syariah.
- b. *Follower*, yaitu segmen ikut-ikutan yang akan menggunakan bank syariah jika orang lain menggunakannya.
- c. *Functional Benefit*, yaitu segmen yang akan menggunakan bank syariah, ataupun bank konvensional tergantung fungsi atau kegunaan.
- d. *Obligatory*, yaitu segmen yang terpaksa menggunakan jasa perbankan syariah karena sesuatu hal misalnya menerima gaji atau pembayaran transaksi harus melalui bank syariah.
- e. *Essentially Conventional*, yaitu segmen pokoknya konvensional yang dalam kondisi apapun hanya menggunakan bank konvensional.

Edukasi perbankan syariah juga harus memperhatikan aspek kognitif, sosial, emosional, estetika dan spiritual. Oleh karena itu perlu dibuat model edukasi perbankan syariah yang mengintegrasikan segmen konsumen dengan memperhatikan aspek-aspek kognitif, sosial, emosional, estetika dan spiritualnya. Perhatian terhadap aspek-aspek kognitif diperlukan mengingat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah masih rendah sehingga perlu penyampaian informasi perbankan syariah dengan logis dan mudah diterima masyarakat. Pada aspek sosial perlu diperhatikan bahwa masyarakat sasaran adalah berada pada lapisan sosial yang berbeda-beda. Aspek emosional perlu ditekankan bahwa semua pembelajaran dalam edukasi selayaknya juga memperhatikan keadaan untuk dapat membangkitkan rasa memiliki terhadap bank syariah. Aspek estetika perlu memperhatikan hal-hal yang menjadikan proses edukasi lebih menarik. Aspek spiritual adalah bahwa edukasi perlu mendasarkan pada penekanan bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai syariah Islam namun bersifat universal untuk seluruh umat manusia tanpa batas-batas keyakinan terhadap ajaran agama. Empat komponen utama dari model ini adalah fondasi/dasar, organisasi,

pelaksanaan, dan evaluasi (Retallick dan Miller, 2010). Model edukasi tersebut diharapkan menjadi sesuatu yang baru dan mendukung kebijakan edukasi dan sosialisasi perbankan syariah.

Minat masyarakat pada perbankan syariah perlu menjadi perhatian para *stakeholders* khususnya pelaku industri perbankan syariah dan pihak regulator (Otoritas Jasa Keuangan/OJK). Minat masyarakat mulai meningkat yang ditunjukkan dengan jumlah rekening dana pihak ketiga di bank syariah yang terus meningkat. OJK berupaya menjalankan program strategis terutama menyangkut optimalisasi promosi keuangan syariah untuk meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat dalam rangka mengembangkan keuangan syariah. Peningkatan minat masyarakat terhadap perbankan syariah harus dijadikan motivasi untuk terus melakukan inovasi produk yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta langkah-langkah alternatif pemberian edukasi kepada masyarakat agar edukasi menjadi mudah diterima oleh masyarakat yang heterogen.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan data primer, dikumpulkan melalui instrument kuesioner, untuk memetakan segmentasi konsumen dan pemahamannya terhadap perbankan syariah serta model edukasi. Pengukuran variabel penelitian dilakukan dengan menghitung persentase jawaban responden pada masing-masing pertanyaan. Unit analisis adalah masyarakat di wilayah Jabodetabek. Pemilihan wilayah Jabodetabek adalah karena masyarakat pada wilayah tersebut dianggap mampu mencerminkan variasi sosial, pendidikan dan kehidupan ekonominya. Rancangan model edukasi akan mengadopsi model yang dikemukakan oleh Rettallick dan Miller (2010) yaitu *Early Field Experiences* (EFE). Model edukasi yang dibuat juga memperhatikan *Multi-Dimensional Perspectives of Holistic Education* yang dikemukakan Nava (2010). Populasi penelitian adalah masyarakat di wilayah Jabodetabek yaitu kelompok pelajar, kelompok mahasiswa, kelompok profesional, kelompok lembaga penunjang perekonomian (termasuk penegak hukum dan instansi pemerintah terkait) dan kelompok lain-lain (termasuk ibu rumah tangga, sektor informal, dan sebagainya). Teknik pengambilan sampel adalah *accidental sampling*. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 200 responden. Jumlah tersebut berdasarkan pada apa yang disampaikan Sukardi (2004), bahwa dengan menggunakan rumus tertentu Isaac dan Michael memberikan hasil akhir jumlah sampel terhadap jumlah populasi antara 10 – 100.000. Data diolah dengan program SPSS. Kuesioner dengan jawaban “ya” diberi bobot 3, “ragu-ragu” bobot 2, dan “tidak” bobot 1. Uji validitas (uji kesahihan) digunakan untuk mengukur valid tidaknya kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Segmentasi Konsumen

Responden dalam penelitian ini berjumlah 200 orang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Berikut adalah potret responden menurut segmentasiya:

Tabel 1. Segmen Responden

Segmentasi	Jumlah	Persentase
a. <i>Syariah Loyalis</i>	12	6%
b. <i>Follower</i>	3	2%
c. <i>Functional Benefit</i>	151	76%
d. <i>Obligatory</i>	9	5%
e. <i>Essentially Conventional</i>	25	13%
Total	200	100%

Sumber : Data Diolah, 2017

Mayoritas responden merupakan segmen *functional benefit*, sedangkan segmen *follower* merupakan segmen yang paling sedikit dibandingkan dengan yang lain.

Data Pemahaman Tentang Bank Syariah

Berikut ini adalah data yang diperoleh mengenai pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah.

a) Bagi Hasil-Mudharabah

Segmen *syariah loyalis*, 75% menyatakan memahami istilah *mudharabah* yang ada di bank syariah. Segmen *follower* terbagi rata antara yang pernah, ragu dan tidak memahami istilah *mudharabah* yang ada di bank syariah. Segmen *functional benefit* memiliki pendapat yang relatif tersebar antara yang paham, ragu dan tidak paham istilah bagi hasil-*mudharabah* dimana 35,76% menyatakan memahami, 21,19% ragu dan 41,72% menyatakan tidak memahami istilah bagi hasil-*mudharabah*. Segmen *obligatory* mayoritas yaitu 55,56% menyatakan tidak memahami istilah bagi hasil-*mudharabah*. Demikian juga segmen *essentially conventional* dimana 72% menyatakan tidak memahami istilah bagi hasil-*mudharabah*.

b). Jual beli-murabahah

Segmen *syariah loyalis*, 66,67% menyatakan memahami istilah *murabahah* yang ada di bank syariah. Segmen *follower* terbagi rata antara yang pernah, ragu dan tidak memahami istilah *murabahah* yang ada di bank syariah. Segmen *functional benefit* memiliki pendapat yang relatif tersebar antara yang paham, ragu dan tidak paham istilah *murabahah* dimana 23,84% menyatakan memahami, 25,17% ragu dan 46,36% menyatakan tidak memahami istilah *murabahah*. Segmen *obligatory* masih mayoritas yaitu 66,67% menyatakan tidak memahami istilah *murabahah*. Demikian juga dengan segmen *essentially conventional* dimana 76% menyatakan tidak memahami istilah *murabahah*.

c). Sewa menyewa-ijarah

Segmen *syariah loyalis* 58,33% menyatakan memahami istilah *ijarah* yang ada di bank syariah.

Segmen *follower* terbagi rata antara yang pernah, ragu dan tidak memahami istilah *ijarah* yang ada di bank syariah. Segmen *functional benefit* mayoritas 52,32% menyatakan tidak memahami istilah *ijarah*. Segmen *obligatory* juga mayoritas yaitu 66,67% menyatakan tidak memahami istilah *ijarah*. Segmen *essentially conventional* 84% menyatakan tidak memahami istilah *murabahah*.

Berdasarkan data di atas maka dapat dibuat ranking pemahaman terhadap perbankan syariah jika dibuat urutan dari yang paling paham hingga yang paling tidak paham adalah :

1. Segmen *Syariah Loyalis*
2. Segmen *Obligatory*
3. Segmen *Follower*
4. Segmen *Functional benefit*
5. Segmen *Essentially conventional*

Segmen *essentially conventional* terlihat sebagai segmen yang paling tidak paham terhadap perbankan syariah. Hal tersebut karena segmen *essentially conventional* merupakan segmen yang tidak pernah menerima informasi tentang perbankan syariah. Segmen *syariah loyalis, obligator, follower* dan *functional benefit* pernah menerima informasi tentang perbankan syariah namun hanya segmen *syariah loyalis* yang memahami istilah-istilah yang ada di bank syariah: bagi hasil-*mudharabah*, jual beli-*murabahah*, dan sewa menyewa-*ijarah*.

Data Model Edukasi Perbankan Syariah Berdasarkan Segmen Konsumen

Berikut ini adalah data yang diperoleh mengenai model edukasi perbankan syariah:

1. Informasi Tentang Bank Syariah Sebaiknya Disisipkan Melalui Ceramah Umum Seperti Melalui Pengajaran.
Responden yang termasuk dalam segmen *syariah loyalis*, mayoritas yaitu 91,67% menyatakan informasi tentang bank syariah sebaiknya disisipkan melalui ceramah umum seperti melalui pengajaran. Demikian juga pada segmen *functional benefit, obligatory* dan *essentially conventional* secara mayoritas berpendapat sebaiknya informasi tentang bank syariah disisipkan melalui ceramah umum seperti melalui pengajaran.
2. Informasi Tentang Bank Syariah Sebaiknya Dimasukkan Dalam Materi Khutbah Jumat.
Responden yang termasuk dalam segmen *syariah loyalis, obligatory* dan *essentially conventional* secara mayoritas menyatakan informasi tentang bank syariah sebaiknya dimasukkan dalam materi khutbah jumat. Pada segmen *follower* terbagi rata antara yang berpendapat sebaiknya, ragu dan tidak perlu informasi tentang bank syariah dimasukkan dalam materi khutbah jumat. Pada segmen *functional benefit* pun tersebar hampir merata diantara yang berpendapat sebaiknya (39%), ragu (31,79%) dan tidak perlu (28,48%) informasi tentang bank syariah dimasukkan dalam materi khutbah jumat.

3. Informasi Tentang Bank Syariah Sebaiknya Secara Gencar Dilakukan Melalui Iklan Di Media Massa (Koran, Majalah, dan lain-lain).
Semua segmen *syariah loyalis, follower, functional benefit, obligatory* dan *essentially conventional* secara mayoritas menyatakan Informasi tentang bank syariah sebaiknya secara gencar dilakukan melalui iklan di media massa (koran, majalah, dan lain-lain).
4. Informasi Tentang Bank Syariah Sebaiknya Secara Gencar Dilakukan Melalui Iklan Di Media Elektronik (TV, radio).
Semua segmen *syariah loyalis, follower, functional benefit, obligatory* dan *essentially conventional* secara mayoritas menyatakan Informasi tentang bank syariah sebaiknya secara gencar dilakukan melalui iklan di media elektronik (tv, radio).
5. Informasi Tentang Bank Syariah Sebaiknya Juga Dilakukan Melalui Iklan Di Media Sosial (Facebook, Twitter, dan lain-lain).
Semua segmen *syariah loyalis, follower, functional benefit, obligatory* dan *essentially conventional* secara mayoritas menyatakan informasi tentang bank syariah sebaiknya juga dilakukan melalui iklan di media sosial (facebook, twitter, dan lain-lain).
6. Kesiapan Memindahkan Rekening Bank Konvensional Ke Bank Syariah Jika Memahami Apa Itu Bank Syariah.
Segmen *syariah loyalis, functional benefit, obligatory* secara mayoritas menyatakan kesiapan memindahkan rekening di bank konvensional ke bank syariah jika memahami tentang bank syariah. Segmen *follower* seluruhnya ragu memindahkan rekening di bank konvensional ke bank syariah walaupun mereka nantinya memahami tentang bank syariah.
7. Informasi Tentang Bank Syariah Seharusnya Masuk Dalam Kurikulum Sekolah
Hanya segmen *syariah loyalis* dan *follower* yang mayoritas menyatakan informasi tentang bank syariah seharusnya masuk dalam kurikulum sekolah. Walaupun belum sampai di atas 50%, namun persetujuan segmen *functional benefit, obligatory* dan *essentially conventional* bahwa informasi tentang bank syariah seharusnya masuk dalam kurikulum sekolah masih lebih tinggi dibandingkan yang ragu dan tidak perlu bahwa informasi tentang bank syariah seharusnya masuk dalam kurikulum sekolah.
8. Perubahan Cara Pandang Terhadap Bank Syariah Jika Menerima Edukasi Bank Syariah
Segmen *syariah loyalis, follower, functional benefit, obligatory* secara mayoritas menyatakan akan mengubah cara pandang terhadap bank syariah jika menerima edukasi tentang bank syariah. Pada sisi segmen nasabah, segmen *essentially conventional* hanya 44% yang menyatakan akan mengubah cara pandang terhadap bank syariah jika menerima edukasi tentang bank syariah, 48% menyatakan ragu, dan 8% tidak akan mengubah

cara pandang terhadap bank syariah jika menerima edukasi tentang bank syariah.

9. Mencoba Menggunakan Bank Syariah Dalam Transaksi Perbankan, Jika Menerima Edukasi Tentang Bank Syariah.

Semua segmen mayoritas menyatakan akan mencoba menggunakan bank syariah dalam transaksi perbankan jika menerima edukasi tentang bank syariah. Bagi segmen *syariah loyalis* sangat wajar 100% menyatakan akan mencoba menggunakan bank syariah dalam transaksi perbankan jika menerima edukasi tentang bank syariah. Namun hal tersebut dapat juga dapat dipahami bahwa mereka pun siap mencoba menggunakan produk perbankan selain yang selama ini mereka gunakan. Pada segmen *essentially conventional*, sebanyak 68% (lebih tinggi dibandingkan dengan segmen *follower*, *fictional benefit* dan *obligatory*) menyatakan akan mencoba menggunakan bank syariah dalam transaksi perbankan jika menerima edukasi tentang bank syariah.

Model Edukasi Perbankan Syariah Berdasarkan Segmentasi Konsumen

Rancangan model edukasi mengadopsi model yang dikemukakan oleh Rettalick dan Miller (2010) yaitu *Early Field Experiences* (EFE). Model ini menyediakan struktur untuk mengembangkan berbagai pengalaman lapangan awal dengan tetap menjaga kesinambungan antara program dan memungkinkan adanya keragaman budaya dan fleksibilitas individu. Oleh karena itu model yang akan dibuat juga akan memperhatikan dasar dalam melakukan edukasi, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi edukasi perbankan syariah. Model edukasi menjadi masukan kepada pihak *stakeholders* (industri bank syariah, pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan) dalam membuat kebijakan edukasi publik.

1. Fondasi/Dasar

Dasar yang akan dijadikan untuk merancang model edukasi adalah potret segmentasi konsumen serta data pemahaman dan model edukasi yang diinginkan oleh responden sebagai representasi konsumen/masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dikemukakan hal-hal pokok yang dapat menjadi dasar dalam melakukan edukasi terhadap bank syariah dan model edukasi sesuai dengan segmen konsumen/masyarakat.

a. Aspek Kognitif

Aspek kognitif dilihat dari sisi pernah atau tidak menerima edukasi tentang perbankan syariah. Ditinjau dari pernah atau tidak menerima edukasi tentang perbankan syariah, hanya segmen *syariah loyalis* yang mayoritas pernah menerima edukasi tentang perbankan syariah, segmen lainnya mayoritas belum pernah menerima edukasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa edukasi mengenai perbankan syariah masih sangat diperlukan. Hal tersebut juga dapat dikaitkan dengan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah, di

mana masyarakat mayoritas tidak pernah mendengar dan tidak memahami istilah-istilah yang ada di bank syariah. Ketidakhahaman masyarakat terhadap perbankan syariah harus segera diatasi dengan memberikan edukasi yang terus menerus dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

b. Aspek Sosial

Informasi tentang bank syariah sebaiknya masuk dalam kurikulum sekolah. Responden dalam kategori *syariah loyalis* dan *follower* mayoritas menyatakan informasi tentang bank syariah sebaiknya masuk dalam kurikulum sekolah. Demikian juga dengan segmen *functional benefit*, *obligatory* dan *essentially conventional* walaupun belum sampai di atas 50%, namun persetujuan bahwa informasi tentang bank syariah sebaiknya masuk dalam kurikulum sekolah masih lebih tinggi dibandingkan yang ragu dan tidak perlu informasi tentang bank syariah sebaiknya masuk dalam kurikulum sekolah.

Bank syariah punya nilai keunggulan tersendiri dibandingkan dengan bank konvensional. Segmen *syariah loyalis*, *follower*, *functional benefit*, *obligatory* secara mayoritas menyatakan bank syariah punya nilai keunggulan tersendiri dibandingkan dengan bank konvensional. Walaupun pada segmen *essentially conventional* masing-masing berjumlah sama yaitu 48% antara yang setuju dan ragu bahwa bank syariah mempunyai nilai keunggulan tersendiri dibandingkan bank konvensional, namun masih dapat dikatakan bahwa bank syariah sesungguhnya mempunyai nilai-nilai keunggulan tersendiri daripada bank konvensional. Pernyataan bahwa bank konvensional memiliki produk yang lebih unggul dibandingkan dengan bank syariah, secara umum diragukan oleh semua segmen, bahkan pada segmen *essentially conventional* yang merupakan segmen “harus ber-bank konvensional” hanya 36% yang menyatakan bahwa bank konvensional mempunyai produk yang lebih unggul dibandingkan dengan produk bank syariah. Berdasarkan aspek sosial, dapat disimpulkan bahwa edukasi perbankan syariah:

- 1). Harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah.
- 2). Segmen *essentially conventional* perlu diprioritaskan agar dapat memahami bahwa bank syariah punya nilai keunggulan tersendiri dibandingkan dengan bank konvensional.

c. Aspek Emosional.

Semua sepakat bahwa edukasi bank syariah seharusnya mengedepankan aspek membangkitkan rasa memiliki terhadap bank syariah (emosional). Semua segmen *syariah loyalis*, *follower*, *functional benefit*, *obligatory* dan *essentially conventional* mayoritas menyatakan edukasi bank syariah seharusnya

mengedepankan aspek membangkitkan rasa memiliki terhadap bank syariah (emosional).

Segmen *syariah loyalis, follower, functional benefit, obligatory* secara mayoritas menyatakan akan mengubah cara pandang terhadap bank syariah jika menerima edukasi tentang bank syariah. Pada segmen *essentially conventional* hanya 8% yang menyatakan tidak akan mengubah cara pandang terhadap bank syariah jika menerima edukasi tentang bank syariah, sedangkan secara mayoritas menyatakan setuju dan ragu. Semua segmen mayoritas menyatakan akan mencoba menggunakan bank syariah dalam transaksi perbankan jika menerima edukasi tentang bank syariah. Segmen *syariah loyalis, follower, functional benefit* dan *essentially conventional* secara mayoritas menyatakan kesediaan memindahkan rekening yang ada di bank konvensional ke bank syariah jika memahami apa itu bank syariah.

Berdasarkan aspek emosional, dapat disimpulkan bahwa :

- 1). Masyarakat akan mengubah cara pandang terhadap bank syariah jika menerima edukasi tentang bank syariah.
- 2). Masyarakat menyatakan akan mencoba menggunakan bank syariah dalam transaksi perbankan jika menerima edukasi tentang bank syariah.
- 3). Masyarakat menyatakan kesediaan memindahkan rekening di bank konvensional ke bank syariah jika memahami tentang bank syariah.

d. Aspek Estetika/Keindahan.

Semua segmen *syariah loyalis, follower, functional benefit, obligatory* dan *essentially conventional* mayoritas menyatakan edukasi bank syariah seharusnya mengedepankan aspek estetika/keindahan. Informasi tentang bank syariah sebaiknya secara gencar dilakukan melalui iklan di media massa (koran, majalah dan lain-lain). Semua segmen *syariah loyalis, follower, functional benefit, obligatory* dan *essentially conventional* secara mayoritas menyatakan informasi tentang bank syariah sebaiknya secara gencar dilakukan melalui iklan di media massa (koran, majalah, dan lain-lain), media elektronik (TV, radio), media sosial (facebook, twitter dll) dan dilakukan secara terus-menerus.

e. Aspek Spiritual/Keagamaan.

Hampir semua segmen, kecuali *follower*, menyatakan informasi tentang bank syariah sebaiknya disisipkan melalui ceramah umum seperti melalui pengajian. Hal tersebut tentu wajar mengingat pada *event* pengajian banyak berkumpul umat muslim sehingga informasi yang diberikan akan dapat lebih mengenai sasaran dengan harapan akan mampu mengajak masyarakat muslim mau ber-bank syariah.

Informasi tentang bank syariah sebaiknya dimasukkan dalam materi khutbah jumat. Semua

segmen *syariah loyalis, obligatory* dan *essentially conventional* secara mayoritas menyatakan informasi tentang bank syariah sebaiknya dimasukkan dalam materi khutbah jumat.

Berdasarkan aspek spiritual, dapat disimpulkan :

- 1). Informasi tentang bank syariah sebaiknya disisipkan melalui ceramah umum seperti melalui pengajian.
- 2). Informasi tentang bank syariah sebaiknya dimasukkan dalam materi khutbah jumat.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dasar yang dapat digunakan dalam edukasi perbankan syariah adalah:

- 1). Edukasi mengenai perbankan syariah masih sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbankan syariah.
- 2). Edukasi perbankan syariah harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah.
- 3). Iklan dapat digunakan sebagai sarana edukasi tentang bank syariah yang dapat ditayangkan melalui berbagai media.
- 4). Segmen *essentially conventional* perlu diberikan edukasi yang lebih intensif tentang perbankan syariah baik mengenai produk maupun lembaga perbankan syariah.

2. Organisasi

Edukasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keuangan harus menjadi perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) industri keuangan di Indonesia. Upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perbankan syariah harus dilakukan oleh seluruh *stakeholders* perbankan syariah, baik dengan cara bekerja sama di antara *stakeholders* maupun secara individual per institusi perbankan syariah. Strategi yang tepat dalam edukasi perbankan syariah akan mempercepat laju pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah.

Dalam menjalankan edukasi publik kepada masyarakat, perlu dilakukan dengan melakukan koordinasi di antara semua pihak yang terlibat dalam edukasi publik bank syariah. Edukasi mengenai perbankan syariah bukanlah hanya tanggung jawab pihak bank syariah saja, namun perlu ada keterlibatan pihak lain. Para pemangku kepentingan dalam edukasi publik perlu berkolaborasi. Di antara para pihak yang dapat terlibat selain pihak bank itu sendiri adalah regulator dan masyarakat. Semua pihak yang terlibat dapat membuat perencanaan bersama untuk terselenggaranya edukasi publik yang efisien dan efektif. Unsur regulator diwakili oleh OJK dan unsur masyarakat dapat diwakili oleh lembaga/organisasi pemerhati ekonomi Islam misalnya Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), Dewan Syariah Nasional (DSN), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), lembaga pendidikan, Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo).

3. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan edukasi publik, masing-masing pihak diharapkan tidak berjalan sendiri namun ada aliansi di antara mereka yang terlibat dalam edukasi. Aliansi dalam edukasi perbankan syariah dapat diartikan sebagai sebuah kerja sama jangka panjang antar berbagai pihak yang terlibat dalam edukasi publik.

Dalam intensifikasi edukasi publik dan aliansi mitra strategis, kegiatannya adalah (Bank Indonesia, 2007 (2)).

- Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga (antara lain *public figures*, bank syariah, PKES) untuk sosialisasi perbankan syariah.
- Mengadakan aliansi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga lainnya (seperti Perguruan Tinggi, lembaga *training*) untuk menyampaikan pesan terkait dengan perbankan syariah.
- Menyelenggarakan Pasar Rakyat Syariah yang menghadirkan perbankan syariah dan berbagai usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal serta hiburan kepada masyarakat
- Iklan layanan masyarakat secara masal dengan mengundang *public figure*, *variety talk show*, *live show on TV/Radio*, *billboard* bekerjasama dengan mitra strategis (antara lain PKES).
- Melaksanakan sosialisasi kepada berbagai asosiasi industri/Kadin/kelompok bisnis dan kepada media massa
- Melakukan sosialisasi kepada organisasi massa (Islam) untuk mendorong kemitraan dengan perbankan syariah dalam pengelolaan aset keuangan (Muhammadiyah, Nahdatul Ulama/NU, dan lain-lain).

Sebagaimana di era BI, di era Otoritas Jasa Keuangan (OJK), edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan pun mendapat perhatian yang serius termasuk pemahaman masyarakat terhadap

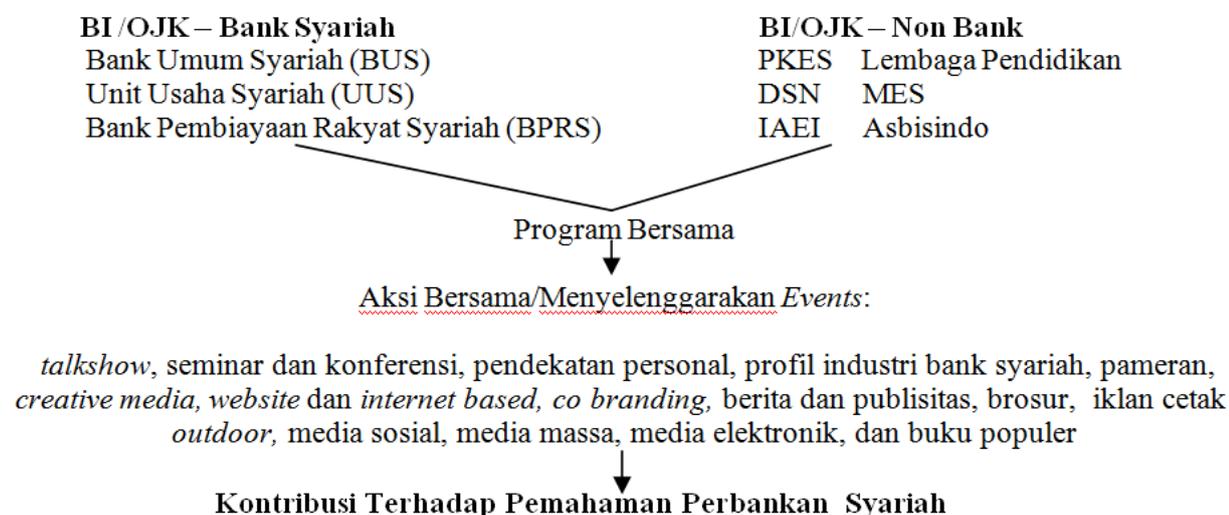
keuangan syariah. Hal ini ditandai dengan terbitnya Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Direksi/Pengurus Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun syariah. Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa edukasi adalah penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi, dengan tujuan untuk mengingat fakta atau kondisi nyata, dengan cara memberi dorongan terhadap pengarah diri, aktif memberikan informasi-informasi atau ide baru (OJK, 2014).

Pada gambar 1 dapat diperoleh satu gambaran suatu model edukasi yang mencerminkan perlunya kerjasama dalam edukasi perbankan syariah. Kerjasama melibatkan unsur-unsur *stakeholders* baik dari pihak perbankan syariah, regulator maupun masyarakat.

4. Evaluasi

Pada 2007 BI juga menyusun Cetak Biru Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan sebagai panduan dalam edukasi perbankan. Dalam cetak biru tersebut, disebutkan pola strategi edukasi masyarakat di bidang perbankan dalam jangka pendek antara lain adalah melaksanakan program edukasi untuk meningkatkan *awareness* terhadap kelembagaan serta produk dan jasa perbankan syariah dalam rangka meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah (Bank Indonesia, 2007 (1)). Sementara itu, untuk memberikan kejelasan mengenai arah pada yang telah disusun akan ditetapkan tiga indikator utama edukasi, yaitu:

- Meningkatnya *awareness*
- Terwujudnya perubahan perilaku
- Terwujudnya masyarakat yang *bank minded*



Sumber : Olahan penulis, 2017

Gambar 1. Model Edukasi

Model Edukasi Berdasarkan Segmentasi Konsumen untuk Membangun Minat Masyarakat pada Perbankan Syariah
 (Bambang Waluyo, Sylvia Rozza, dan Sujarwo)

Berdasarkan hal tersebut, maka evaluasi keberhasilan edukasi publik yang dapat diusulkan dalam penelitian ini dapat menggunakan indikator sebagai berikut:

- 1). Peningkatan *awareness* segmen *essentially conventional* terhadap perbankan syariah.
- 2). Hanya 40% dari segmen *essentially conventional* yang bersedia memindahkan rekeningnya ke bank syariah jika menerima edukasi bank syariah. Evaluasi terhadap segmen *essentially conventional* adalah dengan melihat terjadinya perubahan perilaku sehingga ada kesediaan memindahkan rekeningnya atau membuka rekening di bank syariah.

SIMPULAN

Konsumen pada wilayah Jabodetabek terbagi ke dalam segmen syariah loyalis, follower, functional benefit, obligatory dan *essentially conventional*. Pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah secara umum masih rendah. Perhatian yang lebih terhadap edukasi perbankan syariah perlu diberikan kepada segmen *essentially conventional*. Pelaksanaan edukasi perbankan syariah harus memperhatikan aspek-aspek kognitif, emosional, estetika, spiritual dan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selaku pemberi dana melalui penelitian Hibah Penelitian Produk Terapan Tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachro, A. & Supriyatni, R. (2010). Pembiayaan Bagi Hasil dalam Pembiayaan Syariah yang Berkeadilan Sebagai Salah Satu Upaya Pengembangan Bank Syariah, *Sosiohumaniora*, 12, (3), 250-269.
- Bank Indonesia. (2007) (1). Cetak Biru Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan, Jakarta : Bank Indonesia.
- _____. (2007) (2). *Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah 2007-2008*, Jakarta : Bank Indonesia.
- _____. (2012). *Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah*, Jakarta : Bank Indonesia.
- _____. (2013). *Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah* dalam www.bi.go.id, diunduh 20 April 2013.
- Daniar, A. & Syam, N.W. (2012). Konstruksi Makna Bank Konvensional Bagi Umat Islam, *Sosiohumaniora*, 14, (2), 104-115.

Hirsanuddin, (2005). Kemitraan Usaha Dalam Bisnis (Studi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Mudharabah di Perbankan Syariah, *Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

http://ekonomisyariah.info/blog/2013/04/22/industri_perbankan_syariah_gelar-expo_ib_vaganza/Industri_Perbankan_Syariah_Gelar_Expo_iB_Vaganza, diakses 1 Juni 2013.

<https://www.bi.go.id/id/ekonomi-dan-keuangan-syariah/Cetak-Biru/Contents/default.aspx>. Cetak Biru Pengembangan, diakses 4 Mei 2018.

<http://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/12/15/p0zzu2382-ojk-minat-masyarakat-terhadap-perbankan-syariah-meningkat>, diakses 5 Mei 2018.

Rahmad. (2015). Peningkatan Efektifitas Sosialisasi Bank Syariah dalam <http://rahmadpenelitimuda.blogspot.com/2012/06/peningkatan-efektifitas-sosialisasi.html> diakses 17 April 2015.

Retallick, M.S. & Miller, G. (2010). Teacher Preparation in Career and Technical Education: A Model for Developing and Researching Early Field Experiences. *Journal of Career and Technical Education*, 25, (1), 25-46.

Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat.

Setkab Republik Indonesia. (2013). Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Penganjangan Gerakan Ekonomi Syariah (GRES!), dalam <http://www.setkab.go.id/pidato-11093-sambutan-presiden-republik-indonesia-pada-pencanangan-gerakan-ekonomi-syariah-gres-jakarta-17-november-2013.html>, diakses 18 Nopember 2013

Sukardi. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara.

Waluyo, B. & Ansori. 2010. Persepsi dan Sikap Masyarakat Kampus Terhadap Bank Syariah, Studi Kasus pada Civitas Akademika Universitas Indonesia dan Politeknik Negeri Jakarta, *Hasil Penelitian*, UP2M Politeknik Negeri Jakarta

Waluyo, B & Ekowati, L. (2008). Pengaruh Laporan Keuangan Bank Syariah Terhadap Perilaku Pembacanya (Studi Kasus Pada Civitas Akademika Politeknik Negeri Jakarta), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7, (1), 19-30.

Waluyo, B. dan Sujarwo. (2013). Sosialisasi dan Edukasi Publik Perbankan Syariah di Indonesia. *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 1, (1), 40-49

- Waluyo, B. & Waluyo, Y.S. (2013). Persepsi Masyarakat Kampus Terhadap Stigma Perbankan Syariah (Studi Pada Politeknik Negeri Jakarta dan Universitas Indonesia), *Perspektif, Jurnal Manajemen dan Keuangan Bisnis*, 1, (1), 323-335.
- Winandar, R. (2011). Evaluasi Strategi Bank Indonesia Dalam Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. *Tesis*. Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada

UPAYA *DISASTER DIPLOMACY* PEMERINTAH INDONESIA DI KONFLIK ACEH TAHUN 2005

Arfin Sudirman dan Naura Nabila Haryanto

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

E-mail: arfin.sudirman@unpad.ac.id

ABSTRAK, Bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004 merupakan salah satu bencana alam terbesar yang terjadi di Indonesia. Selain itu, Aceh juga merupakan zona konflik yang dibatasi akses dengan komunitas internasional. Sejak tahun 1976 sampai tahun 2004, Aceh berfokus pada konflik berkepanjangan akibat usaha Pemerintah Indonesia dalam meredam perjuangan gerakan separatisme GAM. Namun, peristiwa bencana alam gempa bumi dan tsunami merupakan momentum titik balik konflik RI dengan GAM ke arah negosiasi dan perdamaian yang menghasilkan Perjanjian Helsinki tahun 2005. Dengan menggunakan pendekatan *Disaster Diplomacy* dan metode kualitatif deskriptif analitis, artikel ini bertujuan untuk memahami upaya Pemerintah Indonesia memanfaatkan momentum bencana alam untuk mencapai perdamaian dengan GAM. Artikel ini menyimpulkan bahwasanya hambatan terhadap upaya diplomasi perdamaian di Aceh yang selama ini terjadi dapat dihilangkan akibat dampak destruktif bencana gempa bumi dan tsunami. Bencana ini membawa konflik mencapai titik jenuh hingga GAM tidak lagi memiliki posisi tawar yang kuat untuk memberontak kepada Pemerintah Indonesia. Sementara Pemerintah Indonesia pun sadar bahwa momentum ini dapat ‘dimanfaatkan’ untuk menyelesaikan konflik yang berlarut-larut.

Kata kunci: Pemerintah Indonesia; *disaster diplomacy*; GAM; dan tsunami Aceh.

INDONESIA'S *DISASTER DIPLOMACY* EFFORT IN ACEH'S CONFLICT IN 2005

ABSTRACT, *The earthquake and tsunami disaster that occurred in Aceh in 2004 is considered as one of the most devastated natural disasters occurred in Indonesia. In addition, Aceh is also a conflicting zone that is restricted for international community. Since 1976 to 2004, Aceh focused on the prolonged conflicts caused by the Government of Indonesia's efforts to contain the GAM's separatist movement. However, the earthquake and tsunami disaster was regarded as the turning-point between Indonesia and GAM conflict towards the mutual negotiations and peace resolution that resulted in the Helsinki Agreement in 2005. Using the Disaster Diplomacy approach and qualitative analytical descriptive method, this article aims to understand the Indonesian Government's efforts to take advantage of natural disasters's momentum to attain peaceful resolution with GAM. This article concludes that the obstacles for peace diplomacy to be implemented in Aceh can be eliminated as a result of the destructive impact of the earthquake and tsunami disaster. This disaster brought the conflict to a point of saturation point where GAM had no longer have a strong bargaining position to rebel against the Government of Indonesia. While the Government of Indonesia is also aware that this momentum can be 'exploited' to resolve the protracted conflict.*

Key words: *the Indonesian Government; disaster diplomacy; disaster related activities; GAM, and the Aceh tsunami.*

PENDAHULUAN

Gempa bumi sebesar 9.3 skala richter yang mengakibatkan terjadinya tsunami pada 26 Desember 2004 merupakan salah satu bencana alam terbesar di satu dekade terakhir (Kelman, 2016: 1-3). Gelombang tsunami mengakibatkan kerusakan hebat di ribuan kilometer garis pantai sepanjang Aceh, Sumatera Utara, dan pulau-pulau yang terletak di barat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terkena dampak kerusakan paling parah, dengan 164.891 korban tewas yang terkubur, 114.897 korban hilang, dan 412.438 korban terlantar (UNEP, 2005: 18). Dampak destruktif terkena pada hampir seluruh aspek kehidupan di Aceh, seperti ekonomi lokal, infrastruktur, dan administrasi (Masyrafah and McKeon, 2006: 1). Dalam pidatonya, Presiden SBY sebagai Presiden Indonesia saat itu, menuturkan bahwa total kerusakan properti publik maupun privat ialah sebesar 5 milyar dolar AS, atau seluruh produk domestik bruto Aceh (Yudhoyono, 2005: 432-434).

Selain karena terkena dampak destruktif paling buruk dibandingkan negara lainnya, salah satu bagian dari Indonesia – yaitu Aceh, juga merupakan zona konflik yang dibatasi akses dengan komunitas internasional.

Sejak tahun 1976 sampai tahun 2004, Aceh berfokus pada konflik yang hadir karena usaha Pemerintah Indonesia dalam meredam perjuangan gerakan separatisme Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Kweifio-Okai, 2014). Konflik tersebut menyebabkan Pemerintah Indonesia mendeklarasikan bahwa Aceh termasuk dalam daerah operasi militer (DOM) dan melarang non warga Aceh, baik masih merupakan warga negara Indonesia maupun bukan, untuk mengunjungi daerah tersebut (Masyrafah and McKeon, 2006: 4). Upaya resolusi konflik ini berbeda dengan apa yang ditawarkan Miall, Ramsbotham dan Woodhouse (dalam Sulaeman, 2010) yang menyatakan bahwa terdapat banyak pendekatan alternatif mengenai resolusi konflik namun jarang dilakukan dengan memahami peristiwa atau pengetahuan local. Tulisan ini bertujuan untuk memahami upaya Pemerintah Indonesia memanfaatkan konsep *disaster diplomacy* untuk men-capai perdamaian antara kedua belah pihak dengan dihasilkannya Perjanjian Helsinki pada tujuh bulan kemudian, yaitu bulan Agustus tahun 2005.

Menurut Kelman (2012: 13) konsep *disaster diplomacy* pada dasarnya merupakan varian dari kajian diplomasi dengan menganalisis kemungkinan bencana

alam dapat menciptakan peluang untuk memfasilitasi kerja sama aktor yang secara alaminya merupakan “musuh”, atau tidak. Menurutny, *disaster diplomacy* mengarahkan kepada penelitian tentang bagaimana dan mengapa aktivitas terkait kebencanaan dapat dan/atau tidak dapat menginduksi kerja sama antara aktor internasional yang secara alami bermusuhan (Kelman 2003, 110-111).

Konsep ‘*disaster diplomacy*’ dikembangkan dan dipopulerkan oleh Ilan Kelman dan Theo Koukis dalam ‘Disaster Diplomacy’ pada *Cambridge Review of International Affairs* yang diterbitkan di tahun 2000. Tulisan tersebut menganalisa empat tulisan ilmiah yang didasari oleh empat studi kasus yang berbeda melalui kacamata *disaster diplomacy*. Empat tulisan ilmiah tersebut merupakan tulisan dari Dr. James Ker-Lindsay yang membahas tentang studi kasus hubungan Yunani dan Turki pasca bencana gempa; Michael H. Glantz membahas tentang studi kasus badai yang menyelimuti Kuba-AS; Ailsa Holloway membahas tentang kekeringan di Afrika Selatan pada 1991-1993; dan Louise Comfort yang membandingkan ketiga studi kasus tersebut melalui *complex adaptive systems framework*.

Didasari dari berbagai studi kasus, Kelman dan Koukis menyimpulkan bahwa aktivitas terkait kebencanaan dapat mempengaruhi, mendukung, mendorong, atau bahkan menghalangi proses diplomasi. Di lain sisi, tidak seluruh bencana dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap suatu konflik. Aktivitas terkait kebencanaan dapat mendukung proses diplomasi apabila proses tersebut sudah dimulai sebelum adanya aktivitas terkait kebencanaan. Hal ini lah yang disebut sebagai konsep *disaster diplomacy*. (Kelman 2012, 14-15).

Aktivitas terkait kebencanaan sendiri digambarkan oleh Kelman sebagai aktivitas, perilaku, keputusan, dan nilai yang dianut dan diambil oleh manusia dalam menghindari atau menghadapi suatu bencana. Hal ini merupakan komponen analisis *disaster diplomacy* karena adanya bencana dengan aktivitas, perilaku, dan keputusan manusia, serta nilai yang dianut manusia dapat dianggap seperti siklus yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Aktivitas terkait kebencanaan dapat terbagi menjadi dua, yaitu ketika sebelum terjadinya bencana dan setelah terjadinya bencana.

Pertama, aktivitas terkait kebencanaan sebelum terjadinya bencana terdiri dari pencegahan, perencanaan, mitigasi, persiapan, dan reduksi risiko bencana. Aktivitas, perilaku, dan keputusan manusia, serta nilai yang dianut oleh manusia dapat menimbulkan bencana bagi manusia, atau bahkan mengurangi risiko terjadinya bencana. Contoh, perilaku buang sampah sembarangan yang dilakukan manusia dapat menyumbat saluran air perkotaan sehingga menimbulkan banjir ketika musim hujan. Kedua, aktivitas terkait kebencanaan setelah terjadinya bencana yang terdiri dari bagaimana manusia merespon bencana tersebut, rekonstruksi, dan pemulihan keadaan setelah terjadinya bencana. Bencana dapat berpengaruh terhadap

aktivitas, perilaku, dan keputusan manusia, serta nilai yang dianut oleh manusia. Sebaliknya, perilaku manusia dalam merespon bencana tersebut juga menentukan seberapa besar dan lama dampak destruktif yang harus dirasakan para korban terhadap bencana tersebut. Contoh, ketika bencana alam melanda negara A dan B yang bermusuhan, maka kedua negara tersebut akan saling memperlihatkan empati, yang dapat berupa bantuan kemanusiaan, sehingga hubungan kedua negara tersebut semakin membaik (Kelman 2012, 11-17).

Dalam jangka pendek, aktivitas terkait kebencanaan dapat, namun tidak selalu, memiliki pengaruh pada proses diplomasi. Hal ini membuat *pre-existing basis* perlu untuk diketahui dalam menganalisa proses diplomasi. *Pre-existing basis* dapat berarti hubungan perdagangan, koneksi kultur, negosiasi perdamaian rahasia atau terbuka antara pihak yang berkonflik, atau bahkan *joint sport events* (Kelman, *Disaster Diplomacy: How Disasters Affect Peace and Conflict* 2012, 14).

Dalam jangka panjang dibandingkan aktivitas terkait kebencanaan, faktor non-bencana secara umum dilihat memiliki efek yang lebih signifikan pada proses diplomasi. Contohnya ialah ketidakpercayaan, perubahan dalam kepemimpinan suatu pemerintahan, atau keyakinan bahwa konflik masa lalu dapat mempengaruhi *disaster-related* atau *peace-related activities* (Kelman, 2012: 14). Kelman membuat enam pertanyaan yang harus dapat dijawab dalam menganalisa studi kasus menggunakan konsep *disaster diplomacy* untuk mengembangkan kerangka analisis. Namun demikian, tulisan ini hanya akan membahas dua dari enam pertanyaan analisis atas pertimbangan signifikansi dengan studi kasus yang diangkat yaitu: Pertama, apakah aktivitas terkait kebencanaan menuntun kepada interaksi diplomasi?; kedua, apakah terbentuk diplomasi baru? Jika aktivitas terkait kebencanaan mempengaruhi proses diplomasi yang sedang berlangsung, maka hal tersebut dianggap sebagai katalis, bukan membentuk diplomasi baru. (Kelman, 2012: 15-16)

Disaster diplomacy merupakan konsep yang masih terus berkembang, dengan didasari dari fenomena yang digunakan sebagai alat untuk mengembangkan konsep tersebut. Menurut Sudirman dan Putra (2018), *Disaster diplomacy* menawarkan pendekatan alternatif dalam interaksi antar negara terutama karena sifat bencana alam yang tidak mengenal batas kedaulatan negara sehingga kerjasama, perjanjian perdamaian dan bantuan kemanusiaan dapat menjadi sebuah kepentingan kolektif negara-negara di dunia.

Dari berbagai studi kasus yang telah dibahas menggunakan konsep *disaster diplomacy* sebagai pisau analisis dalam penelitian Kelman, Kelman menyimpulkan bahwa aktivitas terkait kebencanaan belum pernah terlihat berhasil memproduksi hasil diplomasi baru atau menginisiasi usaha diplomasi baru, namun memiliki potensi sebagai katalis dalam aktivitas diplomasi yang

telah berjalan dalam jangka pendek, dan tidak memiliki potensi untuk membuat aktivitas atau proses diplomasi baru dalam jangka panjang. Aktivitas terkait kebencanaan tidak membuat kesempatan diplomatik baru bagi para aktor untuk melakukan kerja sama, namun memiliki kemungkinan sebagai katalisator dalam aksi diplomasi.

Selain itu, pada artikel ini juga yang akan dibahas sebagai aktivitas terkait kebencanaan merupakan aktivitas atau kebijakan yang dipilih oleh manusia setelah terjadinya bencana, di mana terdiri dari bagaimana manusia merespon bencana tersebut, bagaimana mereka menentukan kebijakan dalam melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi daerah yang terkena dampak destruktif, serta bagaimana kontribusi berbagai pihak dalam pemulihan keadaan setelah terjadinya bencana.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian deskriptif analitis yang menitikberatkan pada pemahaman dan persepsi subjektif peneliti sebagai seseorang yang memiliki latar belakang dan pengalaman sebagai seorang akademisi untuk melakukan interpretasi data dimana faktor subjektivitas ini tidak dapat dihindarkan dalam penelitian sosial (Stake, 2010: 11). Terdapat dua teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam membahas tulisan ini. Pertama, menggunakan teknik *keeping records*, di mana mengumpulkan data dari dokumentasi sumber ilmiah, seperti buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, serta sumber valid lainnya – seperti situs resmi. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengetahui perkembangan konsep *disaster diplomacy* melalui buku *Disaster Diplomacy* karya Ilan Kelman, dan situs resmi Ilan Kelman sebagai pengembang konsep *disaster diplomacy*, serta lini masa konflik beserta proses diplomasi Pemerintah Indonesia dan GAM, baik sebelum (dari tahun 1999) sampai setelah (sampai tahun 2005) terjadinya bencana tsunami yang melanda Aceh di tahun 2004.

Kedua, menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi dan interpretasi yang bersifat unik dan valid dari seorang narasumber. Narasumber pertama ialah Nezar Patria sebagai jurnalis asal Aceh dan saksi Perundingan Damai Helsinki pada 2005. Narasumber kedua ialah Bustanul Arifin sebagai peneliti senior dengan spesialisasi konflik Pemerintah Indonesia dan GAM. Dan narasumber ketiga ialah Ilan Kelman sebagai pengembang konsep *disaster diplomacy*. Wawancara dilakukan pada narasumber pertama dan kedua melalui wawancara tatap muka, sementara wawancara melalui *email* dilakukan kepada narasumber ketiga.

Teknik analisis data yang dilakukan setelah data terkumpul adalah pertama melakukan penyusunan data sesuai dengan kategori dari masing-masing data untuk memudahkan penggunaan sekaligus interpretasi data agar dapat bersifat terstruktur, efektif, dan efisien. Dan kedua

melakukan penyortiran dan interpretasi data. Penyortiran data dilakukan untuk melihat kesinambungan antara pertanyaan penelitian yang dirumuskan oleh penulis dengan kumpulan data yang telah diseragamkan, dan interpretasi data dapat dilakukan dengan menggunakan konsep *diplomacy* dan *disaster diplomacy* untuk dijadikan sebagai pisau analisis oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui apakah aktivitas terkait kebencanaan atau *disaster related activities* sebagai bagian dari *Disaster Diplomacy* diperlukan penjelasan mengenai respon Pemerintah Indonesia, GAM, dan komunitas internasional untuk menyimpulkan apakah peristiwa bencana alam sebagai respon menuntun kepada interaksi diplomasi.

Presiden SBY mengatakan bahwa tsunami yang terjadi di penghujung tahun akhir tahun 2004 menyebabkan tewasnya 200.000 korban jiwa di kawasan Asia dan Afrika. Ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang terkena dampak destruktif dan kehilangan paling besar di antara negara-negara lainnya. Di Aceh dan Nias, terdapat 120.000 korban jiwa dengan 100.000 orang yang masih dinyatakan hilang. Tidak hanya kehilangan banyak korban jiwa, namun kerugian total dari dampak destruktif yang melanda properti publik maupun privat ialah sebesar 5 milyar dolar AS, atau seluruh produk domestik bruto Aceh. Seluruh sarana administrasi publik dan sarana umum hancur diluluhlantakkan oleh tsunami, sehingga seluruh kegiatan perekonomian di Aceh pun lumpuh (Yudhoyono, 2005: 432-434).

Pada hari terjadinya tsunami, yaitu 26 Desember 2004, Presiden SBY langsung mendeklarasikan bencana alam dan memerintahkan berbagai departemen dan kementerian untuk melakukan mobilisasi sumber daya yang tersedia sebagai respon keadaan darurat serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi, serta menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB atau dulu dikenal dengan Bakornas PB) untuk mengirimkan sumber daya yang dimiliki oleh Bakornas PB ke Aceh (Masyrafah and McKeon, 2008: 4)

Tidak hanya Presiden SBY, namun Wakil Presiden Jusuf Kalla juga memberikan respon terkait bencana sekaligus konflik pada akhir Desember 2004. Ia mengatakan kepada Hamid Awaluddin (2008: 24) sebagai Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia saat itu bahwa: “Aceh harus segera damai. Tidak mungkin suplai makanan bisa berjalan lancar kalau masih ada letusan senjata. Apa yang terjadi jika ada orang internasional yang tengah membantu Aceh tiba-tiba diculik atau terbunuh? Mereka berlarian pergi, membuat rakyat Aceh dan Nias kian menderita”.

Dari tanggapan tersebut, dapat dilihat bahwa pemerintah pusat bermaksud untuk memulai dialog kembali dengan Aceh dengan tujuan akhir perdamaian

antara kedua belah pihak dan dapat saling berkompromi dengan kepentingan masing-masing pihak. Dialog damai ini diperlukan untuk membantu korban bencana, karena konflik dapat menghambat bantuan untuk terdistribusi dengan baik.

Enam belas hari setelah terjadinya tsunami di Aceh, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengirimkan memorandum resmi ke Presiden SBY dengan Nomor 02/WP/1/2005. Memorandum tersebut berisi kondisi Aceh paska tsunami, termasuk kondisi pasukan GAM. Ia menyampaikan bahwa korban yang meninggal dalam bencana yang berlangsung mencapai 100.000 orang. Bencana tersebut juga menimbulkan pengungsi sebanyak 1.000.000 orang dengan kerusakan bangunan sebanyak 100.000 unit. Ia juga menggambarkan bahwa secara finansial, usaha rehabilitasi bencana tersebut masih berada dalam jangkauan. Dalam memorandum ini, beliau melaporkan kepada Presiden SBY mengenai sumber dana yang mungkin bisa dibayangkan (Ali, Monoarfa dan Effendy, 2008: 13). Selain kondisi Aceh paska tsunami, ia melaporkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2005, Wakil Presiden telah berbincang dengan Muzakkir Manaf sebagai Panglima GAM pada saat itu, dan menambahkan bahwa ikhtiar damai harus melibatkan kepemimpinan GAM yang ada di Swedia (Awaluddin, 2008: 33).

Tujuan dari dikeluarkannya memorandum tersebut ialah dorongan Wakil Presiden terhadap seluruh Pemerintah Indonesia dan GAM untuk bahu membahu membangun Aceh kembali paska tsunami. Arah memo tersebut ialah membuka dialog dengan GAM. Hal ini dapat dilihat dari kutipan memorandum tersebut: "...walau pun akibat operasi terpadu kekuatan GAM telah berkurang 50%, tapi tetap berbahaya, apabila mereka melakukan aksi teror, penembakan, dan penculikan, khususnya pada orang asing. Komunikasi dengan Panglima GAM Muzakkir Manaf untuk menyelesaikan masalah secara damai telah terjadi pada 7 Januari 2005, tapi kemungkinan untuk itu tetap tergantung pada putusan politik GAM Swedia." (Ali, Monoarfa dan Effendy, 2008: 14).

Wakil Presiden juga menyebutkan bahwa upaya dialog damai dapat dilakukan dengan difasilitasi oleh mantan Presiden Finlandia, yaitu Presiden Martti Ahtisaari. Wakil Presiden yakin dengan himpunan pengalaman Presiden Ahtisaari dan CMI, karena organisasi ini pernah memfasilitasi dialog informal dan mediasi di Afrika, Irak, Irlandia Utara, dan Asia Tengah. Hal ini mendorong Wapres Jusuf Kalla untuk mempertimbangkan bahwa ia merupakan orang yang tepat sebagai juru damai (Ali, Monoarfa and Effendy, 2008: 17-18). Pada memorandum tersebut, tercatat bahwa para pemimpin GAM, yaitu Malik Mahmud, Zaini Abdullah, dan Bachtiar Abdullah sudah bertemu dengan Ahtisaari dan menyatakan siap melakukan perundingan damai dengan Pemerintah Indonesia (Awaluddin, 2008: 33).

Wakil Presiden tidak hanya memikirkan, menentukan, dan merencanakan siapa fasilitator mediasi yang tepat

dialog damai antara kedua belah pihak. Ia juga menekankan bahwa negosiasi dengan GAM berkisar pada tiga hal pokok, yaitu amnesti, tawaran kesejahteraan, serta pembangunan politik dan program pemerintah pusat kepada Aceh secara menyeluruh. Ia juga mengatakan bahwa sebelum seluruh upaya mengenai rekonstruksi bencana dilaksanakan, maka upaya perdamaian harus dilaksanakan secepatnya agar TNI dan pihak internasional dapat bersama bekerja (Ali, Monoarfa dan Effendy, 2008: 27).

Tidak hanya Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menunjukkan usaha dan komitmennya agar kedua belah pihak berdamai setelah bencana tsunami, Presiden SBY menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia bekerja dua kali lebih keras untuk menghasilkan Master Plan – yang pengerjaannya akan diawasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Pemerintah Indonesia juga membuat Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BAPEL) untuk melakukan implementasi terhadap strategi dari Master Plan tersebut dengan program yang konkret (Yudhoyono, 2005: 432-434). Master Plan dan badan pengurus khusus yang menangani rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh paska tsunami ini bertujuan untuk membangun kembali Aceh, dengan ikut mendorong seluruh komunitas internasional maupun pihak yang bertikai untuk memprioritaskan pembangunan dibandingkan kepentingan masing-masing terhadap konflik yang ada.

Ada pun Master Plan tersebut memiliki lima pilar strategi. Pertama, mengembalikan infrastruktur publik seperti jalan dan sekolah. Kedua, mengembalikan fasilitas publik untuk mendukung aktivitas ekonomi, seperti pasar. Ketiga, melakukan stimulasi terhadap ekonomi lokal, seperti menciptakan lapangan pekerjaan baru. Keempat, memberikan keamanan lanjutan bagi komunitas Aceh untuk mengantisipasi bencana alam selanjutnya apabila akan datang (Yudhoyono, 2005: 435-436).

Selain itu, pada wawancara penulis dengan Bustanul Arifin, ia menyebutkan bahwa TNI yang sedang berada di Aceh turut membantu dalam merespon bencana tersebut karena saat itu masih banyak TNI yang belum sempat dipulangkan kembali ke ibukota karena pernah dikirim oleh Presiden Megawati pada operasi militer di tahun 2003. Aktivitas bantuan ini merupakan fungsi TNI untuk membantu apabila ada bencana alam atau proyek sosial di suatu daerah.

Selain Pemerintah Indonesia, komunitas internasional turut memberikan respon bantuan untuk Indonesia mengingat Aceh merupakan daerah yang terkena dampak destruktif paling parah di antara daerah atau negara-negara lain yang ikut merasakan dampak tsunami. Komunitas internasional mengakui bahwa dukungan yang diberikan komunitas internasional merupakan respon internasional terbesar dalam merespon bencana alam, melibatkan jumlah donor terbanyak, dan merupakan respon finansial tercepat terhadap bencana (Flint and Goyder, 2006: 7).

Koordinasi bantuan lokal maupun internasional dipimpin oleh Bakornas PB dengan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) (Flint and Goyder, 2006: 4).

UN's Financial Tracking System melaporkan bahwa bantuan internasional dalam merespon bencana ini dialokasikan paling banyak kepada Indonesia, yaitu sejumlah 1 milyar dolar AS, dengan AS, Australia, dan Jepang sebagai pendonor resmi pemerintah dengan kuantifikasi kontributor paling banyak dalam bencana ini (Kweifio-Okai, 2014). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan dana sebesar 1.1 milyar dolar AS untuk menyediakan makanan, air bersih, obat-obatan, dan penampungan sementara untuk korban. George Bush Senior dan Bill Clinton juga memberikan bantuan dengan membuat *platform* yang menampung dana bantuan khusus tsunami. Selain itu, Sekretaris Jendral PBB, Kofi Annan, menunjuk Presiden Bill Clinton sebagai *Special Envoy for Tsunami Recovery* selama dua tahun, untuk menstabilkan keinginan politik dari berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam upaya pemulihan (The Parliament of the Commonwealth of Australia, 2006). Bantuan dana ini dilaporkan dengan transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan komitmen Presiden SBY. Pemerintah Indonesia mempublikasikan data tentang dana tersebut dalam situs e-Aceh yang diurus oleh Bappenas (Yudhoyono, 2005: 435).

Dukungan dari komunitas internasional tidak hanya berupa dana maupun tenaga. World Bank, Asia Development Bank, Australia, Jepang, dan AS juga menunjukkan dukungannya dengan memberikan saran terhadap implementasi dari Master Plan dan BAPEL pada beberapa lokakarya yang diadakan oleh Pemerintah Indonesia (Yudhoyono, 2005: 434-435).

Kesadaran bahwa perdamaian antara kedua belah pihak itu penting demi kelancaran rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia dan komunitas internasional. Muhammad Nazar sebagai Ketua SIRA saat itu, mengirimkan surat untuk Presiden dan Perdana Menteri GAM, yaitu Malik Mahmud. Surat tersebut berisi dorongan dan desakan oleh Muhammad Nazar kepada semua pihak untuk segera memajukan kembali proses perdamaian dan menjadikan bencana tsunami untuk menegakkan kebebasan, keadilan, HAM dan perdamaian di Aceh. Ia juga menyampaikan bahwa bencana tersebut harus dijadikan titik balik oleh semua pihak untuk menggapai tujuan yang mulia (Ali, Monoarfa dan Effendy, 2008: 23).

Disebutkan oleh Bustanul Arifin dalam wawancaranya dengan penulis, GAM vakum atau tidak melakukan aktivitasnya selama beberapa bulan GAM fokus untuk memikirkan bagaimana cara untuk membangun Aceh kembali. Ketika TNI dan GAM bahu membahu untuk membangun kembali Aceh paska bencana, mereka tidak memikirkan identitas masing-masing karena lebih berfokus bagaimana cara untuk bisa

bertahan dari situasi paska bencana. Sementara itu, Nezar Patria sebagai sumber lainnya juga mengatakan bahwa GAM menyambut dengan baik bantuan yang datang ke Aceh, baik bantuan internasional maupun bantuan yang datang dari Indonesia. GAM sudah tidak mengkotak-kotakkan bantuan tersebut dengan menganggap bahwa bantuan tersebut ada yang datang dari pihak musuh. Hal ini dikarenakan GAM sudah memprioritaskan untuk melakukan rekonstruksi paska bencana terhadap Aceh, dan hal tersebut dapat dilakukan dengan efektif apabila GAM mengesampingkan benturan kepentingannya dengan Pemerintah Indonesia.

Kesimpulan tersebut terlihat dari bagaimana Presiden SBY langsung memerintahkan berbagai departemen dan kementerian untuk melakukan mobilisasi sumber daya yang tersedia sebagai respon keadaan darurat serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi, serta menugaskan Bakornas PB untuk mengirimkan sumber daya ke Aceh. TNI yang dilaporkan oleh LSM internasional sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia yang berkontribusi pada tingginya angka korban konflik, juga langsung membantu warga Aceh untuk bertahan hidup selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung, tanpa 'mengkotak-kotakan' bahwa mereka merupakan Pemerintah Indonesia dan membahas konflik yang sebenarnya masih berlangsung. Selain itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga langsung memiliki inisiatif untuk mengirim memorandum yang berisi dorongan bagi Pemerintah Indonesia untuk segera melakukan dialog damai dengan GAM, demi memperlancar terdistribusinya bantuan lokal maupun internasional ke Aceh. Wakil Presiden Jusuf Kalla sadar bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh membutuhkan waktu yang lama, tidak hanya setahun atau dua tahun. Karena hal tersebut, beliau mendorong Pemerintah Indonesia untuk secepatnya berinisiatif mengadakan dialog damai dengan GAM. Ia sadar bahwa Pemerintah Indonesia harus memiliki inisiatif dalam memulai kembali dialog damai antara Pemerintah Indonesia dengan GAM untuk mencapai kesepakatan damai dengan sama-sama saling berkompromi terhadap kepentingan masing-masing pihak. Hal ini dikarenakan dalam membantu warga Aceh dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh tsunami, diperlukan kelancaran komunikasi antara Pemerintah Indonesia.

Inisiatif ini berbuah hasil, karena pada bulan Januari, dialog damai pertama antara kedua belah pihak dengan difasilitasi oleh CMI, berhasil diadakan. Inisiatif tersebut termasuk sebagai upaya Pemerintah Indonesia untuk melakukan diplomasi sesuai dengan fungsi diplomasi yang dipaparkan oleh Hedley Bull, karena negosiasi tersebut diadakan untuk memfasilitasi komunikasi antara pemimpin politik suatu negara dengan entitas internasional lain dalam politik dunia, di mana GAM sebagai gerakan separatis termasuk dalam entitas internasional lain. Selain itu, negosiasi ini juga bermaksud untuk menyelesaikan gesekan antara Pemerintah Indonesia sebagai aktor negara

dengan aktor lain dalam hubungan internasional, karena komunitas internasional telah memberikan perhatian pada konflik ini. Hal ini dapat dilihat dari dukungan Pemerintah Libya untuk melatih pasukan militer GAM, dan berbagai laporan dari organisasi internasional – seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, terhadap konflik tersebut.

Selain itu, pada era SBY ini negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama dalam penyelesaian konflik juga tertuang dalam Perjanjian Helsinki, sebagai sebuah perjanjian yang dilahirkan untuk melakukan kompensasi kepentingan masing-masing. Proses negosiasi selama tujuh bulan berhasil melahirkan perjanjian yang menyelesaikan konflik tersebut, sekaligus acuan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dari konflik maupun bencana tsunami. Dalam Perjanjian Helsinki, secara eksplisit disebutkan bahwa perjanjian tersebut hadir untuk memudahkan kedua belah pihak dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana, karena hal itu maka dapat disebutkan bahwa aktivitas terkait kebencanaan mendorong lahirnya Perjanjian Helsinki. Hal ini juga yang menjadi karakteristik dari kebijakan luar negeri SBY yang konstruktivis dengan memprioritaskan agenda *peace-maker*, *confidence builder*, *problem solver* dan *bridge builder* dengan bekerja sama dengan komunitas luar negeri untuk berbagai macam persoalan di dalam negeri (Yani, 2009).

Pertanyaan kedua untuk mengembangkan studi kasus ini pada kerangka *disaster diplomacy* ialah mengetahui apakah diplomasi yang dimaksud merupakan bentukan diplomasi baru. Karena apabila bukan, maka aktivitas terkait kebencanaan dianggap sebagai katalis proses diplomasi, bukan pembentuk diplomasi baru. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus melihat lini masa konflik dan upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik ini, dan apa yang membuat keduanya akhirnya menyepakati Perjanjian Helsinki yang menjadi dasar pengaturan pemerintahan di Aceh hingga sekarang.

Upaya Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik secara damai dan tidak menggunakan kekuatan militer untuk meredam gerakan separatis GAM sudah mulai terlihat sejak Orde Baru runtuh. Presiden pertama yang menggantikan Presiden Soeharto ialah Presiden Habibie, di mana langsung menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kekuatan militer. Usaha Presiden Habibie untuk mengunjungi Aceh dan meminta maaf atas berbagai kekejaman yang terjadi saat operasi DOM, memulai pendataan pelanggaran HAM, mengirim penyelidik kasus HAM, dan membebaskan ratusan tahanan politik Aceh, termasuk fungsi diplomasi karena Presiden Habibie berusaha untuk membuka kesempatan komunikasi antara pemimpin politik suatu negara dengan gerakan separatis sebagai entitas internasional. Ia juga memberikan status otonomi spesial kepada Aceh seperti telah dipaparkan, dan usaha ini dapat dikategorikan sebagai fungsi diplomasi karena

Presiden Habibie telah melakukan upaya tersebut untuk mengurangi intensitas konflik. Sayangnya, usaha ini belum membuahkan hasil karena eskalasi konflik masih meningkat.

Setelah Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid merupakan Presiden Indonesia berusaha meredam konflik dengan meminta bantuan komunitas internasional untuk memfasilitasi konflik, yaitu HDC. HDC bersedia untuk turut andil dalam diplomasi antara kedua belah pihak, yaitu memfasilitasi dialog antara Pemerintah Indonesia dengan GAM. Usaha untuk menyudahi gesekan entitas internasional sesuai fungsi diplomasi Hedley Bull ini membuahkan hasil, yaitu Nota Kesepahaman Jeda Kemanusiaan sebagai perjanjian gencatan senjata untuk kedua belah pihak agar bantuan kemanusiaan kepada warga Aceh sebagai korban konflik dapat terdistribusi dengan baik, dan diimplementasikan dengan dua periode waktu implementasi masing-masing tiga bulan. Namun, perjanjian ini juga belum berhasil mendamaikan kedua belah pihak, bahkan eskalasi konflik semakin meningkat. Tidak menyerah, Presiden Abdurrahman Wahid berusaha menuruti keinginan GAM demi eskalasi konflik menurun. Ia mengeluarkan Instruksi Presiden yang berisi perintah kepada Wakil Presiden dan Kementerian untuk melakukan langkah komprehensif dalam menyelesaikan konflik.

Instruksi tersebut masih belum berhasil memfasilitasi dan mempertemukan kepentingan kedua belah pihak agar gesekan dapat berkurang. Dialog damai dengan difasilitasi oleh HDC berlanjut, dan proses diplomasi ini membuahkan perjanjian baru dengan nama COHA. Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menghentikan permusuhan, dan GAM telah menerima hak otonomi daerah yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia.

Sayangnya, terdapat perbedaan penafsiran antara Pemerintah Indonesia, GAM, dan HDC sebagai mediator, sehingga keadaan konflik masih memburuk. Jumlah kasus yang dihitung sebagai *on going incident* ketika itu ialah 1.216 kasus, dengan 1.113 kasus yang belum diinvestigasi (Staf Operasi Markas Besar TNI 2004, 52-53). Pemerintah Indonesia mengartikan bahwa dengan adanya perjanjian ini, maka GAM dapat dihilangkan karena Pemerintah Indonesia akan melanjutkan pembangunan di Aceh yang masih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Staf Operasi Markas Besar TNI 2004, 47). Sementara pihak GAM menafsirkan hak otonomi khusus dan pelaksanaan pemilu yang demokratis merupakan langkah awal adanya pemilihan pemerintahan Negara Aceh Merdeka, bukan pemilihan umum secara nasional seperti yang diinterpretasikan oleh Pemerintah Indonesia (Staf Operasi Markas Besar TNI 2004, 47). Dari sisi HDC, sebagai mediator negosiasi HDC masih mengabaikan teriakan yel-yel kemerdekaan Negara Aceh Merdeka atau tindakan yang tidak menghormati TNI atau Polri di Aceh. JDC mengira bahwa pembentukan komite pengawasan sebagai implementasi Jeda Kemanusiaan

hanya menyentuh aspek keamanan, bukan aspek politik (Staf Operasi Markas Besar TNI 2004, 48). Usaha Pemerintah Indonesia masih berlanjut. Hal ini dibuktikan dengan tetap melakukan upaya damai sebagai ganti dari kegagalan COHA dengan mengadakan pertemuan di Tokyo, Jepang. Namun, pertemuan ini juga gagal.

Dialog damai dan mediasi yang menghasilkan kedua perjanjian tersebut belum berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini disebabkan kedua belah pihak masih melanggar isi kedua perjanjian tersebut. Masih terdapat kesalahpahaman antara kedua belah pihak – seperti definisi gencatan senjata dan apakah pengibaran bendera GAM melanggar perjanjian tersebut atau tidak. Patroli polisi dan operasi *sweeping* masih sering dilakukan di Aceh, dan hal tersebut malah sering menimbulkan bentrok dengan pejuang GAM. Pemerintah dan militer juga mengkritik bahwa keinginan GAM untuk melakukan mediasi yang diawasi oleh komunitas internasional ini menguntungkan GAM sebagai usahanya dalam internasionalisasi (Aspinall and Crouch 2003, 87-98). Perbedaan persepsi dasar serta kurangnya kepercayaan antara kedua belah pihak, menjadikan implementasi perjanjian sebagai hasil dialog tidak sesuai yang diharapkan dan sangat berbeda dengan keadaan di lapangan (Patria and Wandu 2015, 4-5).

Melihat usaha penyelesaian konflik tanpa menggunakan kekuatan militer yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, diplomasi baru tidak terbentuk, karena *pre-existing basis* dari diplomasi telah ada sejak jatuhnya Orde Baru. Pada wawancaranya dengan penulis, Bustanul Arifin memverifikasi data ini dengan mengatakan bahwa upaya damai yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia belum berhasil, sampai dilakukannya dialog damai yang dapat menuntun pada lahirnya Perjanjian Helsinki. Alasan mengapa Perjanjian Helsinki lahir ialah karena masih adanya keinginan besar dari GAM untuk merdeka.

Bencana tsunami merupakan momentum diplomatik bagi kedua belah pihak untuk mempercepat proses penyelesaian konflik. Terjadinya tsunami termasuk ke dalam tenggat waktu praktikal, di mana momentum ditentukan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dikontrol oleh kedua belah pihak. Korban yang berjatuhan diakibatkan bencana tsunami juga lebih banyak jika dibandingkan dengan konflik yang belum berhasil diselesaikan selama 40 tahun. Fakta ini mendorong Pemerintah Indonesia, dengan inisiasi dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, untuk segera menyelesaikan konflik demi lancarnya distribusi bantuan dari komunitas internasional untuk korban bencana untuk tetap bertahan hidup sekaligus melakukan proses pemulihan Aceh.

Dalam wawancara penulis dengan Nezar Patria dan Bustanul Arifin, keduanya mengatakan bahwa perbandingan jumlah korban konflik Aceh dan bencana tsunami mendorong Pemerintah Indonesia dan GAM untuk tidak mengedepankan kepentingan masing-masing dahulu. Bencana tsunami berhasil merubah ideologi Pemerintah Indonesia dan GAM untuk damai. Tadinya,

kedua belah pihak bersikeras untuk mempertahankan kepentingan masing-masing tanpa kompromi. Dikarenakan alasan dasar, yaitu ketidakadilan yang dirasakan oleh warga Aceh terhadap pembangunan di Indonesia, maka GAM bersikeras untuk memerdekakan Aceh dari Indonesia. Namun, tsunami mendorong kedua belah pihak untuk mengesampingkan kepentingan tersebut dengan memprioritaskan rekonstruksi Aceh, karena rekonstruksi tersebut dapat berjalan lancar apabila kedua belah pihak berdamai sehingga komunikasi antara kedua belah pihak menjadi lancar. Pendirian GAM untuk merdeka tidak sekuat sebelum terjadinya tsunami, karena mereka sadar bahwa jika Aceh menjadi negara yang independen, maka warga Aceh belum tentu dapat berdiri sendiri dalam memulihkan kondisi Aceh seperti sebelum terkena dampak destruktif bencana tsunami. Bustanul Arifin bencana tsunami berhasil merubah pola pikir para anggota GAM dan Pemerintah Indonesia. Warga Aceh, termasuk anggota GAM berfokus pada bagaimana mereka dapat membangun kembali Aceh, begitu pula dengan Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia merasa mereka tidak dapat memaksa Aceh untuk berdamai, terutama melalui cara militer, karena bencana tsunami melahirkan *sense of humanity* antara kedua belah pihak. Bencana alam dapat memiliki pengaruh terhadap lahirnya atau berubahnya suatu kebijakan, karena kebijakan harus dicocokkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang terjadi pada negara.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas terkait kebencanaan tidak melahirkan proses diplomasi baru. Namun, demi kelancaran terdistribusinya bantuan lokal dan internasional untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pasca tsunami, maka diperlukan komunikasi yang lancar antara Pemerintah Indonesia dan warga Aceh, termasuk GAM. Aktivitas terkait kebencanaan dianggap memberi pengaruh – dapat dianggap pula sebagai pendorong atau katalis, agar kedua belah pihak menyelesaikan 40 tahun konflik dengan melaksanakan dialog damai selama 7 bulan. Bencana tsunami merupakan momentum diplomatik bagi kedua belah pihak untuk.

SIMPULAN

Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan dalam artikel ini yaitu: pertama, apakah aktivitas terkait kebencanaan menuntun kepada interaksi diplomasi? Tulisan ini menyimpulkan bahwa interaksi diplomasi pasca bencana terjadi pada saat Pemerintah Indonesia dan CMI bekerjasama dan bertindak sebagai fasilitator dialog damai, serta keinginan GAM untuk membangun kembali Aceh, sudah cukup memanfaatkan diplomasi menjadi hasil atau sebuah perdamaian sehingga bisa “menjinakkan” GAM dengan mengakomodir kepentingan masing-masing. Pada pertanyaan penelitian kedua, apakah terbentuk diplomasi baru? Tulisan ini menyimpulkan bahwa setelah upaya persuasif maupun represif yang telah dilakukan sejak Presiden Soeharto hingga Presiden SBY tidak terlalu memberikan dampak berarti terhadap resolusi

konflik dan upaya mencapai perdamaian dengan GAM. Dampak menghancurkannya bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2004 menuntut kedua belah pihak untuk segera berdamai, karena lancarnya distribusi bantuan lokal maupun internasional dalam rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh paska tsunami hanya akan dapat dicapai apabila komunikasi dan negosiasi antara kedua belah pihak lancar. Bencana ini membuat perjuangan GAM pada akhirnya mencapai titik jenuh karena dampak destruktif yang ditimbulkan tsunami kepada Aceh. GAM tidak lagi memiliki posisi tawar yang kuat untuk memberontak kepada Pemerintah Indonesia, dan menjadikan Aceh menjadi negara independen. Sementara Pemerintah Indonesia pun sadar bahwa keadaan ini dapat 'dimanfaatkan' untuk menyelesaikan konflik yang bertahun-tahun telah terjadi. Bencana yang hadir di penghujung tahun 2004 ini dapat mengubah pemikiran Pemerintah Indonesia dan GAM, untuk dapat berkompromi dengan kepentingan masing-masing, dan melahirkan Perjanjian Helsinki pada tahun 2005 untuk mengakomodir kepentingan antara kedua belah pihak yang berkonflik sehingga konflik tersebut selesai, dan damai di Aceh dapat diraih kembali setelah 40 tahun lamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (1993). *Shock Therapy: Restoring Order in Aceh*. Amnesty International.
- Arifin, B. (2017) Interview by Naura Nabila Haryanto. *Situasi Konflik antara Pemerintah Indonesia dengan GAM* (Mei 12, 2017).
- Aspinall, E. & Crouch, H. (2003) *The Aceh Peace Process: Why It Failed*. Washington DC.: East-West Center.
- Awaluddin, H. (2008) *Damai di Aceh: Catatan Perdamaian RI - GAM di Helsinki*. Center for Strategic and International Studies (CSIS).
- Bull, H. (2002). *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*. 3rd edition. New York: Palgrave.
- Centre for Humanitarian Dialogue. *About*. 2005. <https://www.hdcentre.org/who-we-are/about/> (accessed Desember 12, 2016).
- CNN. *Aceh: A Timeline of Insurgency*. May 19, 2003. <http://edition.cnn.com/2003/WORLD/asiapcf/southeast/05/19/aceh.timeline/> (accessed May 18, 2017).
- Flint, M. & Goyder, H. (2006). *Funding the Tsunami Response*. Tsunami Evaluation Coalition.
- Gorman, D. & Kivimäki, T. (2008). *Non-Governmental Actors in Peace Process: The Case of Aceh*. Jenewa: The Centre for Humanitarian Dialogue.
- Gorman, D. & Kivimäki, T. (2008). *Non-Governmental Actors in Peace Processes: The Case of Aceh. Case Study*, Geneva: The Centre for Humanitarian Dialogue.
- Human Rights Watch. (1990). *Indonesia: Human Rights Abuses in Aceh*. Human Rights Watch.
- Kelman, I. (2003). *Beyond Disaster, Beyond Diplomacy*. In *Natural Disasters and Development in a Globalizing World*, by Mark Pelling, edited by Mark Pelling. New York: Routledge.
- Kelman, I. (2016). *Catastrophe and Conflict: Disaster Diplomacy and Its Foreign Policy Implications*. *Diplomacy and Foreign Policy*, 1, (1), 1-2.
- . (2012). *Disaster Diplomacy: How Disasters Affect Peace and Conflict*. New York: Routledge.
- Kweifio-Okai, Carla. (2016). *Where Did the Indian Ocean Tsunami Aid Money Go?*. Desember 25, 2014. <https://www.theguardian.com/global-development/2014/dec/25/where-did-indian-ocean-tsunami-aid-money-go> (accessed Januari 17, 2016).
- Masyrafah, H. & Jock MJA McKeon. (2006). *Post-Tsunami Aid Effectiveness in Aceh*. Wolfensohn Center for Development.
- Masyrafah, H. & Jock MJA McKeon. (2008). *Post-Tsunami Aid Effectiveness in Aceh: Proliferation and Coordination in Reconstruction*. Wolfensohn Center for Development, Brookings Global Economy and Development.
- Patria, N. & Wandu, A. (2015). "The Rebels, the State and the People: Inclusivity in the Aceh Peace Process." *Inclusive Political Statements Paper*.
- Staf Operasi Markas Besar TNI. (2004) *COHA, Suatu Penyelesaian Konflik di Aceh*. Jakarta: Markas Besar TNI.
- Stake, R.E. (2010) *Qualitative Research: Studying How Things Work*. The Guilford Press.
- Sudirman, A. & Cahya, P.A. (2018). *Disaster Diplomacy as an Alternative Approach for Indonesia's Instrument of Foreign Policy in ASEAN*. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14, (1), 9.
- Sulaeman, M. (2010). *Dasar-dasar Konflik dan Model Resolusi Konflik pada Masyarakat Desa Pantura Jabar*. *Sosiohumaniora*, 12, (2), 178
- The Parliament of the Commonwealth of Australia. *Australia's Response to the Indian Ocean Tsunami*. Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade of Australia, Canberra: Commonwealth of Australia, 2006.
- Yani, M.Y. (2009). *Change and Continuity in Indonesian Foreign Policy*. *Sosiohumaniora*, 11, (1), 12
- Yudhoyono, S.B. (2005). *Rebuilding Aceh*. In *Transforming Indonesia: Selected International Speeches*, by Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, edited by Dino Patti Djalal. Jakarta: PT Gramedia.
- Yudhoyono, S.B. (2001). interview by Kantor Menko Polsoskam. *Aceh Perlu Keadilan, Kesejahteraan, dan Keamanan*.

KOMUNIKASI PEMASARAN PRODUK KOMODITAS LOKAL BERBASIS KOMUNITAS MELALUI PENGGUNAAN MEDIA (Studi Kasus FruitsUp, UMKM di Jatinangor)

Santi Susanti¹, Dwi Purnomo², Wahyu Gunawan³ dan Diana Sari⁴

¹Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran

²Fakultas Teknologi Industri Pangan, Universitas Padjadjaran

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor, 456363

E-mail: santi.susanti@unpad.ac.id

ABSTRAK, *FruitsUp* merupakan salah satu produk UMKM Unpad yang berhasil melakukan diversifikasi produk olahan mangga menjadi *puree* buah. Pengembangan bisnis melalui Fruters Model mampu menjadikan bisnis *FruitsUp* yang dimulai dari skala kecil berjalan selama tiga tahun dan berkembang cukup baik dari sisi asset maupun kekayaan sumber daya manusianya. Meski demikian, pengembangan masih dilakukan *FruitsUp*, salah satunya perluasan pemasaran, agar produk dapat menjangkau lebih banyak target pasar sehingga skala penjualan dan skala produksi meningkat. Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi pemasaran *FruitsUp* dalam menjangkau target pasar lebih luas melalui media massa dan media jejaring sosial. Hasil penelitian menunjukkan, televisi, radio, surat kabar dan media sosial dijadikan saluran komunikasi untuk mengenalkan *FruitsUp* secara luas kepada masyarakat. Perancangan dan penyampaian pesan disesuaikan dengan media yang digunakan. Melalui media massa dan jejaring sosial, diharapkan selain dikenal luas, *FruitsUp* dapat memberikan nilai tambah baik dari sisi pemasaran produk, maupun dari sisi peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Kata kunci: *FruitsUp*; Fruters Model; komunikasi pemasaran; media; nilai tambah

MARKETING COMMUNICATION OF LOCAL COMMODITIES PRODUCTS WITH COMMUNITY-BASED THROUGH MEDIA USAGE (Case Study of FruitsUp, UMKM in Jatinangor)

ABSTRACT, *FruitsUp* is one of the UMKM Unpad products that successfully diversify the processed mango products into fruit puree. Fruters Model Business development is enable to make the business run for three years and develop quite well in terms of assets and wealth of human resources. Nevertheless, *FruitsUp*'s development is still underway, one of which is the expansion of marketing, so the product can reach more target market, the scale of sales and production increases also. This study aims to determine the marketing strategy of *FruitsUp* to reach the target market more broadly through the mass media and social media. The results show that mass media and social media became a channel of communication to introduce *FruitsUp* broadly. The use of mass media and social networking is expected that besides being widely known, *FruitsUp* can provide added value in terms of product marketing, as well as the improvement of community welfare and health.

Key words: *FruitsUp*; Fruters Model; marketing communication; media, added value

PENDAHULUAN

Jawa Barat termasuk ke dalam salah satu produsen mangga terbesar di Indonesia bersama dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, NTB dan NTT (Deliana, dkk., 2014). Salah satu varian yang banyak dihasilkan adalah mangga gedong gincu. Wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning) adalah penghasil mangga gedong gincu di Jawa Barat. Pada setiap panen, jumlah mangga seringkali berlebih. Akibatnya, harga jualnya menjadi turun dan banyak mangga yang dibuang.

Pada tahun 2014, sejumlah mahasiswa Fakultas Teknik Industri Pertanian (FTIP) Universitas Padjadjaran, yang sedang merintis wirausaha, menawarkan solusi kepada para petani mangga di Ciayumajakuning, berupa input teknologi pengelolaan pangan yang mengubah buah mangga utuh menjadi bubur buah atau *puree*, yang dapat dikonsumsi kapanpun, tanpa terikat musim mangga. Dengan demikian, tidak ada lagi mangga yang terbuang

pascapanen dan nilai tambah pada mangga hasil panen para petani pun meningkat. Adanya kepastian hilirisasi produk menjadikan para petani bersemangat merawat tanaman mangganya. Jenis mangga yang diolah saat ini adalah gedong gincu, harum manis dan kuweni. Mangga yang sudah diolah menjadi bubur buah tersebut kemudian dikemas kembali ke dalam botol menjadi produk minuman mangga berlabel *FruitsUp*.

Pengembangan produk yang dilakukan *Fruits Up* menggunakan konsep *sociopreneurship*, yakni kegiatan sosial melalui jiwa kewirausahaan. Masyarakat dibantu untuk mandiri melalui kewirausahaan. Pendekatan *sociopreneurship* dirancang untuk memiliki rantai manfaat yang panjang, sehingga memberikan nilai pada objek sosial yang dituju, serta diarahkan untuk menyebar nilai guna dan nilai tambah yang besar bagi masyarakat. (unpad.ac.id, 21/11/2014).

Konsep *sociopreneurship* yang ditawarkan *FruitsUp*, memiliki profit dan benefit bagi para *stakeholder* yang terlibat di dalamnya. Profit yang diperoleh digunakan

sebagai sumber pembiayaan pergerakan petani dan komunitas lokal yang bermanfaat bagi pengembangan usaha. Benefitnya, dengan mengubah mangga menjadi bubur buah atau *puree* berkualitas premium, *FruitsUp* memberi dampak positif pada kesejahteraan petani mangga di kawasan Ciayumajakuning.

Tiga tahun sejak dirintis tahun 2014 oleh Mahadiansyah Alhadi, Bambang Bayu Febianto dan Gian Rizky Pratama, *FruitsUp* berkembang dan menjadi badan usaha bernama CV. Ormund Indonesia. Konsep *sociopreneurship* menjadikan *FruitsUp* sebagai poros kolaborasi dari setiap mitranya. Model bisnis *FruitsUp* diarahkan untuk menjadi usaha yang memiliki nilai (*value*) yang tinggi, dan tidak terjebak pada visi untuk membesarkan bisnis dalam tempo yang singkat. Dalam dua tahun, perkembangan bisnisnya cukup baik dengan asset yang dimiliki kurang lebih Rp. 400.000.000, dengan kekayaan sumber daya manusia sebagai modal utamanya.

Walau sudah mulai berkembang, *FruitsUp* masih memiliki keterbatasan, salah satunya dalam pemasaran. Saat ini, pemasaran masih fokus pada wilayah Bandung dan Jakarta, dengan mengandalkan *reseller* yang sebagian besar adalah ibu-ibu rumah tangga daerah perkotaan serta membuka gerai-gerai penjualan di cafe dan restoran yang bekerja sama dengan *FruitsUp*. Mengikuti perkembangan teknologi saat ini, *FruitsUp* pun memanfaatkan media berbasis internet sebagai media pemasaran. Cara tersebut mampu membuahkan hasil dan membuat *FruitsUp* dikenal. Tertarik akan keberhasilan *FruitsUp* dalam mengembangkan bisnisnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan *FruitsUp* dalam memperluas pemasaran.

Komunikasi pemasaran digunakan untuk menginformasikan, memengaruhi dan dapat meningkatkan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Marcomm Wise (Tsikirayi, Muchenje, & Katsidzira, 2013) mendefinisikan komunikasi pemasaran meliputi semua strategi, taktik, dan kegiatan dalam mendapatkan pesan pemasaran yang diinginkan untuk target pasar yang dituju, terlepas dari menggunakan media. Komunikasi pemasaran atau *marketing communication* merupakan sebuah metode yang dapat memajukan dan mengembangkan suatu lembaga pendidikan maupun sebuah organisasi, sehingga manajemen pemasaran yang baik harus diutamakan. (Riyanto & Triono, 2017).

Penelitian terkait komunikasi pemasaran telah pula dilakukan oleh beberapa peneliti, di antaranya adalah penelitian Meliza Hendri mengenai *Pengaruh Komunikasi Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian Teh Kotak Ultra Rasa Melati oleh Remaja di Kota Bandung*. Pene-kanan komunikasi pemasaran melalui kegiatan promosi dan nonpromosi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemasaran berpengaruh terhadap keputusan pembelian Teh Kotak Rasa Melati oleh remaja di Kota Bandung. Akan tetapi, kegiatan nonpromosi memberikan kontribusi pengaruh lebih besar daripada kegiatan promosi.

Penelitian berikutnya adalah *Komunikasi Pemasaran Usaha Kuliner dalam Menghadapi Persaingan (Studi Deskriptif Kualitatif Kegiatan Komunikasi Pemasaran Cafe "Gerobak Cokelat" dalam Menghadapi Persaingan di Kota Solo)* yang dilakukan oleh Akbar Prayogo dan Adolfo Eko Setyanto dari Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan, Gerobak Cokelat Café melakukan kegiatan pemasaran seperti promosi penjualan, periklanan, publisitas, humas dan word of mouth. Dari kegiatan ini kegiatan komunikasi pemasaran yang paling efektif adalah *word of mouth* dan twitter sedangkan aktivitas komunikasi pemasaran yang tidak bisa menembus konsumen adalah media elektronik iklan. Strategi komunikasi pemasaran yang dibutuhkan untuk memenangkan persaingan pasar adalah dengan membunuh produk lawan, mengubah *tagline*, penggunaan saluran media baru dan strategi aplikasi komunikasi media tertentu. Dari dua penelitian tersebut, aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh *FruitsUp* memiliki kesamaan, terutama dengan yang kedua, yaitu pemasaran melalui pemanfaatan media sosial. Meski demikian, perbedaan dari keduanya, produk *FruitsUp* dipasarkan tidak secara bebas, melainkan di tempat-tempat spesifik, sehingga memerlukan bantuan *reseller* untuk mencapai sasaran yang tepat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Mulyana (2006: 201) studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial.

Menurut Yin (2011: 1) secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan pertanyaan *why* atau *how*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang akan diselidiki, dan bila fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer. Studi kasus dapat memberi nilai tambah pada pengetahuan kita secara unik mengenai fenomena individual, organisasi dan politik, studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakter holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata, seperti siklus kehidupan seseorang, proses-proses organisasional dan manajerial, perubahan lingkungan sosial, hubungan-hubungan internasional hingga kematangan industri (Yin, 2011: 4).

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah individu yang terkait dengan pemasaran Fruit Up, yaitu CEO serta Manajer Pemasaran *FruitsUp*. Data dilengkapi dengan studi pustaka dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

FruitsUp merupakan produk UKM Unpad yang dikelola berdasarkan model pemberdayaan Fruters Model, yaitu model pembedayana masyarakat berbasis technology preneurship, yaitu teknologi hasil penelitian yang dirancang dalam bentuk produk bernilai tambah dan diterapkan sebagai penggerak pemberdayaan antar berbagai pemangku kepentingan yang melibatkan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media sehingga memiliki nilai serta dampak positif yang luas. Model ini memetakan kontribusi dan peran para *stakeholder* dalam menyukseskan program unggulan berbasis kemasyarakatan. Melalui Fruters Model, setiap elemen *stakeholder* bekerja sesuai posisinya masing-masing sehingga lebih terarah.



(sumber: CV Ormund)

Gambar 1. *FruitsUp*, produk UKM Unpad

FruitsUp merupakan merek minuman berbasis bubuk buah atau *puree* mangga yang berorientasi pada produk menyehatkan. UKM *FruitsUp* didirikan berawal dari bagaimana cara meningkatkan nilai tambah dari buah mangga. Mangga yang berasal dari petani di kawasan Ciayumajakuning diubah menjadi *puree* berkualitas premium.

Pemesanan *puree* dilakukan secara *pre-order* kepada pengusaha buah mangga yang berlokasi di Cirebon. Setiap melakukan pemesanan, jumlah *puree* mangga yang dipesan sekitar 4.230 ton dalam satu tahun, sedangkan kebutuhan per bulannya sekitar 350 liter. Setiap pemesanan *puree* mangga dilakukan dalam jangka waktu bulan produksi.

Targetnya kelas menengah hingga premium (Purnomo, dkk, 2017).

Dalam menjalankan bisnisnya, CV Ormund sebagai produsen *FruitsUp*, mengusung platform bisnis sosial. Dengan demikian, bisnis yang dijalankan *FruitsUp* tidak hanya berorientasi pada keuntungan, juga berupaya untuk pemberdayaan masyarakat. Sebagian keuntungan yang diperoleh digunakan sebagai sumber pembiayaan gerakan petani dan komunitas lokal.

Untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya, produk harus didistribusikan. Pemasaran dan *branding* pun dilakukan. Di sinilah pentingnya bagian pemasaran untuk dapat memetakan dan mengatur strategi pemasaran produk, agar *FruitsUp* dapat terdistribusikan dengan baik dan tepat pada sasaran.

Komunikasi Pemasaran *FruitsUp*: *Offline* dan *Online*

Pemasaran produk *FruitsUp* dilakukan melalui dua cara, yaitu secara *offline* dan *online*. Secara *offline*, *FruitsUp* dipasarkan dengan memberdayakan ibu-ibu rumah tangga di perkotaan sebagai *reseller direct selling*. Hampir 50 *reseller* sudah dibina. Mereka pun diajari untuk melakukan pemasaran secara *online*. “Untuk promosi, *branding*, mereka juga diajari Instagram, cara *advertise* di Intagram, *advertise* di Facebook, dan lain-lain” ujar Mahadian. Selain itu, *FruitsUp* bekerjasama dengan beberapa outlet, mini market dan cafe di Bandung dan Jakarta sebagai saluran distribusi kepada konsumen.

Dalam sistem pemasaran *offline*, ada inovasi yang dilakukan, antara lain, *reseller* diakui sebagai marketing langsung dan dibekali dengan aplikasi yang terafiliasi langsung ke *website FruitsUp* sehingga dengan mudah, *reseller* dapat mengecek stock, sisa deposit dan penjualan, serta daerah yang belum terjangkau pemasaran.

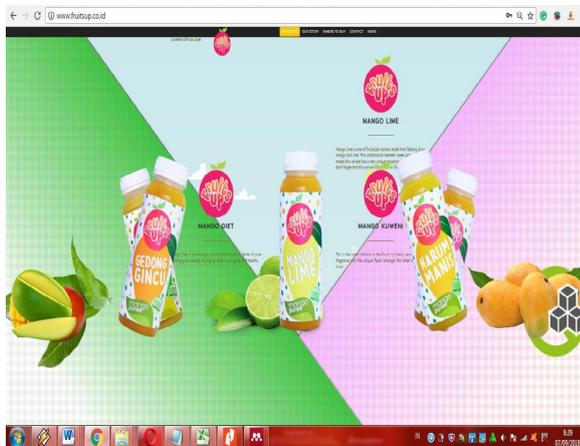
Secara *online*, *FruitsUp* membuat *website* yang bertujuan sebagai media untuk mempromosikan produk dan menyampaikan informasi, gambar, video atau lite-lite lainnya terkait profile perusahaan yang dapat diakses semua orang. *Website FruitsUp* yang sudah dibuat adalah <http://www.fruitsup.co.id>.

Sebagai metode *branding*, informasi yang disampaikan mencakup standar prosedural metode pemasaran melalui media *offline* maupun *online* seperti standar logo, cara pemuatan warna, standar desain, serta tata cara penggunaan media.

Pemasaran secara *online*, dilakukan melalui media sosial Instagram dan Facebook, serta chat messenger Line. Instagram dan Facebook memiliki fitur khusus *online* marketing seperti Instagram Ads dan Facebook Ads. Fitur tersebut dimanfaatkan dengan cara mengunggah foto produk ke media sosial.

Selain itu, *FruitsUp* bekerja sama dengan salah satu vendor khusus pengiklanan untuk me-repost foto produk dan mengirim broadcast pesan ke aplikasi messenger kepada pelanggan/distributor. Pemasaran *online* ditugaskan kepada bagian pemasaran.

Beberapa *reseller* dilatih melakukan pemasaran *online* melalui *website* agar mereka mudah melakukan pemasaran dan *branding*. Untuk mempercepat pencapaian, tim dari *FruitsUp* sering mengunjungi *reseller* untuk menjalin silaturahmi sambil mendapatkan umpan balik tentang pemasaran.



Gambar 2. www.fruitsup.co.id

Selain pemasaran manual, pemasaran berbasis televisi juga dilakukan bekerjasama dengan beberapa stasiun TV nasional dan lokal seperti Metro TV dan MQ TV.

Pemasaran melalui instagram dan facebook dilengkapi dengan tagline dan hastag tentang keunggulan dari produk *FruitsUp*, tips dan informasi tentang kesehatan. Nama akun sosial media yang digunakan yaitu, Facebook: *FruitsUp*, Instagram: @FruitsUp dan Line: @FruitsUp.

Branding dan pemasaran secara *offline* dan *online* yang dilakukan secara terencana dan tertata dengan baik mampu membuahkan hasil. *FruitsUp* mulai dikenal ke luar Bandung dan Jakarta. Permintaan dari luar pulau pun bermunculan, seperti dari Bali dan Sumatera. Sayangnya, permintaan tersebut belum dapat dipenuhi. Bukan karena produksi tidak ada, melainkan terkendala dalam proses distribusi. Fruit Up yang diproduksi secara alami, tanpa bahan pengawet, tidak bisa bertahan lama jika dibiarkan. "Paling tahan 6 sampai 8 jam di luar tanpa disimpan di kulkas", ujar Mahadiansyah.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, telah disiapkan rencana untuk memperpanjang masa simpan dan perluasan distribusi. Untuk memperpanjang masa simpan, akan dilakukan penelitian teknologi pangan, bagaimana memperpanjang masa simpan *FruitsUp* tanpa bahan pengawet. Sementara untuk perluasan distribusi, direncanakan untuk memiliki mobil pendingin, supaya distribusi dapat dilakukan secara bersamaan ke beberapa kota yang dituju.

Hambatan Pemasaran

CEO *FruitsUp*, Bambang Bayu, mengatakan, dalam memasarkan produknya, ada beberapa kendala yang ditemui. Selain masa simpan, juga harga yang premium. Kendala dalam masa simpan menyebabkan *FruitsUp* belum bisa dikirim ke luar wilayah Jatinangor yang membutuhkan

waktu lebih dari satu hari. Selain itu, biaya pengiriman menjadi kendala dalam mengirim produk ke luar daerah. Besarnya biaya pengiriman dapat memengaruhi harga jual yang bisa lebih mahal dari yang ditetapkan saat ini, yaitu 15 ribu rupiah per botol.

Diakui Bayu, dengan harga yang ditetapkan sekarang pun, ia sering mendengar keluhan dari beberapa konsumen mengenai harga yang ditetapkan untuk *FruitsUp*. Menurut Bayu, harga jual tersebut sebenarnya sesuai dengan *added value* yang terdapat dalam *FruitsUp*, yaitu kesehatan yang diperoleh. Selain itu, hasil keuntungan yang diperoleh pun akan digunakan lagi untuk memberdayakan para petani mangga di daerah Ciayumajakuning.

Bayu menambahkan, kualitas produk *FruitsUp* yang premium, membutuhkan target market yang tepat. Untuk itu, peran *reseller* sangatlah penting untuk mencapai target market yang sesuai. Ada validasi market yang berkesinambungan. Dari produksi, tidak begitu bermasalah. Hanya masih terkendala di pemasaran. Produksi disesuaikan dengan pemasaran.

Inovasi di Bidang Pemasaran

Beberapa *reseller* dibina untuk melakukan *branding* pemasaran *online*, yaitu di *website*. Mereka bisa mudah melakukan pemasaran dan *branding*. Untuk bergerak lebih cepat, tim dari *FruitsUp* kerap mengunjungi *reseller* untuk bersilaturahmi, sekaligus mendapatkan *feedback* dari mereka mengenai pemasaran yang dilakukan. Untuk lebih mengembangkan usahanya, *FruitsUp* menjalin jejaring dengan komunitas-komunitas yang ada di Jatinangor dan Bandung. Mereka juga mengikuti *workshop*.

Perubahan Perilaku Masyarakat

Perubahan perilaku terjadi tidak hanya pada masyarakat daerah produsen mangga gedong gincu, juga pada masyarakat perkotaan (*urban areas*) dimana aktivitas pemasaran berlangsung. Masyarakat pedesaan mengalami perubahan perilaku dengan meningkatnya kepedulian terhadap upaya budidaya mangga gedong gincu. Adapun di perkotaan, perubahan perilaku terjadi dalam bentuk mulai meningkatnya motivasi para Ibu rumah tangga terhadap aktivitas pemasaran produk *FruitsUp*. Adanya perubahan perilaku masyarakat di kedua daerah tersebut mendukung terjadinya industrialisasi olahan mangga menjadi lebih *massif*.

SIMPULAN

Media massa dan media sosial menjadi saluran komunikasi untuk mengenalkan *FruitsUp* secara luas. Penggunaan media massa dan jejaring sosial diharapkan selain menjadikan *FruitsUp* dikenal luas juga dapat memberikan nilai tambah dalam hal pemasaran produk, serta peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Peran ibu-ibu *reseller* pun tidak bisa dikesampingkan, karena melalui mereka pula, *FruitsUp* dapat dikenal oleh masyarakat yang menjadi target konsumennya.

Perencanaan yang tepat dan pelaksanaan yang sesuai merupakan kunci dari keberhasilan untuk melakukan pemasaran produk. Ide-ide kreatif yang tiada henti, akan terus mendukung keberlangsungan bisnis yang dijalankan, sehingga semua *stakeholder* dapat merasakan keberhasilan dari bisnis yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Deliana, Y., Fatimah, S. & Charina, A. (2014). Persepsi dan Perilaku Produsen dan Konsumen terhadap Label Asal Daerah pada Mangga Gedong Gincu. *Sosiohumaniora*, 16, (1), 70-76
- Hendri, M. (2009). Pengaruh Komunikasi Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Teh Kotak Ultra Rasa Melati oleh Remaja di Kota Bandung. The 3rd National Conference on Management System, Bandung, 5 November 2009. Bandung: Universitas Widyatama.
- <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1272/content.pdf?sequence=103092017>. diakses: 09 September 2017. 18.30 WIB
- Mulyana, D. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prayogo, A.. (2015). Komunikasi Pemasaran Usaha Kuliner dalam Menghadapi Persaingan (Studi Deskriptif Kualitatif Kegiatan Komunikasi Pemasaran “Gerobak Cokelat” dalam Menghadapi Persaingan di Kota Solo).
- <http://www.jurnalkommas.com/docs/JURNAL%20KOMUNIKASI%20AKBAR%20PRAYOGO%20D0210007.pdf>. Diakses 3 September 2017. 18.20.
- Purnomo, D., Gunawan, W., Sari, D. & Susanti, S. (2017). Hilirisasi Model Pemberdayaan “The Fruters Model” Melalui Produk Turunan Puree Mangga Merek FruitsUp. Laporan Riset Hilirisasi Produk Unggulan (RHPU). Jatinangor: Universitas Padjadjaran.
- Riyanto, E. dan Triono, A. (2017). Komunikasi Pemasaran Terpadu (IMC) Sekolah Dasar Islam Terpadu di Karanganyar. *Komuniti*, IX, (1), 44-62. DOI: <https://doi.org/10.23917/komuniti.v9i1.4183>.
- Tsikirayi, C. M. R., Muchenje, B. & Katsidzira, Z. (2013). Impact of integrated marketing communications mix (IMCM) in small to medium enterprises (SMEs) in Zimbabwe as a marketing tool. *Research in Business and Economics Journal*, 7, (Imcm), 1–12. Retrieved from: <http://search.proquest.com/w/1460230826?accountid=14495%5Cn> <http://diana.uca.es:4550/resserv?genre=article&issn=&title=Research+in+Business+and+Economics+Journal&volume=7&issue=&date=2013-02-01&atitle=Impact+of+integrated+marketing+communications+mix>
- Yin, R. K. (2011). Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- <http://www.fruitsup.co.id>
- <https://www.instagram.com/explore/tags/fruitsup>
- <https://www.facebook.com/fruitsupfresh>
- <http://www.unpad.ac.id/2014/11/kembangkan-sociopreneurship-dosen-ini-dorong-mahasiswa-dan-masyarakat-berwirausaha>. Diakses 6 September 2018

PARTISIPASI POLITIK DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN WORI, KABUPATEN MINAHASA UTARA

Marthen L. Kimbal

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Samratulangi, Manado
E-mail: marthenkimbal22@gmail.com

ABSTRAK, Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memiliki arti strategis untuk kepentingan masyarakat desa. Pembangunan desa dapat berjalan dengan baik sehingga diperlukan adanya partisipasi politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang partisipasi politik dalam pembangunan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian kualitatif dengan penelitian Deskriptif yang didasarkan pada. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman masyarakat pendidikan politik masih sangat rendah dan pendidikan politik dianggap sebagai alternatif untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat desa dalam demokrasi.

Kata kunci: partisipasi politik; pendidikan politik; pengembangan desa

POLITICAL PARTICIPATION IN VILLAGE DEVELOPMENT PROCESS IN WORI SUBDISTRICT, NORTH MINAHASA DISTRICT

ABSTRACT, Construction of the village as an integral part of national development has strategic significance and for the sake of the people of the village. Construction of the village can run well if needed political participation. The purpose of this research was to gain an overview of political participation in the construction of the village. The methods used in this research is qualitative Research method with Descriptive research based on. The number of informants in this study as much as 4 people. The results showed an understanding of political education society is still very low and the political education is regarded as an alternative to changing the attitudes and behaviour of the people of the village in a democracy.

Key words: political participation; political education; village development

PENDAHULUAN

Pembangunan Desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memiliki arti yang sangat strategis. Dikatakan demikian karena pembangunan Desa sebagai tulang punggung ketahanan nasional dan ketahanan pangan. Oleh karena itu pembangunan desa menjadi bagian yang sangat penting dalam berbagai kegiatan/program yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat (Taliziduhu 2011).

Pembangunan Desa adalah jalan yang paling mungkin untuk mengubah wajah desa, mengubah hidup dan kehidupan rakyat desa, agar menjadi lebih baik, lebih adil dan lebih bermakna. Pembangunan Desa yang telah berlangsung sejak beberapa Dasawarsa telah menjadi instrumen penting, yang membawa dampak sangat luas pada kehidupan masyarakat pada umumnya, dan warga desa pada khususnya. Hal yang menjadi masalah kemudian adalah bahwa proses pembangunan desa yang berjalan, tidak menjadikan desa berubah, berkembang menjadi lebih baik dan lebih bermakna, tetapi malah sebaliknya. Desa-desa (atau yang disebut dengan nama lain), justru tetap berada dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Desa tetap menjadi penyangga kota, dan sektor pertanian (yang menjadi sektor utama dipedesaan) tetap menjadi penyangga gerak industrialisasi.

Menurut Widjaya (2010) bahwa secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara ini

terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang sangat tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling nyata.

Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya. Daraba (2013: 24). Sejalan dengan kemandirian desa maka partisipasi politik merupakan bagian penting dalam proses pembangunan desa.

Menurut Pambudi (2012) bahwa untuk mengubah wajah desa, sudah tentu dibutuhkan sebuah pandangan baru, yaitu suatu perspektif baru yang tidak menempatkan desa sebagai objek, melainkan sebagai subjek dari proses yang hendak dibangun. Agar posisi desa menjadi maju, menjadi lebih kreatif, maka menurut Pambudi (2012) bahwa salah satu cara yang dapat mengubah wajah desa untuk dapat lebih kreatif, maka dibutuhkan kepedulian masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan desa. Salah satu tingkat partisipasi yang sangat strategis dalam mengubah pembaharuan desa adalah ikut sertanya rakyat desa dalam

partisipasi politik. Partisipasi politik masyarakat adalah merupakan suatu bentuk keinginan dan kemauan rakyat desa dengan sukarela tanpa adanya unsur paksaan dalam kehidupan berpolitik didesa. Walaupun unsur-unsur politik dianggap sebuah bentuk keinginan rakyat desa dalam menentukan nasibnya sendiri maka hak-hak politik rakyat desa harus perlu diberdayakan lewat kemampuan rakyat desa untuk dapat berpartisipasi dalam politik.

Partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah. (Ratnamulyani dkk, 2018: 155)

METODE

Penelitian ini menitikberatkan pada Partisipasi Politik Masyarakat dalam pembangunan Desa yang di titik beratkan di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian kualitatif dengan berpatokan pada penelitian Deskriptif.

menurut Veeger (2011) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian. Data yang terkumpul akan dijadikan sebagai bahan untuk analisis. Data didalam penelitian ini dapat dikategorikan atas dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dari informan, sedangkan data sekunder dapat diperoleh melalui kantor kecamatan.

Penentuan fokus dalam penelitian kualitatif dapat membantu peneliti untuk menentukan masalah yang diteliti. Menurut Moleong (2012) penentuan fokus dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memberi arah kepada peneliti agar melihat suatu masalah sebagaimana adanya. Sedangkan informan sebanyak 4 orang dan dipilih dari Ketua BPD, Sekretaris BPD, Kepala Desa dan 1 orang dari anggota masyarakat yang dianggap sebagai informan pelengkap. Menurut Veeger (2011) maka tujuan dari teknis analisis data adalah untuk menyederhanakan sehingga setiap karakteristiknya akan lebih mudah ditafsirkan dan dipahami.

Oleh karena yang ditekankan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif, maka data-data yang ada dapat disajikan dalam penyajian deskriptif sebagaimana yang di kemukakan oleh Sugiyono (2010). Dimana analisis ini tidak dilakukan perhitungan sebagaimana lazimnya analisis statistik namun diupayakan hanya dengan membaca data yang ada, walaupun ada data yang berhubungan dengan angka itu hanya sebagai penunjang dalam menganalisis data kualitatif.

Menurut Sugiyono (2010) bahwa teknik analisis seperti ini diuraikan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa menggunakan analisis yang lazimnya dikemukakan berdasarkan teknik analisis statistik. Cara penyajian teknik analisis seperti ini

adalah mengedit, mengkode, menasirkan, menguraikan, menggambarkan, menganalisis, serta menarik berbagai kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlunya Pendidikan Politik bagi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa.

Pendidikan politik pada dasarnya adalah jalan menuju proses pembaharuan bagi rakyat desa dalam kehidupan berpolitik. Di zaman orde baru ada banyak masalah yang muncul berkaitan dengan kepentingan pembangunan desa dimana rakyat desa tidak diberi ruang dalam menyampaikan aspirasi politik. Pada hal tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan di desa bukan saja berasal dari pemerintah, tetapi tanggung jawab tersebut ada dipundak rakyat desa. Rakyat desa seringkali hanya menjadi alat atau objek kekuasaan untuk kepentingan penguasa, hal ini ditandai dengan begitu kuatnya penguasa rezim orde baru dalam mempengaruhi berbagai kepentingan politik bagi rakyat desa. Lihat saja di zaman orde baru penguasa otoriter begitu langgeng memaksimalkan kekuasaannya dengan memanfaatkan rakyat desa sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Partai politik misalnya dizaman orde baru Golkar begitu mendominasi sehingga rakyat digiring untuk ikut ambil bagian dalam pemilu hanya untuk mempengaruhi pemenangan dalam mempertahankan kekuasaan. Rakyat desa dihipnotis dengan kekuasaan politik, dimana kepala desa sebagai bagian dari alat kekuasaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mensukseskan kepentingan politik. Lihat saja didesa-desa dulunya Golkar mendominasi bahkan ada yang memilih 100%. Kekuasaan kepala desa dimasa itu begitu kuat dan dominan sehingga rakyat desa tak mampu membendung arus politik yang begitu deras. Akibatnya proses politik dimasyarakat tidak dapat berjalan sesuai dengan proses demokrasi dimana setiap rakyat diberikan hak untuk menyampaikan aspirasi politiknya tanpa ada paksaan dari siapapun. Rakyat desa dimasa itu dipasung, tidak berdaya. Ketidakberdayaan ini terus berlangsung, bahkan segala kepentingan yang berbau pembangunan harus dikuasai oleh kepala desa. Kue pembangunan didesapun tidak dapat dinikmati oleh rakyatnya, yang dapat merasakan dampak dari kegiatan pembangunan adalah elit desa dan penguasa rezim otoriter yang tetap mempertahankan kekuasaan politiknya. (Soeharto, 2011).

Partisipasi politik dimasa tersebut juga menjadi semu tidak berjalan secara demokratis. Apabila ada rakyat desa yang kritis terhadap kekuasaan politik kepala desa maka mereka akan dicap sebagai pihak yang melawan pemerintah, mereka dicap PKI, atau pihak yang dianggap sebagai pembangkang kekuasaan.

Terpasungnya rakyat desa terhadap kepentingan politik membuat suasana desa sangat rapuh, tidak berdaya, mereka tidak mampu menyampaikan aspirasi

politikanya, walaupun ada rakyat desa yang lebih berpikir kritis mereka itupun tetap kalah dalam pertarungan politik didesa. Begitu kuatnya arus kekuasaan politik didesa tidak akan memberi ruang bagi rakyat desa dalam berpartisipasi secara politik.

Dengan adanya rezim pada masa reformasi orde baru tumbang, rakyat desa mulai diberi kebebasan untuk menyampaikan aspirasi politik lewat pemilu dimana hadirnya banyak partai politik dimasa itu rakyat desa diberi kebebasan untuk memilih partai politik berdasarkan kemauannya sendiri. Akibat dari kebebasan politik rakyat desa, telah terjadi suatu perubahan sikap, bahkan diantara mereka seringkali muncul konflik secara internal baik antara keluarga maupun antara sesama rakyat desa. Ajang pertarungan politik dimasa reformasi membawa angin segar bagi rakyat desa dalam berdemokrasi. Kekuasaan dan pengaruh kepala desa mulai surut dan digantikan dengan rakyatdesa yang bebas memilih aspirasi dan kepentingan politikanya. Tetapi proses penyelenggaraan pemilu hanya terjadi empat tahun sekali sedangkan apa yang diharapkan oleh rakyat desa lewat pemilu tersebut mereka justru harus mendapatkan perlakuan yang layak untuk mendapatkan hak hidup, hak menikmati kue pembangunan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan berjalannya proses pembangunan dari waktu ke waktu belum memberikan pengaruh yang sangat dominan bagi rakyat desa dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Dengan kebebasan berotonomi didaerah pedesaan ada ruang gerak politik yang diberikan oleh pemerintah lewat lembaga politik sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Lembaga politik menjadi saluran komunikasi, dalam menyampaikan kehendak dan aspirasi rakyat desa dalam kehidupan berpolitik. Tetapi kelembagaan politik itu juga hanya terbatas pada mereka yang dianggap memiliki kepentingan, sedangkan secara nyata dalam partisipasi politik adalah sebagian besar rakyat desa harus turut mengambil bagian dalam proses pendewasaan politik. Maka jalan satu-satunya dalam memberikan pemahaman dan wawasan bagi rakyat desa adalah melalui pemahaman terhadap pendidikan politik. (Nasution,2013).

Pendidikan politik dianggap sebagai alternatif dalam merubah sikap dan perilaku rakyat desa dalam berdemokrasi. Karena pendidikan politik bukan saja dilakukan bagi rakyat desa untuk ikut dalam kegiatan organisasi, ikut dalam pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu Presiden maupun Bupati, ikut serta dalam pemilihan kepala desa, ikut pemilihan dalam merekrut pimpinan BPD, tetapi lebih dari itu pendidikan politik harus dapat dilakukan bagi rakyat desa lewat transformasi pengetahuan, transformasi pemahaman terhadap politik, serta rakyat desa mampu berkonsolidasi lewat penyampaian aspirasi demi kepentingan pembangunan desanya. Tujuan untuk mengubah wajah desa dari proses pembaharuan tidak mungkin hanya dilakukan lewat kebijakan dan program yang dicanangkan oleh pemerintah desa saja tetapi lebih dari itu pembaharuan

desa tentu membutuhkan suatu pandangan baru dan kekuatan baru. Suatu pembaharuan desa tentu saja akan berhadapan dengan pihak-pihak yang tidak setuju atau tidak menghendaki perubahan berlangsung. Pada saat itulah daya tawar kepentingan menjadi lebih bermakna dimana akan memunculkan rakyat desa yang lebih kritis, lebih peka dengan perubahan, lebih banyak memunculkan ide-ide baru terhadap kepentingan pembangunan desanya. Inilah harapan yang dapat dimaknai dari pentingnya pendidikan politik bagi rakyat desa, bukan sekedar direkrut, diorganisir dalam kelembagaan tetapi lebih dari itu rakyat desa diberi tanggung besar dan kebebasan dalam memikul beban yang ditanggung oleh mereka sendiri demi kepentingan pembangunan desanya.

Melalui pendidikan politik kemajuan pembangunan desa akan dapat dimunculkan melalui prakarsa politikanya, kepentingan program pembangunan desa tidak saja hanya diiakn oleh rakyat desa tetapi harus dievaluasi, dikontrol, bahkan diberikan kebebasan dalam proses pengambilan kebijakan demi kepentingan pembangunan desa. (Sastropoerto: 2014).

Pendidikan politik secara luas yang dapat dipahami oleh rakyat desa adalah ikut sertanya mereka berpartisipasi secara politik dalam proses pengambilan kebijakan seperti pengelolaan sumberdaya alam. Artinya rakyat desa perlu menentukan sistem pemilikan sumberdaya alam, proses produksi yang dikembangkan, termasuk pilihan teknologi, dan mampu memanfaatkan distribusi hasil-hasil produksi.

Jadi yang diharapkan dalam pendidikan politik adalah semakin banyaknya rakyat desa dalam menanggapi hal-hal yang dianggap kritis, menentang berbagai kebijakan yang dianggap salah, menggiatkan program yang dianggap menjamin kesinambungan hidup yang layak bagi rakyat desa, serta bertanggungjawab secara penuh dalam proses pembangunan desanya.

Menurut Kartini (2011) bahwa dengan pendidikan politik bagi rakyat desa harus mampu membangkitkan kesadaran dan semangat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan politik yang dianggap urgen, mampu memecahkan serta menghindari konflik dan kerawanan ditengah masyarakat.

Dalam lingkungan pemerintah dalam khususnya pemerintah desa pendidikan politik dapat diaplikasikan lewat rapat-rapat desa, pengambilan keputusan, penentuan kebijakan, serta berbagai usulan program pembangunan. Semakin sering rakyat desa dalam mengikuti rapat-rapat desa maka akan semakin menambah wawasan dan pola berpikir yang luas terhadap pendidikan politik. Semangat dari pendidikan politik dalam pembangunan desa adalah keikutsertaan rakyat desa untuk memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital supaya rakyat desa tetap survive dan bisa bertahan hidup serta mampu mengatasi berbagai krisis ekonomi yang tengah berlangsung.

Rakyat desa melalui pendidikan politik dalam pembangunan desa harus memiliki kemampuan dan

tanggungjawab dalam menganalisa dan memecahkan masalah kemiskinan, kesenjangan sosial ekonomis, mengatasi masalah pengangguran, dan lain sebagainya.

Selain itu tujuan dari pendidikan politik bagi rakyat desa adalah keikutsertaandalam mempertahankan kerawanan pangan, mempertahankan lumbung produksi desa, serta mampu menjembatani kehidupan yang harmonis dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan dibidang pertanian, perikanan, peternakan dan lain sebagainya.

Pendidikan politik dapat dipahami oleh rakyat desa dalam pembangunan desa melalui reorientasi dalam cara berpikir, merasa dan berkemauan. Rakyat desa harus belajar berani berpikir kritis, berani melihat berdialog, berbuat politik dengan cara yang lain atau cara baru, agar rakyat desa bisa keluar dari jalan buntu. Proses kemiskinan adalah alternatif dari proses pembelajaran dari rakyat desa untuk keluar dari jalan buntu. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah pemahaman wawasan terhadap teknologi bercocok tanam, memanfaatkan potensi alam seefisien mungkin serta diiringi dengan motivasi yang kuat.

Hal tidak kalah pentingnya pendidikan politik bagi rakyat desa dalam kaitan dengan pembangunan desa adalah mengatasi berbagai problema dengan ketidakberdayaan seperti malas. Boros, pola hidup konsumtif, mementingkan diri sendiri, egois, apatis dengan kenyataan hidup yang ada.

Partisipasi Politik masyarakat dalam proses Pembangunan Desa.

Bagi rakyat desa partisipasi politik merupakan suatu bentuk pemahaman dimana ikut sertanya mereka dalam berbagai kegiatan politik. Konotasi ini memang dapat diakui sebagai bentuk pemahaman yang sempit terhadap partisipasi politik pada hal partisipasi politik bagi rakyat desa memiliki pemahaman yang lebih luas dan kompleks. Orang seringkali mengkonotasikan partisipasi politik adalah dengan melalui kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, memberi diri dalam kegiatan kampanye, mencari dukungan terhadap calon yang diunggulkan, melaksanakan lobi untuk mendapatkan suara sebanyak mungkin, aktivitas dalam organisasi, ikut serta dalam keanggotaan partai politik, dan berbagai kepentingan lainnya. Harun dan Sumarno (2013).

Pada hal partisipasi politik memiliki pemahaman yang lebih luas dan mendalam bila dapat dipahami dengan baik. Hakekat dari partisipasi politik adalah sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan seseorang dalam menginterpretasikan sejumlah symbol kebijakan dalam mensejahterakan masyarakat.

Wujud dari partisipasi politik adalah merupakan tingkat kesadaran optimal dan kualitas integritas mental dan moral dari setiap rakyat yang termotivasi untuk melakukan berbagai aktivitas sikap dan perilaku dalam lingkup sistem baik sistem politik maupun sistem lainnya yang sedang berlangsung. (Juliantara, 2014).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa partisipasi politik secara luas adalah menyangkut:

1. Minat masyarakat dalam mempengaruhi berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
2. Menumbuhkan keyakinan rakyat termasuk rakyat desa secara lebih aktif dalam memberi manfaat demi kepentingan pembangunan termasuk pembangunan politik
3. Pembentukan sikap bagi rakyat terhadap kesadaran dalam mengambil bagian dalam berbagai kegiatan
4. Mengantisipasi pembentukan opini yang menyimpang dari proses demokrasi
5. Merupakan konsep pemikiran, pendapat, ide dan pemahaman yang disampaikan dalam berbagai kebijakan dan kepentingan
6. Merupakan suatu bentuk rasa cinta terhadap berbagai sesuatu yang kita inginkan,
7. Merupakan kemampuan seseorang didalam merealisasikan diri dalam mencapai prestasi,
8. Merupakan pemberian input dan out terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa partisipasi politik masyarakat memiliki makna yang lebih luas bila dilakukan pendekatan dalam menghadapi berbagai problema dimasyarakat. Partisipasi politik masyarakat dapat diaplikasikan lewat pembangunan desa. Makna dari bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa adalah merupakan suatu bentuk keinginan, kemauan, kesadaran rakyat desa dalam mempengaruhi masa depannya. Keinginan yang dimaksudkan disini adalah keinginan dalam memberi diri dan bertanggungjawab dalam pembangunan desa. Kesadaran adalah suatu bentuk pemberian diri tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain yang mendukung kegiatan pembangunan desa. Partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa dapat dipahami melalui berbagai indikator:

1. Rakyat desa menghadiri rapat-rapat yang diupayakan baik oleh pemerintah desa, BPD maupun organisasi kemasyarakatan. Kegiatan rapat-rapat desa yang diupayakan oleh pemerintah desa, BPD maupun organisasi kemasyarakatan lainnya akan menjadi saluran politik dalam mengimplementasikan berbagai kepentingan pembangunan desa. Contoh yang dapat dipahami disini adalah pengusulan program yang disampaikan oleh kepala Desa bisa ditolak maupun disetujui oleh rakyat desa. Kehadiran rakyat desa lewat rapat penting akan memberikan pemahaman dan wawasan yang luas bagi mereka untuk menyampaikan pendapatnya. Banyak ide yang muncul yang sebelumnya tidak dapat diketahui oleh pemerintah desa maupun BPD tapi lewat kegiatan rapat desa maka segala permasalahan dapat dipecahkan secara bersama. Disini akan terjadi proses tawar menawar terhadap kepentingan dan aspirasi politik bagi masyarakat.
2. Rakyat desa ikut serta dalam diskusi, seminar maupun symposium. Kehadiran rakyat desa dalam berbagai

- kegiatan seperti diskusi, seminar maupun symposium secara langsung akan menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat dalam pengembangan aspirasi politik. Biasanya ada perbedaan pemahaman sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan tersebut. Lewat diskusi rakyat desa dilatih untuk menyampaikan pendapat-pendapat dan ide-ide dihadapan orang banyak. Semakin sering rakyat desa mengemukakan pendapat lewat diskusi maka semakin memberi kedewasaan mereka terhadap kehidupan berpolitik.
3. Rakyat desa ikut serta dalam berbagai kegiatan pelatihan maupun magang. Program magang maupun pelatihan akan dapat berdampak secara positif bagi rakyat desa dalam membangun desanya. Seperti ikut serta dalam pelatihan pengembangan industri kecil, pelatihan untuk memanfaatkan bibit-bibit unggul. Pelatihan tentang kader kepemimpinan secara langsung akan dapat merubah perilaku masyarakat dan mereka akan selalu dapat menunjang berbagai kegiatan program pembangunan desa.
 4. Rakyat desa ikut ambil bagian dalam kegiatan kerja bakti, membangun gedung ibadah, membersihkan selokan, membangun sekolah. Keikutsertaan rakyat desa dalam kegiatan kerjabakti seperti membangun gedung ibadah, membersihkan selokan, membangun sekolah dan membangun gedung Balai desa adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa. Suatu desa akan menjadi lebih maju kalau mendapatkan dukungan penuh dari rakyat desa. Pengambilan bagian dalam kegiatan kerjabakti adalah merupakan implementasi dari proses dan tanggungjawab masyarakat terhadap kepentingan pembangunan desanya.
 5. Ikutsertanya rakyat desa dalam kegiatan Mapalus, kegotongroyongan, maupun bentuk kerjasama baik dalam bidang pertanian, perikanan. Banyak kegiatan pembangunan desa seringkali mengalami hambatan disebabkan karena kurangnya dukungan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan Mapalus, bentuk gotong royong khususnya dalam bidang pertanian akan memberikan kepercayaan penuh bagi rakyat desa dalam membangun desanya. Dengan terpenuhinya berbagai keperluan produksi dari hasil-hasil pertanian dan perikanan akan dapat menunjang desa tersebut menjadi lumbung produksi dan lumbung ketahanan pangan.
 6. Ikut mendukung kebijakan dan program pembangunan desa yang dicanangkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Biasanya kegiatan seperti ini dapat dilakukan oleh pemerintah melalui pemberian bantuan lewat proyek-proyek seperti penyediaan air bersih, sarana kesehatan, listrik masuk desa adalah suatu bentuk kegiatan yang nyata sehingga dampaknya akan dapat menggugah masyarakat desa untuk dapat mengaplikasikan partisipasi politiknya dalam pembangunan desa.

7. Ikut memelihara, dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Program pembangunan desa yang diberikan oleh pemerintah lewat dana bantuan dan proyeknya apabila dikelola dengan baik maka rakyat desa akan ikutserta memelihara dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Dampak dari kegiatan ini secara langsung akan mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa.
8. Menyumbangkan pemikiran baik melalui ide-ide, hasil buah pikiran, maupun tenaga terhadap kepentingan pembangunan desa. Rakyat desa memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam membangun desanya, maka implementasi dari tanggungjawab tersebut adalah melalui sumbangan pemikiran melalui ide-ide, buah pikiran maupun dalam bentuk tenaga yang akan disumbangkan untuk pembangunan desanya
9. Memelihara hubungan kerjasama diantara sesama warga maupun dengan pemerintah desa. Dengan terpenuhinya berbagai kegiatan yang disebutkan diatas secara langsung akan mempengaruhi terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat maupun antar sesama warga.

Menyimak uraian tentang indikator partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa tentu memiliki arti yang lebih luas dan kompleks. Partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa seringkali mengalami berbagai hambatan antara lain dapat disebutkan:

1. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Dengan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah secara langsung akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa.
2. Adanya sikap mental. Sikap mental seringkali menjadi salah satu faktor penghambat bagi masyarakat desa untuk dapat berpartisipasi politik dalam pembangunan desa. Mentalitas seperti sikap apatis, kurang menghargai pendapat dan karya orang lain, munculnya sikap egois yang tinggi, secara langsung akan turut mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Sikap otoriter dari aparat pemerintah desa. Sikap otoriter dari kepala desa maupun perangkat desa dalam pengambilan keputusan, kegiatan rapat desa, maupun pengusulan program akan membawa dampak yang sangat buruk bagi partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa. Baik dalam rekrutmen pimpinan BPD, pemilihan perangkat desa yang didominasi oleh kepala desa, menempatkan perangkat desa dari orang-orang dekatnya, akan turut mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa,

SIMPULAN

Partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa dapat diimplementasikan melalui kelembagaan politik desa. Kehadiran kelembagaan Politik Desa

yang diaplikasikan lewat peran BPD telah memberikan dampak yang sangat positif bagi rakyat desa dalam kehidupan demokrasi di desa. Hasil penelitian membuktikan bahwa pemahaman terhadap pendidikan politik masyarakat masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pengetahuan terhadap pendidikan politik masyarakat hanya dipahami lewat proses penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala desa. Makna dari bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa adalah merupakan suatu bentuk keinginan, kemauan, kesadaran rakyat desa dalam mempengaruhi masa depannya. Keinginan yang dimaksudkan disini adalah keinginan dalam memberi diri dan bertanggung jawab dalam pembangunan desa. Faktor-faktor yang turut mempengaruhi Partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa antara lain rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, lemahnya sikap mental masyarakat dan adanya sikap otoriter dari aparat pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Daraba, D. (2013). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora*, 19, (1), 52-58
- Harun, R. dan Sumarno. (2013). Komunikasi Politik sebagai suatu Pengantar. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Juliantara, D. (2014). Arus bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa. Yogyakarta: Tim Lapera Pustaka Utama.
- Kartono, K. (2011). Pendidikan Politik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung Remaja Rosdakarya.
- Nasution, H. (2013). Pendidikan Politik dan Pemberdayaan. Bandung. Ghalia Indonesia.
- Pambudi. H.S. (2012). Partisipasi Politik, Penerbit. Jakarta: Gradnya Paramita.
- Ratnamulyani, A. & Maksudi, B.I. (2018). Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula dikalangan Pelajar di Kabupaten Bogor. *Sosiohumaniora*, 20, (2), 154-161
- Sastroperito & santoso (1914). Partisipasi dan Permasalahan Pembangunan Desa. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiyono, (2010). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soeharto, (2011). Pendidikan Politik. Jakarta: CV. Rajawali.
- Taliziduhu, N. (2011). Pembangunan Desa. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Veeger, K.J. (2011). Realitas Sosial. Jakarta: PT. Gramedia.
- Widjaya, HAW. (2010), Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , (2012). Pemerintahan Desa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

PANDUAN UNTUK PENULIS

JUDUL ARTIKEL (mak. 14 kata)

(Huruf Kapital, Times New Roman, 12 point, Bold, centered)

(kosong, spasi tunggal)

Penulis Pertama¹, Kedua², dan Ketiga³ (10 point)

¹ Alamat instansi (Instansi, Fakultas, Universitas, alamat lengkap) (10 point)

(kosong, spasi tunggal)

(E-mail:peneliti@alamat.com (10 point, italic)

(dua ketuk spasi tunggal)

ABSTRAK

(bold, 10 Point).

Abstrak dalam bahasa Indonesia, tidak lebih dari 250 kata.

Abstrak mencakup permasalahan, metode, dan temuan serta simpulan. Abstrak dalam bahasa Inggris, tidak lebih dari 200 kata.

(kosong, spasi tunggal)

Kata kunci:

Key words: Tuliskan maksimal 5 kata-kata kunci (key words).

(tiga ketuk spasi tunggal)

PENDAHULUAN (tanpa subjudul)

(10 point kapital)

(kosong, spasi tunggal)

METODE

(10 point kapital)

(kosong, spasi tunggal)

HASIL DAN PEMBAHASAN

(10 point kapital)

(kosong, spasi tunggal)

(dalam hasil sertakan data temuannya baik dalam bentuk tabel ataupun hasil wawancara, sedangkan dalam pembahasan harus disertai kutipan referensi yang relevan)

SIMPULAN

(10 point kapital)

(kosong, spasi tunggal)

UCAPAN TERIMA KASIH

(10 point kapital)

(kosong, spasi tunggal)

Penulis dapat menuliskan ucapan terima kasih kepada individu, lembaga pemberi dana penelitian, dsb. Ucapan terima kasih ditulis sebelum Daftar Pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

(10 point kapital)

(kosong, spasi tunggal)

Kepustakaan yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya kepustakaan yang dikutip atau yang dijadikan rujukan dan ditulis dalam teks. Penulisan rujukan dalam badan karangan dilakukan sebagai berikut:

- Apabila terdiri dari satu orang penulis, ditulis sebagai berikut: McNeely (1995:...) atau (McNeely, 1995:...)
- Apabila terdiri dari dua orang penulis, ditulis sebagai berikut: McNeely & McCurdy (1995) atau (McNeely & McCurdy, 1995)
- Apabila terdiri dari tiga orang penulis atau lebih, ditulis sebagai berikut: McNeely *et al.* (1995) atau (McNeely *et al.*, 1995). Kata/istilah *et al.*, hanya digunakan untuk referensi berbahasa asing. Untuk referensi berbahasa Indonesia digunakan istilah dkk., misalnya Suparman, dkk. (1996).

Sitasi/Kutipan

- *Running note* atau *footnote* Penulisan dalam Daftar Pustaka dilakukan sebagai berikut:

Sumber buku:

- Strahler, A. N. 1957. Physical geography. New York: Wiley.
- Farrington, J., Turton, C., & Ames, A. J. (Eds.). 1999. Participatory watershed development: Challenges for the twenty-first century. New Delhi: Oxford University Press.
- Shaxson, T. F. 2000. People's involvement in watershed management: Lessons from working among resource-poor farmers. In R. Lal (Ed.), Integrated watershed management in the global ecosystem (pp. 345–363). Boca Raton, FL: CRC Press.
- Van Noordwijk, M., van Roode, M., McCallie, E. L., & Lusiana, B. (1998). Erosion and sedimentation as multiscale, fractal processes: Implications for models, experiments and the real world. In F. W. T. Penning de Vries, F. Agus, & J. Kerr (Eds.), Soil erosion at multiple scales (pp. 223–253). New York: CAB International.

Sumber jurnal:

diharuskan mensitir atau mengutip dari sumber jurnal Sosiohumaniora

Tomich, T. P., Fagi, A. M., de Foresta, H., Michon, G., Murdiyarto, D., Stolle, F., & van Noordwijk, M. 1998. Indonesia's fires: Smoke as a problem, smoke as a symptom. *Agroforestry Today*, 10(1), 4-7.

Sumber prosiding seminar:

Fay, C., de Foresta, H., & Sirait, M. 1998. Progress towards recognizing the rights and management potentials of local communities in Indonesian state-defined forest areas. Paper presented at the workshop on participatory natural resource management in developing countries, Mansfield College, Oxford, April 6-7.

Sumber internet:

Knox McCulloch, A., Meinzen-Dick, R., & Hazell, P. 1998. Property rights, collective action and technologies for natural resource management: A conceptual framework. CAPRI Working Paper No.1. Washington DC, USA: International Food Policy Research Institute. http://www.capri.cgiar.org/pdf/ca_priwp01.pdf.

Sumber disertasi/tesis:

Zandbergen, P. 1998. Urban watershed assessment: Linking watershed health indicator to management. Ph.D. Thesis. Resource Management and Environmental Studies, University of British Columbia, Vancouver.

Satuan, singkatan, nomenklatur, dan lambang

Satuan dan singkatan menggunakan sistem SI (*Systeme Internationale*) Nomenklatur nama ilmiah tumbuhan dan hewan ditulis lengkap dengan nama authornya. Nama ilmiah sesuai dengan aturan nomenklatur harus digunakan pada penulisan yang pertama kali, selanjutnya dapat disingkat sesuai aturan yang berlaku dan atau menggunakan nama daerah. Penggunaan lambang ditulis sebagai berikut: contoh, lambang alpha ditulis dengan bukan dengan huruf a.

FORMAT NASKAH

Artikel yang dimuat dalam jurnal ini dapat berupa kajian konseptual dan atau hasil-hasil penelitian pada masing-masing disiplin ilmu atau interdisiplin. Secara umum, sistematika artikel terdiri atas pendahuluan/introduksi yang menguraikan latar

belakang dan permasalahan yang dikaji yang ditunjang oleh referensi yang relevan, metode, hasil dan pembahasan, dan simpulan/rekomendasi. Pada kajian yang bersifat konseptual, bagian metode dapat diabaikan bila dianggap tidak perlu. Naskah ditulis dalam dua kolom pada kertas berukuran A4, dengan jarak antar kolom 1 cm. Panjang tulisan maksimal 6 - 10 halaman berspasi tunggal, termasuk daftar pustaka, gambar, tabel, dan lampiran. Setiap halaman memiliki margin atas 3.5 cm, margin bawah 2.5 cm margin kiri dan kanan 2 cm. Naskah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar bentuk huruf Times New Roman 12. Naskah juga dapat ditulis dalam bahasa Inggris.

Naskah dimulai dengan halaman pertama yang memuat:

- Judul singkat (running head). Penulis diminta untuk membuat judul singkat (maksimal 14 kata).
- Judul lengkap (dalam bahasa Indonesia dan Inggris).
- Nama penulis, afiliasi, dan alamat korespondensi (mis. E-mail).

Gambar dan Tabel

- Gambar yang akan ditampilkan dalam jurnal adalah gambar hitam-putih. Bila menginginkan, penulis dapat menyertakan gambar berwarna, namun penulis akan dikenai biaya pencetakan gambar berwarna tersebut. (*mak. 6 untuk gambar dan tabel*)
- Gambar dan tabel diberi nomor sebagai berikut: Gambar 1., Gambar 2, dst. Tabel 1, Tabel 2, dst.
- Gambar dan tabel yang substansinya sama, ditampilkan salah satu.
- Tabel berbentuk pivot table.
- Letak penempatan Tabel diatas gambar tabel (9 point kapital)
- letak penempatan Gambar di bawah gambar (9 point kapital)
- Untuk keterangan di simpan di bawah gambar tabel atau gambar (9 point kapital)

Penulisan subjudul (heading)

- Subjudul tingkat pertama semuanya dicetak tebal ditulis dengan huruf kapital, misal: **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN**
- Subjudul tingkat kedua, semuanya dicetak tebal dan ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama dari setiap kata, misal: **Sistem Pengelolaan Lingkungan Tradisional**
- Subjudul tingkat ketiga, semuanya ditulis dengan huruf miring dan huruf kecil kecuali huruf pertama dari setiap kata, misal: *Sistem Kebun Talun*

PENYERAHAN NASKAH

Lakukan registrasi online pada alamat <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/user/register>. di bagian akhir form, pilih Daftar sebagai: penulis. Pada tahap selanjutnya, lakukan unggah file artikel dalam bentuk .doc (Ms.Word diutamakan office 2003-2007) di link [Penyerahan Naskah Baru]. Berilah centang pada isian Checklist naskah untuk menunjukkan bahwa naskah yang akan diunggah sudah mengikuti panduan. Jika sudah, klik Simpan dan lanjutkan. Di tahap ini klik Browse dan pilih file artikel yang akan dikirimkan untuk Jurnal Sosiohumaniora. Klik Unggah. Klik Simpan dan lanjutkan. Selanjutnya, isi form yang ada hingga Penyerahan Selesai.

INDEKS PENULIS

- A**
Ahmad Ab. 207–214
Arfin Sudirman 269–276
- B**
Bambang Waluyo 260–269
- H**
Helitha Novianty Muchtar 231–235
- M**
Marthen L. Kimbal 1–8
Muhamad Amirulloh 231–235
Muhammad Faisal 222–230
- N**
Naura Nabila Haryanto 269–276, 276
- R**
Rika Ratna Permata 231–235
- S**
Simon Sumanjoyo Hutagalung 236–244
Sujarwo 260–269, 262–269, 268–269
Sylvia Rozza 260–269
- U**
Umar Nain 222–230

INDEKS SUBJEK

- A**
Agribisnis mangga 215–221
Ayam Jago 254–259, 255–259
Ayam Pelung 254–259, 257–259, 259
- B**
bubalah 199–206, 200–206
budaya musyawarah mufakat 199–206, 200–206, 201–206, 202–206, 203–206, 205–206
- C**
Cianjur 254–259, 255–259, 257–259, 258–259, 259
Citra Afektif 207–214, 210–214, 211–214
Citra Destinasi 207–214, 208–214, 210–214
Citra Kognitif 207–214, 210–214, 211–214
cybersquatting 231–235, 232–235, 233–235, 234–235
- D**
dana desa 222–230, 223–230, 224–230, 225–230, 227–230, 228–230, 229–230
disaster diplomacy 269–276, 270–276, 271–276, 274–276
- F**
FruitsUp 277–281, 278–281, 279–281, 280–281, 281
Fruters Model 277–281, 279–281, 281
- G**
GAM 269–276, 271–276, 272–276, 273–276, 274–276, 275–276, 276
- H**
hak menggugat 231–235, 232–235, 234–235
harmonisasi 231–235, 232–235, 233–235, 234–235
- I**
iklim akademik 199–206, 200–206, 201–206, 203–206, 204–206, 205–206
Implementasi Kebijakan Pembangunan 245–253
Implikasi 222–230
Intensi Berkunjung Kembali 207–214, 209–214, 210–214
- K**
kebijakan pendidikan 243–244
- kohesi sosial 222–230, 223–230, 224–230, 225–230, 227–230, 228–230, 229–230
komunikasi pemasaran 277–281, 278–281
- M**
media 277–281, 278–281, 279–281, 280–281
minat masyarakat 260–269, 262–269
model edukasi 260–269, 262–269, 263–269, 264–269, 265–269, 267–269
- N**
nama domain. 231–235, 233–235, 235
nilai tambah 277–281, 278–281, 279–281, 280–281
- O**
orang terkenal 231–235, 232–235, 233–235, 234–235, 235
- P**
partisipasi politik 1–8, 2–8, 3–8, 4–8, 5–8, 6–8
pelaksanaan program 222–230, 224–230, 225–230, 227–230, 228–230, 229–230
Pemerintah Indonesia 269–276, 271–276, 272–276, 273–276, 274–276, 275–276, 276
Pendekatan Hibrida 245–253
pendidikan politik 1–8, 3–8, 4–8, 6–8
pengembangan desa 1–8
pengusahaan pohon mangga 215–221
perbankan syariah 260–269, 262–269, 263–269, 264–269, 265–269, 266–269, 267–269, 268–269
petani mangga 215–221, 216–221, 217–221, 218–221, 219–221, 220–221, 221
proses usahatani dan pemasaran mangga 215–221
- R**
Rumah Layak Huni 245–253, 248–253, 251–253
- S**
segmentasi konsumen 260–269, 262–269, 263–269, 265–269
Simbolisme 254–259, 258–259
- T**
tsunami Aceh 269–276

UCAPAN TERIMA KASIH

Dewan Redaksi Jurnal Sosiohumaniora menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Eng. Pradono, SE., M.Ec., Dev (Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, ITB)
2. Dr. Ismail Nurdin, M.Si. (Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri)
3. Dr. Kunto Sofianto, M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
4. Prof. Dr. Nandang Alamsyah Delianoor, SH., M.Hum. (Fakultas ISIP, Universitas Padjadjaran)
5. Mokhammad Anwar, SE., M.Si., Ph.D. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran)
6. Prof. Dr. Ir. Hj Yosini Deliana, MS. (Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran)
7. Dr. Evie Ariadne Shinta Dewi, M.Pd. (Fakultas IKOM, Universitas Padjadjaran)
8. Prof. Dr. Ir. Yogi, MS. (Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, ITB)
9. Bevaola Kusumasari, M.Si., Ph.D. (Prodi Magister Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM)
10. Prof. Dr. Ir. Nandan Limakrisna, MM., CQM., CMA. (Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta)
11. Endah Djuwendah, SP., MS. (Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran)
12. Dr. Herwan Abdul Muhyi, M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
13. Dr. Prayoga Bestari (Universitas Pendidikan Indonesia)
14. Dr. Ramadhan Pancasilawan, M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran)
15. Dr. Dian Indira, M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran)
16. Dr. Nia Kurniati, SH., MH. (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)
17. Dr. M. Irwan Tahir, AP., M.Si. (Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri)
18. Dr. Mumuh Muhsin Z, M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran)
19. Dr. Muhammad Faisal, M.Pd. (Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri)
20. Sylvia Fettry E.M., SE., SH., M.Si., Ak. (Fakultas Ekonomi, Universitas Parahyangan)
21. Dr. Santoso Tri Raharjo, S.Sos. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran)

Sebagai Mitra Bestari (*Peer Reviewer*) pada Jurnal Sosiohumaniora Volume 20 No. 3 Nopember 2018. Atas kerjasama yang terjalin selama ini dalam membantu kelancaran penerbitan Jurnal Sosiohumaniora. Semoga kerjasama ini berjalan lebih baik untuk masa yang akan datang.

Pemimpin/Redaksi